



JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI

POLITEKNIK RAFLESIA



Tim Editorial

Pimpinan Redaksi:

Tuti Hermelinda, M.Ak (Politeknik Raflesia)
Google Scholar - SINTA

Editor :

1. **Paddery, S.E., M.Ak** (Politeknik Raflesia)
Google Scholar - SINTA
2. **Mis Fertyno Situmeang., SE., MSi., Akt** (Politeknik Negeri Ambon)
Google Scholar - SINTA
3. **Revi Candra, M.Ak.** (IAIN Batusangkar)
Google Scholar - SINTA
4. **Dr. Dwi Asih Haryanti, S.E., M.M., M.Ikom.** (Universitas Gunadarma)
Google Scholar - SINTA
5. **Nurhasanah, S.E., M.Ak. (Politeknik Raflesia)**
Google Scholar - SINTA

Managing Editor :

Parwito (Universitas Ratu Samban)
Google Scholar SINTA

Alamat Redaksi:

Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia Jl. S. Sukowarti No.
28 Curup (39114)

Email:

jirapolraf@gmail.com

Reviewer

1. **Dirvi Surya Abbas, S.E., M.Ak.** (Universitas Muhammadiyah Tangerang)
Google Scholar - SINTA
2. **Erly Mulyani, M.Si** (Universitas Negeri Padang)
Google Scholar - SINTA
3. **Dr. Fachruzzaman, S.E., M.D., M.Ak., CA.** (Universitas Bengkulu)
Google Scholar - SINTA
4. **Yeni Melia, SE, MM** (IAIN Batu Sangkar)
Google Scholar - SINTA
5. **Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.** (Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)
Google Scholar - SINTA
6. **Elfina Yenti, S.E., AK., M.Si, CA.** (IAIN Batu Sangkar)
Google Scholar - SINTA
7. **Estu Niasna Syamiya, S.E., M.Pd.** (Universitas Islam Syekh Yusuf)
Google Scholar - SINTA

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada CV. Rekayasa *Engineering* di Ponorogo

Siti Nur Fitriana¹, Khusnatul Zulfa Wafirotn², Iin Wijayanti³
Universitas Muhammadiyah Ponorogo-¹msitinurfitrana25@gmail.com
²khusnafeump@gmail.com
³iinsmart83@gmail.com

Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis system informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo periode bulan Oktober, November, Desember tahun 2022. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan cara studi pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo untuk memperoleh informasi dan juga data yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan keuangannya selama bulan Oktober 2022 – Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa slstem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo belum sesuai dengan Standart Mulyadi (2016).

Kata Kunci: *Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas*

1. PENDAHULUAN

Pada dunia persaingan kerja saat ini, banyak dihadapkan pada situasi dan keadaan persaingan yang semakin ketat sehingga banyak perusahaan yang harus menjalankan usahanya dengan lebih kreatif, efektif dan juga efisien. Dengan berkembang pesatnya persaingan tersebut maka peranan informasi menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap persusahaan untuk kemajuan usahanya. “Informasi akan digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk membantu proses pengawasan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha perusahaan maka dari itu suatu perusahaan harus wajib membuat sitem informasi akuntansi yang baik” (Widyasari, 2012). CV. Rekayasa Engineering adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor dan penjualan beton. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian pada bidang penjualan beton. Perusahaan ini biasanya melakukan penjualan secara langsung kepada para konsumen. Dengan banyaknya transaksi penjualan yang dijalankan maka banyak juga penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi, sehingga harus dilakukan pencatatan kas yang baik dan juga harus menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengurus CV. Rekayasa Engineering permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam proses pencatatan penerimaan kas dari pihak konsumen dan pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan terkendalanya proses pencatatan laporan keuangan terutama dalam bidang penerimaan dan pengeluaran kasnya. Sehingga pelaporan sistem informasi akuntansinya juga ikut terkendala.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorog dan apakah penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo sudah efektif dan efisien berdasarkan pada standart Mulyadi (2016)?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo dan juga untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo berdasarkan standart Mulyadi (2016).

Sistem Informasi Akuntasi menurut Mulyadi (2016) yaitu memproses data dari faktur menjadi laporan keuangan yang kemudian akan dikoordinasikan dan diolah menjadi suatu informasi keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan untuk mempermudah

proses pengawasan. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan sekumpulan proses yang dilakukan baik itu secara komputerisasi maupun secara manual dengan cara melakukan pencatatan terlebih dahulu kemudian digolongkan sesuai dengan jenisnya masing masing kemudian baru dilakukan peringkasan suatu transaksi sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan APBD yang berhubungan dengan penerimaan kas (Halim, 2007).

Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi (2016) merupakan proses pencatatan data yang kemudian diolah pada waktu akan dilakukannya suatu pengeluaran kas dalam kegiatan perusahaan baik itu dengan uang tunai maupun menggunakan cek. Hall (2009) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi pengeluaran kas adalah proses membayar hutang yang diperoleh dari suatu kegiatan pembelian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus pada CV. Rekayasa Engineering di Ponorogo untuk memperoleh informasi dan juga data yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan keuangannya selama bulan Oktober 2022 – Desember 2022. Setelah melakukan wawancara peneliti menganalisis data-data yang sudah diperoleh. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas pada CV. Rekayasa Engineering bulan November 2022-Desember 2022 berdasarkan standart Mulyadi (2016) dijabarkan sebagai berikut :

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari Kegiatan Operasional sebagai berikut :

Tabel 4.1. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas Standart Menurut Mulyadi (2016) CV. Rekayasa Engineering

Fungsi Penjualan	Bendahara Perimaan Kas
Fungsi Kas	Bendahara Umum
Fungsi Gudang	Tidak ada
Fungsi Pengiriman	Bagian Pengiriman
Fungsi Akuntansi	Bendahara Umum

(Sumber : wawancara)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari CV. Rekayasa Engineering mempunyai perbedaan dengan standart menurut Mulyadi (2016). Disebabkan karena pada CV. Rekayasa Engineering fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kasnya banyak yang merangkap, jadi satu orang mempunyai lebih dari satu tanggungjawab.

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari Kegiatan Operasional sebagai berikut:

Tabel 4.2. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari kegiatan operasional

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas	Bendahara Pengeluaran Kas
Fungsi Kas	Bendahara Umum
Fungsi Gudang	Tidak Ada
Fungsi Akuntansi	Bendahara Umum

(Sumber : Wawancara)

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari kegiatan pembelian bahan baku dalam CV. Rekayasa Engineering kurang sesuai dengan standart Mulyadi (2016). Perbedaan ini dikarenakan pada CV. Rekayasa Engineering banyak fungsi yang merangkap, dan hampir semua fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas diemban oleh bendahara umum. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari Sistem Penggajian sebagai berikut :

Tabel 4.3. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dari sistem penggajian

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Fungsi Kepegawaian	Direktur
Fungsi Pencatatan Waktu	Tidak Ada
Fungsi Pembuat Daftar Gaji Dan Upah	Bagian Administrasi
Fungsi Akuntansi	Bendahara Umum
Fungsi Keuangan	Bendahara Umum

(Sumber : Wawancara)

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari sistem penggajian dalam CV. Rekayasa Engineering tidak sesuai dengan standart Mulyadi (2016). Perbedaan ini dikarenakan pada CV. Rekayasa Engineering banyak fungsi yang merangkap, dan hampir semua fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas diemban oleh bendahara umum selain itu juga tidak adanya fungsi pencatatan waktu.

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas sebagai berikut :

Tabel 4.4. Dokumen yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Faktur Penjualan Tunai	Faktur Penjualan Tunai
Pita Register Kas	Tidak Ada
Credit Chart Sales Slip	Tidak Ada
Bill Of Lading	Tidak Ada
Faktur Penjualan COD	Tidak Ada
Bukti Setor Bank	Bukti Setor Bank
Rekapitulasi Beban Pokok Penjualan	Tidak Ada

(Sumber : Wawancara)

Dari tabel diatas dokumen yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam CV. Rekayasa Engineering tidak sesuai dengan standart Mulyadi (2016). Perbedaan ini dikarenakan pada CV. Rekayasa Engineering banyak dokumen yang tidak ada dan hanya dua yang

sesuai dengan standart Mulyadi (2016) yaitu faktur penjualan tunai dan bukti setor bank. Ketidaksesuaian ini tidak mempunyai pengaruh apapun pada CV. Rekayasa Engineering Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari kegiatan operasional sebagai berikut :

Tabel 4.5. Dokumen yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Bukti Kas Keluar	Nota
Permintaan Cek	Tidak Ada
Cek	Tidak Ada

(Sumber : *Wawancara*)

Dari tabel yang telah diuraikan tersebut dokumen yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari kegiatan operasional dalam CV. Rekayasa Engineering kurang sesuai dengan standart Mulyadi (2016). Perbedaan ini dikarenakan karena pada CV. Rekayasa Engineering jarang menggunakan permintaan cek dan juga cek pada proses pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari sistem penggajian sebagai berikut :

Tabel 4.6. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dari sistem penggajian

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Dokumen Pendukung Perubahan Gaji	Tidak Ada
Kartu Jam Hadir	Absensi
Kartu Jam Kerja	Dokumen Daftar Gaji
Daftar Gaji	Daftar Gaji
Rekap Daftar Gaji	Tidak Ada
Amplop Gaji	Amplop Gaji
Pernyataan Gaji	Tidak Ada
Bukti Kas Keluar	Tidak Ada

(Sumber : *Wawancara*)

Dari tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa dokumen-dokumen pengeluaran kas dari sistem penggajian pada CV. Rekayasa Engineering memiliki beberapa kesamaan dengan standart Mulyadi (2016) diantaranya pada dokumen kartu jam hadir, kartu jam kerja, rekap daftar gaji dan amplop gaji. Kesesuaian tersebut perlu untuk dipertahankan supaya dokumen sistem akuntansi pengeluaran kas dari sistem penggajian tetap berjalan dengan efektif.

Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas sebagai berikut :

Tabel 4.7. Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Jurnal Penjualan	Jurnal Kas Masuk
Jurnal Penerimaan Kas	Jurnal Kas Masuk
Jurnal Umum	Tidak Ada
Kartu Persediaan	Kartu Persediaan
Kartu Gudang	Tidak Ada

(Sumber : *Wawancara*)

Catatan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam CV. Rekayasa Engineering dengan Standart Mulyadi (2016) ada tiga kesesuaiannya yaitu terdiri dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan kartu persediaan, kesamaan ini dikarenakan karena CV. Rekayasa Engineering bergerak dalam bidang penjualan sehingga ada kesesuaian dengan standart Mulyadi (2016) yang digunakan sebagai pembanding. Akan tetapi dalam CV. Rekayasa Engineering belum

terdapat catatan jurnal umum dan juga kartu Gudang.

Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas sebagai berikut :

Tabel 4.8. Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas

Standart Menurut Mulyadi (2016)	CV. Rekayasa Engineering
Jurnal Pengeluaran Kas	Jurnal Kas Keluar
Register Cek	Tidak Ada

(Sumber : Wawancara)

Catatan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dalam CV. Rekayasa Engineering dengan Standart Mulyadi (2016) terdapat satu kesamaan yaitu pada bagian jurnal pengeluaran kas dikarenakan dalam CV. Rekayasa Engineering merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan sehingga jurnal kas keluar menjadi hal penting dalam pencatatan kas, akan tetapi tidak adanya register cek jadi catatan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dalam CV.Rekayasa Engineering kurang sesuai dengan standart Mulyadi (2016).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering bulan November 2022-Desember 2022, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya pemilihan fungsi antara bendahara penerimaan kas dan pengeluaran kas, sehingga pencatatan penerimaan dan pengeluaran kasnya sudah berjalan cukup baik. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering bulan November 2022-Desember 2022 terkait fungsi, dokumen, dan catatan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai perbedaan dengan standart Mulyadi (2016). Akan tetapi perbedaan ini tidak menjadi hal yang negatif dikarenakan dipengaruhi oleh tujuan dan aturan setiap organisasi pasti berbeda-beda.

Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV. Rekayasa Engineering bulan November 2022-Desember 2022 terkait fungsi, dokumen, dan catatan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas kurang berjalan dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ketidaksesuaian dengan standart Mulyadi (2016). Banyak catatan dan juga dokumen yang tidak terdapat pada CV. Rekayasa Engineering. Namun hal ini tidak berdampak buruk dengan CV. Rekayasa Engineering dikarenakan dari setiap perusahaan pastilah mempunyai prosedur penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kasnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hall James. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. BPFE . Yogyakarta.
- Chairul Marom. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Edisi ke-dua. Jakarta : Grasindo.
- Gulo. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta PT. Grasindo.
- Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hall, James A. 2009. *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrajani, 2011. *Perancangan Basis Data All in 1*. Jakarta: Alex Media Komputundo.
- Kusrini, Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi. Akuntansi dengan Visual Basic Dan Microsoft SQL Server*.Yogyakarta:Andi
- La Midjidan, Azhar Susanto,2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi kedelapan. Lingsajaya: Bandung
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems (Edisi 14)*, Person
- Mulyadi, 2009. *Akuntansi Biaya*. Jakarta : STIE YPKPN
- Mulyadi. 2011. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat* : Salemba empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

- Nugroho Widjayanto. 1985. *Pemeriksaan Operasional Perusahaan*. Jakarta : LPFE-UI
- Sarosa, Samiaji. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Azhar, 2009. *Sistem Akuntansi Prosedur dan Metode*. BPFE : Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods For Business : A Skill Building Approach*.

Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Atas Kinerja Pegawai untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan)

Siti Aisyah¹, Muhammad Habibie², Taufiq Risal³, Riadi⁴

¹³Universitas Potensi Utama-aisyah@gmail.com

²Universitas Medan Area-habibie@gmail.com

⁴Universitas Prima Indonesia-taufiq@gmail.com

Abstract— *This research aims to determine and analyze the effectiveness of the role of internal control over employee performance to improve employee discipline at the Medan City Education and Culture Service. The research methodology used is descriptive qualitative research. The data collection technique used is observation and interviews, which are then collected and processed into information that shows what phenomena and problems occur related to the research title. After conducting observations and interviews, it was discovered that several problems were caused by ineffective internal control, namely employee discipline which was still below average, training for employees which was still lacking, and a working environment which was not yet good. It is hoped that the problems that arise can be resolved by the Medan City Education and Culture Office in order to find a more effective and efficient solution. There are still employees who are late, causing problems with the work that must be completed. The phenomenon regarding work discipline at the Medan City Education and Culture Service is a lack of employee discipline which can be seen from several employees who are still procrastinating on work, resulting in long completion of assigned tasks and a lack of responsibility for the work they do themselves. Apart from that, there are still some employees who do not comply with the regulations and are late for work and late for work after break time. Lack of employee discipline also hinders improving company performance in completing tasks and responsibilities by employees.*

Keywords — *internal control, employees, employee discipline*

1. PENDAHULUAN

Pengendalian internal pada sebuah perusahaan dilakukan dengan tujuan agar mampu memberikan arahan, rambu-rambu, evaluasi dan penilaian terhadap hasil kinerja karyawan / pegawai atas apa yang menjadi visi misi dan tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal, diharapkan mampu menjadi alat control manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Fenomena yang terjadi pada pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kota Medan adalah karena masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pengendalian internal, pelatihan dan lingkungan kerja. Sumber daya manusia merupakan suatu hal terpenting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai. Sumber daya manusia memegang peran sebagai perencana, pelaksana dan evaluator seluruh program yang telah ditetapkan organisasi. Budaya yang kuat adalah budaya yang memegang nilai inti organisasi secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Lebih lanjut bahwa budaya organisasional diyakini sebagai salah satu faktor penentu (key variable factors) kesuksesan pegawai yang profesional, tangguh, cerdas, kreatif dan berpandangan kedepan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan instansi. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan adalah salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan di bawah langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terdiri dari beberapa bidang dan sub bidang dengan pembagian kerja yang terstruktur, dimana pegawainya dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan pegawai yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, peran sumber daya manusia akan terus dioptimalkan untuk bisa meningkatkan kinerjanya demi kelangsungan organisasi atau perusahaan. Kinerja tidak datang dengan sendirinya tetapi kinerja harus dikelola oleh perusahaan, untuk mengukur kinerja pegawai perlu dicermati dengan baik, jika kinerja pegawai meningkat maka keberhasilan akan berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan suatu perusahaan. Faktor Lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya adalah pelatihan kerja. Menurut (Hasan, 2023) pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seorang karyawan dengan pelatihan dan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan dan penerapannya untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan. Lingkungan kerja mempunyai keterkaitan dalam mendukung kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif terlahir dari kesadaran karyawan dan pimpinan sehingga kedua pihak ini perlu menciptakan lingkungan kerja tersebut. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan adalah kinerja karyawan yang menurun dikarenakan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam variabel lingkungan kerja adalah masih belum efektif dan tidak sesuai dengan harapan pegawai. Hasil penelitian (Rahmawanti, 2014) menunjukkan bahwa secara simultan lingkungan kerja yang ada di kantor pelayanan pajak pratama Malang utara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu (Budiyanto, 2020). Sedangkan menurut (Suparmi., 2023) kinerja karyawan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam sebuah organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada saat yang sama, menurut (Abdullah, 2014) kinerja karyawan adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di institusi itu baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut (Farisi, 2020) kinerja karyawan merupakan penilaian yang paling dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai. Jika, nilai kerja pegawai harus lebih besar dari prestasi kerja yang diperhatikan instansi mendapatkan nilai positif dari program kerja pegawai tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah keterampilan atau kemampuan seseorang sesuai dengan peran yang diberikan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Indikator yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja karyawan terbagi menjadi lima sebagai berikut: (Sukartini, 2022) :1)Kualitas Kerja, 2)Kuantitas, 3)Ketepatan Waktu, 4)Efektivitas, 5)Kemandirian

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Seda, 2018). Sedangkan menurut (Hasan, 2023:37) pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seorang karyawan dengan pelatihan dan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan dan penerapannya untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan Ajabar (2022:22) pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik ataupun meningkatkan kinerja seseorang pekerja. Menurut (Sulaiman, 2020) pelatihan kerja merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, untuk mengalihkan atau mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari seseorang yang dapat melakukan kepada orang yang tidak tahu dan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan. Adapun menurut (Triasmoko, 2014) pelatihan adalah suatu proses kegiatan untuk mengajarkan pada karyawan seperti keterampilan, sikap, disiplin dan memberikan keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang akan dilakukan karyawan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja adalah kegiatan memberi dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Pelatihan akan menghasilkan pelatihan yang bermutudan bermanfaat apabila memenuhi indikator-indikator pelatihan kerja sebagai berikut: (Artha, 2021): 1)Peserta pelatihan, 2)Materi pelatihan, 3) Media pelatihan, 4)Metode pelatihan, 5)Instruktur atau pemateri, 6)Tujuan pelatihan, 7)Tempat pelatihan, 8)Fasilitas pelatihan, 9)Manfaat pelatihan.

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaannya sehari-hari (Rahmawati, 2020:6). Menurut (Winata, 2022) lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial dan psikologis dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Pada saat yang sama, menurut (Sari, 2021) lingkungan kerja adalah suatu lingkungan dimana karyawan bekerja. sedangkan kondisi kerja merupakan kondisi dimana karyawan tersebut bekerja. Adapun menurut (Sofyan, 2013) lingkungan Kerja adalah segala sesuatu

yang berada disekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut (Ferawati, 2017) lingkungan Kerja adalah lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikologis. Lingkungan kerja fisik berhubungan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi fisik karyawan sedangkan lingkungan psikologis berhubungan dengan psikologis karyawan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah suasana dimana karyawan melakukan aktivitas didalam perusahaan dan memengaruhi kinerja karyawan. Indikator lingkungan kerja terbagi menjadi 3 yaitu : 1)Suasana Kerja, 2)Hubungan dengan rekan kerja, 3)Tersedia fasilitas kerja

Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggaran (Nazara, 2023). Disiplin adalah mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi (Surajiyo, 2020). Sedangkan menurut (Rozi, 2022) disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi, tindakan disiplin digunakan oleh organisasi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari aturan-aturan kerja atau dari harapan-harapan. Sedangkan keluhan-keluhan digunakan oleh pegawai yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh organisasi. Pada saat yang sama, menurut (Erpidawati, 2019) disiplin kerja adalah kesediaan dan kesadaran seseorang untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut (Arif, 2020) Disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah menaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan organisasi/ perusahaan. Hal ini bermanfaat untuk mendidik pegawai mematuhi dan menghasilkan kinerja yang baik. Pada saat yang sama, menurut (Syahril, 2020) berpendapat bahwa terdapat indikator-indikator disiplin kerja diantaranya sebagai berikut : 1)Hadir tepat waktu, 2)Selalu mengutamakan presentase kehadiran, 3)Selalu menaati segala ketentuan jam kerja, 4)Selalu mementingkan jam kerja yang efisien dan efektif, 5)Mempunyai keterampilan kerja pada bidang tugasnya, 6)Mempunyai motivasi kerja yang tinggi, 7)Mempunyai sikap-sikap dan tingkah laku yang baik, 8)Selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja

3. METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data Primer: Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru terkini. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah bagian sumber daya manusia dinas pendidikan dan kebudayaan kota Medan
- b) Data Sekunder Data yang penulis peroleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, informasi perusahaan maupun internet.

Data Dalam kegiatan penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a) Observasi Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati dan menganalisis permasalahan yang terjadi pada disiplin pegawai dan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan
- c) Wawancara (interview) Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan bagian sumber daya manusia dinas pendidikan dan kebudayaan kota Medan. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan kemudian membandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu (Budiyanto, 2020). Berikut ini adalah Tabel 1 yang mencantumkan capaian kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti:

Tabel 1
Hasil Pencapaian Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan
Periode 2022

No.	Sasaran Strategis	Tugas dan Tanggung Jawab	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Murni sekolah (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	87,25%	141,97%	162,72%
2.	Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	APK SD/MI/Paket A	100%	88,74%	88,74%
		APM SD/MI/Paket A	100%	85,06%	85,06%
		APK SMP/MTs/SMPT/Paket B	100%	105,13%	105,13%
		APM SMP/MTs/SMPT/Paket B	100%	118,56%	118,56%
3.	Menurunnya siswa putus sekolah pendidikan dasar	Angka Putus Sekolah (APS)/SD/MI	0,08%	0,15%	53,06%
		Angka Putus Sekolah (APS)/SMP/MTs	0,06%	0,12%	50,13%
4.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana satuan pendidikan	Persentase ruang kelas baik SD	83%	70,74%	85,23%
		Persentase ruang kelas baik SMP	83%	82,63%	99,56%
5.	Meningkatnya kualitas lulusan (AL) SD/MI/Paket A Dasar, SMP/MTs/Paket B	Angka Lulusan (AL) SD/MI/Paket A	100%	112,15%	112,15%
		Angka Lulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	100%	95,12%	95,12%
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	100%	82,07%	82,07%
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MTs	100 %	126,18%	126,18%

Sumber: Data Arsip Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan

Berdasarkan tabel hasil pencapaian hasil kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Medan dapat di lihat bahwa adanya pemenuhan target yang tidak terealisasi seperti APK SD/MI/Paket A dan APM SD/MI/Paket A yang teralisasi hanya 88,74% dan 85,06% yang mana target harus mencapai 100%, persentase ruang kelas baik SD teralisasi 70,74% yang mana target harus mencapai 83% sedangkan angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs teralisasi hanya 82,07% dari target 100%. Hal ini mengingat masih adanya beberapa program yang daya serapnya relatif rendah. Keakurasian sistem perencanaan menjadi sangat penting sehingga kedepan daya serap menjadi lebih baik yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan. Hal ini lah dapat dikatakan rata-rata target yang dibebankan kepada para pegawai tidak terealisasi secara menyeluruh.

Tabel 2
Pelaksanaan dan Pelatihan Kegiatan Bidang
Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Medan 2023

Kegiatan Sub Program		Rincian Kegiatan	Pelaksanaan (TW)	Tgl/Bln/Thn	Keterangan
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan					
1	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tata Kelola Dana BOP	I	20-22 Februari 2023	3 Hari
2	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	I	1 – 2 Maret 2023	2 Hari
3	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pelatihan Tata Kelola Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023	I	7 – 9 Maret 2023	3 Hari
4	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendapatan PAUD, SD, SMP/ MTs Kelurahan	I	10 Maret 2023	Kurangnya biaya
5	1.01.02.04.17 Pengelolaan DanaBOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Bantuan Operasional Kesetaraan	I & IV	11 Maret 2023	Kurangnya biaya
6	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, SD, SMP/ MTs	Monitoring dan Supervisi BOP PAUD, SD, SMP/ MTs	I & IV	13 – 15 Maret 2023	3 Hari
7	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, SD, SMP/ MTs	Operasional TK Negeri dan SPNF SKB	I, II, III, IV	20 – 21 Maret 2023	Kurangnya biaya
8	1.01.02.2.03.09 Pengadaan Pelengkapan PAUD, SD, SMP/ MTs	Pembuatan Partisi Ruang Rapat PAUD, SD, SMP/ MTs	II	17 - 19 April 2023	Diundur waktu pelaksanaan
9	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP/ MTs	Pelatihan Guru Penggerak dan Merdeka Belajar Tingkat PAUD, SD, SMP/ MTs	II	8 – 11 Mei 2023	4 Hari
10	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Sosialisasi dan Pembinaan PAUD, SD, SMP/ MTs Holistik	II	11 – 12 Mei 2023	2 Hari

Kegiatan Sub Program		Rincian Kegiatan	Pelaksanaan (TW)	Tgl/Bln/Thn	Keterangan
	PAUD, SD, SMP/ MTs	Integratif			
	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, SD, SMP/ MTs	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Penggerak	II	23 – 24 Mei 2023	2 Hari
	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP/ MTs	Bimtek Parenting Stunting PAUD, SD, SMP/ MTs	II	6 – 8 Juni 2023	3 Hari
	1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD, SD, SMP/ MTs	Mebel PAUD, SD, SMP/ MTs Negeri, SKB	II	12 Maret 2023	Kurangnya biaya
	1.01.02.2.03.10 Pengadaan Pelengkapan siswa PAUD, SD, SMP/ MTs	Bantuan Perlengkapan Sekolah Dalam Bentuk ATK	II	19 – 22 Maret 2023	Kurangnya biaya
	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Monitoring dan Supervisi Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2023	II	26 – 28 Maret 2023	Diundur waktu pelaksanaan
	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP/ MTs	Bimbingan Teknis Penyusunan Media Pembelajaran Bagi Guru PAUD, SD, SMP/ MTs	III	4 s.d Juli 2023	3 Hari

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa pelatihan yang spesifik yang diberikan kepada pegawai sangat minim, masih banyak materi pelatihan yang belum terlaksanakan seperti, pendapatan PAUD, SD, SMP/MTs Kelurahan disebabkan kurangnya biaya, Bantuan Operasional Kesetaraan disebabkan kurangnya biaya, Operasional TK Negeri dan SPNF SKB disebabkan kurangnya biaya, pembuatan partisi ruang rapat PAUD, SD, SMP/MTs disebabkan diundur waktu pelaksanaan, Mebel PAUD, SD, SMP/MTs Negeri, SKB disebabkan kurangnya biaya, bantuan perlengkapan sekolah dalam bentuk ATK disebabkan kurangnya biaya dan Monitoring dan supervise ujian pendidikan kesetaraan (UPK) Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2023 disebabkan diundur waktu pelaksanaan. Hal ini terjadi karena kurang adanya keseriusan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam memberikan pelatihan kerja dari para pegawainya sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan kinerja dari para pegawai.

Tabel 3
Data Keterlambatan Bulan Januari – Mei 2023

Bulan	Jumlah Pegawai	Terlambat 1 s/d 3 kali	Pulang cepat	Alpa
Januari	355	32	20	12
Februari	355	12	7	9
Maret	355	29	12	14
April	355	38	29	18
Mei	355	19	21	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan (Data diolah)

Disiplin adalah mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi (Surajiyo, 2020). Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa masih terdapat pegawai yang terlambat, sehingga menyebabkan terkendalanya pekerjaan yang harus diselesaikannya. Fenomena mengenai kedisiplinan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan adalah kurangnya kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari beberapa pegawai yang masih menunda-nunda pekerjaan sehingga berdampak pada penyelesaian yang lama pada tugas yang telah diberikan dan kurangnya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Selain itu, masih terdapat beberapa pegawai yang tidak menaati peraturan yang terlambat masuk kerja dan terlambat masuk kantor setelah jam istirahat. Kurangnya kedisiplinan pegawai juga menghambat peningkatan kinerja perusahaan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab oleh pegawai.

Menurut (Hasan, 2023) pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seorang karyawan dengan pelatihan dan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan dan penerapannya untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Josephine, 2017) dan (Fadilah, 2022) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang lengkap akan membuat karyawan merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya.

Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggaran (Nazara, 2023).

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Satedjo, 2017) dan (Irawan, 2021) yang menyatakan bahwa disiplin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa disiplin yang kurang baik akan menimbulkan kinerja yang kurang baik pula bagi karyawan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pentingnya pengendalian internal sebagai alat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai khususnya pegawai di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini. Bagaimana peran pengendalian internal ini bisa efektif menyelesaikan masalah dalam hal kinerja pegawai berupa kedisiplinan, pelatihan pegawai, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk pegawai. Menurut (Hasan, 2023) pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seorang karyawan dengan pelatihan dan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan dan penerapannya untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Josephine, 2017) dan (Fadilah, 2022) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang lengkap akan membuat karyawan merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan

perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya (Nazara, 2023). Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Satedjo, 2017) dan (Irawan, 2021) yang menyatakan bahwa disiplin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa disiplin yang kurang baik akan menimbulkan kinerja yang kurang baik pula bagi karyawan.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan, serta pihak lain yang membutuhkan informasi serupa. Kemudian untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain sesuai dengan fenomena yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. ., Natasha, S. F. ., Risal, T. ., Rizki, S. ., Dewi, A. F. ., & Saragih, N. M. . (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Internal Control on Doubtful Receivables PT. PLN Persero ULP Belawan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 1175–1186. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.6464>
- Aisyah, S., Anindya, D., Habibie, M., & Purnamasari, E. (2023). Effectiveness of Implementing a Management Control System for Revenue Increase via Credit Sales: A Map Analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 817–826. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2199>
- Aisyah, Siti. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Menilai Efektivitas Pengihan Piutang Usaha Pada Pdam Tirtanadi Medan Cabang Medan Labuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. ISSN 2502-7379 dan E-ISSN 2549-4090. <http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v7i2.1648>
- (2023) Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen Untuk Meningkatkan Kinerja Manager Penjualan (Studi kasus pada PT.Astra Daihatsu Krakatau). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Bisnis*. e-ISSN :2963-7643. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.978>
- (2020). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Transit Syariah Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. ISSN 2502-7379 dan E-ISSN 2549-4090. <http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v5i2>
- Ajabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anggraini EN, S.Aisyah.(2024). Peran Profesionalisme Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wali Kota Medan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. Retrieved from <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/1911>. Doi. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1911>
- Amanda, Enno Aldea., Satrijo Budiwibowo, dan Nik Amah. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(1), 1-12.
- Arianty, Nel. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Perdana Publishing.
- Arif, Muhammad., Maulana Taufik dan Lesmana Muhammad Taufik. L. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 106-119.
- Artha, Arvian Yuli. (2021). *Manajemen Pelatihan Guru Sekolah Dasar Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional*. Tangerang: Pascal Books.
- Astarman. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Indragiri. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, VIII(1), 119-127
- Bismala, Lila., Nel Arianty., Titin Farida dan Mutholib. (2020). *Perilaku Organisasi Sebuah Pengantar*. Medan : CV. SIMPHONY BARU
- Ferry, Jhon Manullang dan M. Irawan Noor (2020). Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Jasa Marga di Gerbang Tol Cikampek Utama. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 21(3), 32-35
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Kurniasari, Rani., Nurvi Oktiani dan Gema Ramadhanti. (2018). Pelatihan Kerja Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Karyawan Baru Pada PT Kusumatama Mitra Selaras Jakarta. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 239-246.

- Kurniawati, Endah. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management .
- Nabawi, Rizal. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 170-183.
- Nadila, A., & Aisyah, S. (2023). The Effect of Internal Control System and Transparency on the Income Growth of IDX-Listed Cigarette Companies. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 711–718. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2177>
- Nugroho, Dian Ari. (2017). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, dan Nirlaba*. Malang: UB Press.
- Pakpahan, D., Gea, S., Aisyah, S., Simatupang, J., Yanti, A., Sembiring, E., & Tamba, I. (2023). Analysis of the Effectiveness of Internal Control Roles Over Fixed Assets at the District Office of Medan Labuhan, North Sumatra. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 867–876. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2204>
- Pratiwi, A., & Aisyah, S. (2023). Analysis of the Effectiveness of Implementing Accounting Information Systems at PT. Diamond Hevea Industry. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 719–728. Retrieved from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2185>
- Purba, Sukarman dkk. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Teori*. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi .
- Putra, Zulfikar., Wiridin Darmawan dan Farid Wajdi. (2022). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press (Anggota Ikapi : 264/ JTI/ 2020).
- Putra, Maha., Mukharom dan Arief Teguh Nugroho (2021). Pengaruh Pelatihan, Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT World Innovative Telecommunication. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*. 5(1), 151-162
- Rahman, Ading., M Sidik Priadana dan Senen Machmud (2023). *Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Pada Sektor Transportasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rahmawati, Ita., Lailatus Saádah dan M Nur Chabibi. (2020). *Karakteristik Individu dan Lingkungan Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan*. Jombang : LPPM .
- Rozi, Achmad, dkk. (2022). *Meretas Kinerja Dosen Strategi Membangun Paradigma Baru Kinerja Dosen di Era 5.0*. Cilegon Banten : PT. Runzune Sapta Konsultan.
- Ruyatnasih, Yaya dan Liya Megawati. (2018). *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*. Kerawang: Putra Galuh Publisher.
- Soelistya, Djoko., Setyaningrum Retno Purwani., Aisyah Nur, Sahir Syafida Hafni, dan Purwati Titik. (2022). *Budaya Organisasi Dalam Praktik*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Sofyan, Diana Khairani. (2013). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai BAPPEDA. *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*, 2(1), 18-23.
- Sopian, Dani, dan Wawat Suwartika. (2019). “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan.” *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*. 11(2):40–53. doi: 10.37151/jsma.v11i2.5.
- Sudarso, Aden Prawiro (2019). Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Hero Supermarket Tbk Cabang Pondok Indah. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(1), 26-32
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sulaiman dan Asanudin. (2020). Analisis Peranan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai. *Jurnal Akuntanika*, 6(1), 38-45

Analisis Penilaian Persediaan Barang Dagang Untuk Mencapai Laba Yang Optimal Pada Koperasi Karyawan Melati

Vira Ningtyas¹, Khusnatul Zulfa Wafirotn², iin Wijayanti³

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo – viravr08@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Ponorogo – khusnafeump@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Ponorogo – iinsmart83@gmail.com

Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode penilaian persediaan barang dagang pada Koperasi Karyawan Melati Ponorogo dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO), dan Average (Rata-Rata) periode bulan Januari - Desember tahun 2022. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan pengamatan setempat (observasi), dokumentasi, dan wawancara langsung dengan karyawan atau pengurus perusahaan dalam mengumpulkan data berupa laporan persediaan. Sedangkan data sekunder dengan cara mengumpulkan kajian teori tentang metode penilaian persediaan barang dagang. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang berasal dari data persediaan awal, pembelian dan penjualan barang dagang serta persediaan akhir barang dagang pada Kopkar Melati pada bulan Januari - Desember tahun 2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persediaan barang dagang yang sering terjual (*fastmoving*) yaitu alas/perlak sekali pakai (*underpad*) yang ada di Koperasi Karyawan Melati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan metode Average (rata-rata) menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah dan laba kotor yang lebih tinggi daripada metode First In First Out (FIFO) dan Last In First Out (LIFO).

Kata Kunci: Persediaan Barang Dagang, FIFO, LIFO, Average

1. PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan dunia terhadap usaha dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif membuat perusahaan meningkatkan aktivitas operasional untuk bertahan hidup agar mampu bersaing dengan entitas lain, sehingga tujuan dari perusahaan akan tercapai. Persaingan yang terjadi salah satunya disebabkan karena munculnya para pesaing baru yang memiliki produk yang lebih unggul bersama dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Persediaan adalah barang yang tersedia atau siap untuk dijual pada periode tertentu. Persediaan juga digunakan untuk proses produksi atau digunakan untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Karena berkaitan dengan pendapatan perusahaan, persediaan menjadi aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan. Jelas bahwa perusahaan akan menghasilkan laba lebih lambat jika tingkat perputaran aset persediaan rendah. Di sisi lain, jika perputaran aset persediaan itu cepat, maka perusahaan akan menghasilkan pendapatan juga sama cepatnya. Maka dari itu perusahaan perlu memperhatikan dalam menentukan metode yang tepat untuk menghitung nilai persediaan barang dagangnya untuk menentukan harga pokok penjualan barang dagang yang akan berpengaruh pada besarnya nilai perolehan laba dari suatu perusahaan (Harti, 2011).

Menurut Kartikahadi *et al* (2012) untuk mengetahui jumlah kuantitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu, dapat dilihat dari sudut sistem akuntansi dengan penerapan dua metode, yaitu:

a. Metode Pencatatan Periodik (*Periodic Inventory System*)

Metode pencatatan periodik menghitung jumlah persediaan secara berkala dengan melakukan perhitungan fisik dan kemudian mengalikan jumlah unit dengan harga satuan untuk mendapatkan nilai persediaan yang ada pada periode tertentu. Pada akhir periode usaha untuk menyusun laporan keuangan, harus dilakukan perhitungan fisik persediaan untuk mengetahui nilai Persediaan Akhir dan Harga Pokok Penjualan (HPP).

b. Metode Pencatatan Perpetual (*Perpetual Inventory System*)

Pencatatan persediaan pada metode perpetual, dilakukan secara *kontinue* saat terjadi mutasi persediaan barang dagang, sehingga kuantitas dan nilai persediaan barang dagang pada suatu perusahaan dapat diketahui setiap manajemen membutuhkan informasi.

Menurut (Hermawan, 2008) terdapat tiga metode untuk menghitung penilaian persediaan, yaitu :

a. FIFO (*First In First Out*)

Metode FIFO adalah metode yang memiliki asumsi bahwa barang yang dibeli (masuk) pertama kali adalah barang yang dijual (keluar) terlebih dahulu. Pada metode ini persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Metode FIFO merupakan metode yang sangat realistis, sehingga cocok digunakan untuk sifat produk apapun.

b. LIFO (*Last In First Out*)

Metode LIFO adalah metode yang memiliki asumsi bahwa barang yang dibeli (masuk) terakhir adalah barang yang dijual (keluar) terlebih dahulu. Pada metode ini persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk. Metode LIFO akan cocok digunakan untuk jenis barang yang tidak memiliki masa kadaluarsa atau barang non konsumsi, contohnya barang pecah belah, bahan bangunan, dan tekstil.

c. AVERAGE (*Rata-Rata*)

Metode Average barang yang akan keluar (dijual) tidak akan memperdulikan kapan barang tersebut masuk (dibeli). Menurut Al Haryono Jusup (2008), metode rata-rata pada sistem persediaan perpetual, harga perolehan akan dilakukan pada setiap terjadi transaksi pembelian. Harga rata-rata perunit dihitung dengan membagi harga perolehan barang yang tersedia dijual dengan jumlah unit yang tersedia dijual, hal ini dilakukan setiap terjadi transaksi input persediaan. Oleh sebab itu harga rata-rata pada metode ini selalu berubah, antara harga perolehan perunit barang yang baru dibeli dengan harga perunit barang yang dibeli sebelumnya, maka dari itu metode rata-rata pada sistem perpetual disebut metode rata-rata bergerak.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Karyawan Melati yang merupakan Koperasi Karyawan dari salah satu Rumah Sakit Swasta di Ponorogo. Koperasi ini memiliki usaha dalam bidang perdagangan (toko). Barang yang disediakan sangat beragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, meliputi sembako, peralatan bersih-bersih, perlengkapan dan peralatan mandi, barang habis pakai meliputi pampers dan *underpad*, makanan basah meliputi nasi bungkus dan jajanan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dari pengurus Koperasi Karyawan Melati, diperoleh informasi bahwa pencatatan persediaan sudah menggunakan sistem komputerisasi namun belum menerapkan penilaian persediaan barang dagang, dalam menentukan harga jual barangnya. Koperasi Melati menggunakan kebijakan perusahaan itu sendiri, selain itu terjadi perbedaan perhitungan antara fisik dan sistem. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan solusi kepada perusahaan guna menangani masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Metode Penilaian Persediaan Barang Dagang Apa Yang Tepat Untuk Mencapai Laba Yang Optimal Pada Koperasi Karyawan Melati Ponorogo?

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode Penilaian Persediaan Barang Dagang Yang Tepat Untuk Mencapai Laba Yang Optimal Pada Koperasi Karyawan Melati Ponorogo. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu data persediaan barang dagang *fastmoving* berupa alas/perlak sekali pakai (*underpad*) pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah data persediaan barang dagang Koperasi Melati. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan beberapa kriteria tertentu yang berkaitan dan menunjang pada penelitian.

Metode pengambilan data menggunakan cara studi pustaka dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang metode penilaian persediaan barang dagang dan cara studi lapangan yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus dari Koperasi Melati.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif dimana data yang disajikan dalam bentuk angka yang berasal dari data persediaan *underpad*, data

penjualan *underpad*, data pembelian *underpad*, dan persediaan akhir *underpad* pada Koperasi Melati pada bulan Januari - Desember pada tahun 2022 yang akan dianalisis menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu metode *First In First Out* (FIFO), *Last In First Out* (LIFO), dan *Average* (Rata-rata).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Underpad adalah perlak satu kali pakai yang digunakan sebagai alas penyerap cairan tubuh pasien untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena koperasi ini berada di Rumah Sakit maka fungsi underpad disini banyak digunakan oleh tenaga kesehatan untuk pasien pasca operasi, pasien pasca persalinan, pasien lanjut usia dan pasien rawat inap maupun rawat jalan lainnya. Adapun jenis persediaan underpad yang ada di Koperasi Karyawan Melati yaitu:

Tabel 1 Persediaan Oto-Underpad di Kopkar Melati

No	Kode Barang	Nama Produk	Persediaan Awal	Harga Jual
			(Unit)	(Rp)
1	124523	Underpad Steril	0	Rp. 15.000,-
2	7237842212015	Sensi Underpads L10/12	0	Rp. 4.500,-
3	8994051120294	Top Underpads 10S	0	Rp. 4.000,-
4	8997001068882	Popoku Underpads/10	0	Rp. 4.500,-
5	8997028301498	Oto Underpad	0	Rp. 4.000,-

Sumber: Stock persediaan underpad kopkar melati tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat lima jenis underpad pada Kopkar Melati dengan persediaan awal diambil pada bulan Januari tahun 2022. Namun pada kesempatan kali ini penulis akan meneliti jenis underpad yang paling sering terjual yaitu Oto Underpad. Berikut data yang akan diolah penulis bulan Januari – Desember 2022:

Tabel 2 Transaksi Oto-Underpad di Kopkar Melati bulan Januari – Desember 2022

No.	Bulan	Pembelian	Harga Beli	Penjualan	Harga Jual	Retur Penjualan
		(unit)	Per Unit (Rp)	(Unit)	Per Unit (Rp)	(Unit)
1	Januari	660	2.650	434	4.000	-
2	Februari	120	2.850	416	4.000	-
		70	2.700			-
3	Maret	360	2.750	206	4.000	-
		120	2.750			-
4	April	20	2.800	367	4.000	-
		120	2.850			-
5	Mei	360	2.850	210	4.000	-
6	Juni	120	2.850	218	4.000	-
		120	2.950			-
7	Juli	300	2.950	220	4.000	-
8	Agustus	360	2.950	403	4.000	1
9	September	480	2.950	381	4.000	-
10	Oktober	120	2.950	372	4.000	5
		360	3.000			-
11	November	360	3.000	356	-	-
12	Desember	30	2.900	336	4.000	-
		360	2.950			-

Sumber: laporan persediaan oto-underpad kopkar melati tahun 2022

Berdasarkan data pembelian, penjualan, dan retur penjualan Oto Underpad pada bulan Januari - Desember tahun 2022 tersebut, perhitungan Penilaian Persediaan, HPP, dan Laba Kotor Oto Underpad pada Kopkar Melati menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), metode *Last In First Out* (LIFO), dan metode *Average* adalah sebagai berikut:

1. Metode *First In First Out* (FIFO)

Tabel 3 Perhitungan Penilaian Persediaan Metode FIFO Kopkar Melati

Bln/ Thn	Keterangan	Masuk			Keluar			Saldo		
		Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)
Jan-22	Pembelian & Penjualan	660	2.650	1.749.000	434	2.650	1.150.100	226	2.650	598.900
Feb-22	Pembelian & Penjualan	120	2.850	342.000	226	2.650	598.900	-	-	-
		70	2.700	189.000	120	2.850	342.000	-	-	-
		-	-	-	70	2.700	189.000	0	0	0
Mar-22	Pembelian & Penjualan	360	2.750	990.000	206	2.750	566.500	154	2.750	423.500
Apr-22	Pembelian & Penjualan	120	2.750	330.000	274	2.750	753.500	-	-	-
		20	2.800	56.000	20	2.800	56.000	-	-	-
		120	2.850	342.000	73	2.850	208.050	47	2.850	133.950
Mei-22	Pembelian & Penjualan	360	2.850	1.026.000	210	2.850	598.500	197	2.850	561.450
Jun-22	Pembelian & Penjualan	120	2.850	342.000	218	2.850	621.300	99	2.850	282.150
		120	2.950	354.000	-	-	-	120	2.950	354.000
Jul-22	Pembelian & Penjualan	300	2.950	885.000	99	2.850	282.150	-	-	-
		-	-	-	121	2.950	356.950	299	2.950	882.050
Ags-22	Pembelian & Penjualan	360	2.950	1.062.000	403	2.950	1.188.850	-	-	-
	Retur Penjualan	-	-	-	(1)	2.950	(2.950)	257	2.950	758.150
Sep-22	Pembelian & Penjualan	480	2.950	1.416.000	381	2.950	1.123.950	356	2.950	1.050.200
Okt-22	Pembelian & Penjualan	120	2.950	354.000	372	2.950	1.097.400	-	-	-
		360	3.000	1.080.000	-	-	-	109	2.950	321.550
		-	-	-	(5)	2.950	(14.750)	360	3.000	1.080.000
Nov-22	Pembelian & Penjualan	360	3.000	1.080.000	109	2.950	321.550	-	-	-
		-	-	-	247	3.000	741.000	473	3.000	1.419.000
Des-22	Pembelian & Penjualan	30	2.900	87.000	336	3.000	1.008.000	137	3.000	411.000
		360	2.950	1.062.000	-	-	-	30	2.900	87.000
		-	-	-	-	-	-	360	2.950	1.062.000

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

Tabel 4 Perhitungan Laba Kotor Metode FIFO Kopkar Melati

Koperasi Karyawan Melati Ponorogo		
Laporan Laba Rugi		
Periode 31 Desember 2022		
Metode FIFO (<i>First In First Out</i>)		
Pendapatan dari penjualan:		
Penjualan	Rp. 15.676.000	
Retur Penjualan	Rp 17.700 -	
Penjualan Bersih		Rp 15.658.300
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan awal	Rp -	
Pembelian	Rp 12.746.000 +	
Barang tersedia untuk dijual		Rp 12.746.000
Persediaan akhir	Rp 1.560.000 -	
Total harga pokok penjualan		Rp 11.186.000 -
Lab Kotor		Rp 4.472.300

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

2. Metode *Last In First Out* (LIFO)

Tabel 5 Perhitungan Penilaian Persediaan Metode LIFO pada Kopkar Melati

Bln/ Thn	Keterangan		Masuk			Keluar			Saldo		
			Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)
Jan- 22	Pembelian & Penjualan		660	2.650	1.749.000	434	2.650	1.150.100	226	2.650	598.900
Feb- 22	Pembelian & Penjualan		120	2.850	342.000	70	2.700	189.000	-	-	-
			70	2.700	189.000	120	2.850	342.000	-	-	-
			-	-	-	226	2.650	598.900	0	0	0
Mar- 22	Pembelian & Penjualan		360	2.750	990.000	206	2.750	566.500	154	2.750	423.500
Apr- 22	Pembelian & Penjualan		120	2.750	330.000	120	2.850	342.000	-	-	-
			20	2.800	56.000	20	2.800	56.000	-	-	-
			120	2.850	342.000	227	2.750	624.250	47	2.750	129.250
Mei- 22	Pembelian & Penjualan		360	2.850	1.026.000	210	2.850	598.500	47	2.750	129.250
									150	2.850	427.500
Jun- 22	Pembelian & Penjualan		120	2.850	342.000	120	2.950	354.000	47	2.750	129.250
			120	2.950	354.000	98	2.850	279.300	172	2.850	490.200
Jul- 22	Pembelian & Penjualan		300	2.950	885.000	220	2.950	649.000	47	2.750	129.250
			-	-	-	-	-	-	172	2.850	490.200
			-	-	-	-	-	-	80	2.950	236.000
Agst- 22	Pembelian & Penjualan		360	2.950	1.062.000	403	2.950	1.188.850	47	2.750	129.250
									172	2.850	490.200
	Retur Penjualan		-	-	-	(1)	2.950	(2.950)	38	2.950	112.100
Sep- 22	Pembelian & Penjualan		480	2.950	1.416.000	381	2.950	1.123.950	47	2.750	129.250
			-	-	-	-	-	-	172	2.850	490.200
			-	-	-	-	-	-	137	2.950	404.150
Okt- 22	Pembelian & Penjualan		120	2.950	354.000	360	3.000	1.080.000	47	2.750	129.250
			360	3.000	1.080.000	12	2.950	35.400	172	2.850	490.200
	Retur Penjualan		-	-	-	(5)	3.000	(15.000)	245	2.950	722.750

			-	-	-	-	-	-	5	3.000	15.000
Nov-			360	3.000	1.080.000	356	3.000	1.068.000	47	2.750	129.250
22	Pembelian & Penjualan		-	-	-	-	-	-	172	2.850	490.200
			-	-	-	-	-	-	245	2.950	722.750
			-	-	-	-	-	-	9	3.000	27.000
Des-	Pembelian & Penjualan		30	2.900	87.000	336	2.950	991.200	47	2.750	129.250
22			360	2.950	1.062.000	-	-	-	172	2.850	490.200
			-	-	-	-	-	-	245	2.950	722.750
			-	-	-	-	-	-	9	3.000	27.000
			-	-	-	-	-	-	30	2.900	87.000
			-	-	-	-	-	-	24	2.950	70.800

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

Tabel 6 Perhitungan Laba Kotor Metode LIFO Kopkar Melati

Koperasi Karyawan Melati Ponorogo			
Laporan Laba Rugi			
Periode 31 Desember 2022			
Metode LIFO (<i>Last In First Out</i>)			
Pendapatan dari penjualan:			
Penjualan		Rp 15.676.000	
Retur Penjualan		Rp 17.950	-
Penjualan Bersih			Rp 15.658.050
Harga Pokok Penjualan:			
Persediaan awal	Rp	-	
Pembelian	Rp 12.746.000	+	
Barang tersedia untuk dijual		Rp 12.746.000	
Persediaan akhir		Rp 1.527.000	-
Total harga pokok penjualan			Rp 11.219.000 -
Laba Kotor			Rp 4.439.050

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

3. Metode *AVERAGE* (Rata-rata)Tabel 7 Perhitungan Penilaian Persediaan Metode *AVERAGE* pada Kopkar Melati

Bln/ Thn	Keterangan	Masuk			Keluar			Saldo		
		Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)	Q (Unit)	P (Rp)	T (Rp)
Jan- 22	Pembelian & Penjualan	660	2.650	1.749.000	434	2.650	1.150.100	226	2.650	598.900
Feb- 22	Pembelian & Penjualan	120	2.850	342.000	416	2.716	1.129.856	-	-	-
		70	2.700	189.000	-	-	-	0	0	0
Mar- 22	Pembelian & Penjualan	360	2.750	990.000	206	2.750	566.500	154	2.750	423.500
Apr- 22	Pembelian & Penjualan	120	2.750	330.000	367	2.781	1.020.627	-	-	-
		20	2.800	56.000	-	-	-	-	-	-
		120	2.850	342.000	-	-	-	47	2.781	130.707
Mei- 22	Pembelian & Penjualan	360	2.850	1.026.000	210	2.842	596.820	197	2.842	559.874
Jun- 22	Pembelian & Penjualan	120	2.850	342.000	218	2.874	626.532	-	-	-
		120	2.950	354.000	-	-	-	219	2.874	629.406
Jul- 22	Pembelian & Penjualan	300	2.950	885.000	220	2.918	641.960	299	2.918	872.482
Ags- 22	Pembelian & Penjualan	360	2.950	1.062.000	403	2.935	1.182.805	-	-	-
	Retur Penjualan	-	-	-	(1)	2.935	(2.935)	257	2.935	754.295
Sep- 22	Pembelian & Penjualan	480	2.950	1.416.000	381	2.945	1.122.045	356	2.945	1.048.420
Okt- 22	Pembelian & Penjualan	120	2.950	354.000	372	2.969	1.104.468	-	-	-
		360	3.000	1.080.000	-	-	-	-	-	-
	Retur Penjualan	-	-	-	(5)	2.969	(14.845)	469	2.969	1.392.461
Nov- 22	Pembelian & Penjualan	360	3.000	1.080.000	356	2.982	1.061.592	473	2.982	1.410.486
Des- 22	Pembelian & Penjualan	30	2.900	87.000	336	2.966	996.576	-	-	-
		360	2.950	1.062.000	-	-	-	527	2.966	1.563.082

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

Tabel 8 Perhitungan Laba Kotor Metode AVERAGE Kopkar Melati

Koperasi Karyawan Melati Ponorogo			
Laporan Laba Rugi			
Periode 31 Desember 2022			
Metode Rata-Rata (Average)			
Pendapatan dari penjualan:			
Penjualan		Rp15.676.000	
Retur Penjualan		Rp 17.780	-
Penjualan Bersih			Rp 15.658.220
Harga Pokok Penjualan:			
Persediaan awal	Rp	-	
Pembelian	Rp	12.746.000 +	
Barang tersedia untuk dijual		Rp12.746.000	
Persediaan akhir		Rp 1.563.082	-
Total harga pokok penjualan			Rp 11.182.918 -
Laba Kotor			Rp 4.475.302

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, data diolah

Tabel 4.2.1. Perbandingan Metode Penilaian Persediaan

Metode	FIFO	LIFO	AVERAGE
Penjualan	Rp 15.676.000	Rp 15.676.000	Rp 15.676.000
Retur Penjualan	Rp 17.700	Rp 17.950	Rp 17.780
Penjualan Bersih	Rp 15.658.300	Rp 15.658.050	Rp 15.658.220
Persediaan Awal	Rp -	Rp -	Rp -
Pembelian	Rp 12.746.000	Rp 12.746.000	Rp 12.746.000
Barang Tersedia Untuk Dijual	Rp 12.746.000	Rp 12.746.000	Rp 12.746.000
Persediaan Akhir	Rp 1.560.000	Rp 1.527.000	Rp 1.563.082
HPP	Rp 11.186.000	Rp 11.219.000	Rp 11.182.918
Laba Kotor	Rp 4.472.300	Rp 4.439.050	Rp 4.475.302

Sumber: Koperasi Karyawan Melati tahun 2022, diolah.

Berdasarkan tabel perbandingan diatas hasil perhitungan dengan metode FIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp. 1.560.000,- dengan hasil perhitungan HPP sebesar Rp. 11.186.000,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.472.300,-. Perhitungan dengan metode LIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp. 1.527.000,- dengan hasil perhitungan HPP sebesar Rp. 11.219.000,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.439.050,-. Sedangkan perhitungan dengan metode Average menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp. 1.563.082,- dengan hasil perhitungan HPP sebesar Rp. 11.182.918,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.475.302,-. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan Koperasi Karyawan Melati akan mendapatkan laba yang lebih tinggi jika menggunakan metode Average dalam menghitung nilai persediaan barang dagangnya karena akan menghasilkan HPP yang lebih rendah. Metode Average akan menyederhanakan penghitungan dan pencatatan dan dapat dengan mudah memproses walaupun perusahaan memiliki frekuensi permintaan yang tinggi. Karena jika terjadi penjualan tidak perlu melacak setiap

barang yang dibeli dengan harganya masing-masing, sehingga volume pencatatan dan kemungkinan kesalahan (*human error*) sangat berkurang. Selain itu, perhitungan biaya penjualan pada metode Average akan lebih konsisten dan tidak terlalu berpengaruh oleh perubahan harga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Koperasi Karyawan Melati akan mendapatkan laba tertinggi jika menggunakan metode *Average* (rata-rata) dibandingkan dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) dan *Last In First Out* (LIFO). Hal ini dikarenakan metode *Average* (rata-rata) akan menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah. Pada metode *First In First Out* (FIFO) menghasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp. 11.186.000,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.472.300,-. Metode *Last In First Out* (LIFO) menghasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp. 11.219.000,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.439.050,-. Sedangkan metode *Average* (rata-rata) menghasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp. 11.182.918,- dan laba kotor sebesar Rp. 4.475.302,-. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah akan menghasilkan laba kotor yang tinggi, begitu juga sebaliknya metode yang menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang tinggi akan menghasilkan laba kotor yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. M., Baidlowi, H. I., & Dwihandoko, T. H. (2020). Analisis Perhitungan Persediaan Dengan Metode FIFO , LIFO Dan Average Pada UKM Megah Sandal Mojokerto. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1–14.
- Harti, D. (2011). *Modul Akuntansi 2B*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harrison Jr Walter T., Horngren, C William Thomas, Suwardy T. (2013). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Heizer, Jay and Render Barry. (2015). *Manajemen Operasi Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Hermawan, Sigit. (2008). *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herwin, B. D. (2017). Penerapan Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Menurut Sak Etap Pada Cv. Tjipto Putra Mandiri Indonesia. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol.20 No. 2.
- Jusup, Al. Haryono. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 Edidi 7*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Kartikahadi, H., Sinaga, R., Syamsul, M., & Siregar, S. (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarata: Salemba Empat.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R, Soemarso. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima, jilid I*, Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, D., Subagyo., Arthur. D.L. (2019). Analisis Perhitungan Persediaan Bahan Baku Dengan Metode FIFO dan Average Study Kasus Pada UMKM AAM Putra Kediri. *Cahaya Aktiva Vol. 09 No. 02*. Online: www.cahayasurya.ac.id/jurnal
- Ranita, C., Dedi M., Santi P.H.S. (2019). *Analisis Perhitungan Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode FIFO, LIFO, RAta-Rata Dan Just In Time Pada PT Tamano Indonesia*. 165–174.
- Samryn, L.M. (2012). *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saparius, F., Simatupang, P., & Hidayat, M. (2017). *Analisis Metode Penilaian Persediaan Untuk Mencapai Laba Yang Optimal Pada Perusahaan Osi Electronic Manufacturing*. 11(1), 92–100.
- Sari, D. I. (2018). Analisis Perhitungan Persediaan Dengan Metode Fifo Dan Average Pada PT. Harapan. *Perspektif*, 16(1), 31–38. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/2902/2058>
- Setiadi. (2013). *Konsep dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, T. (2013). *Mahir Akuntansi (Revisi)*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Shavrelia Midu, A. (2019). Analisis Metode Penilaian Persediaan Dengan Menggunakan Metode Average Pada Pt Tirta Investama Airmadidi. <http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/2606>
- Sodikin, Slamet Sugiri. (2017). *Akuntansi Pengantar 2*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Subramanyam, K.R, Wild, John J. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tjahjono, Achmad. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar 2*. Yogyakarta: Ganbika

Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac, Jonathan E.(2016). *Financial and Managerial Accounting*.USA

Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., Kimmel, Paul D. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Analisis Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Pada Prosedur Penerimaan Kas di RSI Ibnu Sina

Putri Yolandari

Universitas Muhammadiyah Riau-Puyol1406@gmail.com

Abstract- *This study aims to analyze the application of accounting information systems and internal controls in accordance with the COSO theory on cash receipt procedures at the Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru. This research is qualitative research with a qualitative descriptive method that uses data collection such as interviews, observation, documentation, and theoretical studies. Based on the research results of the Ibnu Sina Pekanbaru Islamic Hospital, it has implemented an accounting information system for cash receipts procedures and has been carried out quite well, judging by the completeness of the documents that must be fulfilled before carrying out the next transaction and each document must be authorized by the authorized party, the organizational structure is structured with properly and in accordance with job descriptions and accounting records are carried out with an adequate and supportive system. Internal control on cash receipts procedures at RSI Ibnu Sina Pekanbaru has also been quite effective, this can be seen from the evaluation results based on the COSO components, five COSO components have been under control carried out by RSI Ibnu Sina Pekanbaru, namely the control environment component, risk assessment, activity control, information and communication as well as monitoring, although not entirely in accordance with the established criteria.*

Keywords : *Information Systems, cash receipts procedures, internal control.*

1. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan Institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta sarana penunjang lainnya seperti Hemodialisa, Fisioterapi, Labor, Radiologi dan lain sebagainya. Rumah sakit sebagai bagian dari industri perawatan merupakan organisasi yang memiliki lingkungan aktivitas kompleks dan melibatkan berbagai tanggung jawab dalam pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 3 menyebutkan tujuan rumah sakit adalah untuk mempermudah akses masyarakat untuk pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, meningkatkan mutu dan standar rumah sakit dan memberikan kepastian hukum terhadap pasien. Untuk mencapai tujuannya, rumah sakit harus melakukan serangkaian kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

Rumah Sakit memiliki beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang juga berfungsi sebagai sumber pendapatan. Untuk menjalankan kegiatannya Rumah Sakit memerlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya, salah satu sistem yang dibutuhkan adalah sistem informasi akuntansi. Dengan sistem informasi yang memadai diharapkan data yang masuk maupun keluar dapat diproses dengan baik. Dalam sistem penerimaan kas pada Rumah Sakit sangat diperlukan prosedur yang baik, yang kemudian akan disesuaikan dengan kebijakan manajemen Rumah Sakit yang telah ditetapkan. Pendapatan yang dilakukan diluar prosedur yang ditentukan, akan memungkinkan terjadi penyelewengan, sistem informasi akuntansi yang baik juga dapat membantu manajemen dalam mengawasi keuangan rumah sakit.

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terletak di Jl. Melati No. 60, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan

Motto “Melayani masyarakat dengan hati nurani islami”. Rumah Sakit ini berdiri sejak tahun 1980. RSI Ibnu Sina Pekanbaru merupakan rumah sakit dengan mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar islami dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan layanan dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui pengalaman pedoman hidup Islami dalam mengelola amal usaha dan menjadikan rumah sakit sebagai organisasi yang efektif, efisien, kompetitif dan profesional, serta sebagai sarana dakwah. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, harus didukung oleh penyelenggaraan sistem akuntansi yang baik pula.

Peneliti melakukan wawancara pendahuluan pada bagian kasir dengan Ibu Karmila terkait prosedur penerimaan kas. Dalam proses penerimaan kas hal yang sering menjadi permasalahan yaitu pada prosedur penerimaan kas di rawat jalan, dikarenakan prosedur pemulangan pasien rawat jalan sangatlah mudah tidak sesulit prosedur pemulangan pasien rawat inap yang harus mendapatkan surat bebas biaya terlebih dahulu baru diizinkan meninggalkan kawasan rumah sakit. Permasalahan yang terjadi di kasir Rawat Jalan yaitu terdapatnya selisih biaya yang kurang dibayarkan oleh pasien. Hal ini dikarenakan salah satunya seperti, ketika pasien berobat ke Poli Spesialis, dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, namun dokter tidak meresepkan obat. Hal ini hasil si pasien hanya membayar sarana penunjangnya saja sementara tagihan konsul ke dokter spesialisnya tidak dibayar. Alur penerimaan kas pasien rawat jalan yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan penunjang pasien harus membayar sebesar tagihan pemeriksaan penunjangnya, kemudian pada saat setelah selesai dari ruang dokter perawat mengarahkan untuk kembali menuju kasir melakukan pembayaran lagi, jika ada obat, pasien membayar tagihan obat dan konsul dokter namun jika tidak ada obat pasien hanya membayar biaya konsul dokternya saja. Permasalahan disini, setelah dari ruangan dokter pasien tidak kembali ke kasir dahulu sebelum meninggalkan rumah sakit untuk melunasi kewajibannya.

Permasalahan selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan Ibu Delvi Yanti selaku Supervisor Accounting dan bertanya terkait prosedur pembiayaan biaya perobatan pasien umum. Pada wawancara pendahuluan disebutkan rumah sakit islam Ibnu Sina Pekanbaru belum terdapat kebijakan yang tegas mengenai masalah pembayaran biaya perawatan rumah sakit, sehingga terjadi berbagai macam permasalahan antara lain : pembayaran biaya perawatan pasien rawat inap yang belum lunas, masih ada yang meninggalkan BPKB kendaraan bermotor, SIM, KTP, Perhiasan dan lain-lain. Kadang kala barang yang digunakan sebagai jaminan ini tidak sesuai dengan biaya yang harus ditanggung oleh pasien. Bahkan ada barang jaminan ini yang tidak ditebus oleh pemiliknya, sehingga menimbulkan piutang umum tak tertagih.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada prosedur penerimaan kas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru ?
2. Bagaimana kesesuaian dari unsur – unsur Pengendalian Internal COSO terhadap praktik prosedur penerimaan kas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru

Menurut Romney & Steinbart (2018) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Sistem informasi akuntansi merupakan proses, prosedur, dan sistem untuk mengumpulkan data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi dalam catatan yang sesuai, dan memproses data akuntansi terperinci dengan

mengklasifikasikan, meringkas, mengkonsolidasikan, dan memberikan ringkasan data akuntansi kepada pengguna internal dan eksternal. (Turner, Weickgenannt, dan Copeland 2017). Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang menjalankan proses siklus akuntansi dalam menghasilkan informasi bagi para pengguna informasi akuntansi.

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
lingkungan pengendalian adalah komponen pertama dalam COSO. Komponen ini mencakup budaya organisasi, struktur organisasi, dan tata kelola perusahaan. Lingkungan pengendalian yang baik dapat membantu organisasi menciptakan budaya yang mendukung pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa struktur organisasi dan tata kelola perusahaan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
penilaian Risiko merupakan kegiatan dimana manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Komponen ini mencakup identifikasi, analisis, dan penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam organisasi. Penilaian risiko yang baik dapat membantu organisasi mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut.
3. Pengendalian Aktivitas (Control Activities),
Komponen ini mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan dalam organisasi. Aktivitas pengendalian yang baik dapat membantu organisasi mengelola risiko dan memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi.
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication),
Komponen ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang relevan dan akurat dalam organisasi. Informasi dan komunikasi yang baik dapat membantu organisasi membuat keputusan yang tepat dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia untuk semua pihak yang terkait.
5. Pemantauan (Monitoring)
Komponen ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam organisasi. Pemantauan yang baik dapat membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian di mana hasil tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya (Gunawan, 2016). Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang difokuskan pada obyek Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Adapun informan pada penelitian ini yaitu Asisten manajer keuangan, karyawan bagian akunting dan petugas kasir yang ada di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan Observasi, wawancara semi terstruktur dan Dokumentasi

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Di RSI Ibnu Sina Pekanbaru

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru menyatakan bahwa pihak rumah sakit sudah menerapkan sistem informasi

akuntansi pada prosedur penerimaan kas. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru mempunyai sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga non medis. Sistem informasi akuntansi pada prosedur penerimaan kas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru telah terkomputerisasi.

4.2 Prosedur Pemulangan Pasien

Prosedur pemulangan pasien di RSI Ibnu Sina Pekanbaru ada dua yaitu prosedur pemulangan pasien Rawat Jalan dan prosedur pemulangan pasien rawat inap.

A. Prosedur Pemulangan Pasien Rawat Jalan

1. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Dokter segera menyelesaikan kunjungan pada sistem HIS, hal ini dilakukan agar tindakan tersebut akan otomatis masuk pada bill pembayaran pada saat kasir mencetaknya.
Jika pasien diberi resep obat, resep tersebut diserahkan ke bagian apotik.
2. Apotik menyiapkan obat dan menginputkan rincian obat di program HIS.
3. bagian apotik memberikan rincian obat ke pasien untuk dilakukan pembayaran pada bagian kasir.
4. pasien di arahkan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
5. Kasir mencetak rincian biaya yang ada pada program HIS dan membuat kuitansi pembayaran obat sekaligus tindakan di poliklinik sebelumnya.
6. Lembar 1 : untuk pasien sebagai bukti pembayaran
Lembar 2 : untuk kasir sebagai arsip yang akan diserahkan ke bagian akunting.
7. Pasien menunjukkan bukti pembayaran obat ke bagian apotik, bagian apotik kemudian menyerahkan obat ke pasien.

B. Prosedur Pemulangan Pasien Rawat Inap

Semua pasien yang sudah dinyatakan pulang harus mengacu pada prosedur. Berdasarkan surat kebijakan Direktur No. 001/SPO-KEP/02/1437 H tentang Menyiapkan Pasien Pulang Rawat Inap, kebijakan ini bertujuan sebagai pedoman atau acuan penerapan langkah langkah melakukan persiapan pasien pulang. Prosedur pemulangan pasien Rawat Inap yaitu :

- a. Dokter memberitahu pasien atau keluarga bahwa diperbolehkan pulang
- b. Perawat memberitahu pasien atau keluarga untuk menunggu proses pemulangan kurang lebih $\frac{1}{2}$ -1 jam
- c. Dokter melengkapi catatan di file termasuk resume medis, resep obat yang akan dibawa pulang dan surat – surat keterangan lain yang diperlukan dirumah.
- d. Perawat melengkapi catatan asuhan keperawatan dan isi form persiapan pasien pulang lalu file disusun sesuai standar Rekam Medis
- e. Bila tidak ada pengembalian atau penambahan resep pulang, perawat cukup memberitahu petugas apotik melalui telepon dan file dapat diantar ke kasir untuk segera di proses.
- f. Bila ada pengembalian obat atau alkes dan penambahan resep pulang, maka petugas ruangan mengantar obat atau alkes ke apotik dan mengantar file ke kasir.
- g. Kasir mencetak billing dari Sistem Rumah Sakit (HIS) dan mencocokkan data dengan file yang diantarkan oleh petugas ruangan.
- h. Jika informasi dari kasir sudah diterima, maka perawat memberitahu pasien atau keluarga untuk dapat menyelesaikan administrasinya dan mengingatkan kartu tunggu untuk diserahkan langsung ke kasir.
- i. Keluarga pasien membayar sesuai dengan total tagihan yang ada di billing, kasir akan mencetak billing pasien yang sudah dibubuhi tanda tangan petugas kasir dan keluarga pasien 2 rangkap (rangkap pertama untuk keluarga pasien dan rangkap kedua sebagai arsip yang akan dinaikkan ke bagian accounting) dan membuat kwitansi pembayaran.

- j. Kasir menyerahkan surat bebas biaya untuk di perlihatkan di ruangan dan security
 - k. Setelah ada bukti pelunasan atau penyelesaian administrasi diserahkan, maka perawat ruangan mencocokkan daftar obat pulang yang diserahkan apotik dengan form rencana pasien pulang serta meminta paraf dan tanda tangan pasien atau keluarga.
 - l. Keluarga pasien menyerahkan surat bebas biaya di post security dan pasien diantar menuju tempat penjemputan lalu mengucapkan salam dan terima kasih.
- Sesuai dengan Teori Mulyadi (2011) "Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan. Fungsi - fungsi yang terkait dalam penerimaan kas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dalam menyusun beberapa prosedur – prosedurnya yaitu :
- 1. Fungsi Operasi
Fungsi operasi dijalankan oleh Bagian pelayanan medis bertugas memeriksa dan memberikan pelayanan terhadap penyakit yang diderita Pasien.
 - 2. Fungsi Pencatatan
Fungsi Pencatatan dijalankan oleh Bagian catatan medik dan bagian akuntansi. Bagian Catatan medik bertugas mencatat rincian- rincian biaya atas tindakan yang diberikan. Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas kedalam jurnal penerimaan kas serta membuat laporan keuangan. Fungsi kas di jalankan oleh bagian kasir, untuk rawat jalan bagian kasir yang bertugas yaitu kasir Poliklinik Spesialis dan kasir UGD sedangkan untuk rawat inap bagian kasir yang bertugas yaitu kasir rawat inap. Fungsi kas bertugas menerima kas dari pasien atau keluarganya dan membuat laporan penjualan harian.
 - 3. Fungsi Penagihan
Fungsi ini dijalankan oleh bagian penagihan rumah sakit, apabila ada pasien yang kurang membayarkan tagihannya, bagian ini yang akan follow up tagihan tersebut kepada pasien atau keluarganya.
- B. Dokumen – dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina pekanbaru :
- 1. Dokumen rincian biaya rawat jalan dan rawat inap yang memuat semua pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Rumah Sakit kepada pasien berupa billing pasien.
 - 2. Kuitansi pembayaran
 - 3. Bukti pembayaran (jika pasien melakukan pembayaran non tunai)
 - 4. Surat Pernyataan Hutang (Jika pasien tidak melunasi biaya perobatan sebelum meninggalkan rumah sakit)
 - 4. Bukti Setor Bank
Dibuat satu kali dalam seminggu sebagai bukti fungsi kas melakukan penyetoran kas ke Bank perusahaan. Dua (2) lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi.
- C. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas pasien di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru :
- 1. Jurnal Penerimaan Kas pasien rawat jalan
 - 2. Jurnal Penerimaan Kas pasien rawat inap
 - 3. Jurnal Penerimaan Bank

4.3 Evaluasi Pengendalian Internal Penerimaan Kas Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru Berdasarkan Komponen Coso

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen lingkungan pengendalian yang ada pada RSI Islam Ibnu Sina sudah berjalan dengan baik. Sebagian besar kondisi lingkungan pengendalian telah sesuai dengan kriteria yang ada. Penanaman integritas dan nilai etika kepada para staf dilakukan dengan memberikan aturan kepegawaian secara tertulis dan memberikan hukuman kepada staf yang melanggar nilai etika terutama etika kejujuran sehingga hal ini sudah sesuai dengan kriteria integritas dan nilai etika yang baik.

Setiap staf yang bekerja akan dibekali dengan daftar uraian tugas yang disertai dengan target-targetnya. Target tersebut digunakan Manajemen sebagai tolak ukur dalam menilai apakah staf tersebut telah bekerja dengan kompeten atau tidak sehingga hal ini juga telah sesuai dengan kriteria komitmen terhadap kompetensi yang baik. RSI Ibnu Sina Pekanbaru memberikan beban kerja sesuai dengan jabatan dan tunjangan yang diberikannya sehingga tidak ada karyawan yang diberikan beban kerja terlalu banyak. Tidak ada bonus untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik sehingga hal itu tidak memenuhi kriteria dimana seharusnya diterapkan manajemen berbasis kinerja. Pemisahan tugas dalam aktivitas penerimaan kas dilakukan dengan memisahkan antara fungsi kasir dan pembukuan, Pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas sudah diterapkan oleh RSI Ibnu Sina ini dimana setiap staf telah diberikan uraian tugas yang lengkap dengan targetnya. Hal ini sesuai dengan kriteria pemberian wewenang dan tanggungjawab yang baik. Dalam sub komponen kebijakan dan praktik sumber daya manusia menjelaskan bahwa sebaiknya organisasi menetapkan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Hal itu telah tertuang di buku peraturan perusahaan dimana RSI Ibnu Sina akan melakukan rekrutmen jika terdapat kekurangan staf dan akan menghentikan karyawannya jika mereka telah berumur 55 tahun ataupun melakukan kesalahan yang dinilai oleh pengawas adalah kesalahan yang fatal. Selain itu dalam pengelolaan SDM yang baik mengharuskan latar belakang calon karyawan adalah prioritas, hal ini juga telah dipenuhi oleh RSI Ibnu Sina dalam mencari staf yang baru dimana calon staf harus beragama Islam dan sebisa mungkin dari latar belakang pendidikan yang sesuai dikarenakan berdasarkan pengalaman jika merekrut staf yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya maka staf tersebut akan mengalami kesulitan dalam aktivitas pekerjaannya. Secara umum lingkungan pengendalian yang ada pada RSI Ibnu Sina Pekanbaru telah sesuai dengan komponen lingkungan pengendalian COSO, meskipun ada satu hal yang tidak sesuai pada rumah sakit ini, yaitu tidak adanya reward yang diberikan oleh rumah sakit kepada karyawan yang kinerjanya baik atau kategori lainnya, hal ini tidak sesuai dengan filosofi dan gaya operasi manajemen.

2. Penilaian Risiko

Dalam sebuah organisasi seharusnya dilakukan penilaian risiko sebagai salah satu langkah antisipatif organisasi agar terhindar dari kesalahan ataupun kecurangan yang bisa merugikan organisasi tersebut. Secara lebih rinci, dalam komponen penilaian risiko ini mengatur organisasi agar mempunyai struktur pengendalian untuk menilai risiko, menetapkan kriteria klasifikasi risiko rendah menengah atau tinggi, memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan. RSI Ibnu Sina Pekanbaru memiliki struktur pengendalian risiko yaitu dengan dibentuknya Komite Mutu yang didalamnya terdapat Sub Manajemen risiko untuk menilai dan mengevaluasi risiko yang ada di setiap unit

3. Aktivitas Pengendalian

Prosedur penerimaan kas pada RSI Ibnu Sina Pekanbaru dimulai ketika ada pasien yang berobat baik itu melalui UGD maupun Poliklinik. Jika pasien itu merupakan pasien

umum, maka ketika melakukan pembayaran bagian kasir akan mencetak billing pasien dan dibubuhi tanda tangan serta cap lunas. Billing pasien tersebut di cetak dua rangkap, rangkap pertama untuk pasien dan rangkap ke dua untuk arsip yang akan dinaikkan ke bagian accounting. Billing pasien diberi nomor urut yang telah dicetak lebih dahulu, agar setiap dokumen dapat dipertanggung jawabkan.

Setelahnya, kas yang diterima akan dicatat kedalam laporan penerimaan kas harian dan akan disetorkan ke Bank satu kali dalam satu minggu, sebelum disetorkan kas tersebut disimpan didalam brankas Rumah Sakit. Sehingga hal tersebut sesuai dengan kriteria pelaporan yang baik dimana seharusnya laporan penerimaan kas dibuat secara harian dan juga telah sesuai dengan kriteria penyetoran kas yang baik dimana seharusnya kas disetor ke bank dengan segera. Bagian Accounting RSI Ibnu Sina Pekanbaru melakukan rekonsiliasi terhadap catatan – catatan kas pada akhir periode akuntansi. Sehingga hal tersebut memenuhi kriteria rekonsiliasi yang baik dimana dilakukan pemeriksaan independen terhadap rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah, perbandingan jumlah aktual dengan yang dicatat, pembukuan berpasangan, jumlah total batch, dan peninjauan independen.

4. Informasi Dan Komunikasi

RSI Ibnu Sina Pekanbaru telah membuat *flowchart* sebagai pedoman untuk prosedur penerimaan kas, hal ini memudahkan pihak terkait dalam proses penerimaan kas sehingga hal ini telah sesuai dengan kriteria informasi yang baik dimana seharusnya terdapat informasi yang baku dan tertulis dengan jelas yang digunakan sebagai pedoman. Kriteria komunikasi yang baik juga telah dipenuhi oleh RSI Ibnu Sina Pekanbaru dengan rutin mengeluarkan laporan penerimaan kas secara harian dan laporan arus kas setiap bulannya sebagai salah satu media komunikasi kepada pihak yang membutuhkan informasi kas RSI Ibnu Sina.

5. Pemantauan

Pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit serta memiliki tugas untuk memantau kinerja setiap lini yang ada di RSI Ibnu Sina Pekanbaru, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan kriteria pengawasan yang baik dimana pemantauan dilakukan oleh personil yang independen. Dilakukannya audit ataupun perhitungan saldo kas secara mendadak oleh unit independen. Tidak sesuai, karena perhitungan saldo kas dilakukan oleh kasir yang bertugas pada saat itu dan diketahui oleh kepala bagian, sehingga hal itu tidak sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang baik dimana seharusnya perhitungan kas dilakukan mendadak oleh unit yang independen.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada prosedur penerimaan kas di RSI Ibnu Sina Pekanbaru sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasi, fungsi kas dan fungsi pencatatan sehingga tidak ada yang merangkap pekerjaan tersebut.
 - b. Penggunaan formulir pada RSI Ibnu Sina Pekanbaru telah dirancang dengan baik sesuai dengan data informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan prosedur penerimaan kas.
 - c. Pencatatan jurnal sudah didukung dengan bukti pendukung seperti Billing dan kwitansi.

- d. Prosedur penerimaan kas telah dilaksanakan dengan baik dimana bukti-bukti penerimaan kas dilaporkan dan disimpan oleh yang berwenang selain itu pencatatan dimulai dari jurnal, buku besar sampai laporan keuangan. Namun masih ada terdapat beberapa kendala pada sistem HIS (*Hospital Information System*) yaitu kurangnya pembatasan akses untuk unit-unit yang terkait, sehingga unit-unit yang terkait dapat merubah billing setelah pelayanan selesai diberikan.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian internal pada prosedur penerimaan kas di RSI Ibnu Sina Pekanbaru sudah cukup efektif. Jika di evaluasi berdasarkan komponen – komponen pengendalian COSO maka lima komponen COSO telah ada dalam pengendalian yang dilakukan oleh RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta pemantauan telah ada meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Seperti tidak adanya reward yang diberikan Manajemen kepada staf yang kinerjanya baik, hal ini tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada di lingkungan pengendalian yaitu adanya penerapan manajemen berbasis kinerja. Perhitungan saldo kas belum dilakukan secara mendadak oleh unit intern, hal ini tidak sesuai dengan salah satu kriteria pada pemantauan, yaitu Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas dihitung secara periodik dan mendadak oleh unit independen yang bertugas sebagai pengawas.
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah metode lain selain wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat meneliti sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan jangkauan lebih luas tidak hanya pada pelayanan pasien umum di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyanto (2016). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelayar.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ardiansyah, Mochammad Fariz Rully, M.Wimbo Wiyono, Deni Juliasari. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas RSUD Dr. Haryoto Lumajang." *Jurnal Of Accounting* 03, no. 3 (2021):18-22.
- Arif, Firdaus Syaiful. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2020.
- Azhar, S. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary. COSO.
- Elisabeth, D. M. (2019). Kajian Terhadap Peranan Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Audit Komputerisasi (Studi Kajian Teoritis). *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 41.
- Effendi, Rizal. (2013). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fees, Reeve, Warren. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Fiqqiya, N., Irwansyah, & Kurniawan, I. S. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah. *FEB Unmul*, 17(1), 80–86.

Perbandingan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Saat Wabah Covid-19

Ulfah Arima RM¹, Eka Rosalina², Rini Frima³, Wiwik Andriani⁴

¹Politeknik Negeri Padang– ulfahrm08@gmail.com

²Politeknik Negeri Padang– ekarosalinapnp5@gmail.com

³Politeknik Negeri Padang– rinifrima1984@gmail.com

⁴Politeknik Negeri Padang– wiwikandriani@pnp.ac.id

Abstrak— *This study compares the provincial government budgets' actualization in Indonesia before and after the COVID-19 pandemic. In this study, the years 2018–2019 are referred to as the years prior to the COVID–19 pandemic and 2020–2021 as the years of the pandemic. According to the provisions of the Joint Decree of the Ministers of Home Affairs and Finance Number 177/PMK.07/2020, the realization of the provincial government budget is examined from routine spending and capital expenditure. The population for this study is the Indonesian Provincial Government, and the sampling strategy utilized is a saturated sample, which uses the complete population as a sample. As a result, the sample contains 136 data points from 34 provinces that are registered with the BPK in Indonesia.*

Keywords — *Budget realization, capital expenditure, and routine expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan program desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pengalihan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah mandiri berdasarkan otonomi daerah. Perlunya pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk sistem keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mengutamakan pelaksanaan prinsip desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan anggaran yang merinci rencana keuangan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut Pahlevi & Setiawan (2017), penyerapan anggaran merupakan ukuran yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menetapkan anggaran sebagaimana yang dimaksud atau direncanakan.

Penyerapan atau realisasi merupakan aktivitas pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter dan disusun berdasarkan kategori tertentu untuk satu periode. Realisasi menjadi gambaran yang ringkas dan menyeluruh terkait pencapaian aktual dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disandingkan dengan rencana kerja atau anggaran yang telah dibuat sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang merinci realisasi anggaran, dapat dilihat secara terbuka. Laporan realisasi anggaran merinci sumber daya yang dikelola pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, termasuk sumber, alokasi, dan penggunaannya (Lumaku & Nindiasari, 2023). Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang membandingkan perkiraan anggaran dengan realisasi belanja pada tahun anggaran tertentu, mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Astiti & Mimba (2016) berpendapat bahwa belanja rutin menjadi faktor realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Belanja rutin atau belanja operasional merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah, namun tidak dapat meningkatkan jumlah aset pemerintah daerah. Umumnya, proporsi belanja rutin mendominasi belanja daerah yaitu 60% hingga 90% (Sriningsih et al.,

2021). Menurut Rakhman (2019), belanja modal menjadi faktor realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. *Capital expenditure* merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya, memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun akuntansi. Proporsi belanja modal dari belanja daerah berkisar antara 20%-40%.

Tahun 2020, Indonesia ditimpa wabah penyakit yang disebut dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Corona virus berasal dari Kota Wuhan, Cina dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Corona memasuki Indonesia pada awal Maret 2020 yaitu ketika dua orang warga Indonesia tertular corona virus dari warga Jepang. Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar terutama pada realisasi anggaran pemerintah di Indonesia. Hal itu terlihat dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Keuangan Nomor 177/PMK.07/2020. Isinya adalah penyesuaian atau realokasi dan memfokuskan kembali pada tiga belanja daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti pembelian peralatan kesehatan dan pemberian bantuan sosial bagi korban Covid-19.

Anggaran belanja modal sebelum dan selama pandemi 2015–2019 dan 2020–21 mengalami perubahan yang signifikan, menurut Arifin (2022). Berbeda dengan temuan Isti'nah & Fatimah (2023) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap realisasi anggaran, terdapat perubahan sejak pandemi Covid-19 dimulai, seperti penurunan kinerja pemerintah. Berdasarkan justifikasi di atas, menarik bagi para akademisi untuk melakukan penelitian dengan topik Perbandingan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Teori keagenan merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama. Jensen & Meckling (1976) dan Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori agensi didasarkan pada tiga asumsi, yakni asumsi sifat manusia yaitu sifat manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadi, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi yaitu asimetri informasi yang diperoleh antara agen dengan prinsipal, agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal sehingga prinsipal kesulitan dalam mengawasi agen yang bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jensen & Meckling (1976) juga menyatakan bahwa teori agensi ini terjadi dalam sektor publik yang mana agen sebagai pemerintah daerah dan prinsipal sebagai masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai agen menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengatur sumber daya yang dilihat dari realisasi laporan keuangan pemerintah yang disediakan untuk masyarakat sebagai prinsipal, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntabilitasnya sehingga bisa mengurangi ketimpangan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat (Putri, 2017). Hal ini didukung oleh asumsi teori keagenan bahwa agen akan bertindak hati-hati saat menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko dan upaya. Hal ini akan mengakibatkan tertundanya implementasi anggaran dan pelaksanaan strategi di bawah standar, terutama ketika risiko yang lebih tinggi tidak berhubungan dengan peningkatan manfaat, dapat dilihat pada lembaga pemerintah, seperti yang biasanya terjadi (Rakhman, 2019).

Akuntabilitas pemerintah atas pencapaian kinerja keuangan diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Setiap tahunnya, pemerintah bertugas mensosialisasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2019). Dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang menginginkan informasi, masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan disusun dengan tujuan yang luas, artinya dibuat secara sederhana dan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap orang, meskipun tidak semua pemangku kepentingan memahami laporan tersebut secara utuh. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan diperlukan untuk membantu mereka yang kesulitan memahami laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk membantu pemahaman laporan keuangan, interpretasi data numeriknya, evaluasinya, dan penerapan data keuangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, anggaran merupakan komponen penting dari kegiatan

rutin yang digunakan sebagai alat manajemen, akuntabilitas, dan kebijakan ekonomi. Menurut Halim (2012), anggaran adalah suatu rencana kerja formal dan kuantitatif yang memuat usulan pengeluaran yang telah diperkirakan untuk jangka waktu tertentu (Halim, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas 1) pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain. 2) Belanja daerah untuk hal-hal seperti belanja operasional atau rutin, belanja modal, belanja transfer, dan belanja diskresi 3) pembiayaan seperti pembentukan dan pencairan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman dan lainnya.

Menurut PMK Nomor 231/PMK.07/2020, belanja rutin merupakan pengeluaran dari anggaran untuk mendukung fungsi rutin pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi seluruh periode anggaran. Belanja rutin yang meliputi pengeluaran gaji, honorarium pegawai, dan bentuk kompensasi lainnya yang sering kali tidak memberikan hasil nyata, merupakan belanja yang dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi dipecah menjadi beberapa kategori, antara lain pegawai, produk dan jasa, bunga, hibah, subsidi, dan bantuan sosial.

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013, *capital expenditure* adalah pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk perolehan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih lama dari satu tahun buku dan bernilai lebih dari nilai kapitalisasi minimum. Pembelian tanah, pembelian peralatan dan mesin, pembelian jalan, irigasi, dan jaringan, serta pembelian aset lainnya, semuanya dianggap sebagai belanja modal. Untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal dalam hal pembangunan, jalan, atau jaringan yang jauh dari perkotaan, belanja modal diupayakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan wilayah secara adil hingga ke pelosok.

Pengembangan Hipotesis

Perbedaan Belanja Rutin Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Lembaga daerah melakukan pengeluaran berupa belanja rutin guna menjaga kelancaran operasional pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah secara efektif dan efisien. Dana yang dialokasikan untuk belanja rutin digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan rutin pemerintah sekaligus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan institusi lainnya. Astiti & Mimba (2016) menyatakan bahwa belanja operasional tidak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah lebih fokus mendistribusikan belanja rutin pada gaji pegawai sehingga disebut tidak tepat sasaran karena tidak dapat dinikmati secara sinambung oleh masyarakat banyak. Separuh pengeluaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi, sehingga berakibat pada kurangnya alokasi belanja modal yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana prasarana untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalihkan komposisi belanja daerah yang mayoritas oleh belanja operasi yang kurang profitabel, namun mengalokasikannya pada pengadaan pelayanan publik di berbagai sektor (Fatimah et al., 2019). Penegasan berikut dapat dibuat berdasarkan penjelasan sebelumnya:

H1: Terdapat Perbedaan Pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Belanja Rutin Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

Perbedaan Belanja Modal Pemerintah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menambah aset tetap atau investasi jangka panjang yang diperlukan bisa memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama. Menurut Retnowati (2016), *capital expenditure (capex)* berpengaruh signifikan pada pelaksanaan anggaran yang berarti rasio efisiensi yang tinggi dan belanja modal yang rendah menunjukkan bahwa anggaran terealisasi dengan baik. Sejalan dengan hasil Rakhman (2019), bahwa belanja modal terhadap implementasi anggaran berhubungan negatif, semakin tinggi rasio belanja modal maka semakin rendah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan program yang terkait dengan belanja modal membutuhkan upaya yang lebih dan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan program terkait dengan kegiatan menggunakan operasional anggaran. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H2: Terdapat Perbedaan Pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang ditinjau dari Belanja Modal Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian komparatif dengan menggunakan metodologi kuantitatif adalah jenis penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016), penelitian komparatif membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih dalam dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada dua waktu yang berbeda. Metode kuantitatif lebih menekankan pada pembuktian hipotesis. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur suatu konsep atau variabel sedemikian rupa sehingga dapat dipahami secara statistik. Tujuan dari kajian komparatif ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pada Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Indonesia sebelum dan selama wabah covid-19, yang ditinjau dari belanja rutin dan belanja modal.

Menurut Sugiyono (2016), istilah “populasi” mengacu pada wilayah generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan karakteristik tertentu yang dipilih peneliti untuk diselidiki dan selanjutnya diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang membentuk pemerintahan provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih guna dijadikan representasi dari keutuhan populasi dalam sebuah penelitian. Sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi agar kesimpulan yang didapatkan juga berlaku bagi populasi (Chandarin, 2017). Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh sampel yang lengkap sebesar 136 data yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2021.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau sudah ada sebelumnya untuk tujuan lain. Studi ini menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah Provinsi Indonesia yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah. Data didapat dari situs resmi *website* BPK yaitu <https://www.bpk.go.id/ihrs> melalui layanan e-PPID pusat.

Indikator dalam penelitian ini adalah belanja rutin dan belanja modal, merupakan tolak ukur untuk melihat realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Belanja rutin diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu perbandingan dari total realisasi belanja operasi dan pengeluaran aktual belanja daerah. Setiap pengguna atau pihak yang berkepentingan akan diberitahu mengenai laporan alokasi dana belanja daerah untuk belanja operasional.

Tabel 2.1
Rumus Belanja Rutin

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Pengeluaran Aktual Pemda}}$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Belanja modal juga diukur menggunakan rasio keserasian belanja yaitu perbandingan dari total aktual belanja modal dan pengeluaran belanja daerah. Data belanja modal dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.

Tabel 2.2
Rumus Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pengeluaran Aktual Pemda}}$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji beda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data yang menjelaskan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dikenal dengan istilah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum faktor-faktor penelitian dan menerjemahkan data ke dalam gaya tabel yang mudah diinterpretasikan.

Prosedur statistik yang disebut uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak (Kurniawati & Sucipto, 2023). Karena hasil tes ini digunakan untuk melakukan tes lainnya, maka tes tersebut harus dilakukan. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* diterapkan dalam penyelidikan ini. Uji normalitas didasarkan pada asumsi

data berdistribusi normal jika hasil signifikan lebih besar dari 0.05. Data dikatakan tidak normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0.05.

Uji beda digunakan untuk menguji hipotesis setelah menentukan apakah nilai-nilai tersebut terdistribusi secara teratur atau tidak. Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau kondisi atau lebih adalah uji beda. Uji perbedaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok atau kondisi yang dibandingkan pada variabel yang diteliti. Gunakan uji statistik parametrik, seperti uji t sampel berpasangan, jika data berdistribusi normal. Jika distribusinya tidak normal, gunakan uji statistik non-parametrik, seperti uji bertanda *Wilcoxon*. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran sebelum dan pada saat pengujian. Proses pengambilan keputusan ini sama untuk pengujian parametrik dan non-parametrik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Studi ini menggunakan variabel realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia yang dianalisis melalui 2 (dua) pengukuran yaitu belanja rutin dan belanja modal. Untuk melakukan pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini dibantu dengan aplikasi *SPSS versi 25*. Berikut ini merupakan temuan analisis deskriptif dari setiap pengukuran:

Tabel 3.1
Output Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Periode	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Belanja Rutin	Sebelum Pandemi	68	0.394	0.900	0.66328	0.092077
	Setelah Pandemi	68	0.343	0.875	0.66818	0.087089
Belanja Modal	Sebelum Pandemi	68	0.069	0.289	0.16928	0.053237
	Setelah Pandemi	68	0.039	0.303	0.14372	0.060996
Valid N (listwise)		68				

Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai minimal sebelum terjadinya wabah Covid-19 adalah 0.394 atau 39% pada Provinsi Papua Barat dan nilai maksimum sebesar 90% pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai *mean* sebesar 0.66328 dan nilai baku deviasi 0.092077, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memperkirakan dengan akurat kebutuhan belanja rutin dan mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional secara konsisten.

Jika dilihat saat covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Papua barat yaitu sebesar 0.343 atau 34% dan nilai maksimum berada pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 0.875 atau 88%. Sedangkan nilai rata-rata sebanyak 0.66818 dan nilai simpangan baku sebesar 0.087089. Ini menyiratkan bahwa belanja rutin pemerintah daerah cenderung stabil dari waktu ke waktu dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Nilai rata-rata belanja rutin mengalami sedikit kenaikan saat covid-19, Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan redistribusi dana honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat untuk bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan miskin terdampak COVID-19.

Sebelum terjadinya wabah Covid-19, variabel belanja modal memiliki nilai minimum di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,069 atau 7% dan nilai maksimum di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,289 atau 29%. Dengan standar deviasi sebesar 0,053237 maka nilai mean (rata-rata) sebesar 0.16928. Bila angka rata-ratanya melebihi nilai simpangan baku,

berarti demikian adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan daerah.

Dilihat saat pandemi covid-19, nilai minimum masih berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.039 atau 4% dan nilai maksimum sebesar 0.303 atau 30% pada Provinsi Papua Barat. Nilai *mean* berjumlah 0.14372 dengan simpangan baku 0.060996. Ini menunjukkan belanja modal cenderung mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, disebabkan oleh perubahan kebijakan pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nilai rata-rata mengalami penurunan saat wabah covid-19, ini menyatakan adanya pembatasan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respon terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi. Pemerintah daerah menunda proyek dan investasi selama pandemi ini karena mereka lebih mementingkan pengalokasian sumber daya untuk belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Tabel 3.2
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Periode	N	Assyp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Belanja Rutin	Sebelum Pandemi	68	0.200	0.05	Normal
	Setelah Pandemi	68	0.001	0.05	Tidak Normal
Belanja Modal	Sebelum Pandemi	68	0.200	0.05	Normal
	Setelah Pandemi	68	0.051	0.05	Normal

Sumber: Data Diolah SPSS 25, 2023

Variabel belanja modal mempunyai distribusi normal baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19 sesuai temuan uji normalitas pada tabel 3.2 di atas, namun variabel belanja rutin tidak. Uji peringkat bertanda Wilcoxon dan uji t sampel berpasangan kemudian digunakan untuk melakukan uji hipotesis karena data mempunyai distribusi abnormal dan normal.

Uji Hipotesis

Data ini akan diuji untuk melihat apakah ada kesenjangan yang mencolok antara anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 dibandingkan dengan keadaan saat pandemi covid-19.

Tabel 3.3
Hasil SPSS Wilcoxon Test Belanja Rutin

Variabel	Z	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Hasil
Belanja Rutin Sebelum dan Saat	-1.278	0.201	0.05	Tidak Terdapat Perbedaan

Sumber: data diolah penulis, 2023

Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.201, sesuai tabel 3.3 diatas. Mengingat nilai 0,201 lebih tinggi dari 0.05 ($0.201 > 0.05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan berarti pada belanja operasi pemerintah provinsi di Indonesia sebelum dan selama wabah Covid-19. Sebelum adanya wabah Covid-19, belanja rutin memiliki nilai rata-rata sebesar 0.6632. Selama pandemi mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.66818. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat yang rata-rata belanja rutin pada tahun 2019 sebesar 70% dan tahun 2020 sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran pemerintah daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari belanja rutin.

Peningkatan nilai rata-rata belanja rutin yang tidak terlalu tinggi selama wabah Covid-19 menyatakan bahwa pemerintah tidak jauh berbeda dalam merealisasikan anggaran sebelum ataupun saat pandemi covid-19. Belanja rutin sebelum dan saat pandemi memiliki kenaikan sebesar 0.5%. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang berisi realokasi anggaran belanja rutin yaitu belanja pegawai dan belanja jasa yang digunakan untuk memenuhi keperluan semasa pandemi yaitu pembelian alat kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19.

Temuan penelitian ini mempunyai konsekuensi terhadap bagaimana pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan dengan penerimaan anggaran guna menghindari defisit dan masalah keuangan lainnya. Belanja rutin memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja rutin digunakan dengan efisien dan efektif. Pengelolaan yang baik akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari pemerintah terkait penggunaan belanja rutin

Tabel 3.4
Hasil SPSS Uji t Belanja Modal

Variabel	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Hasil
Belanja Modal Sebelum dan Saat	0.000	0.05	Terdapat Perbedaan

Sumber: data diolah penulis, 2023

Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,000 sesuai tabel 3.4 diatas. Karena 0.000 kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal sebelum dan selama pandemi Covid-19 berbeda secara signifikan. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 0.16928, sedangkan selama pandemi memiliki nilai rata-rata sebesar 0.14372. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan realisasi anggaran pemerintah sebelum dan selama wabah covid-19 sebesar 72,53% disebabkan adanya *refocusing* APBD Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19. Namun belanja modal mengalami kenaikan, salah satunya pada daerah Sumatera Selatan, yang mana sebelum pandemi, realisasi belanja modal sebesar 0,167 dan saat pandemi mengalami kenaikan menjadi 0.175.

Penyusutan nilai *mean* rasio belanja modal masa wabah Covid-19 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja selain belanja rutin dan belanja modal yang tidak dibahas pada studi ini untuk menangani pandemi Covid-19 seperti alat kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Hal ini menyebabkan penurunan relatif dalam alokasi belanja modal. Sejalan dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang berisi realokasi anggaran belanja rutin dan belanja modal sebesar 50% untuk penanganan wabah Covid-19.

Temuan penelitian ini berdampak pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola anggarannya secara lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan belanja belanja modal sesuai kebutuhan. Realisasi belanja modal yang tepat dan baik juga berdampak pada peningkatan infrastruktur sehingga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini dapat dibuat berdasarkan pembahasan di atas:

1. Hasil pengujian statistik, diperoleh bahwa belanja rutin tidak adanya perbedaan sebelum dan selama wabah Covid-19. Pemerintah tidak berbeda dalam mengalokasikan belanja rutin baik sebelum wabah maupun selama wabah Covid-19.
2. Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa adanya perbedaan belanja modal sebelum dan saat wabah Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya realokasi belanja modal untuk penanganan wabah Covid-19 sebesar 50%. Dengan demikian, realisasi belanja modal berkurang pada saat wabah Covid-19.

Keterbatasan dalam studi ini adalah peneliti tidak memasukkan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 dikarenakan belum dipublikasikan oleh BPK. Keterbatasan lainnya adalah peneliti mengukur ukuran pemerintah hanya menggunakan *logaritma natural* total aset. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya memasukkan variabel seperti pendapatan daerah, belanja tak terduga, kondisi ekonomi dan variabel lainnya yang relevan dengan realisasi anggaran pemerintah provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Sebelum Dan Saat Pandemi Tahun 2015-2021. *In Braz Dent J. (Vol. 33, Issue 1)*.
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Chandarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003> Online:1 Jan 1989
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Pertama)*. Salemba Empat. [http://eprints.umm.ac.id/45936/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/45936/3/BAB%20II.pdf)
- Isti'annah, K. S., & Fatimah, A. N. (2023). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(2), 311–321. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i2.388>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.4159/9780674274051-006](https://doi.org/10.4159/9780674274051-006)
- Kurniawati, R. O., & Sucipto, A. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 861–868. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2730>
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran dinas kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2017-2021. *Proceeding of National Conference on ...*, 5, 207–211. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art24>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keem).
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 571–582. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7074>
- Putri, Y. M. (2017). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–17. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2767>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)*. 147(March), 11–40.
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Kompetitif*, 7(1), 132–144.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Evaluation of Factors that Influence SKPD Budget Absorption

Ramadhio Satria¹, Armel Yentifa^{2*}, Muhammad Rafi³

Politeknik Negeri Padang -¹satria@gmail.com

-²armel@pnp.ac.id

-³rfai@gmail.com

Abstrak— *This research analyzes the factors influencing budget absorption in the Solok City SKPD. The approach used is quantitative with a survey method through distributing questionnaires. Data processing in this research used SPSS V.26 from the primary data of 100 respondents. The results of this research, namely the results of the F test, show that budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment simultaneously significantly affect budget absorption. Based on the results of the partial test using the t-test, budget planning significantly affects budget absorption. In contrast, the quality of human resources, budget execution, and organizational commitment are independent of budget absorption in SKPD Kota Solok.*

Keywords — *Budget Planning, SKPD, Budget Absorption*

1. INTRODUCTION

A budget is a written plan for all activities of an organization expressed quantitatively for a certain period and expressed in units of money or goods/services. According to Mardiasmo (2021), the budget has a function as a planning tool and as a control tool, as a budget planning tool shows the targets that the government must achieve, while a budget control tool shows the allocation of public funding sources that the legislature has approved for spending.

The budget function is control, namely controlling all allocations of existing funding sources. The source of funds in question is a source of funds that has been approved by the legislative body for expenditure or what is better known as the regional financing and expenditure budget (APBD). APBD is a plan for regional government revenues and expenditures for one budget year as determined by regional regulations. With the APBD, regional governments can increase independence in managing regional development.

Budget absorption in the country is always a problem that occurs every year. Various efforts have been made to optimize state budget absorption, but the facts show that significant changes have yet to be found regarding budget absorption. Optimal budget absorption and initial planning will cause economic activities to run as they should, but if there is a delay, it will economically cause state losses. The problem of delays and uncertainty in budget absorption will cause large amounts of idle cash in government accounts. Managing this excess cash will create risks if this cannot be handled.

As the era of regional autonomy has progressed until now, an interesting phenomenon has occurred, namely the slow absorption of the APBD budget at the beginning of the fiscal year. So, accelerated absorption of the budget that is still accumulating is often carried out towards the end of the fiscal year. It is not new news that until the end of the year, budget absorption is still one of the stumbling blocks in managing state finances. Such practices are unhealthy budget absorption patterns and indicate poor management of state finances. This late budget absorption needs serious attention from the government, especially for goods and capital expenditures. This spending can improve the quality of life and welfare of the community through increasing consumption value, increasing labor productivity, increasing real prosperity, and realizing macroeconomic stability.

As reported by Bisnis.com, the Governor of West Sumatra, Mahyeldi, was disappointed with the performance of regional apparatus organizations (OPD), which he considered was not optimal when looking at the budget absorption in 2022. Mahyeldi explained that as of November 8, 2022, the 2022 West Sumatra APBD absorption was only around 61.64 percent on average. Even though 2022 only has around 50 days left. He said that the agencies or OPDs whose budget absorption was considered quite good were the West Sumatra Satpol PP, and the lowest were the West Sumatra Maritime Affairs and Fisheries Service and the West Sumatra Provincial Secretariat

Welfare Bureau. The issue of budget absorption has also been touched upon by the Minister of Home Affairs (Mendagri) Tito Karnavian. Even in September 2022, the governor also reminded OPD to intensify the activities carried out so that the budget could be absorbed and indirectly contribute to the impact on the community.

The phenomenon of delays or not maximizing regional government budget absorption, which is still a classic regional government problem, is why researchers are interested in researching the factors influencing budget absorption in SKPD in the Solok City government. This can be input and evaluation for the local government of Solok City to improve budget absorption systems and procedures. The Solok City Government, through the official website of the Solok City Government, released data on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as listed in table 1.1 below:

**Table 1.1 Realization of Solok City Government
Revenue and Expenditure Budget 2020-2022**

No	Periode	Revenue	Expenditure
1	2020	545.244.425.68	494.650.066.51
2	2021	547.429.561.40	566.878.632.38
3	2022	542.249.678.64	577.522.797,90

Source : BPS Sumatera Barat

In 2020, the realization of revenue from the Government of Solok City was IDR 545,244,425.68, with a realized expenditure of IDR 494,650,066.5. Meanwhile, in 2021, the realization of revenue from the Government of Solok City is IDR 547,429,561.40, with the realized expenditure of IDR 566,878,632.38. In 2022, the Solok City Government's realized income will be IDR 542,249,678.64, with actual expenditure amounting to IDR 577,522,797.90. The data shows that there are fluctuations in budget absorption, as seen from the realization of regional revenues and expenditures of the Solok City Government, which is the basis of the phenomena in this study.

Stewardship Theory

According to Keay (2017), Stewardship Theory is the harmonization between capital owners (principles) and capital managers (stewards) in achieving common goals. Implicitly, this theory reflects how accounting builds a construct of leadership patterns and communication relationships between shareholders and management.

Budget

According to Asman (2022), a budget is a plan prepared systematically in the form of numbers and expressed in monetary units that cover all company activities within a certain period (period) in the future.

Budget Absorption

The success of work unit performance is assessed from the level of budget absorption that SKPD can carry out in one fiscal year. According to Fitra (2022), budget absorption describes the regional government's ability to carry out and be accountable for each activity, an accumulation of budget absorption by Regional Work Units (SKPD).

Human Resources Competency

According to Widyawati (2019), individual skills are added value for people doing work. The ability of competent state civil servants (ASN) is seen from the linear education level of their field, and they receive regular technical training from the world of work, as well as developing the experience they have and the extensive opportunities they receive—human resource competency in the context of regional financial management.

Organizational Commitment

According to Aprila et al. (2023), organizational commitment is when an individual sided with the organization and its goals and desires to maintain membership.

The Influence of Budget Planning on Budget Absorption

Planning can be interpreted as determining appropriate future actions through a sequence of choices, considering available resources (Asman, 2022). Planning is a process for determining future actions, so doing it before carrying out an activity or job is essential. *Poor budget planning* is a significant obstacle preventing budget absorption. Planning as a reference for budgeting is a process for preparing income, expenditure, and financing plans for a certain period, including participation, data accuracy, ratification of the APBD, approaches, instruments in preparing budgets, planning, and needs, and revisions or changes.

Stewardship theory can explain SKPD as an institution that is trusted to manage and provide good services to the community and carry out good planning for the budget of each SKPD so that it can impact the community. Implementing good budget planning can encourage maximum budget absorption. In order to realize good budget absorption, SKPD must be able to make logical plans and be able to maximize their implementation.

Previous research has been conducted by Nursela et al. (2022), Syahwilda & Damayanti (2022), and Arniwinita et al. (2019), which shows the results that budget planning has a significant effect on budget absorption. Based on this explanation, the following is the first hypothesis in this research:

H₁: Budget planning has a significant effect on budget absorption

The Influence of the Quality of Human Resources on Budget Absorption

High-quality human resources will be an advantage in itself, as well as building a good image in an organization, and will create a sense of trust from the public. This aligns with the stewardship theory where the Solok City Government OPD is the steward who functions as a manager of community resources (principal party). The better the quality of human resources possessed by the Solok City OPD (Steward) in carrying out duties for the community (Principal), the better the level of budget absorption will be. This is because human resources already understand and understand the duties and responsibilities that must be carried out well. The worse the existing human resources, the slower the absorption of the budget; conversely, if the human resources are better, the absorption of the budget will speed up according to the predetermined schedule (Widyawati et al., 2019).

Previous research by Nursela et al. (2022) and Syahwilda and Damayanti (2022) showed that resource quality influences budget absorption. Based on this explanation, here is the second hypothesis in this study.

H₂: The quality of human resources has a significant effect on budget absorption.

Effect of Budget Execution on Budget Absorption

The implementation and administration in practice must also consider the performance that has been determined in the APBD. This process must align with the agreed performance indicators in the APBD document. The planned budget can be aligned as it should, and the number of errors in the implementation and administration process can be minimized. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management states that cash budgets are prepared monthly to facilitate and control the quarterly budget absorption targets that must be achieved. The better the level of budget execution, the greater the absorption of the OPD budget. The process of implementing the budget is a process that is bound by many laws and regulations, which have also undergone many changes, so this Government Regulation is prepared in order to make adjustments to current developments. The better the implementation of the budget by OPD will affect the high absorption level of the spending budget (2019).

Previous research conducted by Nursela et al. (2022) and Syahwilda and Damayanti (2022) showed the result that budget execution has a significant effect on budget absorption. Based on this explanation, the following is the third hypothesis in this research:

H₃: Budget implementation has a significant effect on budget absorption.

The Influence of Organizational Commitment on Budget Absorption

Handoko and Rambe (2018) explained that organizational commitment is an employee assessment that can be seen from their behavior related to a person's strong involvement in the

agency. If a person's involvement is high, a more excellent attitude of responsibility will emerge towards the public. If a person has high organizational commitment, he will be committed to the responsibilities and rules that apply and avoid all actions that will harm the organization (Aprila et al., 2023).

Stewardship theory has philosophical assumptions regarding human nature that humans can be trusted, are responsible, and humans are individuals with integrity. Public sector organizations aim to provide services to the public and be accountable to the community. Exemplary organizational commitment from SKPD will have an impact on maximum budget absorption.

Previous research by Nursela et al. (2022) and Juliani and Sholihin (2014) showed that organizational commitment significantly affects budget absorption. Based on the explanation that has been explained, the following is the fourth hypothesis in this research:

H₄: Organizational commitment has a significant effect on budget absorption.

The Influence of Budget Planning, Quality of Human Resources, Budget Execution, and Organizational Commitment on Budget Absorption

Planning can be interpreted as determining appropriate future actions through a sequence of choices, considering available resources (Asman, 2022). Planning is a process for determining future actions, so doing it before carrying out an activity or job is essential. *Poor budget planning* is a significant obstacle preventing budget absorption. Planning as a reference for budgeting is a process for preparing income, expenditure, and financing plans for a certain period, including participation, data accuracy, ratification of the APBD, approaches and instruments in preparing budgets, planning and needs, and revisions or changes.

High-quality human resources will be an advantage in itself, build a good image in an organization, and create a sense of trust from the public. This aligns with the stewardship theory where the Solok City Government OPD is the steward who functions as a manager of community resources (principal party). The better the quality of human resources possessed by the Solok City OPD (Steward) in carrying out duties for the community (Principal), the better the level of budget absorption will be. This is because human resources already understand and understand the duties and responsibilities that must be carried out well. The worse the existing human resources, the slower the absorption of the budget; conversely, if the human resources are better, the absorption of the budget will speed up according to the predetermined schedule (Widyawati et al., 2019).

The better the level of budget execution, the greater the absorption of the OPD budget. The process of implementing the budget is a process that is bound by many laws and regulations, which have also undergone many changes, so this Government Regulation is prepared in order to make adjustments to current developments. The better the budget implementation by the OPD, the higher the level of budget absorption will be (2019).

Handoko and Rambe (2018) explained that organizational commitment is an employee assessment that can be seen from their behavior related to a person's strong involvement in the agency. If a person's involvement is high, a more excellent attitude of responsibility will emerge towards the public. If a person has high organizational commitment, he will be committed to the responsibilities and rules that apply and avoid all actions that will harm the organization (Aprila et al., 2023).

Previous research conducted by Nursela et al. (2022) shows that budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment simultaneously significantly affect budget absorption.

H₅: Budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment simultaneously influence budget absorption.

2. RESEARCH METHOD

This research is a quantitative research with a survey approach. In this research, primary data is obtained from distributing questionnaires to department heads, secretaries, treasurers, and heads of sub-finance sections from each SKPD, totaling 100 Respondent. Also, in this research, several tests are carried out using SPSS version 26, namely Data Instrument Tests using validity and

reliability tests, classical assumption tests (Normality Test and Heteroscedasticity Test), and Hypothesis Tests consisting of T Test and F Test.

Table 2.1 Operational Variable

Variable	Indicators	Scale
Budget Planning (X₁)	1) Comprehensive 2) Detailed 3) Discipline 4) Flexible 5) Priority 6) Openness	<i>Likert</i> (1-4)
Quality of Human Resources (X₂)	1) Good experience 2) Education according to work 3) Skills according to the task	<i>Likert</i> (1-4)
Budget Execution (X₃)	1) 5K Treasury designation 2) Work culture 3) Administrative Completion 4) Number of officials or committees for the procurement of goods and services 5) Contract document inspection process 6) Determine your own estimated price 7) Capacity of the counterparty 8) Stage in SPM verification 9) Cash budget schedule 10) Disbursement of money to partners	<i>Likert</i> (1-4)
Organizational Commitment (X₄)	1) Commitment is affective 2) Normative commitment 3) Continuous commitment	<i>Likert</i> (1-4)
Budget Absorption (Y)	1) The rate of absorption of the budget in OPD is more than 90% 2) Get an award for the level of absorption of funds that has been achieved 3) The percentage of budget absorption in OPD gets a red report card 4) The percentage of budget absorption in OPD is proportional every month	<i>Likert</i> (1-4)

3. RESULTS AND DISCUSSION

T-test Result

Variable	T _{tabel}	t _{Hitung}	Sig.	Conclusion
Budget Planning	2.634	4.805	0,000	Accepted
Quality of Human Resources	2.634	0.495	0,622	Rejected
Budget Execution	2.634	1.234	0,221	Rejected
Organizational Commitment	2.634	1.737	0.086	Rejected

Source: SPSS Output, 2023

The influence of budget planning on budget absorption

The test results for budget planning (X₁) on budget absorption (Y) obtained $t_{\text{count}} = 4.805$ with a significance level of 0.000. Significance limit value = 0.050 and $t_{\text{table}} = 2.634$, it can be seen that $t_{\text{count}} 4.805 > t_{\text{table}} 2.634$ and significance limit value $0.050 > 0.000$ significance level. This means that budget planning (X₁) significantly affects budget absorption so that hypothesis 1 test

(H1) results are declared accepted. This shows a significant influence of budget planning on budget absorption. These results indicate that the better the budget planning, the better the budget absorption in the SKPD Kota Solok increases.

The results of this study align with the stewardship theory, which can explain that SKPD is part of an extension of the Government, which aims to carry out management so that it can provide progress in the regions. Implementing good budget planning will encourage an increase in budget absorption so that each SKPD can maximize its performance, directly proportional to the increase in budget absorption.

The implications of this research can be considered for the Government to maximize budget absorption in each SKPD. The main thing that each SKPD itself must do is to make budget planning according to the level of urgency of the needs of the SKPD. If budget planning has been adjusted to the needs of each SKPD, of course, this will increase the absorption of the budget from the SKPD. Therefore, each SKPD needs to ensure that the budget planning can support the progress process of each SKPD so that it can contribute to regional progress.

The research results are further strengthened by the rules listed in Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management Article 20, which implicitly states that SKPDs are expected to be able to increase the effectiveness of regional expenditure management. Effective achievement in managing regional expenditures certainly can only be realized if the budget planning is carried out carefully. Therefore, each SKPD needs to be able to make budget plans to support regional expenditure management's effectiveness.

The results of this study are in line with previous research conducted by Nursela et al. (2022), Syahwilda & Damayanti (2022), and Arniwinita et al. (2019), which show results that budget planning has a significant effect on budget absorption. The results of this study reject research conducted by Safpremi et al. (2022) and Ulandari et al. (2021), which show that budget planning does not affect budget absorption.

The influence of human resource quality on budget absorption

The test results for the quality of human resources (X2) on budget absorption (Y) obtained $t_{\text{count}} = 0.495$ with a significance level of 0.622. Significance limit value = 0.050 and $t_{\text{table}} = 2.634$, it can be seen that $t_{\text{count}} 0.495 < t_{\text{table}} 2.634$ and significance limit value $0.050 < 0.622$ significance level. This means that the quality of human resources (X2) has no significant effect on budget absorption, so hypothesis 2 (H2) results are rejected. This means that here, the absorption of the budget will not be affected by the quality of human resources; this is because the absorption of the budget will remain following the previously planned portion so that whether the quality of human resources is good or not will not affect it. Budget absorption will proceed according to the timeline and amount agreed upon at the planning stage.

Stewardship theory also explains that people in a government can be trusted. In addition, the people in the SKPD are chosen people who have been selected through strict selection so that they will continue to carry out the budget that has been planned following what has been stated in the rules of each SKPD.

Previous research conducted by Nursela et al. (2022) and Syahwilda and Damayanti (2022) showed that the quality of resources affects budget absorption. The results of this study are inversely proportional to research conducted by Arniwinita et al. (2019), which shows that the quality of human resources does not affect budget absorption.

The results of this study align with research conducted by Arniwinita et al. (2019), which shows that the quality of human resources does not affect budget absorption. This research also rejects previous research conducted by Nursela et al. (2022) and Syahwilda and Damayanti (2022), which showed that resource quality influences budget absorption. Budget absorption will continue to run according to plans made, not based on the quality of human resources. However, in its implementation, human resources are also needed to manage and plan the budget for each SKPD.

The influence of budget execution on budget absorption

The test results for budget execution (X3) on budget absorption (Y) obtained $t_{\text{count}} = 1.234$ with a significance level of 0.221. The significance limit value = 0.050 and $t_{\text{table}} = 2.634$, so it can be seen that t_{count} is $1.234 < t_{\text{table}} 2.634$, and the significance limit value is $0.050 < \text{significance level } 0.221$. This means that budget implementation (X3) does not significantly affect budget absorption,

so the results of hypothesis test 3 (H3) are rejected. This shows that budget implementation will only follow what was planned at the planning stage, making this variable have little influence on budget absorption. However, budget execution is a factor that supports budget planning to run as expected.

This research implies that suggestions emerge that can be used as a reference for making improvements to budget implementation that can support the achievement of budget absorption by the initial planning made by each SKPD. Each SKPD must be able to implement this budget by budget planning. If budget implementation has been carried out by budget planning, it will impact the success of the SKPD in terms of budget absorption. Budget implementation is only a supporting factor in budget planning and not a factor that directly influences budget absorption. This is why implementing this budget does not influence budget absorption.

The results of this research align with previous research conducted by Arniwinata et al. (2019), which showed that budget implementation did not affect budget absorption. The results of this research also reject previous research conducted by Nursela et al. (2022) and Syahwildan and Damayanti (2022), showing that budget implementation significantly affects budget absorption.

Effect of Organizational Commitment on budget absorption

The test results for organizational commitment (X4) on budget absorption (Y) obtained $t_{\text{count}} = 1.737$ with a significance level of 0.086. Significance limit value = 0.050 and $t_{\text{table}} = 2.634$, it can be seen that $t_{\text{count}} 1.737 < t_{\text{table}} 2.634$ and significance limit value $0.050 < 0.086$ significance level. This means that organizational commitment (X3) has no significant effect on budget absorption, so hypothesis 4 (H4) results are rejected. This is because organizational commitment is a binding thing in the world of the State Civil Apparatus, forcing them to continue to run the budget according to the plans made. This shows that the organizational commitment variable is not the main factor influencing budget absorption in the Solok Municipal Work Unit but is only a supporting factor.

The results of this study align with the concept of stewardship theory based on philosophical assumptions about human nature, that humans can be trusted and responsible, and that humans are individuals with integrity. Public sector organizations aim to provide services to the public and be accountable to the public. Apart from that, organizational commitment in public sector organizations is forced and must be carried out by everyone.

This study's results differ from previous research conducted by Nursela et al. (2022) and Juliani & Sholihin (2014), showing that organizational commitment significantly affects budget absorption. This is because organizational commitment is only a supporting factor for other variables to influence budget absorption and is not the primary variable directly affecting budget absorption.

F-test Results

N	f_{table}	f_{count}	Sig.
100	2,48	15,147	0,000

Source: SPSS Output, 2023

The Effect of Budget Planning, Quality of Human Resources, Budget Execution, and Organizational Commitment on Budget Absorption

The results showed that the significance value of the research data was $0.000 < 0.05$. It is known that the F_{count} value is $15,147 > F_{\text{table}}$, which is 2.48. These results mean that budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment significantly affect budget absorption. Hypothesis 5 (H5) is declared accepted. These results support the first hypothesis, where budget planning is a variable that directly influences budget absorption and implementation; quality of human resources and organizational commitment support budget planning influencing budget absorption. This causes budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment to significantly influence budget absorption in the Solok City Regional Work Unit. The results of this research are in line with research conducted by Nursela et al. (2022), which shows that there is an influence of budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment on budget absorption simultaneously.

4. CONCLUSION

Based on the presentation of the results of statistical calculations and data analysis that has been carried out, it is concluded that budget planning influences budget absorption. In contrast, the quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment are independent of budget absorption in the Solok City SKPD. Apart from that, there is a simultaneous influence of budget planning, quality of human resources, budget implementation, and organizational commitment on Solok City SKPD budget absorption. The results of this study can be used as material for consideration for the Municipal Government of Solok to increase the absorption of the SKPD budget further.

The limitation of this research is that it only looks at the factors that influence budget absorption quantitatively through distributing questionnaires. It is hoped that future researchers will be able to dig deeper into the study results by using a mixed method in subsequent studies.

REFERENCE

- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). FINANCIAL MANAGEMENT OF NAGARI OWNED ENTERPRISES (BUMNAG) AND ITS IMPACT ON COMMUNITY WELFARE. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 98–113. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Arniwita, A., Santoso, A., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2019). Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.77>
- Asman, N. (2022). *Anggaran Perusahaan*. Indramayu: Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=YKBqEAAAQBAJ>
- FITRA, H. (2022). *ANALISIS NERACA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH*. IRDH. <https://books.google.co.id/books?id=zsXODwAAQBAJ>
- Handoko, D. S., & Rambe, M. F. (2018). Pengaruh Pengembangan Karir dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kepuasan Kerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 31–45. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v1i1.2238>
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>
- Keay, A. (2017). Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1292–1314. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Nursela, N., Taufik, T., & Yasni, H. (2022). Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Pada Penyerapan Anggaran. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.31258/current.3.1.11-23>
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–160). <https://www.bpkp.go.id/>
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 188–199. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i2.5386>
- Syahwildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 169–176.
- Ulandari, V., Akram, A., & Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1577. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p18>

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22806>

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip *Prudence* Akuntansi Pada Perusahaan Sektor Finansial Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022

Titik Windiani¹, Rangga Putra Ananto², Ferdawati³
Politeknik Negeri Padang – ¹titikwindiani92@gmail.com
– ²rangga@pnp.ac.id
– ³ferdawati.pnp@gmail.com

Abstract— *This research aims to determine the effect of independent commissioners, institutional ownership, audit quality, litigation risk, capital intensity, fair value intensity, profitability and company size on prudence accounting. Population in this study is the financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. Purposive sampling method was used to determine the research sample so that a sample of 193 observations was obtained. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The data is processed using the SPSS v.25 application. The results showed that litigation risk, capital intensity and profitability affect accounting prudence. Independent commissioners, institutional ownership, audit quality, fair value intensity and company size have no effect on accounting prudence. Simultaneously, independent commissioners, institutional ownership, audit quality, litigation risk, capital intensity, fair value intensity, profitability and company size affect prudence accounting.*

Keywords — *Independent Commissioner, Institutional Ownership, Audit Quality, Litigation Risk, Capital Intensity, Fair value Intensity, Profitability, Company Size, Accounting Prudence.*

1. PENDAHULUAN

Akuntansi berhubungan erat dengan sebuah informasi. Bentuk informasi dari akuntansi salah satunya adalah laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan menuntut adanya kelengkapan dan ketepatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Akuntansi menafsirkan pelaporan yang menghasilkan nilai yang sebenarnya (*true value*) dalam kualitas fundamental harus dapat memenuhi karakteristik antara lain dapat diuraikan, angka-angka yang disajikan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dapat dipahami, diuji, dan diperbandingkan. Sehubungan dari pengungkapan *true value*, ada sebuah penerapan konsep yang disebut *prudence* akuntansi (Sari dan Srimindarti, 2022). Sebelum penggunaan istilah *prudence*, istilah yang digunakan adalah konservatisme akuntansi.

Terdapat berbagai kritikan terkait penggunaan konservatisme dalam kaitannya terhadap mutu dari laporan keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat mengakibatkan angka yang dihasilkan menjadi bias dan cenderung tidak merefleksikan kondisi sebenarnya dari keuntungan dan *return* yang dihasilkan, serta menghasilkan laba yang berkualitas rendah dan tidak berkelanjutan (Darmawan 2023). Namun dengan penerapan konservatisme akuntansi dapat mencegah manajer dari menggelembungkan laba dan memanfaatkan asimetri informasi untuk keuntungan mereka (Ma et al. 2020).

Terlepas dari pro dan kontra mengenai konservatisme akuntansi, prinsip kehati-hatian yang lebih dikenal saat ini dengan istilah *prudence* perlu dipertimbangkan mengingat berbagai kasus yang terjadi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2022 mengeluarkan laporan tentang tindak kecurangan di seluruh dunia yang menyatakan penyalahgunaan aset adalah jenis kecurangan yang paling sering terjadi yaitu sebesar 86%, sedangkan kecurangan laporan keuangan adalah jenis kecurangan yang paling sedikit terjadi yaitu sebesar 9%. Namun, kecurangan laporan keuangan memiliki median kerugian tertinggi sebesar \$593.000, sementara penyelewengan aset memiliki median kerugian sebesar \$100.000. Salah satu kasus kecurangan penyajian laporan keuangan di Indonesia dapat dilihat pada kasus Bank Bukopin yang melakukan perubahan data kartu kredit dengan total lebih dari 100.000 kartu kredit yang mengakibatkan meningkatnya kredit dan pendapatan berbasis komisi Bank Bukopin secara tidak wajar. Bank Bukopin melakukan revisi

laba bersih laporan keuangan tahun 2016 yang memiliki jumlah sebesar Rp 1,08 triliun diubah menjadi Rp 183,56 miliar. Pendapatan yang diperoleh melalui kartu kredit merupakan pendapatan yang mengalami penurunan yang paling besar yaitu dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar (finance.detik.com).

Prudence akuntansi pada suatu perusahaan diaplikasikan pada tingkatan yang berbeda. Adapun faktor penentu dari tingkat *prudence* akuntansi tersebut bersumber dari adanya komitmen pihak manajemen dan internal perusahaan dalam menyajikan informasi yang terbuka (Hariyanto 2021). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari praktik tata kelola yang baik. Komisaris independen berpengaruh positif atau berbanding lurus dengan *prudence* akuntansi pada perusahaan manufaktur dan keuangan. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mengontrol jalannya proses penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang bermutu dengan penerapan *prudence* akuntansi yang lebih tinggi.

Perbandingan persentase antara saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan total saham yang beredar yang dimiliki perusahaan merupakan definisi dari kepemilikan institusional. Dengan semakin besarnya porsi kepemilikan saham institusional dalam suatu perusahaan, mendorong penerapan *prudence* akuntansi karena keberadaan investor institusional dapat mendorong tindakan manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi dalam pelaporan keuangannya yang bertujuan untuk menghindari tindakan oportunistik manajemen dalam memanipulasi kinerja perusahaan. Kualitas audit juga dapat mempengaruhi manajemen dalam menerapkan *prudence* akuntansi. Alvino dan Sebrina (2020) menyatakan kualitas audit adalah suatu karakteristik atau uraian kegiatan audit yang didasarkan pada standar audit dan pengendalian kualitas sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesional auditor. Audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dapat mempengaruhi manajemen agar lebih berhati-hati dalam penyajian laporan keuangan (Alvino dan Sebrina, 2020).

Risiko yang dihadapi perusahaan berkenaan dengan ancaman tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan adalah pengertian dari risiko litigasi. Gugatan hukum yang mungkin dihadapi perusahaan akan mendorong perusahaan untuk cenderung menerapkan prinsip *prudence* dalam pelaporan keuangannya. Efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan merupakan intensitas modal. Perusahaan dengan manajemen aset yang tinggi merupakan perusahaan yang padat modal. Padatnya intensitas modal yang dimiliki perusahaan menimbulkan biaya politik yang tinggi. Untuk menghindari biaya politik yang tinggi, manajemen dapat menerapkan prinsip kehati-hatian akuntansi.

Penerapan prinsip akuntansi sekarang yang merujuk pada IFRS juga memiliki pengaruh yang besar pada penggunaan prinsip *prudence* akuntansi. IFRS mensyaratkan pelaporan keuangan yang lebih baik dengan metode nilai wajar. Pendekatan nilai wajar bertujuan untuk peningkatan relevansi dari informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks IFRS, konservatisme tidak lagi dianggap sebagai prinsip akuntansi yang relevan. Namun, perusahaan tetap menghadapi ketidakpastian dalam era IFRS. Saat ini istilah konservatisme akuntansi lebih dikenal dengan istilah *prudence* akuntansi. Oleh karena itu, untuk menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis, prinsip *prudence* harus diterapkan pada tingkat yang sesuai dalam laporan keuangan.

Kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam menciptakan keuntungan melalui perbandingan rasio-rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menghasilkan keuntungan disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu pendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian akuntansi agar laba yang dihasilkan tidak naik turun. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan diukur melalui total aset, total laba bersih, total penjualan, dan lain sebagainya. Besarnya ukuran perusahaan maka mendorong manajemen untuk cenderung menggunakan prinsip *prudence* akuntansi, yang mana pengakuan laba dilakukan secara konservatif yang memiliki tujuan meminimalisir biaya politik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang sistematis terdiri dari bagian-bagian, fenomena, dan hubungan sebab akibat. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang ditentukan oleh penulis. Adapun kriteria yang dipakai pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Total
1	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022	318
2	Perusahaan sektor finansial yang melaporkan laporan keuangan selama periode 2020-2022	(24)
3	Perusahaan sektor finansial yang memiliki kepemilikan institusional selama periode 2020-2022	(6)
4	Perusahaan sektor finansial yang mendapatkan laba selama periode 2020-2022	(54)
5	Data <i>outlier</i>	(41)
Jumlah Sampel		193

Sumber : Data diolah, 2023

Metode analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besar kecilnya variabel dependen dengan data variabel independen yang telah diketahui. Model persamaan regresi yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = a + \beta_1 X1_{i,t} + \beta_2 X2_{i,t} + \beta_3 X3_{i,t} + \beta_4 X4_{i,t} + \beta_5 X5_{i,t} + \beta_6 X6_{i,t} + \beta_7 X7_{i,t} + \beta_8 X8_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

Y = *Prudence* akuntansi

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Komisaris independen

X2 = Kepemilikan institusional

X3 = Kualitas audit

X4 = Risiko litigasi

X5 = Intensitas modal

X6 = Intensitas *fair value*

X7 = Profitabilitas

X8 = Ukuran perusahaan

ε = *error*

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *prudence* akuntansi yang diukur dengan menggunakan pengukuran akrual yang diadaptasi dari model Givoly dan Hayn (2000).

$$CON_{ACC} = \frac{(NIO + DEP - CFO)}{TA} \times -1$$

Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari delapan variabel yang terdiri dari komisaris independen yang diukur dengan membagi antara banyaknya dewan komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris (Achyani et al., 2021)). Kepemilikan institusional yang diukur dengan rasio total saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap total saham yang beredar (Afriani et al., 2019). Kualitas audit pengukurannya menggunakan variabel *dummy* yang mana 1 diberikan untuk perusahaan yang di audit oleh KAP *Big Four* dan 0 diberikan untuk perusahaan yang di audit oleh KAP *Non Big Four* (Achyani et al., 2021). Kemudian variabel risiko litigasi diukur melalui *debt to equity ratio*, yaitu dengan membagi total utang perusahaan dengan total modal yang dimiliki perusahaan (Mumayiz dan Cahyaningsih, 2020). Variabel intensitas modal dihitung dengan menggunakan rasio total aset dibagi dengan penjualan, semakin tinggi nilai intensitas modal maka perusahaan semakin padat modal (Achyani et al., 2021). Variabel intensitas *fair value* diukur dengan membandingkan nilai *other comprehensive income* dengan laba bersih perusahaan, tingginya nilai *other comprehensive income* maka semakin tinggi pula intensitas *fair value* suatu perusahaan (Alvino dan Sebrina, 2020). Profitabilitas dihitung menggunakan *return on asset* dan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistik deskriptif penelitian ini memuat informasi mengenai gambaran mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang memuat tentang nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Hasil analisis statistik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
IND	193	,20	1,00	,5245	,13538
INS	193	,08	1,00	,7304	,19700
ADQ	193	,00	1,00	,3212	,46817
LTG	193	,00	11,33	2,7282	2,61348
IMD	193	,82	35,48	10,2296	6,85643
IFV	193	-14,19	15,36	,2069	2,12877
PRF	193	,00	,69	,0315	,06416
SZE	193	26,22	32,89	29,6873	1,69748
CON	193	-,68	,29	-,0408	,15229
Valid N (listwise)	193				

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2023

Pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas pada penelitian ini memiliki nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,167 yang menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai residual pada penelitian ini telah berdistribusi normal.

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi penelitian ditemukan adanya hubungan/korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini karena memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10.

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser yang menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05, yang mengindikasikan model regresi penelitian tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode *t* yang ada pada model regresi penelitian dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* atau periode sebelumnya. Penelitian ini memiliki *K*=8 dan *N*=193 sehingga diperoleh nilai *du* sebesar 1,8513 dan nilai (4-*du*) sebesar 2,1487. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa pada model regresi tidak ada gejala autokorelasi antar variabel residual penelitian (1,8513 < 1,903 < 2,1487). Uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = -0,104 - 0,106 (\text{IND}) - 0,048 (\text{INS}) + 0,015 (\text{ADQ}) + 0,015 (\text{LTG}) - 0,004 (\text{IMD}) - 0,002 (\text{IFV}) - 0,987 (\text{PRF}) + 0,006 (\text{SZE}) + \varepsilon$$

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menggambarkan perubahan variabel dependen dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi (*R*²).

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,510 ^a	,260	,228	,13379

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel yang ditampilkan dapat diketahui bahwa koefisien determinasi pada penelitian ini adalah 0,228 atau 23%, yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari komisar independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, risiko litigasi, intensitas modal, intensitas *fair value*, profitabilitas dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *prudence* akuntansi sebesar 23%. Hal ini menunjukkan terdapat 77% variabel lain yang dapat mempengaruhi *prudence* akuntansi yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Hasil uji simultan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara semua variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Adapun hasil dari uji simultan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,159	8	,145	8,097	,000 ^b
Residual	3,294	184	,018		
Total	4,453	192			

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2023

Pengujian hipotesis apabila signifikansi $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Uji Hipotesis
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,104	,241	-,429	,669	
IND	-,106	,082	-1,304	,194	Tidak Berpengaruh
INS	-,048	,052	-,922	,358	Tidak Berpengaruh
ADQ	,015	,023	,679	,498	Tidak Berpengaruh
LTG	,015	,005	2,798	,006	Berpengaruh
IMD	-,004	,002	-2,399	,017	Berpengaruh
IFV	-,002	,005	-,429	,668	Tidak Berpengaruh
PRF	-,987	,163	-6,038	,000	Berpengaruh
SZE	,006	,008	,781	,436	Tidak Berpengaruh

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2023

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Prudence* Akuntansi

Berdasarkan uji hipotesis variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,194 > 0,05$ yang menunjukkan komisaris independen tidak mampu mempengaruhi manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Salah satu perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen tertinggi pada perusahaan sektor finansial selama periode penelitian yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yaitu sebesar 100% pada tahun 2022. Namun berdasarkan data yang diolah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tidak menerapkan *prudence* akuntansi hal ini dapat dilihat pada nilai *prudence* akuntansi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang masih tergolong rendah yaitu sebesar -0,17 karena berada dibawah nilai rata-rata (*mean*) nilai *prudence* akuntansi yaitu sebesar -0,04. Rendahnya nilai *prudence* akuntansi menunjukkan perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menekan konflik keagenan dengan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris independen perusahaan terhadap pihak manajemen. Komisaris independen sendiri merupakan anggota komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan yang dipilih secara independen dan terbebas dari pengaruh-pengaruh yang berkenaan dengan kepentingan individu atau pihak lain perusahaan. Masalah keagenan dapat diatasi dengan adanya komisaris independen karena dapat mengurangi asimetri informasi dimana komisaris independen bertindak atas dasar informasi yang jelas dan menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap risiko yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan sehingga dapat mendorong penerapan *prudence* akuntansi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Dewi dan Rahayuningsih (2023) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Namun, penelitian yang dilakukan Alvino dan Sebrina (2020) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Prudence* Akuntansi

Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang dibuktikan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,358. Kepemilikan institusional yang besar terhadap kepemilikan saham perusahaan tidak dapat menjadi suatu jaminan pihak institusional mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen perusahaan dalam menerapkan *prudence* akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Zulni dan Taqwa (2023) menyatakan keterlibatan besar para pemodal institusional dalam tata kelola perusahaan membutuhkan biaya yang tinggi dan hasil dari kehati-hatian akuntansi baru dapat dilihat hasilnya dalam waktu jangka panjang, oleh sebab itu tidak semua pemodal institusional mau turut serta dalam urusan tata kelola perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini tingkat kepemilikan institusional tergolong tinggi yang dapat dilihat pada analisis deskriptif dimana nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional senilai 73%. Namun, tingginya kepemilikan institusional dalam penelitian tidak dapat mempengaruhi penerapan *prudence* akuntansi. Hal ini dibuktikan pada PT Bank Maspion Indonesia Tbk tahun 2022 yang memiliki proporsi kepemilikan institusional yang relatif tinggi yaitu 100% dengan nilai *prudence* akuntansi sebesar -0,12. Nilai *prudence* akuntansi tersebut masih tergolong rendah karena masih berada di bawah nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi senilai -0,04 yang mengindikasikan perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi.

Hasil pada penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan kepemilikan institusional merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk meminimalisir konflik kepentingan. Pemegang saham institusional sebagai pemilik saham mayoritas dapat menggunakan kontrol yang dimilikinya untuk mempengaruhi tindakan manajemen dalam penerapan *prudence* akuntansi. Dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin ketat pula pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh pemegang saham institusional agar dapat meminimalisir tindakan oportunistik manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Rahayuningsih (2023) yang menyatakan kepemilikan institusional yang tinggi tidak dapat memberikan jaminan bahwa pihak institusional sebagai pemegang saham mayoritas dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik dalam menjalankan prinsip kehati-hatian akuntansi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Alvino dan Sebrina (2020) pada perusahaan keuangan yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Prudence* Akuntansi

Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai signifikansi dari variabel kualitas audit yaitu 0,0498 $> 0,05$ yang menunjukkan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Sampel pada penelitian ini masih didominasi oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* dimana terdapat 68% perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* dan 32% diaudit oleh KAP *Big Four*. Rendahnya sampel dalam penelitian yang diaudit oleh KAP *Big Four* belum dapat mempengaruhi manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Achyani et al., (2021) menyatakan bahwa rendahnya jumlah sampel pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* menyebabkan investor kurang memperhatikan ketepatan penyajian laporan keuangan perusahaan, pihak investor hanya mengharapkan modal yang ditanamkan pada perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Hal ini terlihat pada PT Krom Bank Indonesia Tbk yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* selama periode penelitian. Namun, pergantian auditor pada perusahaan tersebut tidak mempengaruhi perusahaan dalam penerapan *prudence* akuntansi dimana nilai *prudence* akuntansi perusahaan tersebut masih tergolong rendah yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak konservatif. Nilai *prudence* akuntansi pada PT Krom Bank Indonesia Tbk dari tahun 2020-2022 berturut-turut sebesar -0,36, -0,45 dan -0,25. Nilai tersebut masih tergolong rendah karena berada di bawah nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi yaitu sebesar -0,04.

Hasil penelitian ini tidak dapat memperkuat teori keagenan yang menyatakan bahwa pemisahan antara pemegang saham dan pihak manajemen memerlukan pihak lain yang dapat memberikan keyakinan dan meningkatkan kredibilitas investor terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Achyani et al (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Namun, Samosir dan Hadiprajitno (2023) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang memiliki hasil berbeda dengan penelitian ini.

Pengaruh Risiko Litigasi Terhadap *Prudence* Akuntansi

Nilai signifikansi variabel risiko litigasi yaitu sebesar $0,06 < 0,05$ yang menunjukkan risiko litigasi memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Perusahaan yang diteliti dalam studi ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) risiko litigasi sebesar 2,73%, dan dari 193 sampel yang diteliti, terdapat 75 sampel yang nilai risiko litigasi di atas nilai rata-rata (*mean*) atau sebesar 39%. Nilai risiko litigasi dalam penelitian ini tergolong tinggi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena perusahaan sektor keuangan didominasi oleh sub sektor perbankan. Simpanan dana dari nasabah perusahaan perbankan yang masuk dalam pos utang mengakibatkan *debt to equity ratio* yang digunakan untuk menghitung risiko litigasi dalam penelitian ini cenderung tinggi. Semakin tinggi simpanan nasabah, maka akan meningkatkan *debt to equity ratio* perusahaan. Semakin meningkat risiko litigasi yang ditanggung perusahaan, maka semakin meningkatkan penerapan *prudence* akuntansi pada suatu perusahaan.

Tuntutan hukum yang mungkin dihadapi oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan *prudence* akuntansi, karena biaya yang timbul akibat tuntutan hukum mendorong manajemen perusahaan untuk menghindari kerugian akibat tuntutan hukum tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada PT Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2021 yang memiliki nilai risiko litigasi sebesar 10,75. Angka tersebut tergolong tinggi karena berada di atas nilai rata-rata (*mean*) risiko litigasi yaitu sebesar 2,7282. Sementara itu, nilai *prudence* akuntansi PT Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2021 adalah sebesar 0,12. Nilai *prudence* akuntansi pada PT Bank Nationalnobu Tbk tergolong tinggi karena berada di atas nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi yang menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan *prudence* akuntansi yaitu sebesar -0,04.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah disepakati, maka kreditur akan menuntutnya ke ranah hukum. Gugatan hukum yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar. Besarnya biaya yang dikeluarkan mendorong manajemen perusahaan untuk menghindari timbulnya kerugian karena gugatan melalui penyajian laporan keuangan secara hati-hati yang mendorong penerapan *prudence* akuntansi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil Erawati dan Wea (2021) yang menyatakan risiko litigasi berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Namun Fadhiilah dan Rahayuningsih (2022) menyatakan risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang memiliki hasil berbeda dengan penelitian ini.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Prudence* Akuntansi

Intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ yang menunjukkan variabel intensitas modal dalam penelitian ini mampu mempengaruhi manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Pada penelitian ini, variabel intensitas modal berbanding terbalik terhadap *prudence* akuntansi atau berpengaruh negatif. Tingginya intensitas modal perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut besar dan menerapkan *prudence* akuntansi yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung merasa dapat menutupi biaya politis yang akan muncul (Suyono et al. 2022).

Hal ini ditunjukkan pada nilai rata-rata (*mean*) intensitas modal perusahaan yang menjadi sampel tergolong tinggi yaitu 10,23 menunjukkan bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang padat modal. Pada PT Indoritel Makmur Internasional Tbk pada tahun 2020 yang memiliki nilai intensitas modal paling tinggi yaitu 35,48 dan nilai *prudence* akuntansi yang masih tergolong rendah yaitu -0,07 karena berada di bawah rata-rata (*mean*) nilai *prudence* akuntansi yaitu -0,04 yang berarti PT Indoritel Makmur Internasional Tbk tidak menerapkan *prudence* akuntansi dalam pelaporan keuangannya.

Hasil penelitian ini tidak memperkuat teori akuntansi positif dalam hipotesis biaya politik yang mengemukakan bahwa perusahaan yang mempunyai beban biaya politik yang tinggi, manajemen perusahaan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang menghasilkan laba yang cenderung rendah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya politik yang muncul. Perusahaan padat modal diduga memiliki biaya politik yang juga tinggi sehingga manajemen perusahaan cenderung menurunkan laba atau menerapkan *prudence* akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Maharani dan Kristanti (2019) tidak mendukung hasil penelitian ini dimana semakin tinggi intensitas modal meningkatkan *prudence* akuntansi. Penelitian oleh

Suyono (2021) sejalan dengan hasil penelitian ini pada perusahaan yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara intensitas modal dengan *prudence* akuntansi.

Pengaruh Intensitas *Fair value* Terhadap *Prudence* Akuntansi

Variabel intensitas *fair value* memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,668 yang artinya tidak terdapat pengaruh antara intensitas *fair value* terhadap *prudence* akuntansi. Penerapan IFRS pada tahun 2012 memiliki pengaruh besar terhadap penerapan *prudence* akuntansi. IFRS yang mempunyai tiga karakteristik utama diantaranya pendekatan *principle base*, penggunaan pendekatan nilai wajar serta pengungkapan pada laporan keuangan (Surya, Ananto, dan Rissi 2018). Salah satu karakteristik IFRS yaitu penggunaan nilai wajar pada IFRS bertentangan dengan *prudence* akuntansi yang menggunakan *historical cost*.

Variabel intensitas *fair value* pada penelitian ini diukur dengan membandingkan nilai *other comprehensive income* terhadap laba bersih perusahaan. Semakin tinggi nilai *other comprehensive income* perusahaan menunjukkan semakin tinggi intensitas *fair value* perusahaan. Nilai rata-rata (*mean*) intensitas *fair value* pada penelitian ini cenderung rendah yaitu sebesar 0,2069. Hal ini menunjukkan masih rendahnya intensitas *fair value* pada sampel penelitian yang berarti perusahaan cenderung rendah dalam pengungkapan intensitas *fair value*. Rendahnya intensitas *fair value* belum mampu mendorong perusahaan untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Siregar dan Khodijah (2022) menyatakan *other comprehensive income* memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi karena adanya estimasi, asumsi, dan penilaian yang terlibat dalam penyusunan dan pengungkapan *other comprehensive income*. Rendahnya intensitas *fair value* pada penelitian ini menyebabkan estimasi dan asumsi manajemen dalam laporan keuangan juga rendah sehingga tidak berpengaruh pada kebijakan manajemen untuk berhati-hati dalam pelaporan keuangannya.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tahun 2020 yang memiliki nilai intensitas *fair value* sebesar -14,19 dengan nilai *prudence* akuntansi sebesar -0,14. Nilai intensitas *fair value* pada sampel penelitian tergolong rendah karena berada dibawah nilai rata-rata (*mean*) intensitas *fair value* yaitu 0,2069. Rendahnya intensitas *fair value* pada perusahaan tidak dapat mendorong manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Sejalan dengan nilai intensitas *fair value*, nilai *prudence* akuntansi pada perusahaan juga tergolong rendah karena berada dibawah nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi yaitu sebesar -0,02.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa konflik keagenan sering muncul karena pihak manajemen dan para pemegang saham menerima informasi yang tidak sama mengenai perusahaan. Ketidaksamaan informasi yang diperoleh manajemen dan pemegang saham ini dapat disebut dengan asimetri informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Aldabbagh (2021) yang menyatakan *fair value* tidak berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Namun Yu et al., (2022) menyatakan bahwa intensitas *fair value* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Prudence* Akuntansi

Nilai signifikansi variabel profitabilitas pada penelitian ini yaitu senilai $0,000 < 0,05$ yang berarti profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penerapan *prudence* akuntansi pada suatu perusahaan. Variabel profitabilitas pada penelitian ini berbanding terbalik terhadap *prudence* akuntansi atau berpengaruh negatif. *Return on asset* yang dijadikan pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang rendah yaitu sebesar 0,03. Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak menerapkan *prudence* akuntansi, karena perusahaan ingin memberikan kesan kepada investor bahwa manajemen perusahaan sudah optimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba.

Pada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 2021 memiliki profitabilitas yaitu sebesar 0,41. Namun nilai *prudence* akuntansi masih tergolong rendah yaitu sebesar -0,43. Nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi pada perusahaan yaitu sebesar -0,04. Rendahnya nilai *prudence* akuntansi pada perusahaan menunjukkan perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi dalam pelaporan keuangannya.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung teori akuntansi positif atas hipotesis biaya politik yang menyatakan perusahaan akan cenderung menerapkan *prudence* akuntansi ketika perusahaan menghasilkan keuntungan yang juga tinggi. Meningkatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkatkan biaya politik perusahaan. Kemungkinan

munculnya biaya politik ini akan merugikan perusahaan sehingga manajemen perusahaan akan cenderung menerapkan *prudence* akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anjelina (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berhubungan terbalik dengan *prudence* akuntansi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Islami et al., (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan *prudence* akuntansi yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Prudence* Akuntansi

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan $> 0,05$ yaitu 0,436. Variabel ukuran perusahaan pada studi ini yang diproksikan dengan menggunakan logaritma natural total aset perusahaan cenderung merata. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proporsi antara perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan di atas nilai rata-rata ukuran perusahaan, yaitu sebesar 52% perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan di atas nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29,69. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan meningkatkan biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun, dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi manajemen untuk menerapkan *prudence* akuntansi. Tinggi atau rendahnya biaya politis yang muncul tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menerapkan *prudence* akuntansi.

Salah satu perusahaan yang tergolong besar yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tahun 2022 yang memiliki ukuran perusahaan sebesar 32,83. Perusahaan tersebut tergolong besar karena nilai ukuran perusahaan berada diatas nilai rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan yaitu sebesar 29,69. Namun perusahaan memiliki nilai *prudence* akuntansi yang tergolong rendah yaitu -0,08. Nilai rata-rata (*mean*) *prudence* akuntansi -0,02. Rendahnya nilai *prudence* akuntansi menunjukkan perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori akuntansi positif atas hipotesis biaya politik yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan cenderung memiliki pendapatan yang tinggi sehingga memicu biaya politik yang juga tinggi. Biaya politik yang dikeluarkan merupakan kerugian bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menerapkan *prudence* akuntansi untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Maharani dan Kristanti (2019) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Namun, penelitian yang dilakukan Putri et al., (2021) memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *prudence* akuntansi yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, risiko litigasi, intensitas modal, intensitas nilai wajar, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *prudence* akuntansi. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, sehingga diperoleh 193 observasi selama tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2020-2022. Hasil penelitian membuktikan bahwa risiko litigasi, intensitas modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi. Komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, intensitas *fair value* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Fatchan, Lovita, dan Eskasari Putri. 2021. "The effect of good corporate governance, sales growth, and capital intensity on accounting conservatism (Empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(3):255–67. doi: 10.23917/reaksi.v6i3.17578.
- Afriani, Nur, Zulpahmi, dan Sumardi. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi." *Jurnal Buana Akuntansi* 6(1):40–56.
- Aldabbagh, Lukman M. A. 2021. "The effect of adopting accounting of *fair value* according to standard (IFRS13) on levels of accounting conservatism A study in a sample of Iraqi banks."

- Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences* 17(54 part 1).
- Alvino, Kazbarani, dan Nurzi Sebrina. 2020. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi Dengan Intensitas *Fair value* Sebagai Pemoderasi." *Wahana Riset Akuntansi* 8(1):65–81. doi: 10.24036/wra.v8i1.109028.
- Anjelina, Yuli. 2021. "Pengaruh Debt Covenant, Political Cost, dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 6(2):188–99.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2022. *Occupational Fraud 2022: A Report to the nations*.
- Darmawan, I. Made Dwi Hita. 2023. "Membedah Prinsip Pelaporan Konservatisme Akuntansi: Pro Kontra, Kegunaan Dan Pertimbangan Untuk Pemangku Kepentingan." *Jurnal Maneksi* 12(2):410–16. doi: 10.31959/jm.v12i2.1531.
- Dewi, Viriya, dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih. 2023. "Mekanisme Eksternal Vs Mekanisme Internal Pada Konservatisme Akuntansi: Mana yang Lebih Efektif?" *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 25(1):17–28. doi: 10.34208/jba.v25i1.1406.
- Erawati, Teguh, dan Angela Yuanita Seku Wea. 2021. "Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan, Risiko Litigasi dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi." *Forum Ekonomi* 23(4):640–47. doi: 10.30872/jfor.v23i4.10135.
- Fadhiilah, Dinda, dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih. 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 5(1):87–102. doi: 10.33061/jeku.v21i3.6902.
- Givoly, Dan, dan Carla Hayn. 2000. "The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?" *Journal of Accounting and Economics* 29:287–320.
- Hariyanto, Eko. 2021. "Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Konservatisme Akuntansi." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18(1). doi: 10.30595/kompartemen.v18i1.7851.
- Islami, Ramadahniel, Putri Ayu Solihat, Amellia Jamil, dan Nanda Suryadi. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Transportasi di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3(3):1285–95. doi: 10.37385/msej.v3i3.637.
- Ma, Lijun, Min Zhang, Jingyu Gao, dan Tingting Ye. 2020. "The Effect of Religion on Accounting Conservatism." *European Accounting Review* 29(2):383–407.
- Maharani, Swetlana Kartika, dan Farida Titik Kristanti. 2019. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konservatisme Akuntansi." *JASa: Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi* 3(1):83–94. doi: 10.36555/jasa.v3i1.463.
- Mumayiz, Nurul Afyani, dan Cahyaningsih. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konservatisme Akuntansi." *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3(1):29–49. doi: 10.21632/saki.3.1.29-49.
- Putri, Suci Kurnia, Wiralestari, dan Riski Hernando. 2021. "Pengaruh Leverage, Growth Opportunity, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Konservatisme Akuntansi." *Wahana Riset Akuntansi* 9(1):46–61. doi: 10.24036/wra.v9i1.111948.
- Rachman, Fadhly Fauzi. 2018. *Bank Bukopin Permak Laporan Keuangan. Ini Kata BI dan OJK*. Ditelusuri 5 Agustus 2023. <https://finance.detik.com/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk>
- Samosir, Agung Maulana Erick Ghifari, dan Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno. 2023. "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)." *Diponegoro Journal of Accounting* 12(2):1–15.
- Sari, Intan Puspita, dan Ceacilia Srimindarti. 2022. "Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Akuntansi." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6(1):487–500. doi: 10.33395/owner.v6i1.558.
- Siregar, Dina Khairuna, dan Ina Khodijah. 2022. "Pengaruh *Other comprehensive income* dan Net Income Terhadap Return Saham Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15(2):510–27. doi: 10.46306/jbbe.v15i2.192.

- Surya, Firman, Rangga Putra Ananto, dan Dita Maretha Rissi. 2018. "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Hubungan Pengungkapan *Other comprehensive income* Dengan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Akuntansi dan Manajemen* 13(2):1–16. doi: 10.30630/jam.v13i2.35.
- Suyono, Nanang Agus. 2021. "Faktor Determinan Pemilihan Konservatisme Akuntansi." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 4(1):67–76. doi: 10.32500/jematech.v4i1.1653.
- Suyono, Sudarno, Harry P. Panjaitan, Achmad Tayip Junaedi, dan Megawati Pakpahan. 2022. "Analysis of Factors Affecting Accounting Conservatism of Hotel, Restaurant, and Tourism Companies Listed on Indonesia Stock Exchange." *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 10(2):130–47.
- Yu, Qianlong, Jiali Guo, Ding Lili, dan Hu Qin. 2022. "Study on Conditional Conservatism Within *Fair value* Measurements Based on Anti-discount Expectations." *Frontiers in Psychology* 13(39):1–11. doi: 10.3389/fpsyg.2022.923055.
- Zulni, Yona, dan Salma Taqwa. 2023. "Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan Institusional, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5(1):246–62. doi: 10.24036/jea.v5i1.723.

Intellectual Capital Disclosure : Studi pada PTKIN di Indonesia Versi Webometrics 2024

Raizky Rienaldy Pramasha¹, Arifa Kurniawan², A. Zuliansyah³

UIN Raden Intan Lampung -¹raizkyrienaldypramasha@radenintan.ac.id

-²arifakurniawan@radenintan.ac.id

-³Zuliansyah@radenintan.ac.id

Abstrak-Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *Intellectual Capital (IC)* oleh perguruan tinggi PTKIN, khususnya yang berbasis agama Islam, relatif serupa. Perguruan tinggi PTKIN yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan tingkat pengungkapan yang belum mencapai 100% dari *Human Capital*, *Structural Capital*, dan *Relational Capital*. Pengungkapan IC pada perguruan tinggi PTKIN mencakup aspek-aspek seperti jumlah dosen, kualifikasi, kompetensi, visi-misi-tujuan, strategi, tata pamong, kerjasama internasional, nasional, dan regional, serta dana kerjasama.

Kata Kunci :*Pengungkapan, Intellectual Capital*

1. PENDAHULUAN

Transparansi merupakan wujud keterbukaan informasi publik dengan cara penyampaian secara elektronik maupun non-eletronik (Indonesia, 2008; Putra, 2017). Informasi yang disajikan oleh sektor publik akan memengaruhi para stakeholders dalam mengambil keputusan (Salsabilah *et al.*, 2020). Salah satu sektor publik yang memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada publik yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan pengelolanya dibagi menjadi tiga yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih dibagi menjadi dua yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Bentuk keterbukaan informasi kepada public yaitu *Intellectual Capital Disclosure (ICD)*. *Intellectual capital* merupakan salah satu bentuk aset tak berwujud yang dimiliki oleh suatu organisasi (Herawati *et al.*, 2020). Apabila pengungkapan *intellectual capital* dapat disajikan dan tersampaikan dengan baik maka dapat menjadi nilai tambah dan dasar dalam keunggulan kompetitif, sehingga dapat meningkatkan daya saing. Pengungkapan modal intelektual dapat menjadi pelengkap dari sumber daya (aset berwujud-keuangan) yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi (Marr, 2018; Herawati *et al.*, 2020).

Penelitian pengungkapan modal intelektual pada sektor publik khususnya perguruan tinggi masih cukup terbatas jika dibandingkan dengan pengungkapan di sektor swasta (Dumay *et al.*, 2015; Ulum *et al.*, 2016; Ulum dan Wijayanti, 2019). Namun, setiap waktu mengalami kecenderungan peningkatan dalam ICD di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sektor publik yang memberikan layanan dalam bentuk tidak berwujud. *Intellectual Capital Disclosure (ICD)* dalam perguruan tinggi menjadi penting, mengingat produk utama yang dihasilkan adalah pengetahuan. Pengetahuan tersebut dalam bentuk pembelajaran, penulisan karya ilmiah, atau hal lainnya. Selain itu, perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan sehingga perlu menawarkan informasi tentang ICD dalam model informasi akuntansi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi adalah tempat yang tepat dan ideal dalam penerapan *Intellectual Capital Disclosure (ICD)* (Ramirez dan Gordillo, 2014; Ramirez dan Tejada, 2016; Ulum, 2019; Herawati *et al.*, 2020)

Selama ini, sebagian besar *Intellectual Capital Disclosure (ICD)* dilihat dari laporan keuangan . Karena laporan tahunan bersifat gratis dan banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya (Dumay, 2014; Dumay dan Cai, 2015; Dumay dan Guthrie, 2017). Namun, menurut Dumay

(2016), Dumay dan Cai (2014) dan Dumay dan Guthrie (2017) menyatakan bahwa laporan tahunan memiliki keterbatasan dalam pengungkapan modal intelektual. Karena laporan tahunan tidak didesain untuk memberikan informasi tentang pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian, diperlukan media lain untuk mengeksplorasi pengungkapan modal intelektual yang lebih tepat, akurat, dan mudah. Dimana media tersebut, dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada para *stakeholders* terkait *Intellectual Capital Disclosure (ICD)* (Edvinsson, 2013; Dumay, 2016; Cuzzo *et al.*, 2017).

Dalam era digital saat ini, semua kegiatan serta penyampaian informasi dapat dipermudah dengan adanya teknologi. Informasi dapat dengan mudah diperoleh melalui internet (online) (Ulum dan Wijayanti, 2019). Salah satu tempat media online yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi modal intelektual capital adalah website. Hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Ulum *et al.* (2016), Pisano *et al.* (2017), Lardo *et al.* (2017), Rossi *et al.* (2018), Novitasari dan Ulum (2018), Ulum dan Wijayanti (2019), dan Herawati *et al.* (2020). Menurut Dumay (2016) menyatakan bahwa website memiliki peran dalam pengungkapan modal intelektual dalam sector swasta. Hal ini tentu juga dapat di gunakan dalam sector public khususnya perguruan tinggi untuk mendeteksi dan mengungkap modal intelektual yang dimiliki. Beberapa kelebihan pengungkapan informasi secara online diantaranya public bisa mengakses dengan mudah, memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik kepada pihak *stakeholders*, biaya lebih ringan, penyebaran informasi lebih efisien dan efektif (Meijer, 2007; Gandi'a dan Archidona, 2008; Serrano-Cinca *et al.*, 2009; Ivarez *et al.*, 2011).

Penelitian tentang perbandingan pengungkapan modal intelektual antara lima universitas di Indonesia dan lima universitas di Malaysia melalui website dilakukan oleh Ulum *et al.* (2016) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, dan cenderung lebih banyak mengungkap informasi dalam bentuk narasi. Penelitian dilakukan oleh Kuralová dan Margarisová (2016) di universitas negeri Republik Ceko memperoleh hasil bahwa pengungkapan modal intelektual ditingkat menengah dan secara berurutan pengungkapan paling tinggi pada aspek *relational capital*, *structural capital*, dan *human capital*. Penelitian di Universitas Negeri Spanyol dilakukan oleh Ramirez dan Tejada (2016) yang menyatakan bahwa universitas membutuhkan pengungkapan informasi modal intelektual dalam laporan tahunan yang berguna untuk pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian Rossi *et al.* (2018) dilakukan melalui website universitas di Itali dengan hasil bahwa komponen sumber daya manusia dan modal internal paling banyak diungkap, sedangkan komponen modal eksternal masih terbatas yang disebabkan oleh pengaruh positif internasionalitas dan visibilitas online pada ICD.

Novitasari dan Ulum (2018) menyatakan bahwa dari 30 Universitas terbaik di Indonesia versi 4ICU tahun 2018 dalam mengungkap modal intelektual melalui website masih cenderung menggunakan narasi, sedangkan pengungkapan dalam bentuk angka, moneter, dan gambar/grafik masih dibawah 40%. Penelitian lain, dilakukan oleh Ulum *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa dari 30 sampel perguruan tinggi di Indonesia, belum ada yang mengungkap modal intelektual secara penuh sesuai indikator dan universitas tersebut cenderung mengungkap *relational capital* yang menggambarkan capaian dan keunggulan universitas. Selain itu, juga berdampak positif pada calon mahasiswa. Penelitian pengungkapan modal intelektual melalui website dilakukan Ulum dan Wijayanti (2019) pada 44 Universitas Muhammadiyah di Indonesia dengan hasil menunjukan bahwa pengungkapan IC sebesar 16% berupa narasi, 8% berupa angka, 0,15% berupa mata uang, dan 0,75% berupa grafik. Dari 44 perguruan tinggi tersebut, tidak ada yang mengungkap modal intelektual secara lengkap dan masih tergolong rendah. Herawati *et al.* (2020) juga melakukan penelitian tentang pengungkapan modal intelektual perguruan tinggi vokasi di Indonesia dengan hasil bahwa ICD sebagian besar dalam bentuk gambar atau grafik. Jumlah item IC yang tidak diungkap sebesar 47,40%. Sedangkan informasi yang diungkap dalam aspek

structural capital sebesar 66%, relational capital sebesar 43%, dan human capital sebesar 36%.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan lembaga akreditasi independen yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memberikan akreditasi pada perguruan tinggi. Mulai tanggal 1 April 2019, BAN-PT menetapkan instrument baru yaitu Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0. Pada IAPS 4.0 terdiri dari sembilan kriteria. Perbedaan dengan instrument sebelumnya yaitu memecah standar no tujuh menjadi dua kriteria dan menambah satu kriteria baru yaitu luaran dan capaian tridharma. IAPS 4.0 terdiri dari dua bagian yaitu Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).

Penelitian ini mengungkap informasi modal intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Sampel PTKIN di Indonesia dalam penelitian ini berdasarkan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi skala internasional yaitu *Webometrics*. Versi *Webometrics* digunakan sebagai referensi karena salah satu lembaga yang memberikan penilaian terhadap kemajuan perguruan tinggi terbaik di dunia (*World Class University*) melalui official website sehingga dikenal sebagai pemeringkatan web perguruan tinggi (Ranking Web of University). Penelitian ini juga mengacu pada situs resmi masing-masing PTKIN. PTKIN dipilih dalam penelitian karena sejauh ini belum ada yang mengungkap informasi modal intelektual di Perguruan Tinggi dibawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrument akreditasi terbaru yaitu IAPS 4.0 yang dimodifikasi oleh Ulum (2019). Sehingga penelitian ini merupakan penelitian pertama tentang modal intelektual pada PTKIN di Indonesia menggunakan instrument IAPS 4.0.

Hasil penelitian ini melengkapi informasi sebelumnya tentang perkembangan pengungkapan modal intelektual di perguruan tinggi khususnya PTKIN. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada manajemen perguruan tinggi tentang bagaimana pengungkapan modal intelektual yang telah disajikan. Hal tersebut diperlukan, karena pengungkapan modal intelektual bermanfaat untuk meningkatkan daya saing universitas (Ramirez dan Tejada, 2016; Ulum *et al.*, 2019)

Teori stakeholder pertama kali dijelaskan oleh Dr. F. Edward Freeman, profesor di University of Virginia. Teori ini menyatakan bahwa pemangku kepentingan merupakan semua pihak yang terlibat baik yang memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Teori ini juga menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan terletak pada kepuasan semua pemangku kepentingan dan tidak hanya diukur dengan kinerja ekonomi (keuangan). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual juga perlu dipertimbangan sebagai sarana daya saing dan keunggulan kompetitif. Hal ini sejalan dengan Ramirez dan Tejada (2016) bahwa pengungkapan modal intelektual berguna untuk pemangku kepentingan. Pandangan ini menggambarkan bahwa lingkungan organisasi sebagai ekosistem yang perlu dipertimbangan dan dipuaskan untuk menjaga keberlangsungan dalam jangka panjang (Simon, 2016). Sedangkan menurut Deegan (2004) dalam Novitasari dan Ulum (2018) dalam teori ini, organisasi manajemen diharapkan dapat melakukan hal yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan dan menyajikan hal tersebut dalam informasi pada pemangku kepentingan. Teori ini juga menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk menerima informasi tentang sebuah organisasi yang memengaruhinya. Teori ini menjadi pertimbangan dalam etika bisnis dan pengembangan studi termasuk yang ditampilkan di situs web.

Modal intelektual menurut Marr (2018) merupakan kumpulan dari aset tak berwujud dengan pengetahuan yang dimiliki perusahaan (organisasi). Apabila intellectual capital dirujuk pada universitas, maka hal tersebut mencakup semua kekayaan aset non-berwujud termasuk proses, inovasi, kemampuan, bakat, ketrampilan, pengakuan masyarakat, jaringan kolaborator, dan lain-lain (Ramirez dan Gordillo, 2014). Sedangkan universitas merupakan organisasi publik yang harus memenuhi akuntabilitas pada publik. Media online menjadi

sarana untuk menyajikan informasi yang membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Rossi *et al.*, 2018). Intellectual capital di representasikan dalam tiga komponen dasar dan saling berkaitan yaitu (Ramírez dan Gordillo, 2014; Marr, 2018)

- *Human capital* : jumlah pengetahuan eksplisit dan terpendam, keahlian serta pengalaman dari staf universitas (dosen, pejabat struktural, tenaga administrasi) yang didapat melalui pendidikan formal dan non-formal. Menurut Roos et al sumber daya manusia dianggap bagian yang hidup dari sumber daya modal intelektual. Komponen ini akan hilang dengan keluarnya sumber daya manusia. Modal manusia meliputi keahlian, ketrampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Termasuk sikap, bakat, loyalitas, motivasi dan fleksibilitas.
- *Structural capital* : modal yang meliputi berbagai faktor vital seperti pengetahuan eksplisit yang berhubungan dengan proses desiminasi internal, arus komunikasi, gaya kepemimpinan dan manajemen, budaya, kebijakan, dan pengelolaan atas pengetahuan ilmiah dan teknis. . RC dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Organisational capital yaitu lingkungan operasional yang bersumber dari interaksi antara penelitian, manajemen dan proses serta rutinitas organisasi, budaya dan nilai-nilai perusahaan, prosedur internal, kualitas dan ruang lingkup sistem informasi, dan lain-lain
 - b. Technological capital yaitu sumber daya teknologi yang ada di universitas (sumber daya bibliografi dan dokumenter, arsip, pengembangan teknis, paten, lisensi, software, basis data, dan lain-lain
- *Relational capital* : semua hubungan yang meliputi antara ekonomi, politik dan kelembagaan yang dibangun dan dikembangkan antara universitas dengan mitra non akademik (perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintah daerah, dan masyarakat umum). Komponen ini juga termasuk persepsi orang tentang institusi pendidikan, citra, daya tarik, keandalan, reputasi dan lain-lain.

Tiga komponen modal intelektual diatas digunakan sebagai dasar dalam *framework Intellectual Capital Disclosure* di perguruan tinggi berbasis IAPS 4.0 yang dikembangkan oleh Ulum (2019). *Framework ICD* secara keseluruhan sebanyak 60 item (*human capital* 30 item, *structural capital* 18 item, *relational capital* 12 item).

Tabel 1

Intellectual Capital Framework Perguruan Tinggi – IAPS 4.0

Elemen <i>Intellectual Capital</i>	
<i>Human Capital</i>	
HC1	Jumlah Dosen
HC2	Kualifikasi Dosen
HC3	Kompetensi Dosen
HC4	Beban Kerja Dosen
HC5	Jumlah Dosen dengan Pendidikan S3
HC6	Jumlah Dosen yang memiliki kepangkatan Guru Besar
HC7	Jumlah Dosen yang memiliki kepangkatan Lektor Kepala
HC8	Jumlah Dosen yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Pendidik/Industri
HC9	Jumlah Dosen Tidak Tetap
HC10	Jumlah Mahasiswa Aktif
HC11	Jumlah Mahasiswa Baru
HC12	Jumlah Mahasiswa Transfer
HC13	Jumlah Mahasiswa Luar Negeri
HC14	Jumlah Tenaga Kependidikan
HC15	Kualifikasi Tenaga Kependidikan
HC16	Kompetensi Tenaga Kependidikan
HC17	Beban Kerja Tenaga Kependidikan
HC18	Pengakuan atas Kepakaran Dosen

HC19	Publikasi Ilmiah Dosen
HC20	Karya Ilmiah Dosen yang Disitasi
HC21	Produk/Jasa Dosen yang Diadopsi oleh Industri
HC22	Payung Penelitian Dosen-Mahasiswa
HC23	Payung Pengabdian kepada Masyarakat Dosen-Mahasiswa
HC24	Prestasi Akademik Mahasiswa
HC25	Prestasi Non-Akademik Mahasiswa
HC26	Daya Saing Lulusan*
HC27	Kinerja Lulusan**
HC28	Publikasi Ilmiah Dosen bersama Mahasiswa
HC29	Jumlah Artikel Dosen bersama Mahasiswa yang Disitasi
HC30	Produk/jasa Dosen bersama Mahasiswa yang Diadopsi Masyarakat/Industri

Structural Capital

SC1	Visi, Misi, Tujuan (VMT)
SC2	Strategi Pencapaian VMT
SC3	Sistem Tata Pamong (<i>good governance</i>)
SC4	Sistem Penjaminan Mutu
SC5	Sistem Seleksi Mahasiswa
SC6	Layanan Kemahasiswaan***
SC7	Sistem Pengembangan SDM****
SC8	Dana Penelitian Dosen (sumber internal)
SC9	Dana Pengabdian kepada Masyarakat Dosen (sumber internal)
SC10	Sarana dan Prasarana Tridharma
SC11	Sistem Informasi Akademik
SC12	e-Learning
SC13	Sistem Informasi Perpustakaan
SC14	Sistem Informasi Penelitian
SC15	Sistem Informasi
SC16	Kurikulum
SC17	Sistem Pembelajaran
SC18	Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Relational Capital

RC1	Kerjasama Internasional bidang Pendidikan
RC2	Kerjasama Internasional bidang Penelitian
RC3	Kerjasama Internasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat
RC4	Kerjasama Nasional bidang Pendidikan
RC5	Kerjasama Nasional bidang Penelitian
RC6	Kerjasama Nasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat
RC7	Kerjasama Regional bidang Pendidikan
RC8	Kerjasama Regional bidang Penelitian
RC9	Kerjasama Regional bidang Pengabdian kepada Masyarakat
RC10	Jumlah Dana Kerjasama Pendidikan
RC11	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian
RC12	Jumlah Dana Kerjasama PkM

Keterangan:

* waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi dan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi

** Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan

*** Bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.

****Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pension.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu pengungkapan, penjelasan, atau penggambaran suatu fenomena secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara komponen yang bersangkutan dan diselediki (Ulum dan Juanda, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengungkapan modal intelektual di 4 perguruan tinggi keagamaan islam (PTKIN) terbaik di Indonesia menurut Webometrics.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan berdasarkan perolehannya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh dari pihak yang bukan pengolah utamanya.

Teknik perolehan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Data penelitian ini diperoleh dari *official website* dari setiap perguruan tinggi keagamaan islam (PTKIN).

Unit analisis penelitian ini yaitu 4 website perguruan tinggi keagamaan islam (PTKIN) tahun 2024. Komponen *intellectual capital* dikonstruksikan oleh Ulum (2019) yang merupakan modifikasi dari Leitner (2002). Modifikasi yang dilakukan telah menyesuaikan standar perguruan tinggi yang diatur oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri dari 60 item (lihat tabel 1)

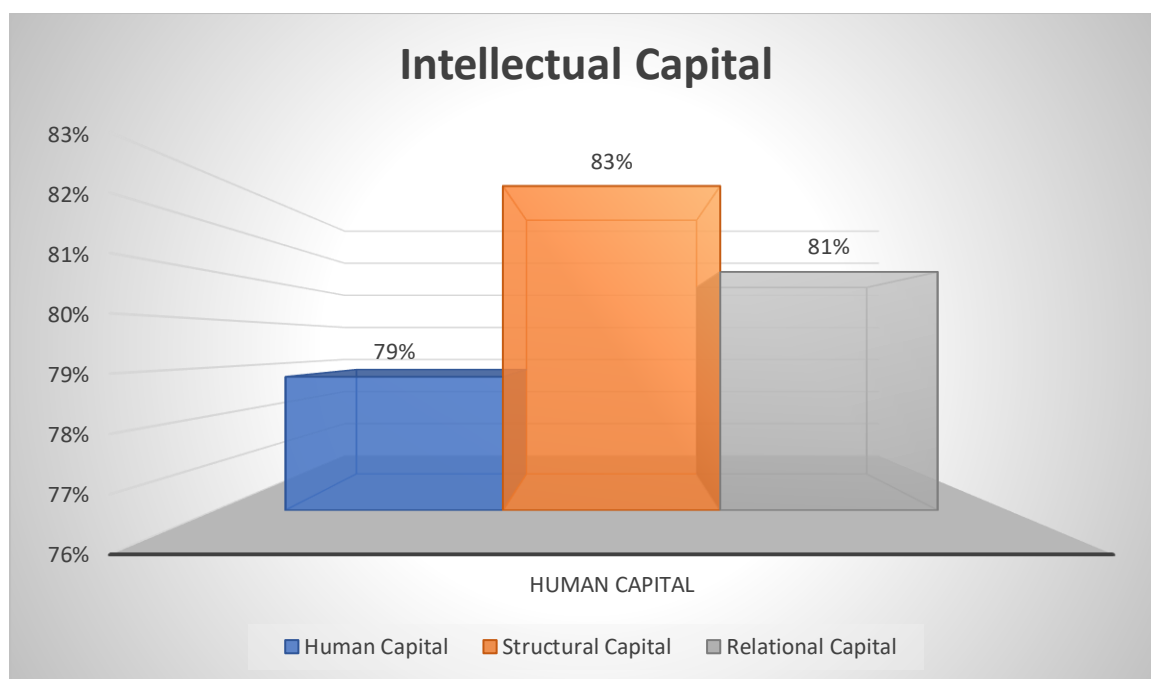
Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah salah satu cara telaah data yang berusaha menguraikan data secara objektif, berurutan dan berbentuk kualitatif. Tujuannya untuk memahami makna / arti suatu teks secara konsisten. *content analysis* biasa digunakan untuk menganalisis teks dalam media. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan gejala berupa simbolik untuk mengungkap makna dalam suatu teks dan mendapatkan pemahaman atas pesan tersebut. Analisis ini dalam penelitian ini yaitu *six ways numbering coding system* (Herawati *et al.*, 2020). *six ways numbering coding system* yaitu menilai kualitas pengungkapan melalui website dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2

Kode	Apabila
0	Item tidak diungkapkan
1	Terdapat judul item, tetapi tidak ada isinya
2	Item diungkapkan dalam format narasi
3	Item diungkapkan dalam format angka
4	Item diungkapkan dalam format satuan moneter
5	Item diungkapkan dalam format grafik/chart/gambar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

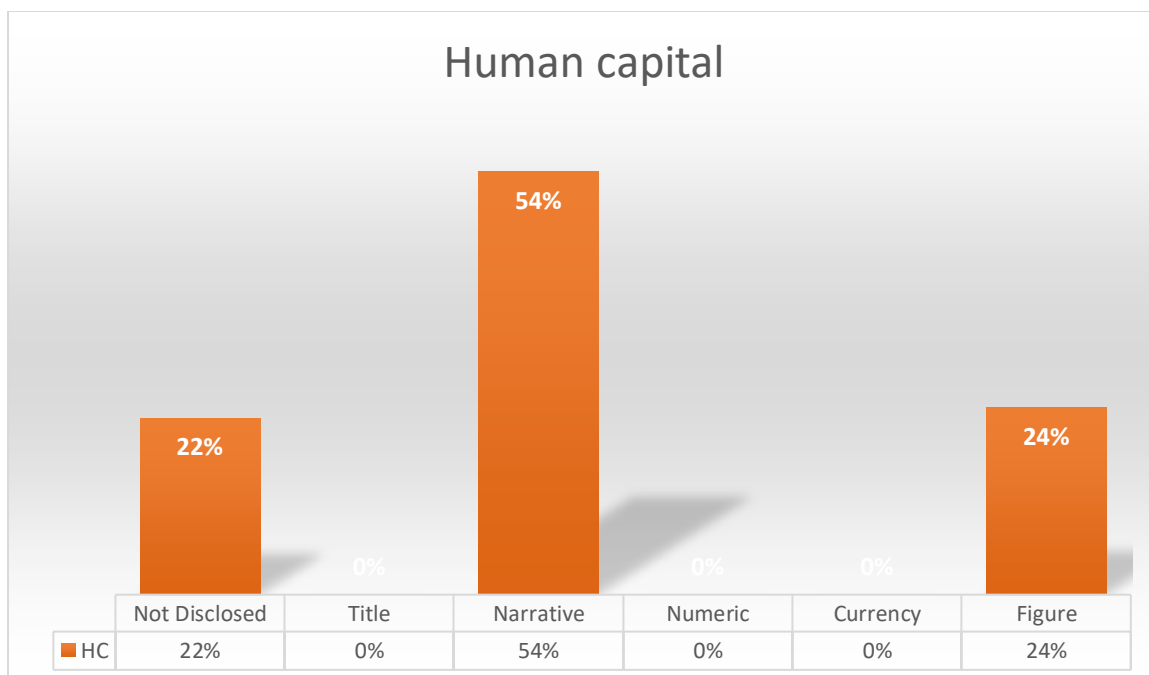
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari hingga 10 Februari 2024. Analisis awal yang dilakukan adalah analisis konten. Metode analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang terungkap mengenai item Indikator Kinerja Utama (IKU) pada situs web resmi pendidikan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) terbaik versi webometric 2024 meliputi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan analisis ini dilakukan dengan menggunakan daftar periksa. Daftar periksa diterapkan pada item yang disajikan di dalam situs web resmi pendidikan tinggi. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai "1" untuk item yang diungkapkan dalam format judul, nilai "2" untuk item yang diungkapkan dalam format narasi, nilai "3" untuk item yang diungkapkan dalam format angka, nilai "4" untuk item yang diungkapkan dalam format satuan moneter, nilai "5" untuk item yang diungkapkan dalam format grafik/gambar, dan "0" jika item tidak diungkapkan sama sekali.



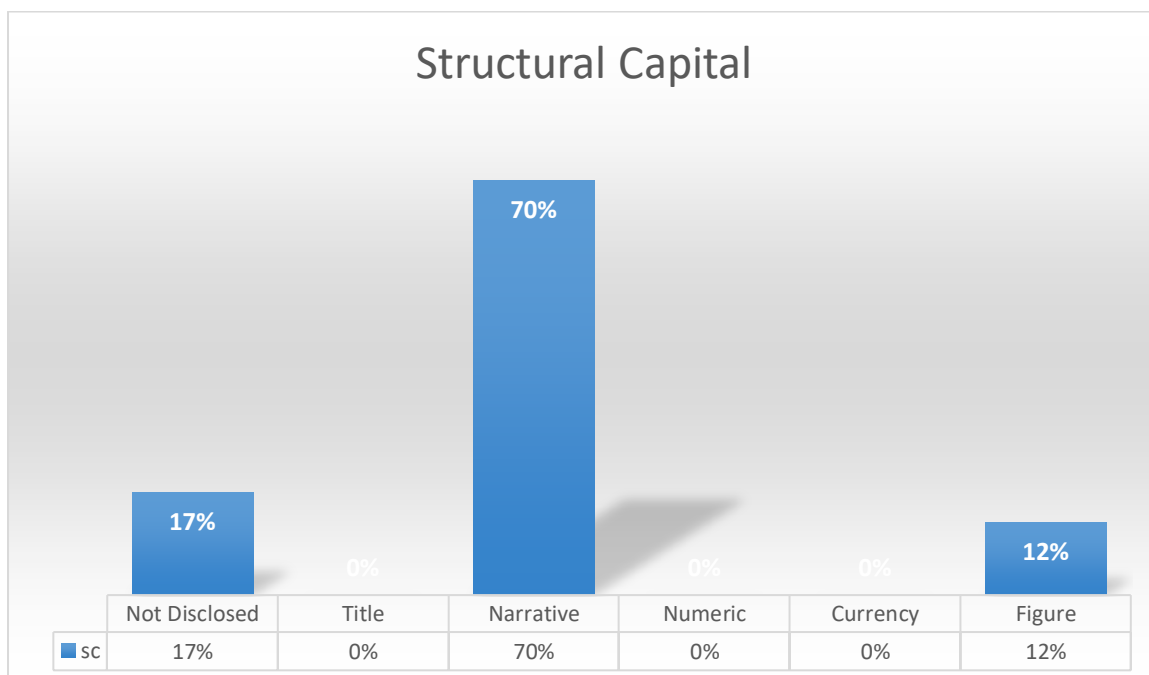
Gambar 1 : Pengungkapan *Intellectual Capital* (IC)

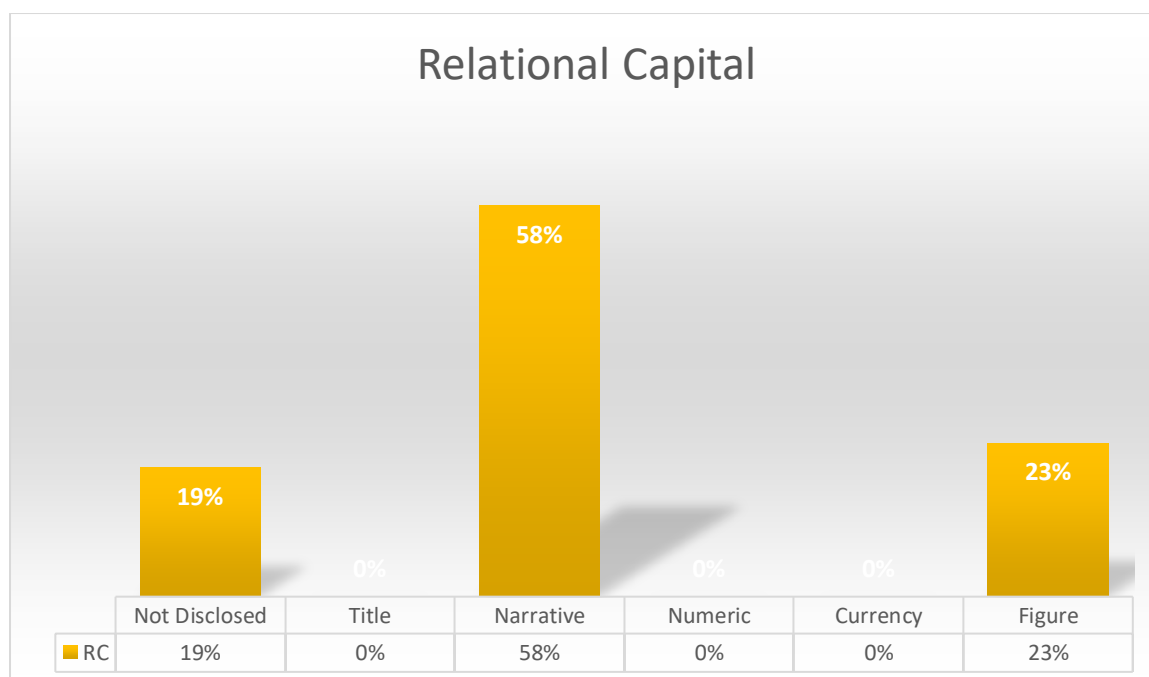
Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *Intellectual Capital* (IC) oleh perguruan tinggi PTKIN relatif serupa. Perguruan tinggi PTKIN yang dijadikan sampel melakukan pengungkapan dari *Human Capital*, *Structural Capital* dan *Relational Capital*, dimana pengungkapan belum mencapai 100%. Pengungkapan IC pada perguruan tinggi PTKIN *Human Capital* mencapai 79% meliputi jumlah dosen, kualifikasi, kompetensi, beban kerja, keahlian, jumlah mahasiswa serta tenaga pendidik. Sedangkan *Structural Capital* mencapai 83% meliputi visi, misi, tujuan (VMT), strategi VMT, tata pamong, penjamin mutu, seleksi mahasiswa, layanan kemahasiswaan, sistem pengembangan SDM, dana penelitian, pengabdian, sarana dan prasarana, sistem informasi akademik, perpustakaan, kurikulum, pembelajaran dan standar penelitian pengabdian. *Relational Capital* mencapai 81% meliputi kerjasama internasional bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, kerja sama nasional, kerja sama regional, dan dana kerjasama.

Gambar 2 menyajikan hasil penelitian mengenai preferensi media yang digunakan oleh 4 perguruan tinggi keagamaan islam negeri dalam menyampaikan informasi tentang *Intellectual Capital* (IC). Berdasarkan data, informasi tentang *human capital* (HC) lebih sering disajikan dalam format narasi mencapai 54% dan dalam format gambar sebesar 24%, serta adanya data yang tidak di ungkapkan sebesar 22%. Tidak terdapatnya pengungkapan dalam format judul, angka dan mata uang yang disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa ke 4 sample perguruan tinggi keagamaan islam negeri cenderung lebih memilih pendekatan naratif dalam mengkomunikasikan informasi tentang human capital, diikuti dengan penyajian angka dan gambar, sementara penggunaan judul, angka dan mata uang tidak ditemukan dalam konteks ini.

Gambar 2 : Pengungkapan *human capital* (HC)

Seperti yang terlihat dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam mengungkapkan informasi tentang *structural capital* (SC) di perguruan tinggi keagamaan islam negeri cenderung lebih sering mengandalkan format naratif. Penyampaian informasi dengan rata – rata pengungkapan 70% dengan format naratif dan 12% dalam format gambar. Pengungkapan informasi tentang *structural capital* (SC) pada sampel penelitian masih ditemukan adanya informasi yang belum diungkapkan oleh perguruan tinggi keagamaan islam negeri yang menjadi sampel.

Gambar 3 : Pengungkapan *structural capital* (SC)

Gambar 4 : Pengungkapan *relational capital* (RC)

Pola pengungkapan informasi tentang *relational capital* (RC) juga menunjukkan proporsi yang serupa, di mana jenis informasi naratif memiliki dominasi yang jelas. Hal ini menandakan bahwa terdapat kecenderungan yang mirip dalam pendekatan komunikasi untuk menggambarkan SC dan RC, dimana narasi menjadi pilihan yang dominan dalam mengkomunikasikan elemen-elemen penting dari kedua aspek tersebut.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur definisi informasi publik sebagai segala data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh lembaga publik terkait dengan penyelenggaraan negara atau kepentingan masyarakat. Lembaga publik tersebut mencakup badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta organisasi nonpemerintah yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan sumber luar negeri. Dengan adanya UU KIP ini, sektor pendidikan tinggi ditekan untuk lebih terbuka karena berada di bawah pengawasan negara, sehingga kinerjanya dapat dimonitor secara ketat oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, dapat diamati bahwa pengungkapan elemen *Intellectual Capital* (IC) dalam institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Melalui analisis isi, terdapat variasi dalam nilai pengungkapan yang disebabkan oleh perbedaan dalam cara penyajian informasi. Beberapa institusi pendidikan tinggi telah memilih untuk menyajikan informasi dalam format grafis, yang mengakibatkan nilai pengungkapan yang lebih tinggi, sedangkan yang lainnya lebih cenderung menggunakan pendekatan naratif, yang pada akhirnya menghasilkan nilai yang relatif lebih rendah dalam konteks pengungkapan IC

4. KESIMPULAN

Gambaran dari data yang disajikan dalam analisis menunjukkan bahwa preferensi media dalam menyampaikan informasi tentang IC di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri lebih cenderung menggunakan pendekatan naratif, diikuti oleh penyajian angka dan gambar. Adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mendorong sektor pendidikan tinggi, termasuk PTKIN, untuk menjadi lebih transparan dan terbuka, seiring dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah.

Secara umum, meskipun terdapat variasi dalam bentuk pengungkapan informasi, baik naratif maupun grafis, namun keseluruhan perguruan tinggi PTKIN memiliki kecenderungan yang serupa dalam pendekatan komunikasi untuk menggambarkan elemen-elemen penting dari

Intellectual Capital (IC), baik dari aspek *Human Capital*, *Structural Capital*, maupun *Relational Capital*. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cuozzo, B., J. Dumay, M. Palmaccio, dan R. Lombardi. (2017). "Intellectual Capital Disclosure: A Structured Literature Review". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 18, No. 1, hlm: 9-28.
- Dumay, J. (2014). "Reflections On Interdisciplinary Accounting Research: The State Of The Art Of Intellectual Capital". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 27, No. 8, hlm: 1257-1264.
- . (2016). "A Critical Reflection On The Future Of Intellectual Capital: From Reporting To Disclosure". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 17, No. 1, hlm.
- Dumay, J., dan L. Cai. (2014). "A Review And Critique Of Content Analysis As A Methodology For Inquiring Into Ic Disclosure". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 15, No. 2, hlm: 264-290.
- . (2015). "Using Content Analysis As A Research Methodology For Investigating Intellectual Capital Disclosure: A Critique". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 16, No. 1, hlm.
- Dumay, J., dan J. Guthrie. (2017). "Involuntary Disclosure Of Intellectual Capital: Is It Relevant?". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 18, No. 1, hlm: 29-44.
- Dumay, J., J. Guthrie, dan P. Puntillo. (2015). "IC And Public Sector: A Structured Literature Review". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 16, No. 2, hlm: 267-284.
- Edvinsson, L. (2013). "IC 21: Reflections From 21 Years Of IC Practice And Theory". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 14, No. 1, hlm: 163-172.
- Gandí'a, J. L., dan M. C. Archidona. (2008). "Determinants Of Web Site Information By Spanish City Councils". *Online Information Review*, Vol. 32, No. 1, hlm: 35-57.
- Herawati, L. I., I. Ulum, A. Juanda, dan D. Syam. (2020). "Pengungkapan Modal Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi Di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, hlm: 107-121.
- Indonesia, R.(2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kuralová, K., dan K. MargarISOVÁ. (2016). "Intellectual Capital Disclosure At Czech Public Universities In Relation To The Stakeholder Information Need". *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol. 64, No. 6, hlm: 1989-1998.
- Lardo, A., J. Dumay, R. Trequattrini, dan G. Russo. (2017). "Social Media Networks As Drivers For Intellectual Capital Disclosure Evidence From Professional Football Clubs". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 18, No. 1, hlm: 66-80.
- Ivarez, I. G.-A., L. Rodríguez-Domí'nguez, dan I.-M. a. Garcí'a-Sa'nchez. (2011). "Information Disclosed Online By Spanish Universities: Content And Explanatory Factors". *Online Information Review*, Vol. 35, No. 3, hlm: 360-385.
- Marr, B. (2018). "Intellectual Capital". Pada *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*, diedit oleh D. J. T. Mie Augier. London: Palgrave Macmillan.
- Meijer, A. J. (2007). "Publishing Public Performance Results On The Internet Do Stakeholders Use The Internet To Hold Dutch Public Service Organizations To Account?". *Government Information Quarterly*, Vol. 24, No. 1, hlm: 165-185.
- Novitasari, I., dan I. Ulum. (2018). "Intellectual Capital Disclosure Of Indonesian Universities: A Five Ways Numerical Coding System". *International Journal of Economics and Research*, Vol. 9, No. 6, hlm: 01-09.

- Pisano, S., L. Lepore, dan R. Lamboglia. (2017). "Corporate Disclosure Of Human Capital Via LinkedIn And Ownership Structure An Empirical Analysis Of European Companies". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 18, No. 1, hlm: 102-127.
- Putra, A. (2017). "Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi". *Integritas*, Vol. 3, No. 1, hlm: 173-189.
- Ramirez, Y., dan S. Gordillo. (2014). "Recognition And Measurement Of Intellectual Capital In Spanish Universities". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 15, No. 1, hlm: 173-188.
- Ramirez, Y., dan A. Tejada. (2016). "The Value Of Disclosing Intellectual Capital In Spanish Universities A New Challenge Of Our Days". *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 29, No. 2, hlm: 176-198.
- Rossi, F. M., G. Nicolò, dan P. T. Polcini. (2018). "New Trends In Intellectual Capital Reporting: Exploring Online Intellectual Capital Disclosure In Italian Universities". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 19, No. 4, hlm: 814-835.
- Salsabilah, A., W. Eka, dan F. Mansur. (2020). "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Pada Perusahaan Intellectual Capital Intensive Industries Di Bursa Efek Indonesia)". *Jambi Accounting Review*, Vol. 1, No. 2, hlm: 217-230.
- Serrano-Cinca, C., Mar Rueda-Toma's, dan P. Portillo-Tarragona. (2009). "Factors Influencing E-Disclosure In Local Public Administrations". *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 27, No. 2, hlm: 355-378.
- Simon, B. (2016). "What Is Stakeholder Theory and How Does It Impact an Organization?" <https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-theory-and-how-does-it-impact-organization>. [diakses pada 15 Desember 2021].
- Ulum, I. (2019). "Intellectual Capital Framework Perguruan Tinggi Di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 3, hlm: 309-318.
- Ulum, I., R. R. Harviana, S. Zubaidah, dan A. W. Jati. (2019). "Intellectual Capital Disclosure And Prospective Student Interest: An Indonesian Perspectives". *Cogent Business & Management*, Vol. 6, No. 1, hlm: 1-13.
- Ulum, I., dan A. Juanda. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Ulum, I., A. Tenrisumpala, dan E. D. Wahyuni. (2016). "Intellectual Capital Disclosure: Studi Komparasi Antara Universitas Di Indonesia Dan Malaysia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, hlm: 13-26.
- Ulum, I., dan P. F. Wijayanti. (2019). "Intellectual Capital Disclosure of Muhammadiyah Universities: Evidence from 4ICU 2018". *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 20, No. 1, hlm: 145-155.

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada Bank Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Tahun 2017-2022

Tesa Yolanda¹, Lisa Amelia Herman², Desi Handayani³
Politeknik Negeri Padang - ¹tesaayolanda@gmail.com
- ²lisaamelia@pnp.ac.id
- ³ci-e@yahoo.com

Abstract - This research aims to compare the health level of Regional Development Banks in the Sumatra Region before and after the 2017-2022 Covid-19 Pandemic. The research method used is the RGEC method as a measure of bank health. The data analysis technique used descriptive statistical analysis and independent sample T-test & Wilcoxon sign-test. The population in this research is Regional Development Bank companies in the Sumatra Region which are registered with the Financial Services Authority (OJK). Data processing was done with the SPSS v.25 program. The study's findings indicate that both before and after the Covid-19 pandemic, the NPL was regarded as being in excellent health. Following the Covid-19 pandemic, LDR is in good health, while GCG is in good health both before and after the epidemic. Prior to the Covid-19 pandemic, ROA was in better health, NIM was in better health, and CAR was in better health following the Covid-19 pandemic. Various tests indicate that there are no significant variations between the NPL, LDR, ROA, and NIM ratios before and after the Covid-19 epidemic, although there are substantial differences between the two in the CAR ratio.

Keywords: Bank Health Level, Analysis Comparison, RGEC, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Perbankan ialah suatu lembaga penting yang ikut berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian sebuah bangsa, khususnya di bidang keuangan, perekonomian, dan pembangunan. Perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga keuangan, termasuk aktivitasnya, usaha komersial, serta metode dan proses yang digunakan untuk menjalankannya (Putra et al., 2023). Lembaga keuangan yang didirikan dan dikendalikan seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah disebut Bank Pembangunan Daerah (BPD). Peran BPD dalam mempercepat dan meningkatkan vitalitas perekonomian bagi pembangunan daerah telah berkembang pesat dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Kesehatan bank diartikan oleh (Putriana & Artati, 2019) sebagai kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas perbankan secara efektif dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang bersangkutan. Jika kita melihat perkembangan perbankan secara historis, kita akan menemukan bahwa permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas merupakan hambatan utama yang menghalangi organisasi keuangan mencapai tujuannya. Hal ini masuk akal mengingat tingkat kesehatan keuangan suatu bank sangat menentukan sukses atau gagalnya suatu bank. Pemerintah menekankan perlunya menilai kondisi industri perbankan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, khususnya ayat 2 pasal 29 tanggal 10 November. Sesuai pasal tersebut, bank harus menjaga standar tertentu. kesehatan bank dengan memenuhi beberapa persyaratan terkait kecukupan permodalan, kualitas aset, pengelolaan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang terkait dengan operasional bank. Selain itu, bank juga harus menjalankan usahanya dengan berpegang pada konsep kehati-hatian.

Kesehatan bank dapat dinilai dengan menggunakan berbagai kriteria. Laporan keuangan bank merupakan salah satu sumber utama indikator yang digunakan dalam evaluasi. Laporan keuangan adalah dokumen formal yang merangkum data keuangan bisnis selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi relevan tentang kinerja operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan perubahan kondisi tersebut. Berbagai pihak menganggap informasi ini berguna dalam proses pengambilan keputusan mereka. Laporan keuangan memungkinkan penghitungan sejumlah rasio, yang merupakan alat penting untuk menilai kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2011, membuat peraturan untuk menilai status keuangan bank secara keseluruhan. Mekanisme ini menggunakan analisis *Risk Based Bank Rating* atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari 4 faktor utama, pemodal (capital), profil risiko (risk profile), rentabilitas (earning) serta *good corporate governance* (GCG). Profil risiko digunakan untuk mengevaluasi risiko internal dan sejauh mana manajemen risiko diintegrasikan ke dalam operasional bank sehari-hari. Faktor kedua, yang umumnya dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik, adalah mengevaluasi kapasitas manajemen bank dalam menerapkan gagasan tata kelola perusahaan yang sehat. Profitabilitas adalah faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan, karena mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari aset modalnya. Terakhir faktor permodalan dan pengelolaan modal dinilai untuk mengetahui tingkat kecukupan dan efisiensi pengelolaan modal oleh bank. Dengan menggunakan analisis RGEC ini, Bank Indonesia dapat menilai secara holistik tingkat kesehatan suatu bank berdasarkan profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas, dan permodalan.

Riset ini dilakukan di Bank Pembangunan Daerah yang terletak di wilayah Sumatera dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di wilayah Sumatera, terdapat 7 perusahaan Bank Pembangunan Daerah, yaitu PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Bengkulu, PT BPD Lampung, Bank Nagari, PT BPD Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung. Namun, data yang lengkap hanya tersedia untuk PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Bengkulu, dan PT BPD Lampung. Sementara itu, data yang diperlukan tidak disajikan dalam laporan keuangan perusahaan untuk bank lainnya, yaitu PT Bank Nagari, PT BPD Riau, dan PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung.

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan mengurangi aktivitas masyarakat dalam sektor ekonomi terutama pada sektor perbankan. OJK pada sektor perbankan, per tanggal 27 Maret 2020 masih terjaga sebesar 2.79%. Namun, menurut Perry Warijoyo, risiko NPL tetap perlu diwaspadai karena akan terjadi perlambatan ekonomi dari menurunnya kinerja perusahaan dan UMKM (djkn.kemenkeu.go.id). Dari uraian diatas menarik penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Sumatera dengan metode RGEC.

Teori Signal (*Signaling Theory*)

Menurut Houghton dan Houston, signal adalah tindakan yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengingatkan investor tentang rencana pengelolaannya di masa depan (Andriani, Ananto, Fitri, et al., 2023). Pihak eksternal perusahaan menggunakan informasi yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk catatan kinerja atau deskripsi untuk menginformasikan keputusan investasi mereka (Andriani et al., 2022). Teori signal sangat berkaitan dengan pemberian informasi laporan keuangan suatu perusahaan berupa signal baik atau buruk (Andriani, 2023). Pemberian signal ini dapat menimbulkan ketidakpastian prospek yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kesuksesan dan kredibilitas suatu perusahaan (Fitri et al., 2023).

Pada penelitian ini, *signaling theory* merupakan implikasi dari bank pembangunan daerah selaku pemberi informasi akan mengisyaratkan kepada calon nasabah, calon investor, dan *stakeholder* lainnya akan kondisi suatu bank pembangunan daerah melalui laporan keuangan maupun rasio keuangan. Sebelum mengambil keputusan *stakeholder* akan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kinerja kesehatan bank pembangunan daerah. Penelitian ini mengkaji tentang kesehatan bank yang diproyeksikan oleh *Non-Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Assets* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

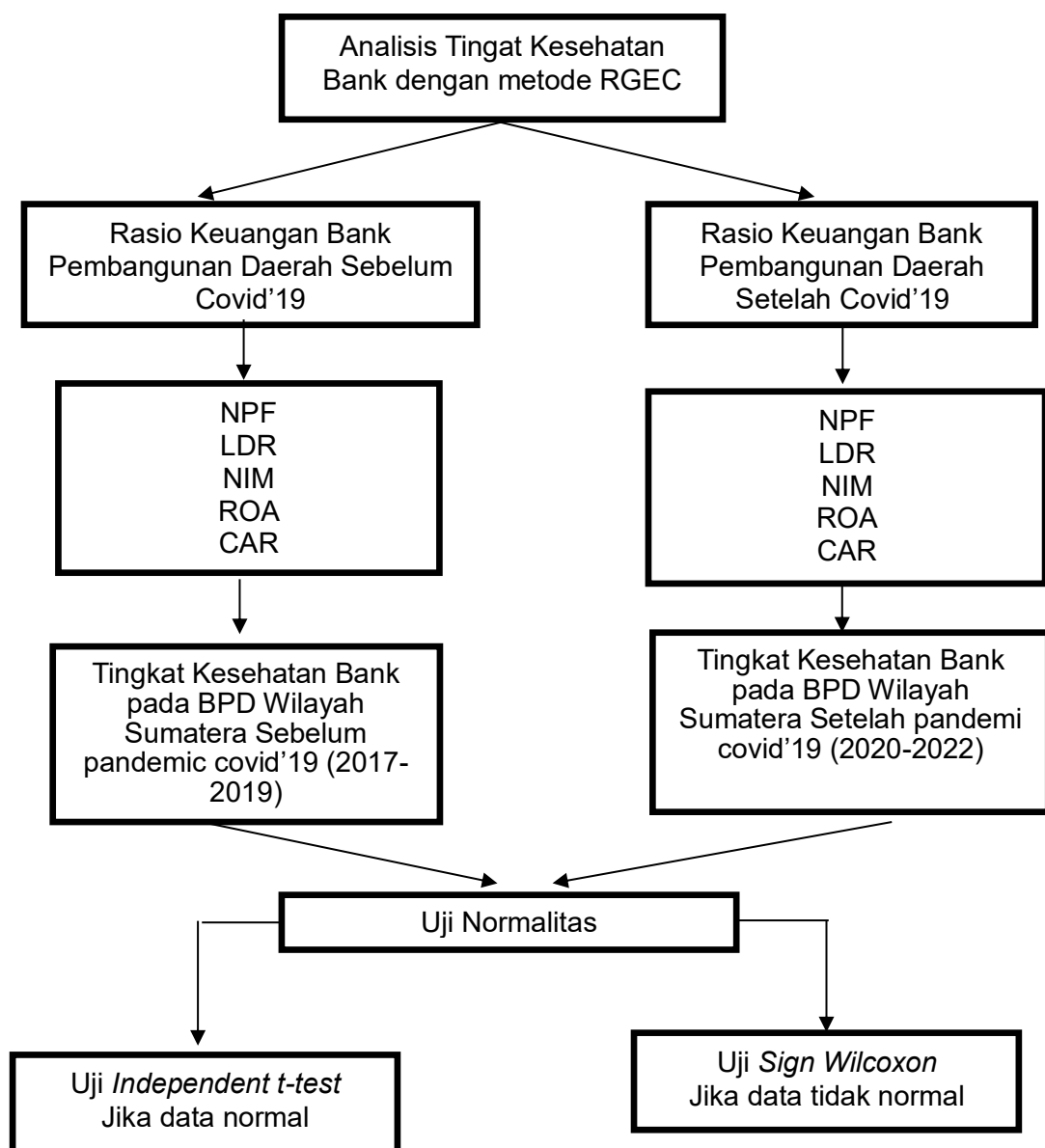
Menurut Andriani et al (2023), teori pemangku kepentingan menyebutkan bahwasanya perusahaan wajib memastikan bahwa perusahaan mempunyai manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingannya sendiri. Pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemasok, analis, pekerja, pemerintah, dan organisasi lain yang merupakan bagian dari lingkungan sosial semuanya dianggap sebagai pemangku kepentingan.

Menurut (Elamer et al. 2017), perbankan memiliki tanggung jawab yang luas terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan, tidak hanya terbatas pada aspek keuangan semata. Hal ini juga berlaku bagi perbankan syariah yang diharapkan untuk secara transparan

mengkomunikasikan kebijakan yang mereka terapkan, terutama terkait dengan jenis risiko yang dihadapi dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Tujuannya adalah memastikan bahwa manajemen bank beroperasi sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Konsep teori pemangku kepentingan adalah dasar dari tata kelola perbankan tradisional.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Membantu manajer bisnis memahami dan mengelola lingkungan pemangku kepentingannya secara efektif adalah tujuan utamanya. Membangun hubungan saling percaya dengan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen perusahaan dalam meningkatkan penawaran nilai inisiatif perusahaan sekaligus mengurangi kerugian pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai hal ini. Teori pemangku kepentingan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas, antara lain yang dilihat dengan rasio ROA, NIM, GCG, dan LDR. Kemampuan dunia usaha dalam memenuhi komitmennya kepada pemangku kepentingan tercermin dalam variabel ini.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan perumusan masalah yang ada, peneliti mengajukan hipotesis-hipotesis berikut ini:

H1: terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah masa pandemi covid'19/

- a. H1.1.0: tidak terdapat perbedaan NPL yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- b. H1.1.1: terdapat perbedaan NPL yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- c. H1.2.0 tidak terdapat perbedaan LDR yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- d. H1.2.1 terdapat perbedaan LDR yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- e. H1.3.0 tidak terdapat perbedaan ROA yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- f. H1.3.1 terdapat perbedaan ROA yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- g. H1.4.0 tidak terdapat perbedaan NIM yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- h. H1.4.1 terdapat perbedaan NIM yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- i. H1.5.0 tidak terdapat perbedaan CAR yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.
- j. H1.5.1 terdapat perbedaan CAR yang signifikan pada tingkat kesehatan bank pembangunan daerah sebelum dan setelah masa pandemi covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa rasio keuangan untuk menilai kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan analisis data deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai stabilitas keuangan Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dan mengkaji pola historis dalam stabilitas tersebut. Laporan keuangan yang diajukan secara resmi ke Otoritas Jasa Keuangan antara tahun 2017 hingga 2022 merupakan data yang diambil dalam penelitian ini. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera.

Tabel 1. Daftar Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera

No	Bank Pembangunan Daerah
1	PT. BPD Lampung
2	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
3	PT. BPD Bengkulu
4	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
5	PT. Bank Nagari
6	PT. BPD Jambi
7	PT. BPD Sumatera Utara

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Purposive sampling adalah pendekatan bertujuan yang digunakan dalam penelitian yang melibatkan pemilihan individu berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan. Sampel penelitian ini menggunakan standar sebagai berikut:

- a. Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2022.
- b. Bank Pembangunan Daerah yang menerbitkan laporan keuangannya saat tahun 2017-2022.
- c. Bank Pembangunan Daerah yang memberikan data laporan keuangan tahunan pada 2017-2022 terkait rasio keuangan yaitu: *Non-Performing Loan* (NPL), rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), rasio *Return on Asset* (ROA), rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Serta hasil penilaian sendiri (*self assessment*) implementasi tata kelola perusahaan.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, terdapat empat bank yang diambil untuk dijadikan sampel penelitian, yakni:

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Bank Pembangunan Daerah
1	PT. BPD Sumatera Utara
2	PT. BPD Jambi
3	PT. BPD Bengkulu
4	PT. BPD Lampung

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sedangkan Tiga Bank lainnya tidak terdapat data yang lengkap sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada riset ini terkait rasio keuangan yaitu *Non Performing Loan (NPL)*, rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, rasio *Return on Asset (ROA)*, rasio *Net Interest Margin (NIM)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Selain hasil evaluasi diri terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Sampelnya tidak mencakup ketiga bank tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dibentuk secara resmi bersama Otoritas Jasa Keuangan antara tahun 2017 hingga tahun 2022 di Wilayah Sumatera Indonesia. Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat umum. Prosedur dokumentasi merupakan metode yang diterapkan untuk mendapatkan data; informasi diambil dari laporan keuangan perusahaan yang telah diajukan dengan benar atau dipublikasikan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu statistic deskriptif, uji normalitas, uji beda (*independent sample T-Test* dan *sign-Wilcoson*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Menggunakan Pendekatan Profil Risiko (*Risk Profile*)

Di bawah ini adalah perhitungan nilai NPL dari Bank Pembangunan Daerah selama periode tahun 2017-2022.

Tabel 3. Nilai NPL Bank Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022

No	Nama Bank	NPL							
		Sebelum Covid-19			Rata-rata	Setelah Covid-19			Rata-rata
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
1	PT BPD Sumut	1.44%	1.35%	1.77%	1.52%	2.24%	1.80%	1.21%	1.75%
2	PT BPD Jambi	0.10%	0.12%	0.44%	0.22%	0.29%	0.31%	0.28%	0.29%
3	PT BPD Bengkulu	0.06%	0.05%	0.11%	0.07%	0.36%	0.49%	0.50%	0.45%
4	PT BPD Lampung	0.05%	1.01%	0.89%	0.65%	1.35%	1.87%	2.18%	1.80%
Rata-rata		0.41%	0.63%	0.80%	0.62%	1.06%	1.12%	1.04%	1.07%

Sumber: Annual Report 2022

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum terjadinya wabah Covid-19, bank pembangunan daerah di Wilayah Sumatera memiliki rata-rata tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,62% yang merupakan peringkat sangat baik. Kendati demikian, rata-rata kredit bermasalah (NPL) meningkat menjadi 1,07% selama pandemi Covid-19 dengan nilai yang masih tinggi. Dengan rata-rata 0,22% < 2%, PT BPD Jambi memiliki NPL terendah sehingga menduduki peringkat 1 (satu) sangat sehat baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19. Rendahnya persentase kredit bermasalah pada PT BPD Jambi menunjukkan bahwa bank tersebut kemungkinan tidak akan mengalami kerugian yang signifikan dalam waktu dekat.

Tabel 4. Nilai LDR Bank Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022

No	Nama Bank	LDR							
		Sebelum Covid-19				Setelah Covid-19			
		2017	2018	2019	Rata-Rata	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	PT BPD Sumut	89.14%	97.91%	94.16%	93.74%	87.62%	81.31%	87.28%	85.40%
2	PT BPD Jambi	100.75%	100.64%	101.37%	100.92%	90.50%	84.68%	95.08%	90.09%
3	PT BPD Bengkulu	89.86%	104.33%	97.06%	97.08%	91.78%	93.41%	90.48%	91.89%
4	PT BPD Lampung	88.22%	98.42%	83.36%	90.00%	89.60%	75.44%	77.47%	80.84%
	Rata-rata	91.99%	100.33%	93.99%	95.44%	89.88%	83.71%	87.58%	87.05%

Sumber: Annual Report 2022

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwasanya sebelum adanya covid-19, rerata LDR Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera adalah 95.44% dengan peringkat cukup sehat. Sedangkan rata-rata LDR setelah pandemi covid-19 sebesar 87.05% dengan peringkat cukup sehat. Nilai LDR paling tinggi sebelum dan setelah pandemi covid-19 terdapat pada PT BPD Jambi dengan rata-rata sebesar 100.92% < 120% peringkat 4 (empat) kurang sehat, artinya total kredit yang diperoleh kurang besar.

Analisis Data Menggunakan Pendekatan Tata Kelola (GCG)

Tabel 5. Pendekatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera Tahun 2017-2022

Nama Bank	Peringkat					
	Sebelum Covid-19			Setelah Covid-19		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PT BPD Sumut	2	2	2	2	2	2
PT BPD Jambi	2	2	2	2	2	2
PT BPD Bengkulu	2	2	2	1	1	1
PT BPD Lampung	2	2	3	2	2	2

Sumber: Annual Report

Tabel 5 menunjukkan bahwa, sebelum dan sesudah epidemi Covid-19, PT BPD Sumatera Utara secara rutin menempati peringkat kedua ketika metrik tata kelola dievaluasi untuk mengukur kesehatan bank secara umum. Hal ini memperlihatkan bahwa, baik sebelum maupun sesudah wabah Covid-19, bank secara umum kuat serta mampu menoleransi dampak negatif signifikan yang disebabkan oleh perubahan perekonomian dan sumber eksternal lainnya.

Analisis Data Menggunakan Pendekatan Rentabilitas (Earnings)

Tabel 6. Nilai ROA Bank Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022

No	Nama Bank	ROA							
		Sebelum Covid-19				Setelah Covid-19			
		2017	2018	2019	Rata-Rata	2020	2021	2022	Rata-rata
1	PT BPD Sumut	2.65%	2.09%	2.21%	2.32%	1.89%	2.00%	2.39%	2.09%
2	PT BPD Jambi	3.65%	3.06%	2.72%	3.14%	3.17%	3.20%	3.43%	3.27%
3	PT BPD Bengkulu	2.02%	1.76%	2.15%	1.98%	2.06%	1.38%	1.82%	1.75%
4	PT BPD Lampung	2.44%	1.82%	1.88%	2.05%	2.20%	1.59%	1.77%	1.85%
	Rata-rata	2.69%	2.18%	2.24%	2.37%	2.33%	2.04%	2.35%	2.24%

Sumber: Annual Report 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas, nilai ROA secara keseluruhan sebelum pandemi Covid-19 sebesar 2,37% dengan peringkat 1 (satu) sangat sehat. Sedangkan pascapandemi Covid-19 rata-rata nilai ROA sebesar 2,24% dengan nilai sangat sehat. ROA terbesar sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dicapai pada PT BPD Jambi dengan penilaian 1 (satu) sangat sehat, menunjukkan bahwa bank tersebut menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat baik, dengan laba yang melebihi target dibandingkan bank lain. Tingkat kesehatan suatu bank akan semakin baik jika nilai ROA besar.

Tabel 7. Nilai NIM Bank Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022
NIM

Nama Bank		Sebelum Covid-19				Setelah Covid-19			
		2017	2018	2019	Rata-Rata	2020	2021	2022	Rata-Rata
PT BPD	Sumut	7.44%	7.36%	7.22%	7.34%	6.80%	6.52%	6.39%	6.57%
PT BPD	Jambi	5.92%	8.04%	5.00%	6.32%	5.49%	6.01%	6.54%	6.01%
PT BPD	Bengkulu	6.12%	7.50%	7.29%	6.97%	5.93%	5.55%	6.92%	6.13%
PT BPD	Lampung	5.26%	5.52%	5.21%	5.33%	5.76%	4.61%	4.85%	5.07%
Rata-rata		6.19%	7.11%	6.18%	6.49%	6.00%	5.67%	6.18%	5.95%

Sumber: Annual Report 2022

Berdasarkan tabel 7 nilai NIM sebelum pandemi covid-19 memiliki rata-rata sebesar 6.49% dengan peringkat sangat sehat. Sedangkan nilai NIM setelah pandemi covid-19 sebesar 5.95% dengan peringkat sangat sehat. Nilai NIM tertinggi sebelum maupun setelah pandemi covid-19 diperoleh pada PT BPD Sumut dengan peringkat 1 (satu) sangat sehat.

Analisis Data Menggunakan Pendekatan Permodalan (*Capital*)

Tabel 8. Nilai CAR Bank Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022
CAR

Nama Bank		Sebelum Covid-19				Setelah Covid-19			
		2017	2018	2019	Rata-Rata	2020	2021	2022	Rata-Rata
PT BPD	Sumut	15.85%	17.85%	18.49%	17.40%	20.99%	20.47%	20.13%	20.53%
PT BPD	Jambi	21.00%	24.44%	22.78%	22.74%	23.90%	25.38%	31.24%	26.84%
PT BPD	Bengkulu	19.36%	19.26%	19.14%	19.25%	24.24%	22.92%	24.52%	23.89%
PT BPD	Lampung	20.57%	19.69%	18.54%	19.60%	27.86%	25.93%	25.47%	26.42%
Rata-rata		19.20%	20.31%	19.74%	19.75%	24.25%	23.68%	25.34%	24.42%

Sumber: Annual Report 2022

Berdasarkan tabel 8 diatas rata-rata CAR sebelum covid-19 sebesar 19.75% dengan tingkat kesehatan bank sangat sehat. Sedangkan setelah pandemi covid-19 rata-rata CAR sebesar 24.42% dengan tingkat kesehatan sangat sehat. Rata-rata tertinggi CAR sebelum maupun setelah pandemi covid-19 terdapat pada PT BPD Jambi dengan peringkat 1 (satu) sangat sehat. Hasilnya, skor CAR yang lebih tinggi menggambarkan kualitas dan kecukupan modal yang lebih baik, sehingga memperkuat tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Sebaliknya, peringkat CAR yang lebih rendah menunjukkan kurangnya kecukupan modal dan kualitas profil risiko bank.

Tabel 9. Uji Normalitas Data Bank Pembangunan Daerah Sebelum Covid-19

Tests of Normality			
<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			
	Statistic	Df	Sig.
NPL	.354	12	.000
LDR	.185	12	.200*
ROA	.400	12	.000
NIM	.205	12	.176
CAR	.216	12	.129

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Olah SPSS

Tabel 10. Uji Normalitas Data Bank Pembangunan Daerah Setelah Covid-19

Tests of Normality			
<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			
	Statistic	Df	Sig.
NPL	.262	12	.022
LDR	.182	12	.200*
ROA	.364	12	.000
NIM	.209	12	.153
CAR	.167	12	.200*

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan hasil Uji *Kolmogorov – Smirnov* pada tabel 9 dan tabel 10 diringkas seperti berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov

Kategori		Kolmogorov-Smirnov			Distribusi
		Statistik	N	Sig.	
NPL	Sebelum Pandemi Covid-19	.354	24	.000	Tidak Normal
	Setelah Pandemi Covid-19	.262	24	.022	
LDR	Sebelum Pandemi Covid-19	.185	24	.200	Normal
	Setelah Pandemi Covid-19	.182	24	.200	
ROA	Sebelum Pandemi Covid-19	.400	24	.000	Tidak Normal
	Setelah Pandemi Covid-19	.364	24	.000	
NIM	Sebelum Pandemi Covid-19	.205	24	.176	Normal
	Setelah Pandemi Covid-19	.209	24	.153	
CAR	Sebelum Pandemi Covid-19	.216	24	.129	Normal
	Setelah Pandemi Covid-19	.167	24	.200	

Sumber: Data Olah SPSS

UJI PAIRED SAMPLE T-TEST (DATA NORMAL)**a. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)**

Berikut hasil uji LDR dengan menggunakan *Paired Sample T-Test*:

Tabel 12. *Pired Sample T-Test*
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	LDR_SEBELUM_COVID & LDR_SESUDAH_COVID	12	.295	.352

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 12, bisa disimpulkan bahwa nilai Sig LDR lebih besar dari nilai signifikansi, dimana $0.352 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio LDR tidak berbeda signifikan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hasilnya, hipotesis H1.2.0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan nyata status kesehatan BPD pada variabel LDR sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 ditolak.

b. NIM (*Net Interest Margin*)

Berikut hasil uji NIM dengan menggunakan *Paired Sample T-Test*:

Tabel 13. *Pired Sample T-Test*
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	NIM_SEBELUM_COVID & NIM_SESUDAH_COVID	12	.273	.390

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 13, bisa disimpulkan bahwa nilai Sig NIM lebih besar dari nilai signifikansi, yakni $0.390 > 0.05$. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio NIM tidak berbeda signifikan sebelum serta sesudah pandemi Covid-19. Dengan demikian, hipotesis H1.4.0 yang menyatakan tidak terdapat perubahan nyata antara nilai variabel NIM terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 ditolak.

c. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Berikut hasil uji CAR dengan menggunakan *Paired Sample T-Test*:

Tabel 14. *Pired Sample T-Test*
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	CAR_SEBELUM_COVID & CAR_SESUDAH_COVID	12	.729	.007

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 14, bisa dilihat bahwa nilai Sig CAR lebih kecil dari nilai signifikansi, yakni $0.007 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa rasio CAR sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 berbeda secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1.5.1 yang menyatakan bahwa variabel CAR menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara status kesehatan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 diterima.

UJI SIGN-WILCOXON (DATA TIDAK NORMAL)**a. NPL (*Non Performing Loan*)**

Berikut hasil uji NPL dengan menggunakan *Signed Ranks Test*

**Tabel 15. Wilcoxon Signed Ranks Test
Test Statistics^a**

	NPL_SESUDAH_COVID - NPL_SEBELUM_COVID
Z	-1.890 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.059

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Olah SPSS

Nilai Z yang ditemukan sebesar -1,890 dengan nilai p (Asymp. Sig. 2 tailed) sebesar 0,059 berdasarkan data pada Tabel 15. Nilai p ini melebihi tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, pilihan hipotesis H1.1.0 ditolak sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara variabel NPL dengan kondisi kesehatan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan sesudah wabah Covid-19.

b. ROA (Return On Asset)

Berikut hasil uji ROA dengan menggunakan *Signed Ranks Test*

**Tabel 16. Wilcoxon Signed Ranks Test
Test Statistics^a**

	ROA_SESUDAH_COVID - ROA_SEBELUM_COVID
Z	-1.732 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.083

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Sumber: Data Olah SPSS

Dapat disimpulkan bahwa nilai Z yang diperoleh sebesar -1,732 dengan nilai p (Asymp. Sig. 2 tailed) sebesar 0,083 berdasarkan data pada Tabel 16. Nilai p ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu hipotesis H1.3.0 ditolak yang mana dikatakan bahwa tidak ada variasi yang signifikan pada variabel ROA antara kesehatan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Tingkat Kesehatan Bank Pembangunan Daerah Menggunakan Metode RGEC sebelum dan Setelah Masa Pandemi Covid-19

Risk Profile (Profil Risiko)

Tabel 17. Persentase Penilaian NPL

Rasio NPL	Peringkat	Predikat	Sebelum Covid-19	Setelah Covid-19
$0\% \leq \text{NPL} < 2\%$	1	Sangat Sehat	0.62%	1.07%
$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$	2	Sehat		
$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	3	Cukup Sehat		
$8\% \leq \text{NPL} < 12\%$	4	Kurang Sehat		
$\text{NPL} \geq 12\%$	5	Tidak Sehat		

Berdasarkan tabel 17 Bank Pembangunan Daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19 masuk predikat sangat sehat. Nilai NPL dapat dikatakan sangat sehat apabila nilai rasionya rendah, dan Bank Pembangunan Daerah memiliki rata-rata rasio NPL sebelum pandemi covid-19 yaitu 0.62% dan setelah covid-19 memiliki rata-rata rasio sebesar 1.07%. Diketahui bahwa sebelum dan setelah masa pandemi covid-19 nilai rasio NPL Bank Pembangunan Daerah dinilai sangat sehat. selama masa pandemi, bank pembangunan daerah dapat mengatasi pembiayaan bermasalah dengan sangat baik, sehingga posisinya dalam predikat sangat sehat dibawah 2%.

Tabel 18. Persentase Penilaian LDR

Rasio LDR	Peringkat	Predikat	Sebelum Covid-19	Setelah Covid-19
$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	1	Sangat Sehat		
$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	2	Sehat		
$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	3	Cukup Sehat	95.44%	87.05%
$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	4	Kurang Sehat		
$\text{LDR} \geq 120\%$	5	Tidak Sehat		

Berdasarkan tabel 18 Bank Pembangunan Daerah sebelum dan setelah covid-19 masuk predikat cukup sehat. Nilai LDR dapat dikatakan sangat sehat apabila nilai rasionya rendah dari 75% dan Bank Pembangunan Daerah memiliki rata-rata rasio LDR sebelum pandemic covid-19 yaitu 95.44% dan setelah covid-19 memiliki rata-rata rasio 87.05% disimpulkan bahwa sebelum masa pandemic covid-19 Bank Pembangunan Daerah dinilai lebih sehat. Namun, rasio LDR sebelum dan setelah pandemi covid-19 berada pada predikat cukup sehat karena berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena total kredit cukup besar.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) pada bank pembangunan daerah wilayah sumatera, dimana terlihat bahwa secara keseluruhan bank memiliki peringkat 2 (dua) tiap tahunnya dengan kategori sehat yang terdapat pada bank PT BPD Sumut, Hal ini menjelaskan mengapa Bank Sumut terus melakukan evaluasi faktor tata kelola secara konsisten dalam menentukan kondisi kesehatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan bank secara umum baik dan mampu menahan dampak negatif besar dari perubahan lingkungan bisnis eksternal. Selain itu, setiap tahunnya PT BPD Jambi memperoleh peringkat 2 (dua) yang menunjukkan bahwa manajemen bank telah berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola dan berhasil menerapkan proses tata kelola yang baik secara komprehensif. Selain itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2019, PT BPD Bengkulu mendapatkan peringkat 2 (dua) dengan kategori sehat. Namun PT BPD Bengkulu mengalami peningkatan peringkat pada kategori sangat sehat yaitu 1 (satu) pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Hal ini membuktikan bahwa manajemen bank telah menerapkan prosedur tata kelola yang kuat, sehingga menghasilkan kinerja yang baik. PT BPD Lampung mengklaim praktik tata kelola yang kuat banyak diterapkan oleh manajemen bank. Namun pada tahun 2019, peringkat mereka turun ke posisi ketiga. Alasan kejatuhan ini adalah berkurangnya pengabdian mereka terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sekalipun ditemui kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kesenjangan tersebut biasanya kecil dan dapat diisi melalui tindakan rutin yang dilakukan oleh manajemen bank.

Earning (Rentabilitas)

Tabel 19. Persentase Penilaian ROA

Rasio ROA	Peringkat	Predikat	Sebelum Covid-19	Setelah Covid-19
$\text{ROA} > 1.5\%$	1	Sangat Sehat	2.37%	2.24%
$1.25\% < \text{ROA} \leq 1.5\%$	2	Sehat		
$0.5\% < \text{ROA} \leq 1.25\%$	3	Cukup Sehat		
$0\% < \text{ROA} \leq 0.5\%$	4	Kurang Sehat		
$\text{ROA} \leq 0\%$	5	Tidak Sehat		

Tabel 19 menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, bank pembangunan daerah berada pada kisaran yang sangat sehat. Jika rasio ROA lebih dari 1,5%, maka bisa dikatakan sangat sehat. Sebelum adanya COVID-19, rata-rata rasio Bank Pembangunan Daerah adalah 2,37%; selama COVID-19 sebesar 2,24%. Nilai rasio ROA terbukti lebih sehat sebelum COVID-19 dibandingkan pada saat COVID-19. Namun karena lebih besar dari 1,5%, angka rasio ROA dinilai sangat sehat baik sebelum atau saat pandemi Covid-19.

Tabel 20. Persentase Penilaian NIM

Rasio NIM	Peringkat	Predikat	Sebelum Covid-19	Setelah Covid-19
$3\% < \text{NIM}$	1	Sangat Sehat	6.49%	5.95%
$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	2	Sehat		
$1.5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	3	Cukup Sehat		
$1\% < \text{NIM} \leq 1.5\%$	4	Kurang Sehat		
$\text{NIM} \leq 1\%$	5	Tidak Sehat		

Berdasarkan tabel 20 Bank Pembangunan Daerah sebelum maupun sewaktu pandemi covid-19 masuk predikat sangat sehat. Nilai NIM dapat dikatakan sangat sehat apabila nilai rasionya lebih tinggi dari 3%, dan Bank Pembangunan Daerah memiliki rata-rata rasio sebelum covid-19 yaitu 6.49% dan setelah covid-19 memiliki rata-rata rasio 5.95%. Bisa dikatakan bahwa nilai rasio NIM sebelum covid-19 lebih sehat dibandingkan setelah covid-19. Namun, nilai rasio NIM sebelum dan setelah pandemi covid-19 berada pada predikat sangat sehat karena berada di atas 3% atau nilai NIM lebih besar dari 3%.

Tabel 21. Persentase Penilaian CAR

Rasio CAR	Peringkat	Predikat	Sebelum Covid-19	Setelah Covid-19
$\text{CAR} \geq 11\%$	1	Sangat Sehat	19.75%	24.42%
$9.5\% \leq \text{CAR} < 11\%$	2	Sehat		
$8\% \leq \text{CAR} < 9.5\%$	3	Cukup Sehat		
$6.5\% \leq \text{CAR} < 8\%$	4	Kurang Sehat		
$\text{CAR} < 6.5\%$	5	Tidak Sehat		

Pendekatan permodalan diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan tabel 21 Bank Pembangunan Daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19 masuk kategori sangat sehat. Jika nilai rasionya lebih dari 11%, maka nilai CAR tergolong dalam kondisi sangat sehat. Sebelum pandemi COVID-19, rata-rata rasio Bank Pembangunan Daerah sebesar 19,75%; selama pandemi sebesar 24,42%. Rasio CAR terbukti lebih baik pascapandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi. Meski demikian, karena lebih besar dari 11%, angka rasio CAR dinilai cukup sehat baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19.

Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Pembangunan Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Untuk mengetahui apakah terdapat disparitas yang signifikan pada status kesehatan Bank Pembangunan Daerah sebelum dan sesudah wabah Covid-19, dilakukan Uji T-Independen untuk menghitung rasio NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR. Sebelum dilakukan Uji T-Independen maka harus dilaksanakan uji normalitas dengan menerapkan Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dahulu. Karena data tidak mengikuti distribusi normal, uji Sign-Wilcoxon digunakan untuk analisis perbedaan.

Tabel 22. Uji Beda Setiap Variabel

No	Variabel	Nilai Statistik	Hasil Uji Beda	Hipotesis
1	NPL	$\text{Sig} = 0,059 > \alpha = 0,05$	Tidak Terdapat Perbedaan	H1.1.0 Ditolak
2	LDR	$\text{Sig} = 0,352 > \alpha = 0,05$	Tidak Terdapat Perbedaan	H.1.2.0 Ditolak
3	ROA	$\text{Sig} = 0,083 > \alpha = 0,05$	Tidak terdapat Perbedaan	H.1.3.0 Ditolak
4	NIM	$\text{Sig} = 0,390 > \alpha = 0,05$	Tidak terdapat perbedaan	H.1.4.0 Ditolak
5	CAR	$\text{Sig} = 0,007 < \alpha = 0,05$	Terdapat Perbedaan	H.1.5.1 Diterima

Dari tabel 22 dapat dijelaskan:

a. NPL (*Non-Performing Loan*)

Indikator risiko pembiayaan yang dinilai dengan NPL (*Non-Performing Loan*)

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil uji Sign-Wilcoxon. Hal ini memperlihatkan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa Bank Pembangunan Daerah masih cukup mampu mengatasi dampak pandemi terhadap pembiayaan bermasalah sehingga tidak berdampak serius terhadap Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera.

b. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Indikator risiko pembiayaan yang ditentukan dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,352 atau lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil Uji Paired Sample T-Test. Hal ini memperlihatkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah masih cukup mampu mengatasi dampak pandemi sehingga tidak berdampak serius terhadap Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera.

c. ROA (*Return on Asset*)

Indikator pembiayaan risiko yang ditentukan dengan ROA (*Return on Assets*) berdasarkan hasil uji Sign-Wilcoxon memperoleh nilai signifikansi senilai 0,083 bahkan lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ditemui perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menjelaskan bahwasannya Bank Pembangunan Daerah masih cukup mampu mengatasi dampak pandemi terhadap pembiayaan bermasalah sehingga tidak berdampak serius terhadap Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera.

d. NIM (*Net Interest Margin*)

Indikator pembiayaan risiko yang ditentukan dengan NIM (*Net Interest Margin*) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,390 atau lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil Uji Paired Sample T-Test. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah masih cukup mampu mengatasi dampak pandemi sehingga tidak berdampak serius terhadap Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera.

e. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Berdasarkan hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Paired Sample T-Test, indikator risk financing mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari batas cutoff sebesar 0,05. Artinya, indikasinya berbeda jauh sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Perbedaannya mulai bergerak ke arah hasil yang lebih baik. Sebelum terjadi wabah Covid-19, nilai CAR sebesar 19,75%. Selama pandemi meningkat sebesar 4,67% hingga mencapai 24,42%. Bank Pembangunan Daerah menerapkan kehati-hatian dalam menyalurkan dana di masa pandemi Covid-19 guna mengurangi potensi bahaya akibat kondisi yang tidak stabil.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Desi Handayani, Rangga Putra Ananto dan Ferdawati yang berjudul "Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya memperlihatkan tingkat kesehatan bank, terutama dalam konteks pandemi covid-19 yang berdampak pada kinerja BPRS Al-Makmur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kesehatan BPRS Al-Makmur menggunakan beberapa rasio, yaitu *Non-Performing Financing* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dua indikator keuangan yang disebutkan oleh pengguna: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Operating Margin (NOM). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa BPRS Al-Makmur berada dalam kondisi sehat, ditunjukkan dengan persentase Non-Performing Financing (NPF) yang menunjukkan pertumbuhan stabil pada triwulan I dan II tahun 2020. Pada kedua triwulan tersebut, Finance to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang kuat. Berdasarkan analisis Return on Assets (ROA), kinerja bank pada triwulan I sangat baik dan triwulan II cukup baik. Sementara itu, bank mempertahankan tingkat yang kuat di kedua kuartal, berdasarkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tingkat kesehatan yang buruk pada triwulan 1 dan bahkan kurang baik pada triwulan 2 tercermin pada rasio Net Operating Margin (NOM).

Disamping itu, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan kesehatan keuangan pada triwulan 1 memuaskan dan sangat memuaskan pada triwulan 2. (Desi Handayani, Rangga Putra Ananto dan Ferdawati, 2020)

4. KESIMPULAN

Dari riset dan analisis yang sudah dilaksanakan bisa disimpulkan tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dengan teknik RGEC yang meliputi *Capital Adequacy Ration* (CAR), *Non-Performed Loan* (NPL), *Net Interested Margin* (NIM), *Return on Aset* (ROA) serta *Good Corporate Governance* dimana :

- Berdasarkan analisis aspek profil risiko dengan menggunakan rasio NPL dan LDR, kondisi kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Sumatera dinilai sangat sehat jika dilihat dari rasio NPL sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.
- Pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan bank pembangunan daerah di Wilayah Sumatera juga mempertimbangkan variabel Good Corporate Governance (GCG). Faktor-faktor tersebut dinilai berdasarkan temuan self-assessment yang dituangkan dalam laporan tahunan BPD.
- Berdasarkan indikator profitabilitas seperti ROA dan NIM, analisis status kesehatan bank pembangunan daerah di Wilayah Sumatera menunjukkan bahwa rasio ROA bank-bank tersebut mendapat predikat “sangat sehat” baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19.
- Pertimbangan permodalan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) juga menjadi pertimbangan dalam menganalisis kesehatan bank pembangunan daerah di Wilayah Sumatera.

Berdasarkan hasil pengujian, berikut adalah saran yang dapat disampaikan untuk menjadi masukan dan penyempurna bagi peneliti selanjutnya:

- Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, disarankan agar Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Sumatera menaikkan peringkat kesehatan banknya. Hal ini akan mendukung menjaga stabilitas manajemen bank. Faktor likuiditas, seperti LDR yang mendapat peringkat tiga (tiga) atau bilamana dalam kondisi sehat selama masa penelitian, patut mendapat pertimbangan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih relatif rendah, hal ini bisa jadi karena adanya relatif tinggi jumlah kredit.
- Diharapkan masyarakat lebih berhasil dalam menyalurkan dana dan menanyakan keadaan bank tersebut. Hal ini karena kondisi kesehatan bank dapat memberikan gambaran tentang keadaan bank tersebut. Dengan mengetahui informasi tersebut, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih lembaga keuangan yang tepat untuk bertransaksi atau melakukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 25 Oktober
- Handayani, Desi, Rangga Putra Ananto dan Ferdawati. (2020). “Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)”, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2): 60–69
- Andriani, W. (2023). Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 951–959. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3094>
- Andriani, W., Ananto, R. P., Fitri, W. N., & Aprila, D. (2023). Corporate Policy Strategy Based on Comparison of Financial Performance Due to the Impact of the Covid-19 Pandemic. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(1), 70–91. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.662>
- Andriani, W., Ananto, R. P., Rosalina, E., Fitri, W. N., & Aprila, D. (2022). Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Perubahan Kebijakan Perusahaan Sektor Teknologi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 7(2), 54–61. <https://doi.org/10.30871/jaat.v7i2.4701>
- Andriani, W., Ananto, R. P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The Influence of Financial Literacy and Educational Background on the Financial Governance of Nagari Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 742–754. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.928>
- Desi Handayani, R. P. A. dan F. (2020). Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

- Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 60–69.
- Fitri, W. N., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Performance of Infrastructure Companies Before and During the Covid-19. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 18(1), 114–123. <https://doi.org/10.37301/jmubh.v18i1.22064>
- Putra, A. Y., Sriyuniarti, F., & Rissi, D. M. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Pemerintah Daerah Tahun 2019-2022). *Menara Ekonomi*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4759>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Sustainability Report Disclosure* Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Indeks LQ45 BEI Tahun 2018-2021

Indrawati Mara Kesuma¹, Yuli Nurhayati², Dian Wulan Sari³, Mohammad Adha Harokah⁴
Universitas Bina Insan-¹fairuz.Ukail@gmail.com

²yuli_nurhayati@univbinainsan.ac.id

³dian_wulansari@univbinainsan.ac.id

⁴1901020056@univbinainsan.ac.id

Abstract-This study aims to analyze the effect of financial performance by proxy ROA, ROE, NPM, PBV and MarketCap on the disclosure of sustainability reports in companies listed on the LQ45 index of the Indonesia Stock Exchange (IDX). In Indonesia, sustainability reports are not mandatory (voluntary) reports, but companies have started to care about and are aware of the importance of reports such as sustainability reports. The data used is secondary data and the method used is panel data regression analysis with the help of the Eviews 12 program. The population in this study are companies listed on the LQ45 index on the Indonesian Stock Exchange, totaling 45 companies. The sample selection used a purposive sampling method. There are 15 companies that meet the sampling criteria. The results of this study indicate that the ROA, ROE, NPM, PBV and Market Capitalization has a significant effect on sustainability report disclosure and have samples from populations of the same variance. ROA and MarketCap variables have a negative and significant effect on the sustainability report disclosure. The NPM variable has a positive and significant effect on the sustainability report disclosure. While the ROE and PBV variables have no effect on the the sustainability report disclosure. With an Adjusted R² value of 39.16%.

Keyword : ROA, ROE, NPM, PBV, MarketCap, Sustainability Report, LQ45

1. PENDAHULUAN

Umumnya tujuan utama dari operasional dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan *profit* dan memenuhi keinginan pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan perusahaan untuk menjadi lebih baik (Nurdiah & Asrori, 2021). Seiring dengan berkembangnya zaman, tujuan tersebut tidak lagi hanya cukup pada laba atau keuntungan, tetapi juga perusahaan harus bisa berkontribusi dengan baik kepada karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungan. Hal ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir perusahaan mulai melaporkan informasi non-keuangan perusahaan seperti aspek sosial dan lingkungan (Fatmawati & Trisnawati, 2022). Informasi non-keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan ini terdapat dalam laporan berkelanjutan perusahaan atau *sustainability report*.

Organisasi internasional yang menjadi acuan regulasi dari *sustainability report* yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI) menyebutkan bahwa Laporan keberlanjutan adalah laporan yang mengungkapkan dan mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu organisasi terhadap masyarakat dan melaporkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan. (*Global Sustainability Standards Board*, 2016). Laporan berkelanjutan atau *sustainability report* di Indonesia merupakan laporan sukarela yang tidak mewajibkan perusahaan melaporkan laporan tersebut.

Dikutip dari (Majalahcsr.id, 2022) Menurut Direktur Keuangan dan SDM Bursa

Efek Indonesia (BEI), pelaporan laporan keberlanjutan yang di laporkan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI semakin meningkat. Peningkatan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dapat di lihatpada Tabel 1. dibawah ini:

Tabel I. Perusahaan yang Mengungkapkan SR dari tahun 2017-2021

NO	Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Jumlah Perusahaan yang Mengungkapkan Laporan Keberlanjutan
1	2017	559	56
2	2018	614	70
3	2019	668	110
4	2020	715	54
5	2021	766	154

Sumber : Widyaksa (2022), www.idx.co.id

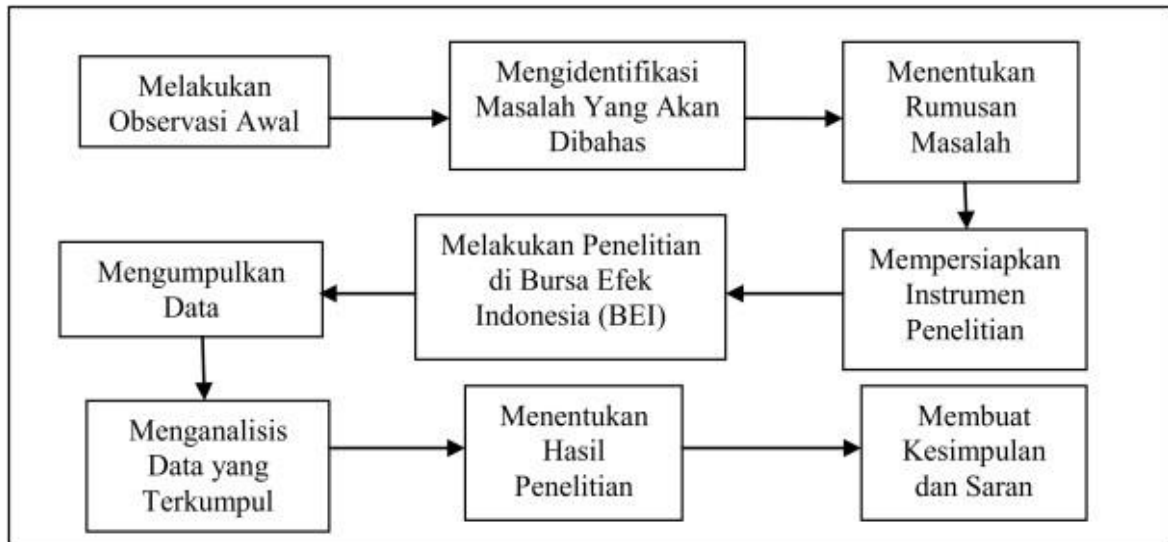
Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang terdaftar di BEI mulai peduli dan sadar akan pentingnya pengungkapan *sustainability report* atau laporan berkelanjutan yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melaporkan laporan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2020 menurun yang diperkirakan peneliti akibat wabah Covid-19.

Kinerja keuangan dan laporan keberlanjutan memiliki hubungan kausalitas yang saling memengaruhi. Menurut Belascu dan Horobet Kinerja keuangan dapat memengaruhi laporan keberlanjutan dan sebaliknya laporan keberlanjutan dapat memengaruhi kinerja keuangan (dalam Ching et al., 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Mujiani & Nurfitri, 2020), (Tobing et al., 2019), (Yunan et al., 2021) yang menunjukan bahwa profitabilitas sebagai variabel kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dan penelitian Lee and Pati (2012), Aggarwal (2013), Buchholz et al., (2020) (dalam Garcia, 2021) yang menunjukan bahwa pengungkapan *sustainability report* berpengaruh terhadap ROA dan profitabilitas sebagai variabel kinerja keuangan. Penelitian ini akan meneliti hubungan kausalitas kinerja keuangan yang memengaruhi laporan berkelanjutan.

Pada penelitian sebelumnya juga, pengukuran pengungkapan *sustainability report* hampir semuanya menggunakan GRI *guidelines* seperti GRI-G4 dan GRI *Standard*. Merujuk pada sumber *youtube* (EduPendentTraining, 2022) yang merupakan media *sharing* dan pembelajaran tentang akuntansi lingkungan dengan topik pembahasan CSR dan *sustainability report* menyebutkan bahwa pengukuran pengungkapan *sustainability report* memungkinkan dan sangat *acceptable* untuk menggunakan pedoman penyusunan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 karena GRI *guidelines* memiliki indikator pengungkapan yang sangat banyak. Beberapa perusahaan LQ45 seperti PT Antam Tbk pada tahun 2021 menggunakan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 sebagai acuan standar teknis pelaporan *sustainability report* selain acuan dari GRI. Maka dalam penelitian ini pengukuran variabel pengungkapan *sustainability report* menggunakan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 sebagai instrumen pengukuran *sustainability report disclosure*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2021 adalah populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi adalah 45 perusahaan indeks LQ45. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang dijelaskan seperti dibawah ini:

Tabel 2. Seleksi Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi	45
2	Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar pada indeks LQ45 periode 2018 hingga 2021.	(17)
3	Perusahaan yang tidak konsisten menerbitkan <i>Sustainability Report</i> (SR) periode 2018 hingga 2021.	(8)
4	Perusahaan sector perbankan dan keuangan lainnya.	(5)
6	Jumlah Sampel	15
7	Jumlah sampel selama periode penelitian $n=4$	60

Sumber: Data Sekunder, diolah (2022)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel. Data sekunder dalam penelitian ini adalah *annual report* dan *sustainability report* perusahaan yang di dapat dari IDX dan situs resmi perusahaan. Teknik Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi data *cross-sectional* dan *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa variabel yang sama dalam runtut waktu tertentu. Uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas membentuk uji asumsi klasik. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ROA, ROE, NPM, PBV dan *Market Cap* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Tabel 3. Hasil Uji F

R-squared	0,587549
Adjusted R-squared	0,391635
S.E. of regression	0,139657
Sum squared resi	0,780167
Log likelihood	45,14143
F-statistic	2,999013
Prob(F-statistic)	0,001703

Sumber : *Output Eviews 12*, Olahan Peneliti(2023)

Tabel 3. menunjukkan bahwa ROA, ROE, NPM, PBV dan *Market Capitalization* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dan memiliki sampel dari populasi dari varian yang sama. nilai F- hitung sebesar 2,99901 dan *probability F- statistic* sebesar 0,001703. Nilai *probability* 0,001703 lebih kecil dari 0,05 ($0,001703 < 0,05$) dan F- hitung 2,38607 lebih besar dari F-tabel 2,38607 ($2,38607 > 2,38607$) berarti Sampel dalam variabel ROA, ROE, NPM, PBV dan *Market Capitalization* berasal dari populasi yang memiliki varians sama dalam memengaruhi secara signifikan pengungkapan *Sustainability Report*.

Kinerja keuangan dan laporan keberlanjutan memiliki hubungan kausalitas yang saling memengaruhi. Menurut Belascu dan Horobet Kinerja keuangan dapat memengaruhi laporan keberlanjutan dan sebaliknya laporan keberlanjutan dapat memengaruhi kinerja keuangan (dalam Ching et al., 2017).

Pengaruh ROA terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Tabel 4. Hasil Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	3,269052	0,0022
ROA	-3,429551	0,0014
ROE	-1,606450	0,1160
NPM	3,244393	0,0024
PBV	1,510697	0,1387
MarketCap	-2,293213	0,0272

Sumber : *Output Eviews 12*, Olahan Peneliti(2023)

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. ROA memperoleh nilai *t-statistik* atau t-hitung sebesar -3,4296 dengan *probability* sebesar 0,0014. Nilai *probability* yaitu sebesar 0,0014 lebih kecil dari 0,05 ($0,0014 < 0,05$) berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ROA maka semakin luas/banyak pengungkapan *sustainability report*.

ROA merupakan salah satu rasio dari profitabilitas, menurut teori legitimasi, jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi maka pihak manajemen menganggap tidak perlu melaporkan apapun yang dapat mengganggu informasi terkait keberhasilan keuangan perusahaan. Sedangkan jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang rendah, manajemen akan lebih mengungkapkan laporan-laporan yang dapat menarik *stakeholder* untuk mengetahui informasi di luar informasi keuangan perusahaan seperti *sustainability*

report, yang artinya pengungkapan *sustainability report* dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian pengguna informasi mengenai turunya kinerja manajemen dalam menghasilkan laba sehingga tetap mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari stakeholder. Pengaruh ROA terhadap pengungkapan *sustainability report* ini sesuai dengan penelitian (Nurdiah & Asrori, 2021), (Tobing et al., 2019) dan (Yunan et al., 2021).

Pengaruh ROE terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. ROE memperoleh nilai *t-statistik* atau *t-hitung* sebesar -1,6065 dengan *probability* sebesar 0,1160. Nilai *probability* yaitu sebesar 0,1160 lebih besar dari 0,05 ($0,1160 > 0,05$) berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Sama dengan ROA, ROE juga merupakan rasio dari profitabilitas namun dengan perbandingan laba dan ekuitas. Jika dilihat dari perbandingan pengukurannya maka ekuitas atau modal perusahaan yang berperan dalam kausalitas ini. Ekuitas ini menggambarkan nilai uang yang diberikan oleh investor saat membeli saham sebuah perusahaan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Perusahaan-perusahaan indeks LQ45 merupakan kumpulan perusahaan besar dengan ekuitas yang besar. Menurut teori legitimasi, perusahaan-perusahaan besar sebenarnya tidak perlu mengungkapkan laporan sukarela seperti *sustainability report* untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* karena perusahaan sudah mendapatkan legitimasi dari latar belakang dan kinerja utama perusahaan. Hubungan ini sesuai dengan penelitian (Saadah et al., 2020) dan (Laurencia & Roekhudin, 2019).

Pengaruh NPM terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel NPM berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. NPM memperoleh nilai *t-statistik* atau *t-hitung* sebesar 3,2444 dengan *probability* sebesar 0,0024. Nilai *probability* yaitu sebesar 0,0024 lebih kecil dari 0,05 ($0,0024 < 0,05$) berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPM maka semakin luas/banyak pengungkapan *sustainability report*.

NPM merupakan salah satu gambaran kinerja keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, yang ditunjukkan dengan profitabilitas yang tinggi, dorongan bagi manajer untuk memberikan informasi yang lengkap akan semakin kuat, karena mereka pasti menginginkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan akan meningkat. Sesuai dengan teori *stakeholder*, *legitimacy* dan *signal* dimana perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan dan sekaligus memberikan informasi yang baik tentang perusahaan kepada pemangku kepentingan. Hubungan ini sesuai dengan penelitian (Liana & Kunci, 2019), (Dewi, 2019) dan (Nurdiah & Asrori, 2021)

Pengaruh PBV terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel PBV tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. PBV memperoleh nilai *t-statistik* atau *t-hitung* sebesar 1,5106 dengan *probability* sebesar 0,1387. Nilai *probability*

yaitu sebesar 0,1387 lebih besar dari 0,05 ($0,1387 > 0,05$) berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

PBV menggambarkan permintaan pasar akan saham perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini PBV tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dikarenakan populasi dan sampel dari penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 BEI dimana perusahaan indeks LQ45 merupakan perusahaan yang paling aman untuk dibeli sahamnya sehingga permintaan akan saham perusahaan tidak akan berpengaruh jika perusahaan tidak memperhatikan pengungkapan *sustainability report*. Sesuai dengan sinyal bahwa perusahaan dapat memberikan informasi yang baik tidak harus dengan pengungkapan *sustainability report*, dengan terdaftar di indeks LQ45 perusahaan sudah memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik.

Pengaruh *MarketCap* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel *MarketCap* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. *MarketCap* memperoleh nilai *t-statistik* atau *t-hitung* sebesar -2,2932 dengan *probability* sebesar 0,0272. Nilai *probability* yaitu sebesar 0,0272 lebih kecil dari 0,05 ($0,0272 < 0,05$) berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator *MarketCap* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil *MarketCap* maka semakin luas/banyak pengungkapan *sustainability report*.

Kapitalisasi pasar merupakan nilai kekayaan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini kapitalisasi pasar berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report* dikarenakan semakin kecil kapitalisasi pasar perusahaan maka perusahaan semakin memerlukan laporan yang dapat menarik para *stakeholder* agar percaya terhadap perusahaan tersebut. Sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan memerlukan pengakuan dari *stakeholder* untuk keberlanjutan perusahaan dengan menerbitkan *sustainability report*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Ching et al., 2017).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dengan proksi ROA, ROE, NPM, PBV dan *MarketCap* terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai *probability* F lebih kecil dari 0,05 yang artinya ROA, ROE, NPM, PBV dan *Market Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* dan memiliki sampel dari populasi dari varian yang sama.
- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa koefisien ROA bernilai negatif dan pada uji t nilai *probability* dibawah 0,05 yang artinya ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- Hasil uji t menunjukkan nilai *probability* diatas 0,05 yang artinya ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa koefisien NPM bernilai positif dan pada uji t nilai *probability* dibawah 0,05 yang artinya NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- Hasil uji t menunjukkan nilai *probability* diatas 0,05 PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

- f. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa koefisien *MarketCap* bernilai negatif dan pada uji t nilai *probability* dibawah 0,05 yang artinya *MarketCap* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainabilityreport*
- g. Nilai *Adjusted R-Squared* (R^2) sebesar 0,3916 Yang menunjukkan menunjukkan kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen sebesar 39,16%, sedangkan sisanya sebesar 60,84% (1-0,3916) dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dijelaskandalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ching, H. Y., Gerab, F., & Toste, T. H. (2017). The Quality of Sustainability Reports and Corporate Financial Performance: Evidence From Brazilian Listed Companies. *SAGE Open*, 7(2).<https://doi.org/10.1177/2158244017712027>
- Dewi, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Serta Dampaknya Kepada Nilai Perusahaan. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 7(3), 173–186. www.idx.co.id,
- EduPendentTraining. (2022). *Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting*.https://youtu.be/73M8zwB_9KM
- Fatmawati, V., & Trisnawati, R. (2022). The Effect of Leverage, Profitability, Activity, and Corporate Governance on Sustainability Reporting Disclosure. *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)*, 655(Icoebs), 66–74.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.010>
- García, M. L. S. (2021). *SustainabilityReporting in Cooperatives*. March 2022.
<https://doi.org/10.3390/risks9060117>
- Global Sustainability Standards Board.(2016). Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan. *Global Reporting Initiative*, 30.
- Laurencia, E., & Roekhudin. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(1), 1–33.
- Liana, S., & Kunci, K. (2019). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Ukuran Perusahaan , dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sustainability Report*. 2(2), 199–208.
- Majalahcsr.id. (2022). *Pelaporan Keberlanjutan Meningkatkan Seiring Naiknya Investor di Indonesia*. 24 February 2022.
<https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-indonesia/>
- Mujiani, S., & Nurfitri, T. (2020). AnalisisFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 18–35.
<https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/1042>
- Nurdiah, N., & Asrori, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Sustainability Report dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(1),15–36.
<https://doi.org/10.56696/jaka.v2i1.5146>
- Saadah, N., Agriyanto, R., Warno, W., & Mustika, W. P. (2020). the Effect of Financial Performance, Company Size and Good Corporate Governance on Sustainability Report. *AFEBI Accounting Review*, 5(01), 57.
<https://doi.org/10.47312/aar.v5i01.319>

- Tobing, R. A., Zuhrotun, Z., & Rusherlistyani, R. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 102–123. <https://doi.org/10.18196/rab.030139>
- Widyaksa, T. (2022). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. Universitas Sriwijaya.
- Yunan, N., Kadir, & Anwar, K. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Karakteristik Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Corporate Governance Terhadap Sustainability Rreporting. *Duconomics Sci-Meet (Education & Economics Science Meet)*, 1(01), 281–295. <https://doi.org/10.37010/duconomics.v1.5454>

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Di Bank Umum Syariah Periode 2018-2021

Agus Kurniawan, M.S.Ak ¹, Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.,²Desiyana Safitri, S.E.³

Universitas Islam Negeri Raden Intan -¹kurniawan@gmail.com

-²ahmad@gmail.com

-³desiana2gmail.com

Abstrack: *Company value is investors' perception of the company which is often linked to share prices. The growth of Islamic banking is increasing, the implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) has become an obligation. ICG implementation aims to overcome the emergence of various risks and problems. Apart from these goals, ICG is also the main focus for making banking superior and highly competitive. The results in this study indicate that Islamic corporate governance has a positive effect on firm value, and earnings management has a positive effect on firm value. The conclusion in this study is H1 which states that Islamic corporate governance has a negative and significant effect on accepted firm value and H2 states that earnings management has a positive and significant effect on accepted firm value and H3 which states simultaneously that both variables, namely Islamic corporate governance and earnings management can have an effect to accepted firm value.*

Keywords: *Islamic Corporate Governance, Earnings Management and Company Value*

1. PENDAHULUAN

Pentingnya menerapkan GCG adalah upaya untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum untuk industri perbankan syariah. Atas dasar tersebut mulai diperkenalkan gagasan Islamic Corporate Governance (ICG) yang berusaha mengelaborasi tata kelola perusahaan yang Islami dengan mengedepankan dan mensinkronkan antara pilar tata kelola perusahaan konvensional dan syariah. Menjalankan suatu perbankan dalam hal ini perbankan syariah perlu didukung oleh SDM yang baik dan cukup, agar tujuan perusahaan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin meningkat, penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) menjadi suatu kewajiban Implementasi ICG bertujuan untuk menanggulangi timbulnya berbagai macam resiko dan masalah. Selain tujuan tersebut, ICG juga menjadi tumpuan utama untuk menjadikan perbankan yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi Dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam pedoman Islamic Corporate Governance untuk perbankan di Indonesia, penerapan ICG memiliki peranan yang sangat penting bagi industri perbankan ICG yang dilaksanakan oleh bank umum syariah bertujuan menciptakan dan mempertahankan nama baik serta kepercayaan pada masyarakat, hal tersebut merupakan syarat wajib untuk menciptakan lingkungan kerja perbankan yang sehat. Aktivitas yang dilakukan oleh perbankan akan berhubungan langsung dengan para nasabahnya, oleh karena itu akan berpotensi timbul masalah keagenan. Sebagai solusi dalam permasalahan tersebut, diperlukan penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) sebagai pelindung kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan perbankan akan prinsip-prinsip syariah yang utama. Akan tetapi ICG tidak mempunyai peran pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan yang ada dalam perbankan syariah. Keberhasilan perbankan syariah di dorong dengan inovasi-inovasi yang terus

Halaman 97

diciptakan oleh perbankan syariah itu sendiri. Akan tetapi pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah tidak selamanya bernilai baik dan tidak sedikit dari masyarakat Indonesia masih memandang tata kelola perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional pada umumnya, beranggapan bahwa pendirian perbankan syariah hanya sebagai penghasil laba semata, tanpa melihat nilai-nilai sosial. Kemaslahatan, keadilan dan yang paling penting adalah nilai keimanan. Membicarakan Corporate Governance yang sesuai dengan etika Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang mempunyai hubungan secara langsung khususnya dalam praktik perbankan seperti larangan riba, terjadinya maysir dan adanya gharar. Aspek-aspek di atas tersebut belum diperhatikan secara khusus oleh Corporate Governance konvensional pada umumnya. Beberapa hal penting yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan aktivitas perbankan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesopanan, bekerja dengan rajin niatan untuk mencari ilmu, dan memiliki kompetensi di bidangnya. 3 Tata kelola yang baik menurut Islam didasarkan pada indikator Islamic Corporate Governance. Corporate governance merupakan salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan bahwa keadaan internal perusahaan sudah memenuhi standar tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau sering dikenal dengan corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Corporate Governance menurut sudut pandang Islam atau sering disebut dengan Islamic Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan secara umum yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Dalam rangka membuktikan bahwa perusahaan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada, dan dapat semaksimal mungkin mengupayakan pengelolaan yang optimal melalui penerapan Islamic corporate governance. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hana Fadhillah (2019) dalam penelitiannya bahwa Islamic Corporate Governance yang di proksi dengan rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap Financial Shenanigans sedangkan komisaris independen: komite audit, dewan pengawas syariah, dan rapat komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Diky Satna dkk dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Riza Nur Rosita dan Sri Lestari Kumiawati menyatakan bahwa ICG secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 5 digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bersifat penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain dan memberikan informasi secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji teori dan mengetahui lebih lanjut terkait hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel dengan data yang jelas, rinci dan spesifik sehingga penelitian ini berjalan secara sistematis dan objektif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (secondary data). Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dokumentasi laporan harian dan laporan tahunan perusahaan Bank Umum Syariah tahun 2018-2021. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara

mengambil data dan sumber informasi dari bacaan yang berupa literatur, buku dan jurnal yang sesuai dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan SPSS diperoleh tHitung sebesar -2,806 dengan nilai p value 0,009. Karena nilai p value $0,004 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Dan hipotesis yang diajukan adalah Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan H1 diterima. Hasil penelitian ini dikarenakan pihak yang mengemban jabatan dalam sebuah tata kelola di perusahaan tidak semua keuntungan yang didapat dirasakan oleh baik dari pihak manajer, dewan direksi dan pihak yang mempunyai jabatan dalam sebuah tata kelola perusahaan. Sehingga mereka belum merasa ikut memiliki perusahaan itu dan lebih mementingkan dari tujuan sebagai jabatan yang dimiliki. Sesuai dengan teori stakeholder yang mengindikasikan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Sehingga perusahaan harus mampu menyampaikan informasi aktivitas bisnisnya dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erawati, dkk bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, manajemen laba juga 6 mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan menggunakan SPSS untuk melakukan uji parsial pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperoleh tHitung sebesar 4,757 dengan p value 0,000. Karena nilai p value adalah $0,000 < 0,005$, hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel nilai perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan Manajemen dapat menguntungkan perusahaan ke posisi yang aman di pasar saham sehingga para investor baru tertarik dengan perusahaan namun tidak akan berdampak pada nilai perusahaan, dengan adanya ke tidak simetrisan informasi yang diterima antara manajer dengan pemegang saham, akan memberikan celah bagi manajer untuk mendahului kepentingan pribadinya. Sehingga, para investor hanya memiliki informasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan, Manajer akan termotivasi untuk memaksimalkan laba seolah terlihat perusahaan mampu menyejahterakan para pemegang saham. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sejalan dengan teori sinyal, dimana informasi laba sebagai hasil dari tindakan manajemen laba merupakan sinyal negatif yang akan di reaksi oleh pasar sebagai bad new, sehingga harga saham perusahaan di pasar akan menurun, menurun nya harga saham akan membuat nilai perusahaan menurun dan akan berdampak pada menurunnya kemakmuran para pemegang saham, praktik manajemen laba yang mengandung oportunitik dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang ditunjukkan oleh Siti Nurul dan Daryanto Wibowo bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

3. Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Manajemen Laba Secara Simultan Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan uji F model regresi linear berganda bahwa nilai signifikasinya lebih kecil dari α yakni sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya H_0

ditolak bahwa inflasi berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index tahun 2011-2018. Berdasarkan perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} bahwa dalam penelitian F_{hitung} nya lebih besar dari F_{tabel} yakni sebesar $25,525 > 3,32$ artinya H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa islamic corporate governance dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai R square pada tabel 4.8 sebesar 0.630 atau sebesar 63% yang artinya nilai perusahaan dipengaruhi oleh islamic corporate governance dan manajemen laba sebesar 63% sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang ditunjukkan oleh Sri Rahmayanti dan Dewi Sharina Simartama. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa islamic corporate governance dan manajemen laba secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan

KESIMPULAN

Berdasarkan koefisien regresi islamic corporate governance secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian semakin meningkatnya islamic corporate governance maka diikuti dengan menurunnya nilai perusahaan. Untuk itu, H_1 yang menyatakan bahwa islamic corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan koefisien regresi manajemen laba secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan lagi variabel independen yang dianggap memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel dan tahun riset. Seperti menambahkan data dari UUS maupun BPRS, Gadai Syariah, dan Koperasi Syariah dan dapat menambahkan sumber data penelitian, seperti laporan yang diterbitkan dari berbagai sumber misalnya surat kabar, majalah dan informasi lain yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Caroel, and dan Listiya Ike Purnomo. "Pengaruh Manajemen Laba Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Variabel Moderating." *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala* 1, no. 1 (2021): 665–83.
- Amirudin, dan Zainal Asikin.(2003) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ananda, Chintya Zara, and dan Erinors NR. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2065–82.
- Ansofino dkk.(2016). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Appley, A Lawrence. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arthesa, Ade, and dan Edia Handiman.(2006). *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Ascarya. (2016). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Basuki, Agus Tri, and DanNano Parowot. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brown, D. Lurance, and and Marcus L. Caylor.(2004). *Corporate Governance and Firm Performance in New York*.
- Chapra, and & Ahmed.(2002). *Coorporate Governance In Islamic Financial Institution*.
- Chariri, and Dan G.I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Effendi, Muh. Arif. (2009). *The Power of Good Governance; Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Endraswati, Hikmah. (2018). "Konsep Awal Islamic Corporate Governance." *Jurnal Universitas*

Sebelas Maret (UNS) 6, no. 2.

- F, Eugene, and and Ehrhardt Brigham. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhilah, Hana. "Pengaruh ICG Terhadap Financial Shenanigans (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* 13, no. 1 (2019): 14–22.
- Gunawan, Bambang, and & Robertus. (2016). *GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Marwan, Ibrahim Sufi, Wen Konadi, Akmal Yisrizal, and Iddris Jamaludin. *Analisis Jalur Dan Aplikasi SPSS Versi 25*. Edisi Pert. Medan: Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, 2019.
- Harinaldi. (2015). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Harmono. (2017). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa Raya.
- Hasanah, Shofia Mauxiton. (2019). "Konsep Islamic Corporate Governance." *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1.
- Husaini, Usman, and Dan Setiadi. (2003). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Indriani, (2019). Silvia. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance Dan Kebijakan Perusahaan)*. Surabaya: Scopindo.
- Kurniawan, Albert. (2014). *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Lailiyah, Khasanatul, and Hariri Maslichah. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting." *E-JRA* 10, no. 5 (2021): 57.
- Larbsh. "Islamic Perspective of Corporate Governance." *University Bulletin ISSUE* 17, no. 1 (2015).
- Lukman, Arif, and dan Zaki Murtado. "Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2017): 12.
- Mariani, Desy, and Dan Suryani. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Sosial Dan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2018): 61. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/viewFile/585/498>.
- Maryadi, and dan Chaidir Djohar. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2022): 442–54.
- Mayliza, Riri, and dan Arie Yusnelly. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 369–79.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Mustafa, Pinton Setya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan*. Malang: PSPO UNM, 2020.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- "Peraturan BI No 11/33/PBI/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Bisnis Syariah," n.d.
- Rini, Nova. "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) Pada Perbankan Dan Keuangan Syariah." *The International Journal Of Applied Busniess Tijab* 2, no. 1 (2018): 115.

- Riswandi, Pedi, and dan Rina Yuniarti. "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Pamator* 13, no. 1 (2020): 134–38.
- Rohmah, Jazilatur, Askandar, Noor Shodiq, Malikah, and Anik. "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan." *E-JRA* 8, no. 5 (2019): 135.
- Rosita, Riza Nur dan Sri Lestari Kurniawati. "Pengaruh ICG, Profabilitas Dan Siza Terhadap ICSR Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2022): 136–53.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. 1 st ed., 6. depublish.
- Saepul, Hamdi Asep.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Ratna Candra, and Dan Zuhrotun.(2015). *Keinformatifan Laba Di Pasar Obligasi Dan Saham*. Padang: Simposium Nasional Akuntansi.
- Satria, Diky dkk. "Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syari'ah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi." *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance* 7, no. 1 (2021): 31–42.
- Scoot, W.R. *Financial Accounting Theory, 7th Ed*. Canada: Pearson Prentice-Hall, 2015.
- Scott, R. William. *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Prentice Hall, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, n.d.
- Sri, Hermuningsih dan Wardani, and Dewi Kusuma. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Malaysia Dan Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Siasat Bisnis* 13 (2017): 131.
- Sudana, I. (2011) *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori & Praktik*.
- Sударsono, Heri. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia-FE.
- Sudjana. (2011). *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: IKAPI, 2016.
- Sulistyanto, Sri. (2008). *Manajemen Laba: Teori Dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo
- Sutapa, and dan Rustam Hanafi. "Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 8, no. 2 (2019): 135–52.
- Syahyunan. (2015). *Manajemen Keuangan*. Medan: USU Press
- Tambalean, F.A.k. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di BEI." *Going Concern: Jurnal Riset AKuntansi* 6, no. 1 (2018): 465–73.
- Tandiontong, Mathius. (2016). *Kualitas Audit Dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Umi, Novia Turmina, and Dkk. "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Di Indonesia Dalam Pandangan Islam." *SALAM: Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2022): 101–9. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam>.
- Wijaya, Dedie. (2022). *Pengaruh Manajemen Laba Efisien Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas*.

Pengaruh Teknologi Informasi Berbasis *Payment Gateway*, Inovasi Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru)

Risma Ihza Sahrawani¹, Evi Marlina², Nur Fitriana³

Universitas Muhammadiyah Riau-¹rismaihza@gmail.com

²evimarlina@umri.ac.com

³nurfitri@umri.ac.com

Abstrak— *This research aims to determine the influence of payment gateway-based information technology, innovation and entrepreneurial orientation on the performance of MSMEs (empirical study on MSMEs in Pekanbaru City). The population in this research is Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru City, totaling 7,309 MSMEs in 2022. The sample selection for this research was based on the purposive sampling method. So the sample in the research was 100 MSMEs, especially culinary delights in Pekanbaru City. The type of data used in this research is quantitative data in the form of secondary data with collection techniques using questionnaires. The data analysis technique uses multiple regression and is tested using the t test. The research results show that payment gateway-based information technology, innovation and entrepreneurial orientation have a significant effect on the performance of MSMEs (empirical study on MSMEs in Pekanbaru City).*

Keywords-*Payment Gateway Based Information Technology, Innovation and Entrepreneurial Orientation Have a Significant Influence on MSME Performance*

1. PENDAHULUAN

Kendala yang harus dihadapi oleh UKM yang akan memulai suatu usaha yaitu minimnya akses permodalan, bunga kredit yang tinggi dan sulitnya akses pembiayaan (Perpustakaan.bappenas.go.id, 2009). Umumnya kendala yang dimiliki oleh UMKM yaitu kurangnya pemahaman mengenai keuangan. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan, ada juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja.

Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui. Keahlian yang minim pada proses pengaplikasian dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) serta menjadi sebuah kelemahan yang mampu memberikan kegagalan pada UMKM di dalam kelangsungan dari usahanya. Riset-riset yang dilaksanakan mengenai penerapan dari sistem informasi akuntansi pada UMKM menyatakan jika praktik dari akuntansi di beberapa UMKM mempunyai kelemahan yang didorong dengan berbagai faktor meliputi adanya pendidikan yang rendah serta adanya pemahaman yang kurang mengenai standar dari akuntansi keuangan. Kemudian Riset dari Sinarwati, menunjukkan jika SIA memiliki peran yakni meningkatkan kinerja dari UMKM.

Kinerja UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah teknologi informasi berbasis payment gateway, inovasi dan orientasi kewirausahaan. Kecanggihan teknologi menurut Alanita & Suaryana, (2014) di masa saat ini mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat apalagi sanggup menciptakan berbagai macam sistem teknologi dirancang untuk menolong manusia dalam bekerja guna menciptakan kualitas. Banyak teknologi yang dapat mempermudah penggunaannya dalam implementasinya. Para pelaku usaha harus menyadari bahwa berkat teknologi berbagai jenis upaya dan bisnis UMKM bisa dilaksanakan lebih mudah dan terstruktur. Apalagi di masa pandemi pemberlakuan PSBB menyulitkan pelaku UMKM dalam memasarkan sesuatu. Adanya kecanggihan teknologi informasi para pelaku UMKM dapat menjangkau pasar, guna memasarkan produk lebih luas lagi serta meningkatkan pendapatan usaha. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, diharapkan kinerja UMKM dapat meningkat (riaupos.co). Perkembangan teknologi digital sebagai sarana bagi pelaku UMKM dapat menjadi sarana dalam memasarkan produk serta dapat melakukan transaksi jual beli dan juga transaksi perbankan secara *online*. Dengan adanya teknologi digital membuat perubahan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia maupun di Provinsi Riau yang dulunya konvensional sekarang sudah perlahan

menjadi secara *online* dalam memasarkan produknya. Pelaku UMKM juga mulai memanfaatkan media sosial dan penggunaan *website* dalam membantu pemasaran produknya. Mudahnya akses internet saat ini, memeberikan besarnya manfaat yang di dapat, serta mudahnya biaya yang di butuhkan menjadi alasan utama bagi UMKM sebelum akhirnya mereka memilih media online sebagai solusi yang tepat dalam memperluas jangkauan bisnisnya sebelum akhirnya mereka memilih media online sebagai solusi yang tepat dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Pada masa saat ini masyarakat juga membuat serta menggunakan aplikasi online untuk transaksi pembayaran secara online dalam UMKM yang dapat di unduh melalui *smartphone*. Pelaku usaha yang sudah menggunakan aplikasi *online*, mereka juga mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana pemasaran produk secara digital dan juga pengembangan usaha. Saat ini pelaku usaha yang sudah menggunakan aplikasi online mengalami peningkatan dalam jumlah produk yang di jual. Hal ini juga mendorong pelaku usaha lainnya dalam berinovasi dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Dalam penelitian (Astuti, 2014) yang menjelaskan bahwa teknologi infoemasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya menurut hasil penelitian dari (Jenggawah et al., 2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif kecanggihan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan .

Selanjutnya yang mempengaruhi kinerja adalah inovasi. Menurut Undang - Undang No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Adapun tujuan dari inovasi yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk/ layanan dan mengurangi konsumsi energi. Inovasi teknologi membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif, layanan dan proses yang lebih efektif, bisnis yang baru, dan sebagainya. Hal ini merupakan kewajiban organisasi untuk memantau perubahan teknologi, melatih dan memotivasi karyawan untuk berinovasi karena teknologi meliputi semua aspek dari semua organisasi.

Dari sudut pandang yang disebutkan oleh Said dan Susanto (2018) bahwasanya, inovasi dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaiki namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan. Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwasannya inovasi perubahan terencana dengan matang. Pelaksanaan inovasi didahului adanya kajian terlebih dahulu mengenai inovasi yang akan dilakukan. Inovasi dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan peralatan yang baru dalam organisasi pemerintahan. Inovasi dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan ide-ide baru yang diciptakan dalam suatu proses pelayanan. Dengan kata lain, inovasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan (Hartaroe et al., 2016) menyatakan bahwa variabel inovatif berpengaruh terhadap kinerja UKM. Sebaliknya dari penelitian (Hartini, 2012) menyatakan bahwasannya inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Orientasi kewirausahaan diidentifikasi sebagai satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu kinerja usaha. Seorang pengusaha dikatakan mempunyai peran yang cukup tinggi dalam suatu bisnis adalah dalam hal orientasi kewirausahaannya, dapat dinilai bisnis tersebut berjalan dengan baik. Rauch dkk (2019) menyatakan orientasi kewirausahaan dilihat untuk dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan, dan sangat penting dalam pengembangan kinerja usaha.

Ingham (2018) mengartikan bahwa yang dimaksud orientasi ialah tingkah laku dan sikap karyawan yang bisa menimbulkan harmoni di dalam pekerjaan dan membuat kinerja karyawan meningkat secara individu dalam suatu perusahaan. Miller dan Friesen (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi lebih kuat dibandingkan perusahaan lain. Sementara itu Lumpkin dan Dess (2016), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat, akan lebih berani untuk mengambil risiko, dan tidak cuma bertahan pada strategi masa lalu. Pada lingkungan yang dinamis, orientasi kewirausahaan jelas merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan maupun UMKM. Orientasi dalam sebuah kewirausahaan menjadi

satu cara untuk melihat kinerja usaha pada UMKM, bisa mengukur sejauh mana perbaikan UMKM dapat dilakukan. Karena itulah penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai pengaruh apa mengenai kinerja UMKM terhadap orientasi kewirausahaan. Dalam penelitian (Lailah & Soehari, 2020) yang menyebutkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha. Sebaliknya penelitian dari Usboko (2018) menyatakan orientasi kewirausahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Umiyati (2021) mengenai pengaruh teknologi informasi dan inovasi terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (studi pada UKM berbasis *online* di Kota Dumai). Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya (1) peneliti menambahkan *variable independen*. Penelitian ini menggunakan *variable independen* yaitu teknologi informasi, inovasi dan orientasi kewirausahaan sedangkan sebelumnya hanya menggunakan *variable independen* teknologi informasi dan inovasi saja. (2) alasan penulis menambahkan *variable orientasi kewirausahaan* dikarenakan meningkatkan kinerja usaha tentunya seorang wirausaha harus tau bagaimana cara mengevaluasi kinerja, dan melaksanakan tugas yang penting untuk menerapkan strategi kinerja dalam usaha. Oleh karena itu penulis ingin menambahkan variabel orientasi kewirausahaan untuk bisa membahas lebih jauh mengenai strategi dari pelaku usaha terhadap kinerja UMKM. (3) Berdasarkan lokasi penelitiannya, penelitian sebelumnya berada pada UKM Kota Dumai dan Penelitian saat ini berada pada UMKM Kota Pekanbaru. Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis ingin memberikan judul dalam penelitian yaitu **“Pengaruh Teknologi Informasi Berbasis *Payment Gateway*, Inovasi Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Umkm (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru)”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini menggambarkan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu, dengan maksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Populasi pada penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 7.309 seluruh UMKM tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria adalah *purposive sampling*, Jadi jumlah sampel sebesar 100 UMKM khususnya kuliner yang ada di Kota Pekanbaru, dengan alasan karena kuliner merupakan UMKM terbanyak yang berada di Kota Pekanbaru.. Jenis data yang penulis digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu secara langsung dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan sebanyak 100 lembar, dan kuesioner yang kembali 100 lembar. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha dan lama usaha. Dalam kuisisioner responden tidak perlu mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden. Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Teknologi Informasi	100	26	39	32.96	3.330
Inovasi	100	18	30	25.58	2.587
Orientasi Kewirausahaan	100	18	30	24.47	3.112
KinerjaUMKM	100	19	35	29.21	3.352
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer olahan 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel untuk teknologi informasi memiliki nilai minimum 26 dengan nilai maksimum 39, memiliki nilai *mean* 32.96 dan nilai standar deviasi 3.330, inovasi memiliki nilai minimum 18 dengan nilai maksimum 30, memiliki nilai *mean* 25.58 dan nilai standar deviasi 2.587. Untuk variabel orientasi kewirausahaan nilai minimum 18 dengan nilai maksimum 30, memiliki nilai *mean* 24.47 dan nilai standar deviasi 3.112. Untuk variabel kinerja

UMKM nilai minimum 19 dengan nilai maksimum 35, memiliki nilai *mean* 29.21 dan nilai standar deviasi 3.352.

Hasil uji kualitas data

Tabel 2 Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{Tabel}	Hasil
1	Kinerja UMKM (γ)	Y_1	0.478	0.195	Valid
		Y_2	0.447	0.195	Valid
		Y_3	0.275	0.195	Valid
		Y_4	0.483	0.195	Valid
		Y_5	0.509	0.195	Valid
		Y_6	0.426	0.195	Valid
		Y_7	0.431	0.195	Valid
2	Teknologi Informasi (X_1)	$X1_1$	0.479	0.195	Valid
		$X1_2$	0.439	0.195	Valid
		$X1_3$	0.422	0.195	Valid
		$X1_4$	0.463	0.195	Valid
		$X1_5$	0.407	0.195	Valid
		$X1_6$	0.492	0.195	Valid
		$X1_7$	0.451	0.195	Valid
		$X1_8$	0.486	0.195	Valid
3	Inovasi Produk (X_2)	$X2_1$	0.613	0.195	Valid
		$X2_2$	0.502	0.195	Valid
		$X2_3$	0.521	0.195	Valid
		$X2_4$	0.642	0.195	Valid
		$X2_5$	0.673	0.195	Valid
		$X2_6$	0.582	0.195	Valid
4	Orientasi Kewirausahaan (X_3)	$X3_1$	0.401	0.195	Valid
		$X3_2$	0.491	0.195	Valid
		$X3_3$	0.540	0.195	Valid
		$X3_4$	0.383	0.195	Valid
		$X3_5$	0.558	0.195	Valid
		$X3_6$	0.473	0.195	Valid

Sumber: Pengolahan data SPSS

Pada tabel 2 uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel teknologi informasi, inovasi, orientasi kewirausahaan dan kinerja lebih besar dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel teknologi informasi, inovasi, orientasi kewirausahaan dan kinerja dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Hasil uji reliabilitas

Tabel 3 Hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
1	Kinerja UMKM (γ)	0,774	Reliabel
2	Teknologi Informasi (X_1)	0,788	Reliabel
3	Inovasi (X_2)	0,757	Reliabel
4	Orientasi Kewirausahaan (X_3)	0,729	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian Tahun 2023

Pada tabel 3 uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel teknologi informasi berbasis payment gateway, inovasi dan orientasi kewirausahaan dan kinerja dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Nurmalitas
One - sample kolmogorov - smirnov test

		Teknologi Informasi	Inovasi	Orientasi Kewirausahaan	Kinerja UMKM
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	32.96	25.58	24.47	29.21
	Std.	3.330	2.587	3.112	3.352
	Deviation				
Most Extreme Differences	Absolute	.083	.098	.096	.133
	Positive	.083	.069	.096	.059
	Negative	-.073	-.098	-.082	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.828	.985	.963	1.333
Asymp. Sig. (2-tailed)		.499	.287	.312	.057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Pengolahan data hasil penelitian tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Kolmogrov - Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu variable teknologi informasi sebesar 0.499, inovasi sebesar 0.287, orientasi kewirausahaan sebesar 0.312, kinerja UMKM sebesar 0.057, Artinya bahwa residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil uji multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Teknologi Informasi	.535	1.868
	Inovasi	.688	1.454
	Orientasi Kewirausahaan	.557	1.795

Sumber : Pengolahan data hasil penelitian tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa keempat variabel tersebut semua *tolerance* berada di atas atau >0.10 dan nilai VIF di bawah atau <10 . Nilai Tolerance variable teknologi informasi sebesar 0.535, inovasi sebesar 0.688, orientasi kewirausahaan sebesar 0.557, nilai tersebut lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF variable teknologi informasi sebesar 1.868, inovasi sebesar 1.454, orientasi kewirausahaan sebesar 1.795, nilai tersebut lebih kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	4.648	1.399	3.322	.001
	Teknologi Informasi	.004	.050	.012	.929
	Inovasi	-.070	.057	-1.216	.227
	Orientasi Kewirausahaan	-.059	.053	-1.118	.266

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Pengolahan data hasil penelitian tahun 2023

Kesimpulannya: apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka dari Tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa data tersebut tampak

bahwa ketiga variable seperti teknologi informasi dengan nilai sig. sebesar 0.929, variabel inovasi sig. sebesar 0.227, variabel orientasi kewirausahaan sig. 0.266, lebih besar dari 0.05, maka tidak ada gejala Heteroskedastisitas.

Pengujian regresi linear berganda

Tabel 6 Rekapitulasi hasil analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	.421	2.341
1 Teknologi Informasi	.314	.084
Inovasi	.432	.096
Orientasi Kewirausahaan	.336	.088

Sumber : Pengolahan data hasil penelitian tahun 2023

$$Y = 0.421 + 0.314 X_1 + 0.432 X_2 + 0.336 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Nilai Konstanta sebesar (a) 0.421 artinya adalah apabila kinerja UMKM (Y), teknologi informasi (X1), inovasi (X2), orientasi kewirausahaan (X3), , nilainya diasumsikan nol (0), maka kinerja UMKM adalah 0.421.
- Nilai Koefisien regresi variabel teknologi informasi (X1) sebesar 0.314 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point teknologi informasi akan meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,314 dengan inovasi (X2), orientasi kewirausahaan (X3) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja UMKM.
- Nilai Koefisien regresi variabel inovasi (X2) sebesar 0.432 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point inovasi akan meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,432 dengan teknologi informasi (X1), dan orientasi kewirausahaan (X3) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi inovasi maka semakin tinggi kinerja UMKM.
- Nilai Koefisien regresi variabel orientasi kewirausahaan (X3) sebesar 0.336 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point orientasi kewirausahaan akan meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,336 dengan teknologi informasi (X1), inovasi (X2), tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi orientasi kewirausahaan maka semakin tinggi kinerja UMKM.

Hasil pengujian hipotesis

Uji statistik t

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Pengujian (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.421	2.341		.180	.858
1 Teknologi Informasi	.314	.084	.312	3.730	.000
Inovasi	.432	.096	.333	4.519	.000
Orientasi Kewirausahaan	.336	.088	.312	3.806	.000

a. Dependent Variable: KinerjaUMKM

Sumber : Pengolahan data hasil penelitian tahun 2023

Selanjutnya dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis dari masing-masing variabel bebas (teknologi informasi berbasis payment gateway, inovasi dan orientasi kewirausahaan) sebagai berikut :

- Teknologi informasi berbasis payment gateway (X1). Diketahui nilai t hitung sebesar 3.730 lebih besar dari t tabel sebesar 1.980 dan *p-value (sign)* 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang

menyatakan Teknologi informasi berbasis payment gateway berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru).

2. Inovasi (X2). Diketahui nilai t hitung sebesar 4.519 lebih besar dari t tabel sebesar 1.980 dan p -value (sign) 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua yang menyatakan inovasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru).
3. Orientasi kewirausahaan (X3). Diketahui nilai t hitung sebesar 3.806 lebih besar dari t tabel sebesar 1.980 dan p -value (sign) 0.001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis ketiga yang menyatakan Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Pengujian untuk Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.641	.629	2.041

a. Predictors: (Constant), Orientasikewirausahaan, Inovasi, Teknologiinformasi

b. Dependent Variable: KinerjaUMKM

Sumber: data primer olahan 2023

Nilai R menunjukkan korelasi berganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam tabel di atas diketahui nilai R sebesar 0.800. Artinya adalah bahwa korelasi berganda antara variabel independen (teknologi informasi berbasis payment gateway, inovasi dan orientasi kewirausahaan) dengan variabel dependen (kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru)) memiliki hubungan yang sangat kuat.

Hasil koefisien determinasi nilai R^2 merupakan nilai *Adjusted R Square* dalam tabel di atas sebesar 0.629 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (teknologi informasi berbasis payment gateway, inovasi dan orientasi kewirausahaan) terhadap variabel dependen (kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru)) adalah sebesar 62.9%, sedangkan sisanya 37.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni Teknologi informasi berbasis *payment gateway*, inovasi dan orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, hal ini berarti UMKM yang tinggi dalam penggunaan teknologi informasi berbasis *payment gateway*, inovasi dan orientasi kewirausahaan maka kinerja UMKM cenderung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) : Alternatif. Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Ahsyar, T. K., Syaifullah, S., & Ardiansyah, A. (2020). E-Marketplace Media Pengembangan Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi Umkm Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24014/rmsi.v6i1.8768>
- Alif. K. A. F M. (2019). Analisis Pengaruh Jaringan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, serta Inovasi Terhadap Keunggulan bersaing dan Kinerja Usaha (Studi pada UMKM di Purwokerto). *Diponegoro Journal of Management*, 8(4), 74–84.
- Alfulailah, F., & Soehari, T. D. (2020). tPengaruh Inovasi, Teknologi Informasi dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha. *Jurnal Akademika*, Vol. 9 No. 2.
- Antaraartikel.com. (n.d.). No Title. <https://riau.antaranews.com/berita/175826/sebanyak-7888-umkm-pekanbaru-terimbas-covid-19>
- Aribawa, Dwitya. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis Vol. 20 No. 1*

- Astuti, N.M.M.P. dan Dharmadiaksa. I.B. (2014). Pengaruh efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas dengan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9 No. 2
- Drucker, Peter F. 1996. *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi. Naib*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi.M.Z.R. 2019. Orientasi Kewirausahaan, Karakteristik Wirausahawan, Kecepatan Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha (Studi pada UMKM di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Akuntansi*.
- Gurinova, K. (2018). the Impact of Marketing Innovation on the Competitiveness of Enterprises in the Context of Industry 4.0. *Journal of Competitiveness*, 10(2), 132–148. <https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.09>
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Hartini, S. (2012). Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 14(1), 82–88. <https://doi.org/10.9744/jmk.14.1.83-90>
- Hartaroe, B. P., Mardani, R. M., & Abs, M. K. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kreativitas, Dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM Himpunan Pengusaha Kecil. e – *Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 82–94.
- Ilham, j dara. (2018). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Inovasi Dan Karakteristik Wirausahawan Terhadap Kinerja Usaha. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 108.
- Ingham, G. (1970). *Size of Industrial Organization and Worker Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismawanti, Eryanafita. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KinerjaPemasaran dengan Faktor Lingkungan Sebagai Variabel Moderat*.UNDIP. Semarang
- Jannah, M., Irawati, A., & Purnomo, H. (2019). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja UMKM Batik Gedog Khas Tuban. *Eco-Entrepreneurship*, 5(1), 33–48.
- Jihanti Dan Imelda W.J. Ogi. 2018. "Pengaruh Inovasi Terhadap Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manado". *Jurnal EMBA*:Vol. 6 No. 1
- Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K., & Belajar, M. (2010). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*. 68–74.
- Kaisar Adietya. Miyasto, Y Sugiarto.2016.Analisis Pengaruh Teknologi Informasidan Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing Untukmeningkatkan Kinerja Organisasi(Studi Pada UkmMakanan Di Kota Semarang)
- Komarudin, K. (2021). Implementasi Orientasi Dan Strategi Kewirausahaan Untuk Mencapai Peningkatan Kinerja Umkm. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, VIII(1), 66–78. <http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/view/117>
- Lailah, F. A., & Soehari, T. D. (2020). the Effect of Innovation, Information Technology, and Entrepreneurial Orientation on Business Performance. *Akademika*, 9(02), 161–176. <https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.914>
- Lee D Y and Tsang E W K, (2001), The Effect of Entrepreneurial Personality, Background and Network Activities on Venture Growth, *Journal of Management Studies* 38-4 pp 583602.
- Lumpkin, G.T., & Dess,G.G. (1996). Linking two dimentions of entrepreneurial orientation to business performance: The moderating role of environment and indushy life cycle.. *Journal of Business Venturing*, 16:429-451
- Lu kas, Br yan A d an O.C Ferrell, 2000, "The Effect of Market Orientation om Product Innovation"*Journal of The Academy of Marketing Science*, vo l 28, 239-247.
- Maria Goreti usboko. (2018). Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Dampak Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UMKM. *Gastrointestinal Endoscopy*, 10(1), 279–288. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>
- Mangkunegara. A.P. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya*. Manusia. Jakarta: Refika Aditama.
- Mujiyanto. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM Warung Ritel Tradisional di Indonesia dan Strategi Bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi Vol. 30 No. 2*.

- Mustikowati, 2017. 'Orientasi Kewirausahaan, Inovasi, dan Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi pada UKM Sentra Kabupaten Malang)', *Jurnal Orientasi Kewirausahaan*, vol. 10, no. 1 Feb 2014.
- Miller, D., Freiesen, P. 1983. Strategy making and environment: The third link. *Strategic Management Journal*, 4:221-235
- McDougall, P.P. and Oviatt, B.M. 2000. International Entrepreneurship: The Intersection Of Two Research Paths. Guest Editor's Introduction. *Academy of Management Journal*. 43(5): pp.902-907.
- Nurandini, Arina dan Eisha Lataruva (2014), *Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*, Jakarta.
- Nurdin, Z (2016). Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
- Pattipeilohy, V. R. (2018). Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing: Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemasaran (Studi pada Usaha Nasi Kuning di Kelurahan Batu Meja Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.31959/jm.v7i1.78>
- Qosasi, A., Maulina, E., Purnomo, M., Muftiadi, A., Permana, E., & Febrian, F. (2019). The impact of Information and Communication Technology capability on the competitive advantage of small businesses. *International Journal of Technology*, 10(1), 167–177. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i1.2332>
- Rapih, S., Martono, T., & Riyanto, G. (2015). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Modal Sosial dan Modal Finansial terhadap Kinerja UMKM Bidang Garmen di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2).
- Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., dan Frese, M. (2009). *Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice*, 33(3), 761-787.
- Riduwan. (2012). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sarjono, H., dan Julianita, W. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Sari, M., Hanoum, (2017). 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Kinerja UKM Menggunakan Metode Structural Equation Modelling', *Jurnal Teknik ITS*, vol. 1, Sept 2012, ISSN: 2301-9271.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). *Research Method For Business: A Skill-Building Approach* 17th Edition. Chichester: Wiley
- Suryantini, L. P., Luh, N., & Erni, G. (2020). *Kinerja Umkm Di Kecamatan Buleleng*. 3, 125–135.
- Sukmadi. 2016. *Inovasi & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Grup.
- Suwarno. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN. Jakarta. Melalui <<http://www.zerosugar.files.wordpress.com/2012/04/e-book-inovasi-di-sektor-publik-yogi-suwarno.pdf>>
- Schermerhorn. (2002), *Management*, ed New York: John Wiley & Sons inc.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, T. (2020). *Pasar Traditional Dan Peran UMKM*. Bogor: IPB Press.
- Umiyati. (2021). *Pengaruh Teknologi Informasi dan Inovasi Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Pada UKM Berbasis Online di Kota Dumai)*. 4(1), 6.
- Usboko. (2018). *Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Handphone Samsung*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Denny Hambali¹, Reza Muhammad Rizqi²

Universitas Teknologi Sumbawa – ¹denny.hambali@uts.ac.id

– ²reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id

Abstrak— *This research aims to determine the influence of the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports on the accountability of village financial management. The sample in this research was village officials or officials in Utan District, Sumbawa Regency, totaling 9 villages with a total sample of 45 respondents. The research results show that the presentation of financial reports influences the accountability of village financial management and the accessibility of financial reports influences the accountability of village financial management. Then, simultaneously presenting financial reports and accessibility of financial reports, influences the accountability of village financial management in Utan District, Sumbawa Regency. In conclusion, accountability in managing village money is an important part of carrying out good village governance. This is necessary to ensure that village funds are used clearly, effectively and efficiently, as well as improving the standard of living of the people in the village.*

Keywords — *Presentation of Financial Reports, Accessibility of Financial Reports, Accountability, Village Financial Management.*

1. PENDAHULUAN

Desa di Indonesia merupakan entitas penting dalam kerangka pemerintahan Indonesia dan mempunyai peranan penting dalam aktualisasi pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian Mubyarto dan Suryatini (2020), desa sebagai basis negara memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Terdapat tonggak sejarah penting dalam pemerintahan desa yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan UU Desa. Menurut Soetjipto (2018), undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan potensinya. Sesuai dengan Pasal 1 undang-undang tersebut, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Desa juga diberi wewenang untuk mengurus dan mengendalikan urusan pemerintahan. Desa diberikan yurisdiksi atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat, yang kesemuanya diakui dan dilindungi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurizkiana dkk, 2017). Dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai kepentingan lokal dan latar belakang budaya yang ada.

Keberadaan desa berfungsi sebagai lembaga pemerintahan tingkat utama di Indonesia, yang memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini menjadi landasan pemenuhan hak masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Putri dan Maryono, 2022). Menurut Pratama dkk. (2021), undang-undang desa menjelaskan bahwa desa berfungsi sebagai sarana untuk membimbing pemerintah desa secara efektif dan efisien dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerapkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mendesentralisasikan pemerintahan dengan memberdayakan daerah-daerah dan daerah pinggiran. Hal ini melibatkan pemberian peran yang lebih signifikan kepada pemerintah desa dalam pembangunan komunitas mereka sendiri (Pramayana et al., 2022). UU Desa memberikan hak yang lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan wewenang dan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan mendorong kemajuan desa. Hal ini mencakup kegiatan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik (Arriansyah, 2020).

Akibat penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan

keuangan desa menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Mubyarto dan Suryatini, 2020). Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa menjadi landasan pengelolaan keuangan desa, yang mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, yang dapat berupa uang dan non-uang. -barang moneter (Wardani dan Andriyani, 2017). Aspek tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik mencakup penerapan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menjamin pengelolaan keuangan desa terlaksana secara efektif. Selain itu pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara metodis dan disiplin, khususnya anggaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Ahmad dan Sapar, 2023).

Beragam penelitian yang dilakukan di Indonesia telah mengungkap berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji elemen-elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, melakukan penelitian seperti ini sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang berharga kepada pemerintah desa dalam mengatasi tantangan yang muncul secara efektif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh cara penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Kuncahyo dan Dharmakarya, 2022). Pemerintah desa harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Menurut Septa (2018), terdapat korelasi langsung antara kualitas penyajian laporan keuangan dengan kejelasan pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Alasannya adalah seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan akan diungkapkan secara lengkap dan akurat dalam laporan keuangan pemerintah desa, sehingga menumbuhkan akuntabilitas yang kuat (Khoirina & Widaryanti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Astungkara dkk (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara cara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Meilani dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dan menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Upaya terus-menerus untuk menyempurnakan proses penyampaian laporan keuangan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sya'diah dan Hafiz (2022) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang jelas dan jujur merupakan dasar penting bagi pemerintah desa untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang setinggi-tingginya. Laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami oleh publik memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyelewengan. Menurut Puspa dan Prasetyo (2020), pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi perangkat desa terkait penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan keuangan desa erat kaitannya dengan akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengawasi dan mengelola dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Syahputra (2019) menyoroti bahwa permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak memadai dan efisien telah menjadi perhatian publik dan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi yang melibatkan dana desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di sektor anggaran desa terus meningkat. Dari total 271 kejadian korupsi, 46 kasus terdokumentasi khusus di bidang anggaran desa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi khususnya di bidang anggaran desa. Dari total 169 kasus korupsi, 126 kasus terkait dengan sektor anggaran desa. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi yang tercatat di sektor anggaran desa, dari total 200 kasus korupsi yang dilaporkan (katadata.co.id, 2022). Meilani & Sukarmanto (2022) berpendapat bahwa maraknya kasus korupsi di sektor anggaran desa menunjukkan pentingnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah seperti memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa, membuat laporan keuangan yang

komprehensif dan mudah dipahami, dan mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan dana daerah. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk membina kolaborasi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Aprilia, 2019). Melihat latar belakang dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, serta menyadari pentingnya akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa secara efektif untuk membina desa sejahtera dengan memberikan desa otonomi dalam menangani keuangannya, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa”**.

Penyajian laporan keuangan desa mempunyai peranan penting dalam menetapkan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keuangan desa. Pemerintah desa harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Memastikan penyertaan data yang komprehensif dalam pelaporan keuangan membantu membangun rasa tanggung jawab dan kewajiban (Meilani dan Sukarmanto, 2022). SAP Nomor 71 Tahun 2010, khusus PSAP 01 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan terorganisir yang memberikan informasi mengenai status keuangan dan transaksi suatu usaha pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang posisi keuangan entitas pelapor, kinerja anggaran, saldo anggaran surplus, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Informasi ini berharga bagi pengguna dalam mengambil dan menilai keputusan terkait alokasi sumber daya (Astungkara et al, 2023). Shadrina & Hidajat (2023) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang telah diberikan. Menurut Harahap (2023), berikut karakteristik laporan keuangan yang baik:

- a. Sesuai standar akuntansi, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAP No. 71 Tahun 2010 tentang PSAP 01.
- b. Lengkap, laporan keuangan harus memuat seluruh informasi keuangan yang relevan, termasuk pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas.
- c. Transparan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna, baik yang memiliki pengetahuan akuntansi maupun yang tidak.
- d. Tepat Waktu, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Akuntabel, laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketersediaan laporan keuangan desa merupakan elemen penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudahan akses terhadap informasi keuangan desa memungkinkan masyarakat untuk mencermati dan menilai pemanfaatan keuangan desa oleh pemerintah desa. Mawaddah et al (2019) menegaskan bahwa penentu utama efektivitas pemanfaatan informasi keuangan adalah ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses. Masyarakat umum harus diberikan sarana yang mudah untuk memperoleh laporan keuangan, sehingga memungkinkan mereka memahami dan memanfaatkan informasi keuangan untuk berbagai tujuan, termasuk pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi. Menurut Temalagi dan Anakota (2021), laporan keuangan dapat diakses melalui berbagai saluran media antara lain surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website, dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih media yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Wardana (2016) mengajukan sejumlah kriteria penilaian aksesibilitas laporan keuangan desa, antara lain:

- a. Terbuka di media massa, laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, seperti surat kabar dan majalah, sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi keuangan desa.
 - b. Kemudahan dalam memperoleh informasi, masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang laporan keuangan desa, baik secara langsung di kantor desa maupun melalui media lainnya.
 - c. Aksesibilitas melalui internet, mengaksesnya dengan mudah kapanpun dan dimanapun.
- Manfaat aksesibilitas laporan keuangan yang baik:

- a. Meningkatkan transparansi, aksesibilitas laporan keuangan rutin memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan wawasan komprehensif mengenai penggunaan dana desa.
- b. Peningkatan akuntabilitas, pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, individu yang memiliki akses terhadap informasi keuangan mengenai desa akan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan proses pengambilan keputusan.
- d. Akses masyarakat yang lebih mudah terhadap informasi keuangan memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan desa. Akuntabilitas menjamin bahwa pemerintah desa mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana daerah. Menurut Kusumastuti (2014), akuntabilitas diartikan sebagai persyaratan bahwa penyelenggara kegiatan publik harus menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan langkah, keputusan, dan proses yang dilakukan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Meilani dan Sukarmanto (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, perluasan hingga pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan terakhir mencakup pengawasan keuangan desa. Hal inilah yang perlu diungkapkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik kegagalan maupun keberhasilannya, sebagai bahan evaluasi tahun depan. Masyarakat tidak hanya berhak mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat berbagai penanda akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:

- a. Transparansi, Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.
- b. Partisipasi, Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa.
- c. Pertanggungjawaban, Kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat.
- d. Pengawasan, Adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
- c. Mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *self-report*, sehingga terdapat kemungkinan bias dalam data.

Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Desa di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang berjumlah Sembilan Desa, di antaranya: Desa Bale Brang, Desa Jorok, Desa Labuan Bajo, Desa Motong, Desa Orong Bawa, Desa Pukat, Desa Sabedo, Desa Stowe Brang, dan Desa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat positivis. Ini melibatkan penyelidikan populasi atau sampel, pengumpulan data melalui instrumen penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan cara mengirimkan kuesioner kepada seluruh perangkat desa yang terlibat dan bergerak di bidang keuangan desa masing-masing.
- b. Data sekunder, mengacu pada data yang diperoleh dari sumber eksternal yang relevan dengan penyelidikan ini. Data sekunder ini terdiri dari temuan penelitian sebelumnya, literatur ilmiah, dan data yang diperoleh dari subjek penelitian yang penting untuk persiapan penelitian ini.

Kuesioner digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penyelidikan ini. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara menyajikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Strategi pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

Dalam penelitian, pendekatan analisis data yang digunakan disebut analisis kuantitatif, yang mengacu pada kumpulan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk memproses, menganalisis, dan menafsirkan data numerik (Hair et al, 2023). Dalam bidang analisis data kuantitatif, berikut beberapa metodologi yang sering digunakan:

a. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan ringkasan data dengan melihat angka minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang diteliti, yaitu bagaimana laporan keuangan disajikan dan kemudahan aksesnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Uji Kualitas Data

1) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai validitas suatu kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji korelasi bivariat yang menguji hubungan antara skor setiap item dengan skor keseluruhan dengan menghitung korelasinya. Validitas uji ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai kritis r tabel, menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka pengujian tersebut dinyatakan sah. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka tes tersebut dinyatakan tidak valid (Field, 2023).

2) Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas menilai kemampuan kuesioner untuk memberikan hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, memastikan bahwa kuesioner dapat digunakan berkali-kali dengan responden yang sama. Suatu kuesioner dikatakan dapat dipercaya apabila memenuhi kriteria tersebut. Kisaran Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 menunjukkan keandalan. Sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60 maka dianggap tidak dapat dipercaya (Pallant, 2023).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel terikat atau variabel bebas berdistribusi normal. Tes Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menilai kenormalan. Menurut Sugiyono (2019), apabila tingkat signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 maka menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal.

2) Field (2023) menyatakan bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal harus menunjukkan korelasi nol di antara variabel independennya. Untuk mengidentifikasi tanda-tanda multikolinearitas, dapat dilakukan uji nilai toleransi dan variance inflasi faktor (VIF). Jika nilai toleransi melebihi 0,10 dan variance inflasi faktor (VIF) di bawah 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan variance inflasi faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam penelitian.

3) Heteroskedastisitas menguji apakah residu model regresi mengubah varians antar observasi. Homoskedastisitas adalah ketika varians residunya konstan dan heteroskedastisitas adalah ketika variansnya berbeda. Model regresi yang layak adalah homoskedastik atau nonskedastis. Pendekatan Glejser menguji heteroskedastisitas dengan

melakukan regresi nilai residu absolut dan faktor independen. Heteroskedastisitas tidak ada jika nilai signifikan $> 0,05$ (Pallant, 2023).

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut Gozali (2018), analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta besarnya pengaruh yang dimilikinya. Untuk melakukan analisis ini, rumus berikut digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Penyajian Laporan Keuangan

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

X1 = Penyajian Laporan Keuangan

X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

e = Standar Error

e. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t atau Uji parsial, digunakan untuk menilai kekuatan penjelas individu dari faktor-faktor independen dalam kaitannya dengan variabel dependen dalam penelitian ini. Uji t mempunyai nilai signifikansi statistik sebesar $\alpha = 5\%$. Kriteria penilaian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah untuk menentukan apakah nilai p yang mewakili signifikansi nilai t kurang dari 0,05. Jika kondisi ini terpenuhi maka hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa suatu variabel independen mempunyai pengaruh yang besar dan bersifat individual terhadap variabel dependen (Field, 2023).

2. Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Pallant (2023), uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh faktor independen mempunyai pengaruh gabungan terhadap variabel yang diuji atau tidak. Saat melakukan uji F untuk pengambilan keputusan, jika tingkat signifikansi kurang dari 5% maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dan mempunyai hubungan yang signifikan secara statistik dengannya. Menurut Field (2023), hipotesis diterima jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, terlepas signifikan atau tidaknya variabel tersebut secara statistik.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) mengkuantifikasi sejauh mana model dapat memperhitungkan fluktuasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar variabel (Sugiyono, 2019).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kuantitas data, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Faktor-faktor penelitian ini antara lain: tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, penyajian dan aksesibilitas informasi keuangan, serta sistem pengendalian internal. Tabel 1 menampilkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	45	15	23	20,12	2,318
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	45	8	13	9,43	1,326
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	45	19	25	21,58	2,273
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian ini adalah 45 responden, dengan standar deviasi sebesar 2,318. Variabel penyajian laporan keuangan berkisar antara minimal 15 hingga maksimal 23. Nilai mean sebesar 20,12 dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai minimum dan tertinggi. Nilai mean yang melebihi nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar merata.
- Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, menampilkan temuan uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi 1,326. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berkisar antara 8 sampai 13. Nilai mean sebesar 9,43 dapat ditentukan dari nilai minimum dan maksimum yang diberikan. Rata-rata melebihi simpangan baku, yang menunjukkan distribusi data yang seragam.
- Hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan pada tabel 1 menunjukkan bahwa ukuran sampel penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi sebesar 2,273. Variabel yang mewakili akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa berkisar antara nilai minimum 19 hingga nilai maksimum 25. Nilai mean sebesar 21,58 dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai minimum dan tertinggi. Nilai mean yang melebihi nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar merata.

Uji Asumsi Klasik**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Penelitian	Kriteria	Hasil		Keterangan
Uji Normalitas	P-Value > 0,05	0,361		Data terdistribusi secara normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,1; VIF < 10		Tolerance	VIF
		X1	0,417	1,592
		X2	0,664	2,162
Uji Heteroskedastisitas	Sig. > 0,05	X1	0,178	Tidak terjadi
		X2	0,284	heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis uji asumsi klasik pada tabel 2 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Uji normalitas, berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,361 yang berarti lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.
- Uji Multikolinearitas, pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh nilai toleransi variabel independen lebih besar dari 0,10, dan semua nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen.
- Uji Heteroskedastisitas, mengacu pada tabel 2 terlihat bahwa nilai signifikansi (sig.) variabel independen melebihi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda**Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Koefisien Regresi
Kostanta	3,273
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,514
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,528

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 di atas, diperoleh persamaan regresi yaitu, $Y = 3,273 + 0,516X_1 + 0,528X_2 + e$. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diambil suatu analisis bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 3,273 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 3,273 satuan.
- Koefisien regresi untuk variabel penyajian laporan keuangan adalah sebesar 0,514 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyajian laporan keuangan ditingkatkan namun faktor lainnya tetap sama, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 51,4%.
- Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,528 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan namun variabel lainnya tetap sama, maka akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 52,8%.

Uji Hipotesis**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji Penelitian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji F	Sig.<0,05	F-hitung= 3,716, sig.= 0,031	Lolos Uji Statistik F
Uji T	Sig.<0,05	Sig.	Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa(Y)
		t-hitung	
		Koefisien	
		X1	0,012 3,217 0,514
		X2	0,014 3,162 0,528
Uji R-square	$0 \leq R^2 \leq 1$	0,462	Sebanyak 46,2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dijelaskan oleh variabel penelitian

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian belum lengkap yang disajikan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

1. Uji-t (Parsial)

- Nilai p-value variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,012 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,217 lebih besar dari nilai t kritis sebesar 2,004. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis pertama dapat di terima.
- Nilai p-value variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,162 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,004. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis kedua dapat di terima.

2. Uji-f (Simultan)

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji F yang disajikan pada Tabel 3 adalah nilai signifikansi sebesar 0,031 berada di bawah ambang batas 0,05, dan nilai F hitung sebesar 3,716.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara simultan dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel 3 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa 46,2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, kemudian sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa format laporan keuangan yang bervariasi mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Apabila pemerintahan desa di Kecamatan Utan menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa-desa di Kecamatan Utan akan terlihat efektif. Peningkatan penyajian laporan keuangan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah desa dengan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diungkapkan secara lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini membantu mengatasi segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah secara langsung meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septa (2018), Syahputra (2019), dan Paramayana dkk (2022). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang lebih efektif berhubungan dengan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi. Melalui penerapan aturan pemerintah, akan terjadi peningkatan transparansi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap tanggung jawab penyelenggaraan keuangan desa. Dengan mempublikasikan secara terbuka pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Utan melalui media massa, maka pengguna akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai laporan keuangan desa. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa melalui internet (website), sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Utan. Lebih-lebih lagi. Ketersediaan laporan keuangan desa berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Meningkatnya aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat memberikan banyak manfaat, antara lain memudahkan masyarakat desa mengakses laporan keuangan sehingga dapat mengetahui pemanfaatan dana desa. Hal ini pada gilirannya membantu mencegah penyelewengan dana dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020), Shadrina dan Hidajat (2023), serta Khoirina dan Widaryanti (2023) yang menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan desa berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. . Oleh karena itu, aksesibilitas informasi keuangan desa berkorelasi langsung dengan efektivitas pengawasan keuangan desa. Peningkatan ketersediaan laporan keuangan desa melalui publikasi terbuka, forum sosialisasi dan komunikasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam meminta informasi, memantau, dan memberikan masukan, merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak aksesibilitas dan penyajian laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat pedesaan. Kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan wacana peneliti pada bab

sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
3. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara silmutan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak format dan ketersediaan laporan keuangan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini termasuk mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. and Sapar, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81-93. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.278>
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(2), 109-122.
- Arfiansyah, M. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Astungkara, D., Rahmawati, D., & Supriyanto, A. (2023). Analisis pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(1), 1-14.
- Astungkara, I. W. D., Putra, I. A. G. D., & Dayinta, F. L. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *E-Journal Akuntansi*, 43(4), 773-788.
- Field, A. (2023). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (9th ed.)*. London: Sage Publications.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2023). *Multivariate data analysis (9th ed.)*. New York: Pearson.
- Harahap, S. F. (2023). Analisis laporan keuangan: Teori dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Khoirina, A., & Widaryanti, W. (2023). Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 196-210.
- Kuncahyo, H. and Dharmakarja, I. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299-319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Mawaddah, N., dkk. (2019). Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 154-166.
- Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022, January). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 59-65).
- Mubyarto, & Suryatini, E. (2020). *Membangun desa: Teori, kebijakan, dan praktik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan transparansi dan akuntabilitas

- pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Pallant, J. (2023). *SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using IBM SPSS (8th ed.)*. London: Routledge.
- Paramayana, A., Dewi, R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Owner*, 6(4), 4108-4112. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Putri, L. S., & Maryono. (2022). *Peran dan Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Penyempurnaan*. Jakarta: Pusat Peraturan Perundang-Undangan.
- Septa, P. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459-466.
- Soetjipto, H. (2018). *Desa dan pembangunan: Perspektif sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'diah, H., & Hafiz, A. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 130-138.
- Syahputra, M. I. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Temalagi, D. R., & Anakota, W. (2021). Aksesibilitas laporan keuangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 1-14.
- Wardana, I. G. A. K. (2016). Analisis aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan desa di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 157-166.
- Wardani, D. and Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di kabupaten klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>

Analisis *Return* Saham Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022

Hartika Defriani¹, Susy Hambani², Saeful Anwar³

Universitas Djuanda -¹hartikadef@gmail.com

-²susy.hambani@unida.ac.id

-³saful.anwar@unida.ac.id

Abstrak— *Return is a method often used by investors in comparing investment alternatives which is used to show market reactions to merger and acquisition activities carried out by companies which affect the share prices of both the acquiring company and the target company. From the data obtained, it shows that these expectations have not been met because of stock returns. still shows small results. This research aims to determine the market reaction to mergers and acquisitions which is characterized by the average abnormal return value of majority shares around the date of merger and acquisition activity and to determine the difference in average abnormal stock returns before and after mergers and acquisitions in listed banking companies. on the IDX for the 2018-2022 period. This research method is descriptive analysis with a quantitative approach and the population in this research is banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange and carrying out merger and acquisition activities in 2018-2022. Sampling was carried out using the Purposive Sampling method. The results of the research show that there is no market reaction to mergers and acquisitions as indicated by the average value of the majority of abnormal stock returns being significant around the date of the merger and acquisition and there is no difference in the average abnormal stock return between before and after the merger and acquisition.*

Keywords — *Acquisition, Merger, Stock Return*

1. PENDAHULUAN

Saat ini bisnis secara global mengalami perubahan karena pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perdagangan bebas membuat persaingan semakin kompetitif. Kondisi seperti ini mengakibatkan perusahaan harus berkembang dengan strategi baru untuk bertahan dalam industri (Revinka, 2021). Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan atau ekspansi yang merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan jangkauan dan keuntungan bisnis.

Merger dan akuisisi merupakan penggabungan bisnis dengan mengambil alih harta dan tanggung jawab atau kendali dari perusahaan yang diambil alih sebagai target perusahaan (Kuncoro, 2014). Merger dan akuisisi diyakini sebagai restrukturasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi menurunkan persaingan. Hingga saat ini, merger dan akuisisi terus terjadi dan diikuti oleh banyak perusahaan perbankan seperti Bank Permata dan Bank Danamon sehingga mempengaruhi reaksi pasar dengan fenomena tersebut (www.kppu.go.id).

Perubahan harga saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi menggambarkan reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi (Jogiyanto, 2017). Reaksi pasar terhadap aktivitas tersebut ditunjukkan dengan *return*. Ini mempengaruhi harga saham perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan akan memberikan perubahan harga saham dan akan menghasilkan *abnormal return* saham baik yang signifikan maupun tidak signifikan (Achsan, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya analisis *return* saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi telah banyak dilakukan seperti Nisa (2019) menunjukkan ada perbedaan yang signifikan *return* saham sebelum dan setelah pengumuman. Lain halnya dengan penelitian Al Afgan, dkk (2021) menunjukkan walaupun keputusan merger dan akuisisi mengakibatkan perubahan kinerja keuangan perusahaan, namun perubahan tersebut tidak signifikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil berbeda dan tidak konsisten dengan apa yang terjadi di perusahaan setelah merger dan akuisisi. Oleh karena itu, ini adalah dasar dan masalah yang akan dihadapi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sementara itu, *research gap* yang ada, masalah dapat dilihat dari data

return saham tahunan dari empat perusahaan perbankan yang dipilih. Data ini menunjukkan penurunan data *return* saham baik sebelum maupun sesudah merger dan akuisisi. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti kembali mengenai *return* saham perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada periode 2018-2022.

Signalling theory dikenalkan Space tahun 1973, menurutnya *signalling theory* memberikan suatu sinyal dari pemilik informasi dan dimanfaatkan oleh penerima informasi (Lestari, 2016). Sedangkan Suganda (2018) mendefinisikan *signalling theory* sebagai teori yang digunakan untuk memahami kondisi perusahaan menguntungkan penerima (investor). Wold dan Dodd (2017), menekankan *signalling theory* pada pentingnya informasi yang disampaikan perusahaan terhadap keputusan investasi bagi investor.

Investor dapat menggunakan pengumuman untuk membantu mereka membuat keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Teori ini mempunyai hubungan dengan *return* saham karena jika saham meningkat maka dijadikan sinyal bagi investor untuk berinvestasi.

Efficient market theory ialah konsep pasar yang menekankan pada aspek ketersediaan informasi (Tandellin, 2010). Teori efisiensi pasar bisa ditinjau dari sudut pandang seberapa mudah pelaku pasar membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang mereka miliki (Jogiyanto, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut (Hanafi, 2016).

Pasar dianggap efisien jika nilai sekuritas menggambarkan informasi yang tersedia yang berdampak pada harga sekuritas berada pada tingkat keseimbangannya. Hubungan teori ini dengan peristiwa merger dan akuisisi ialah informasi merger dan akuisisi merupakan informasi sangat penting bagi investor untuk diketahui. Jika informasi tersebut tidak tersebar luas, maka berdampak pada selisih *return* saham sehingga investor yang mengetahui informasi lebih dahulu akan mengambil keuntungan besar.

a. *Corporate Action*

Aktivitas emiten yang memengaruhi jumlah saham beredar dan harga saham di pasar dikenal sebagai *corporate action*. *Corporate action* merupakan berita tentang perusahaan biasanya menarik perhatian para pihak yang terkait di pasar modal, terutama para pemegang saham (Fakhrudin et al., 2012). *Corporate action* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh manajemen perusahaan, dan tindakan ini berpotensi tercapture oleh pasar sehingga dapat memengaruhi harga saham emiten yang bersangkutan di Bursa Efek (Hadi, 2015). Keputusan emiten untuk melakukan *corporate action* adalah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi bisnis, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran hutang, dan tujuan lainnya (Fakhrudin, 2012).

Kasmir (2016) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang menggambarkan keadaan keuangan usaha pada periode tertentu. Dalam laporan keuangan digambarkan keadaan perusahaan terkini yang berisi kondisi keuangan tanggal tertentu pada neraca dan dan periode tertentu pada laporan laba rugi.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, (Sugiono dan Untung (2016). Sementara itu pendapat lainnya mengatakan Laporan keuangan adalah informasi tentang kondisi suatu perusahaan, yang kemudian akan menjadi informasi tentang kinerjanya (Fahmi, 2017).

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan tertentu seperti yang dikemukakan oleh Fahmi (2017), yaitu:

- 1) Menyampaikan informasi jenis serta jumlah aset, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
- 2) Menyampaikan informasi perubahan aktiva, pasiva, dan modal.
- 3) Menyampaikan informasi kinerja perusahaan.

Laporan keuangan sejatinya dibuat bagi keperluan pemilik untuk melihat kepemilikan saham; manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan yang dibuat mencerminkan kinerja mereka; kreditor sebagai penyandang dana untuk memberi pinjaman atau pinjaman telah berjalan; pemerintah menilai kewajiban terhadap negara dari hasil laporan keuangan; serta investor sebagai pihak yang menanamkan modal bagi perusahaan (Kasmir, 2016).

Tandelein (2010), *return* saham ialah tingkat pengembalian dari investasi dan risikonya.

Investor umumnya menyukai informasi saham memberikan keuntungan atau return yang sama dengan resiko lebih kecil ataupun resiko sama tetapi return yang lebih besar. Investor akan berinvestasi jika objek investasinya menghasilkan return lebih besar dibanding investasi lainnya.

Harjito dan Martono (2012), return saham adalah tingkat pengembalian hasil yang diperoleh investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham dan periode tertentu. Jadi return saham adalah tingkat pengembalian dari transaksi jual beli saham (Jogiyanto, 2017). Ada beragam jenis keuntungan (return) saham, diantaranya:

- 1) *Actual return* yaitu *return* yang realisasinya sudah terjadi dan digunakan untuk mengukur kinerja investasi.
- 2) *Expected return* yaitu *return* yang diharapkan dipakai sebagai dasar pertimbangan investasi saham.
- 3) *Market return* yaitu biasanya digunakan pada IHSG sebagai dasar patokan pergerakan harga saham naik atau turun.
- 4) *Abnormal return* yaitu kelebihan return yang diperoleh dari keuntungan normal. Return yang diperoleh lebih besar dari yang diharapkan berarti abnormal return positif, hal ini diharapkan investor. Sedangkan jika return yang didapat lebih kecil berarti abnormal return negatif.
- 5) *Cumulative abnormal return* yaitu penjumlahan return tak normal hari sebelumnya dalam periode masing-masing sekuritas.
- 6) *Average abnormal return* yaitu rata-rata abnormal return bisa menggambarkan reaksi paling kuat positif ataupun negatif dari keseluruhan jenis saham.
- 7) *Cumulative average abnormal return* yaitu akumulasi rata-rata return tak normal untuk hari-hari sebelumnya.

Informasi harga saham di pasar modal berperan penting dalam segala bentuk transaksi ekonomi di BEI baik harga saham individual maupun gabungan yang dipengaruhi oleh lingkungan mikro (Alwi, 2013):

- 1) Informasi pemasaran, produksi dan penjualan.
- 2) Informasi pendanaan yang berkaitan dengan ekuitas dan hutang, pemecahan atau penggabungan saham.
- 3) Informasi manajemen terkait perubahan dan penggantian direksi ataupun struktur organisasi.
- 4) Informasi diversifikasi seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over.
- 5) Informasi investasi seperti ekspansi pabrik, R&D atau penutupan usaha.
- 6) Informasi ketenagakerjaan dan laporan keuangan usaha.

Selain secara mikro, faktor yang dapat mempengaruhi harga saham juga ditinjau dari lingkungan makro (Alwi, 2013):

- 1) Informasi perubahan suku bunga, kurs, inflasi, regulasi dan deregulasi.
- 2) Informasi hukum, gejolak politik dan berbagai issue.
- 3) Informasi industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan, volume atau harga saham.

Merger dan akuisisi merupakan salah satu bentuk penggabungan usaha. Merger merupakan penggabungan dua usaha atau lebih dengan satu nama usaha yang bergabung tetap dipakai. Dalam merger ini salah satu usaha tetap ada, sedangkan satunya menjadi hilang. Menurut Gaughan (2011), merger adalah gabungan dua perusahaan, dengan hanya satu perusahaan yang tetap ada dan yang lain keluar dari bisnis. Pada merger, perusahaan yang mengambil alih seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger (Sjahrial, 2010). Merger dilakukan untuk tetap mempertahankan identitas korporasi masing-masing. Merger dilakukan dengan mengambil alih usaha melalui negosiasi; penawaran langsung kepada pemegang saham usaha yang akan diambil alih; atau penawaran tender (Tampubolon, 2013).

Sedangkan akuisisi ialah pengambilalihan usaha lain dengan identitas usaha tersebut tetap ada tetapi kontrol sepenuhnya ada di pengakuisisi. Perusahaan dapat menjadikan perusahaan targetnya sebagai anak perusahaannya melalui akuisisi, baik perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang ditargetkan tetap sama (Sartono, 2010). Menurut Barrauallo (2019), akuisisi adalah pengambilalihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan yang masih ada. Akuisisi berarti membeli atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu dan kemudian menambahkannya ke barang atau barang tertentu yang sudah dimiliki (Rumondang, 2010). Merger dan akuisisi dilakukan dengan alasan merger dan akuisisi dianggap jalan cepat mewujudkan tujuan perusahaan dimana tanpa memulai dari awal suatu bisnis baru.

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk mendapatkan sinergi atau nilai tambah,

strategi peluang, meningkatkan efektivitas, dan menghindari penipuan pasar modal (Annas, 2017). Sementara itu, Sartono (2016) beralasan jika perusahaan melakukan merger dan akuisisi dikarenakan hal-hal berikut:

- 1) Mencapai skala operasional ekonomis dalam bidang pemasaran, personalia, keuangan dan administrasi.
- 2) Memperbaiki pengelolaan perusahaan yang tidak efisien yang berdampak pada keuntungan rendah.
- 3) Menghemat pajak usaha.
- 4) Memiliki lini usaha baru dengan diversifikasi usaha serta memperkecil pengaruh siklus laba diperoleh.
- 5) Meningkatkan penguasaan jaringan pemasaran lebih luas.

Perusahaan tidak sembarang melakukan merger dan akuisi, melainkan harus memperhatikan kriteria usaha yang dianalisis dari kedua usaha atau lebih (Pranowo, 2015),

- 1) Keadaan keuangan perusahaan dilihat berdasarkan modal cukup, manajemen yang baik.
- 2) Karakteristik perusahaan.
- 3) Pertumbuhan pasar yang diharapkan.
- 4) Hambatan persaingan baru.
- 5) Keunggulan kompetiti produk atau pelayanan akuisisi.
- 6) Kemampuan pengakuisisi dalam mempertahankan usaha calon akuisisi.

Pasar modal merupakan pasar sekuritas yang umumnya mempunyai usia lebih dari satu tahun. Pasar modal, menurut Tandelein (2017), tempat orang memiliki dana lebih banyak bertemu dengan orang yang membutuhkannya dengan melakukan kegiatan jual-beli sekuritas. Sekuritas yang diperjualbelikan bisanya seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Pasar modal, juga dikenal sebagai pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik modal sendiri maupun hutang, diperdagangkan. (Harjito dan Martono 2014). Pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berperan sebagai lembaga penghubung orang yang membutuhkan dana dengan orang memiliki dana yang lebih banyak.

Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder (Harjito dan Martono 2014). Pasar primer adalah pasar di mana surat berharga baru diterbitkan, dan pasar sekunder adalah pasar di mana surat berharga yang sudah lama terdaftar di bursa efek diperdagangkan. Pasar modal digerakkan oleh para pelaku pasar (UU No.21 tahun 2011), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab melaksanakan pengaturan dan pengawasan komprehensif pada seluruh aktivitas jasa keuangan di sektor bank, pasar modal, asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah *return* saham perusahaan perbankan di BEI, sebelum dan sesudah merger dan akuisisi menjadi variabel independen dan *return* saham menjadi variabel dependen. Penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan jenis data berupa jumlah, tingkatan, perbandingan, dan volume, yang merupakan data sekunder.

Populasi penelitian ini 12 perusahaan perbankan di BEI yang pernah melakukan merger dan akuisisi serta mengumumkannya tahun 2018-2022. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan tahun 2018-2022 dengan metode pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu atau *purposive sampling*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif dilakukan pada *return* yang dievaluasi melalui nilai rata-rata yang tidak normal 20 hari sebelum dan sesudah merger dan akuisisi serta saat saat merger dan akuisisi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Abnormalreturn20	41	-,024999	,057004	-,00288331	,016353796
Valid N (listwise)	41				

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Terlihat pada tabel nilai mean dari 4 sampel penelitian -0,00288331. Dengan nilai minimum -0,024999, nilai maksimum 0,057004, serta nilai standar deviasi 0,016353796. Nilai standar deviasi

menunjukkan bahwa seberapa jauh nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data memakai uji *Shapiro wilk* dengan rata-rata abnormal return saham sebagai variabel yang akan diuji.

Tabel 2. Uji Normalitas Data
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AARSBLM20	,188	4	.	,980	4	,903
AAR	,363	4	.	,775	4	,065
AARSSDH20	,345	4	.	,791	4	,087

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Berdasarkan tabel diketahui uji normalitas *Shapiro wilk* pada rata-rata abnormal return saham selama 41 hari menunjukkan tingkat signifikan 0,903, 0,065 dan 0,087 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Hipotesis

Uji One Sample T-Test

Uji ini dilakukan melalui pengamatan rata-rata abnormal return saham yang signifikan pada periode jendela 20 hari sebelum merger dan akuisisi, pada saat merger dan akuisisi, dan 20 hari sesudah merger dan akuisisi. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai rata-rata *abnormal return* 14 hari bernilai positif 41 hari periode jendela sebesar 51,48% dan selebihnya menghasilkan rata-rata *abnormal return* bernilai negatif yaitu sebanyak 27 hari atau sebesar 48,52%, dan tidak ada satu hari pun menghasilkan rata-rata *abnormal return* bernilai nol.

Berdasarkan perhitungan tersebut nilai rata-rata abnormal return yang signifikan 1 hari yaitu pada hari ke -5, dengan tingkat signifikansi 95%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa merger dan akuisisi belum menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan perbankan, karena nilai rata-rata *abnormal return* signifikan hanya sebanyak 1 hari atau 15,36% dari total periode jendela 41 hari, dan sebanyak 40 hari pengamatan yang tidak terdapat rata-rata *abnormal return* saham yang signifikan.

Uji Paired Sample T-Test

Rata-rata *abnormal return* saham selama periode pengamatan pada 20 hari sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Tabel 3. Uji Paired Sample T-Test

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	AARSBLM - AARSSDH	,001548173	,004491191	,002245596	-,005598315	,008694660	,689	3	,540

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Berdasarkan Uji *Paired Sample Test* diperoleh hasil nilai t-hitung sebesar 0,689 dan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,540. Maka hipotesis kedua periode jendela 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah merger dan akuisisi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* saham antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Karena hasil pengujian pada tabel *Paired Sample Test* memperoleh taraf signifikansi sebesar 0,540 ($\alpha > 0,05$).

Pembahasan

Setelah dilakukannya pengujian hipotesis oleh peneliti pada 4 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022, pada periode jendela 41 hari, maka peneliti akan menginterpretasikan hasil penelitian mengenai ada tidaknya reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi yang ditandai dengan adanya nilai rata-rata abnormal return saham mayoritas signifikan di

sekitar tanggal merger dan akuisisi, serta ada tidaknya perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Terdapat Reaksi Pasar Terhadap Merger dan Akuisisi yang Ditandai dengan Nilai Rata-Rata *Abnormal Return* Saham Mayoritas Signifikan di Sekitar Aktivitas Merger dan Akuisisi

Adanya rata-rata *return abnormal* yang signifikan sebelum merger dan akuisisi terjadi pada hari kelima, dan menunjukkan bahwa pada saat merger dan akuisisi dilakukan, rata-rata *return abnormal* yang dihasilkan bernilai tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pasar atau investor pada hari tersebut tidak terlalu tertarik pada saham perbankan. Selama periode pengamatan sesudah merger dan akuisisi, tidak ada hari yang menghasilkan *return* saham rata-rata yang *abnormal*. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi secara signifikan terhadap tindakan merger dan akuisisi perusahaan.

Perhitungan akumulasi rata-rata *return abnormal* dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemakmuran pemegang saham perusahaan perbankan. Pada penelitian ini menunjukkan dalam 41 hari akumulasi *return* rata-rata abnormal dengan nilai positif dan negatif. Hal tersebut menunjukkan merger dan akuisisi belum menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dari sebelum hingga setelah merger dan akuisisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi yang ditandai dengan nilai rata-rata *abnormal return* (*average abnormal return*) saham mayoritas signifikan di sekitar tanggal merger dan akuisisi. Karena pada periode jendela 41 hari hanya terdapat 1 hari yang memperoleh *abnormal return* saham signifikan atau sebesar 15,36%, dimana terdapat 1 hari yang menghasilkan rata-rata *abnormal return* signifikan bernilai negatif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achsan (2016) yang menyatakan bahwa adanya *abnormal return* yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman merger dan akuisisi, atau pasar bereaksi terhadap pengumuman merger dan akuisisi, sehingga aktivitas merger dan akuisisi berpengaruh terhadap *abnormal return* perusahaan dan pada penelitian Mellynia, dkk (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *return* saham, *abnormal return*, dan *trading volume activity* yang signifikan sesudah merger dan akuisisi pada sub sektor telekomunikasi.

Terdapat Perbedaan Rata-Rata Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Periode 2018-2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* saham antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, dengan taraf signifikansi yang dihasilkan pada periode jendela 41 hari sebesar 0,540 ($\alpha > 0,05$). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achsan (2016), Nisa (2019), Mellynia, dkk (2023), dan Hakika, dkk (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *return* saham yang signifikan antara sebelum merger dan akuisisi dan sesudah dilakukannya merger dan akuisisi.

Namun demikian, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2021), Pratiwi, dkk (2021), dan Jalaludin, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reaksi pasar selalu berbeda-beda karena banyaknya aspek yang mempengaruhi baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. Perbedaan periode penelitian, data penelitian, serta metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian, meskipun variabel yang digunakan adalah sama yaitu *abnormal return* saham.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguji hipotesis analisis *return* saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022, dengan periode jendela 41 hari, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tidak ada reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi melalui nilai rata-rata *return* saham *abnormal*, yang disebabkan pada periode jendela 41 hari, hanya satu hari yang memperoleh *return* saham *abnormal* yang signifikan, yaitu pada hari sebelum aktivitas merger dan akuisisi.
- 2) Tidak ada perbedaan rata-rata *abnormal return* saham sebelum atau sesudah merger dan akuisisi. Hasil ini menunjukkan tidak ada dampak jangka pendek pada *return* saham yang dihasilkan dari aktivitas merger dan akuisisi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah kegiatan merger dan akuisisi secara umum tidak menunjukkan efek signifikan, oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif jangka pendek dari merger dan akuisisi, serta melakukan pertimbangan dan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. (2016). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. Hal 77.
- Alwi, Iskandar Z. (2013). *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta, Hal 79-88.
- Annas, Aswar. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Celebes Media Perkasa. Hal 67.
- Arief Sugiono & Edi Untung. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, Hal 1.
- As'ari, L., Amin, M., & Mawardi, M.C. (2017). Analisis Dampak Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Akuisitor yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(02).
- Astria, N. (2012). Analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan akuisitor yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2) 95.
- Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta
- Bararuallo, F. (2019). *Pengantar Bisnis: Prinsip, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya.
- Catur, Sasongko dan Sfrida Rumondang Parulian (2010), *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- D. Agus Harjito dan Martono (2012), *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia.
- Darmadji, Tjiptono, dan Fakhrudin. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 123.
- Dermawan Sjahrial (2010), *Manajemen Keuangan*, Edisi 4, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Eduardus Tandelillin. (2017). *Pasar Modal "Manajemen Portofolio dan Investasi"*. (G. Sudibyo (ed.)). Yogyakarta: PT. Kanisius. Hal 25-26.
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, Hal 10- 30.
- Fuad Achsan (2016), Analisis Pengaruh merger dan Akuisisi terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus pada perusahaan GO PUBLIC BEI periode 2010-2014), Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Gaughan, P. A. (2011). *Mergers, Acquisition, and Coporate Restructurings*. Wiley India Private Limited.
- Kasmir, (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal 7-18.
- Lestari, M. P. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Indeks LQ45. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 91-102.
- Manahan P. Tampubolon (2013), *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal* Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 275-276.
- Revinka, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sebelas Sektor Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 145-163.
- Ruliarsa Arif Pranowo (2015), Merger dan Akuisisi, Seminar Manajemen Keuangan
- Suganda, T. R. (2018). Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. CV. Seribu Bintang, 53(9).
- Wahyu Hadi Kuncoro (2014), Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Skripsi, Semarang, Universitas Dipenogoro.
- Wolk, H.I., Dodd, J.L., & Rozycki, J.J. (2017). *Accounting Theory*. Los Angeles: SAGE Publication, inc.
- Aziz, A. J., Anwar, S., & Setiawan, A. B. (2023). Analisis Determinan Corporate Governance dan CSR Terhadap Financial Distress: Studi Empiris. *Jurnal Akunida*, 9(1), 1-15.
- Anwar, S., Amelia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce. *Karimah Tauhid*, 2(2), 380-393.

- Anwar, S., Afif, M. N., Saraswati, A., & Elma, E. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Kapas. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(2), 1-12.
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Aziz, A. J., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal: Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128-136.
- Janiati, F., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2022). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Koperasi Pondok Pasantren Baetur Rahman Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(5), 686-697.

Analisis *Return* Saham Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022

Hartika Defriani¹, Susy Hambani², Saeful Anwar³

Universitas Djuanda -¹hartikadef@gmail.com

-²susy.hambani@unida.ac.id

-³saful.anwar@unida.ac.id

Abstrak— *Return* is a method often used by investors in comparing investment alternatives which is used to show market reactions to merger and acquisition activities carried out by companies which affect the share prices of both the acquiring company and the target company. From the data obtained, it shows that these expectations have not been met because of stock returns. still shows small results. This research aims to determine the market reaction to mergers and acquisitions which is characterized by the average abnormal return value of majority shares around the date of merger and acquisition activity and to determine the difference in average abnormal stock returns before and after mergers and acquisitions in listed banking companies. on the IDX for the 2018-2022 period. This research method is descriptive analysis with a quantitative approach and the population in this research is banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange and carrying out merger and acquisition activities in 2018-2022. Sampling was carried out using the Purposive Sampling method. The results of the research show that there is no market reaction to mergers and acquisitions as indicated by the average value of the majority of abnormal stock returns being significant around the date of the merger and acquisition and there is no difference in the average abnormal stock return between before and after the merger and acquisition.

Keywords — *Acquisition, Merger, Stock Return*

1. PENDAHULUAN

Saat ini bisnis secara global mengalami perubahan karena pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perdagangan bebas membuat persaingan semakin kompetitif. Kondisi seperti ini mengakibatkan perusahaan harus berkembang dengan strategi baru untuk bertahan dalam industri (Revinka, 2021). Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan atau ekspansi yang merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan jangkauan dan keuntungan bisnis.

Merger dan akuisisi merupakan penggabungan bisnis dengan mengambil alih harta dan tanggung jawab atau kendali dari perusahaan yang diambil alih sebagai target perusahaan (Kuncoro, 2014). Merger dan akuisisi diyakini sebagai restrukturasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi menurunkan persaingan. Hingga saat ini, merger dan akuisisi terus terjadi dan diikuti oleh banyak perusahaan perbankan seperti Bank Permata dan Bank Danamon sehingga mempengaruhi reaksi pasar dengan fenomena tersebut (www.kppu.go.id).

Perubahan harga saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi menggambarkan reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi (Jogiyanto, 2017). Reaksi pasar terhadap aktivitas tersebut ditunjukkan dengan *return*. Ini mempengaruhi harga saham perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan akan memberikan perubahan harga saham dan akan menghasilkan *abnormal return* saham baik yang signifikan maupun tidak signifikan (Achsan, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya analisis *return* saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi telah banyak dilakukan seperti Nisa (2019) menunjukkan ada perbedaan yang signifikan *return* saham sebelum dan setelah pengumuman. Lain halnya dengan penelitian Al Afgan, dkk (2021) menunjukkan walaupun keputusan merger dan akuisisi mengakibatkan perubahan kinerja keuangan perusahaan, namun perubahan tersebut tidak signifikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil berbeda dan tidak konsisten dengan apa yang terjadi di perusahaan setelah merger dan akuisisi. Oleh karena itu, ini adalah dasar dan masalah yang akan dihadapi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sementara itu, *research gap* yang ada, masalah dapat dilihat dari data

return saham tahunan dari empat perusahaan perbankan yang dipilih. Data ini menunjukkan penurunan data *return* saham baik sebelum maupun sesudah merger dan akuisisi. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti kembali mengenai *return* saham perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada periode 2018-2022.

Signalling theory dikenalkan Space tahun 1973, menurutnya *signalling theory* memberikan suatu sinyal dari pemilik informasi dan dimanfaatkan oleh penerima informasi (Lestari, 2016). Sedangkan Suganda (2018) mendefinisikan *signalling theory* sebagai teori yang digunakan untuk memahami kondisi perusahaan menguntungkan penerima (investor). Wold dan Dodd (2017), menekankan *signalling theory* pada pentingnya informasi yang disampaikan perusahaan terhadap keputusan investasi bagi investor.

Investor dapat menggunakan pengumuman untuk membantu mereka membuat keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Teori ini mempunyai hubungan dengan *return* saham karena jika saham meningkat maka dijadikan sinyal bagi investor untuk berinvestasi.

Efficient market theory ialah konsep pasar yang menekankan pada aspek ketersediaan informasi (Tandellin, 2010). Teori efisiensi pasar bisa ditinjau dari sudut pandang seberapa mudah pelaku pasar membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang mereka miliki (Jogiyanto, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut (Hanafi, 2016).

Pasar dianggap efisien jika nilai sekuritas menggambarkan informasi yang tersedia yang berdampak pada harga sekuritas berada pada tingkat keseimbangannya. Hubungan teori ini dengan peristiwa merger dan akuisisi ialah informasi merger dan akuisisi merupakan informasi sangat penting bagi investor untuk diketahui. Jika informasi tersebut tidak tersebar luas, maka berdampak pada selisih *return* saham sehingga investor yang mengetahui informasi lebih dahulu akan mengambil keuntungan besar.

a. *Corporate Action*

Aktivitas emiten yang memengaruhi jumlah saham beredar dan harga saham di pasar dikenal sebagai *corporate action*. *Corporate action* merupakan berita tentang perusahaan biasanya menarik perhatian para pihak yang terkait di pasar modal, terutama para pemegang saham (Fakhrudin et al., 2012). *Corporate action* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh manajemen perusahaan, dan tindakan ini berpotensi tercapture oleh pasar sehingga dapat memengaruhi harga saham emiten yang bersangkutan di Bursa Efek (Hadi, 2015). Keputusan emiten untuk melakukan *corporate action* adalah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi bisnis, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran hutang, dan tujuan lainnya (Fakhrudin, 2012).

Kasmir (2016) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang menggambarkan keadaan keuangan usaha pada periode tertentu. Dalam laporan keuangan digambarkan keadaan perusahaan terkini yang berisi kondisi keuangan tanggal tertentu pada neraca dan dan periode tertentu pada laporan laba rugi.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, (Sugiono dan Untung (2016). Sementara itu pendapat lainnya mengatakan Laporan keuangan adalah informasi tentang kondisi suatu perusahaan, yang kemudian akan menjadi informasi tentang kinerjanya (Fahmi, 2017).

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan tertentu seperti yang dikemukakan oleh Fahmi (2017), yaitu:

- 1) Menyampaikan informasi jenis serta jumlah aset, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
- 2) Menyampaikan informasi perubahan aktiva, pasiva, dan modal.
- 3) Menyampaikan informasi kinerja perusahaan.

Laporan keuangan sejatinya dibuat bagi keperluan pemilik untuk melihat kepemilikan saham; manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan yang dibuat mencerminkan kinerja mereka; kreditor sebagai penyandang dana untuk memberi pinjaman atau pinjaman telah berjalan; pemerintah menilai kewajiban terhadap negara dari hasil laporan keuangan; serta investor sebagai pihak yang menanamkan modal bagi perusahaan (Kasmir, 2016).

Tandelein (2010), *return* saham ialah tingkat pengembalian dari investasi dan risikonya.

Investor umumnya menyukai informasi saham memberikan keuntungan atau return yang sama dengan resiko lebih kecil ataupun resiko sama tetapi return yang lebih besar. Investor akan berinvestasi jika objek investasinya menghasilkan return lebih besar dibanding investasi lainnya.

Harjito dan Martono (2012), return saham adalah tingkat pengembalian hasil yang diperoleh investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham dan periode tertentu. Jadi return saham adalah tingkat pengembalian dari transaksi jual beli saham (Jogiyanto, 2017). Ada beragam jenis keuntungan (return) saham, diantaranya:

- 1) *Actual return* yaitu *return* yang realisasinya sudah terjadi dan digunakan untuk mengukur kinerja investasi.
- 2) *Expected return* yaitu *return* yang diharapkan dipakai sebagai dasar pertimbangan investasi saham.
- 3) *Market return* yaitu biasanya digunakan pada IHSG sebagai dasar patokan pergerakan harga saham naik atau turun.
- 4) *Abnormal return* yaitu kelebihan return yang diperoleh dari keuntungan normal. Return yang diperoleh lebih besar dari yang diharapkan berarti abnormal return positif, hal ini diharapkan investor. Sedangkan jika return yang didapat lebih kecil berarti abnormal return negatif.
- 5) *Cumulative abnormal return* yaitu penjumlahan return tak normal hari sebelumnya dalam periode masing-masing sekuritas.
- 6) *Average abnormal return* yaitu rata-rata abnormal return bisa menggambarkan reaksi paling kuat positif ataupun negatif dari keseluruhan jenis saham.
- 7) *Cumulative average abnormal return* yaitu akumulasi rata-rata return tak normal untuk hari-hari sebelumnya.

Informasi harga saham di pasar modal berperan penting dalam segala bentuk transaksi ekonomi di BEI baik harga saham individual maupun gabungan yang dipengaruhi oleh lingkungan mikro (Alwi, 2013):

- 1) Informasi pemasaran, produksi dan penjualan.
- 2) Informasi pendanaan yang berkaitan dengan ekuitas dan hutang, pemecahan atau penggabungan saham.
- 3) Informasi manajemen terkait perubahan dan penggantian direksi ataupun struktur organisasi.
- 4) Informasi diversifikasi seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over.
- 5) Informasi investasi seperti ekspansi pabrik, R&D atau penutupan usaha.
- 6) Informasi ketenagakerjaan dan laporan keuangan usaha.

Selain secara mikro, faktor yang dapat mempengaruhi harga saham juga ditinjau dari lingkungan makro (Alwi, 2013):

- 1) Informasi perubahan suku bunga, kurs, inflasi, regulasi dan deregulasi.
- 2) Informasi hukum, gejolak politik dan berbagai issue.
- 3) Informasi industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan, volume atau harga saham.

Merger dan akuisisi merupakan salah satu bentuk penggabungan usaha. Merger merupakan penggabungan dua usaha atau lebih dengan satu nama usaha yang bergabung tetap dipakai. Dalam merger ini salah satu usaha tetap ada, sedangkan satunya menjadi hilang. Menurut Gaughan (2011), merger adalah gabungan dua perusahaan, dengan hanya satu perusahaan yang tetap ada dan yang lain keluar dari bisnis. Pada merger, perusahaan yang mengambil alih seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger (Sjahrial, 2010). Merger dilakukan untuk tetap mempertahankan identitas korporasi masing-masing. Merger dilakukan dengan mengambil alih usaha melalui negosiasi; penawaran langsung kepada pemegang saham usaha yang akan diambil alih; atau penawaran tender (Tampubolon, 2013).

Sedangkan akuisisi ialah pengambilalihan usaha lain dengan identitas usaha tersebut tetap ada tetapi kontrol sepenuhnya ada di pengakuisisi. Perusahaan dapat menjadikan perusahaan targetnya sebagai anak perusahaannya melalui akuisisi, baik perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang ditargetkan tetap sama (Sartono, 2010). Menurut Barrauallo (2019), akuisisi adalah pengambilalihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan yang masih ada. Akuisisi berarti membeli atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu dan kemudian menambahkannya ke barang atau barang tertentu yang sudah dimiliki (Rumondang, 2010). Merger dan akuisisi dilakukan dengan alasan merger dan akuisisi dianggap jalan cepat mewujudkan tujuan perusahaan dimana tanpa memulai dari awal suatu bisnis baru.

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk mendapatkan sinergi atau nilai tambah,

strategi peluang, meningkatkan efektivitas, dan menghindari penipuan pasar modal (Annas, 2017). Sementara itu, Sartono (2016) beralasan jika perusahaan melakukan merger dan akuisisi dikarenakan hal-hal berikut:

- 1) Mencapai skala operasional ekonomis dalam bidang pemasaran, personalia, keuangan dan administrasi.
- 2) Memperbaiki pengelolaan perusahaan yang tidak efisien yang berdampak pada keuntungan rendah.
- 3) Menghemat pajak usaha.
- 4) Memiliki lini usaha baru dengan diversifikasi usaha serta memperkecil pengaruh siklus laba diperoleh.
- 5) Meningkatkan penguasaan jaringan pemasaran lebih luas.

Perusahaan tidak sembarang melakukan merger dan akuisi, melainkan harus memperhatikan kriteria usaha yang dianalisis dari kedua usaha atau lebih (Pranowo, 2015),

- 1) Keadaan keuangan perusahaan dilihat berdasarkan modal cukup, manajemen yang baik.
- 2) Karakteristik perusahaan.
- 3) Pertumbuhan pasar yang diharapkan.
- 4) Hambatan persaingan baru.
- 5) Keunggulan kompetiti produk atau pelayanan akuisisi.
- 6) Kemampuan pengakuisisi dalam mempertahankan usaha calon akuisisi.

Pasar modal merupakan pasar sekuritas yang umumnya mempunyai usia lebih dari satu tahun. Pasar modal, menurut Tandelein (2017), tempat orang memiliki dana lebih banyak bertemu dengan orang yang membutuhkannya dengan melakukan kegiatan jual-beli sekuritas. Sekuritas yang diperjualbelikan bisanya seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Pasar modal, juga dikenal sebagai pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik modal sendiri maupun hutang, diperdagangkan. (Harjito dan Martono 2014). Pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berperan sebagai lembaga penghubung orang yang membutuhkan dana dengan orang memiliki dana yang lebih banyak.

Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder (Harjito dan Martono 2014). Pasar primer adalah pasar di mana surat berharga baru diterbitkan, dan pasar sekunder adalah pasar di mana surat berharga yang sudah lama terdaftar di bursa efek diperdagangkan. Pasar modal digerakkan oleh para pelaku pasar (UU No.21 tahun 2011), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab melaksanakan pengaturan dan pengawasan komprehensif pada seluruh aktivitas jasa keuangan di sektor bank, pasar modal, asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah *return* saham perusahaan perbankan di BEI, sebelum dan sesudah merger dan akuisisi menjadi variabel independen dan *return* saham menjadi variabel dependen. Penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan jenis data berupa jumlah, tingkatan, perbandingan, dan volume, yang merupakan data sekunder.

Populasi penelitian ini 12 perusahaan perbankan di BEI yang pernah melakukan merger dan akuisisi serta mengumumkannya tahun 2018-2022. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan tahun 2018-2022 dengan metode pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu atau *purposive sampling*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif dilakukan pada *return* yang dievaluasi melalui nilai rata-rata yang tidak normal 20 hari sebelum dan sesudah merger dan akuisisi serta saat saat merger dan akuisisi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Abnormalreturn20	41	-,024999	,057004	-,00288331	,016353796
Valid N (listwise)	41				

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Terlihat pada tabel nilai mean dari 4 sampel penelitian -0,00288331. Dengan nilai minimum -0,024999, nilai maksimum 0,057004, serta nilai standar deviasi 0,016353796. Nilai standar deviasi

menunjukkan bahwa seberapa jauh nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data memakai uji *Shapiro wilk* dengan rata-rata abnormal return saham sebagai variabel yang akan diuji.

Tabel 2. Uji Normalitas Data
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AARSBLM20	,188	4	.	,980	4	,903
AAR	,363	4	.	,775	4	,065
AARSSDH20	,345	4	.	,791	4	,087

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Berdasarkan tabel diketahui uji normalitas *Shapiro wilk* pada rata-rata abnormal return saham selama 41 hari menunjukkan tingkat signifikan 0,903, 0,065 dan 0,087 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Hipotesis

Uji One Sample T-Test

Uji ini dilakukan melalui pengamatan rata-rata abnormal return saham yang signifikan pada periode jendela 20 hari sebelum merger dan akuisisi, pada saat merger dan akuisisi, dan 20 hari sesudah merger dan akuisisi. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai rata-rata *abnormal return* 14 hari bernilai positif 41 hari periode jendela sebesar 51,48% dan selebihnya menghasilkan rata-rata *abnormal return* bernilai negatif yaitu sebanyak 27 hari atau sebesar 48,52%, dan tidak ada satu hari pun menghasilkan rata-rata *abnormal return* bernilai nol.

Berdasarkan perhitungan tersebut nilai rata-rata abnormal return yang signifikan 1 hari yaitu pada hari ke -5, dengan tingkat signifikansi 95%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa merger dan akuisisi belum menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan perbankan, karena nilai rata-rata *abnormal return* signifikan hanya sebanyak 1 hari atau 15,36% dari total periode jendela 41 hari, dan sebanyak 40 hari pengamatan yang tidak terdapat rata-rata *abnormal return* saham yang signifikan.

Uji Paired Sample T-Test

Rata-rata *abnormal return* saham selama periode pengamatan pada 20 hari sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Tabel 3. Uji Paired Sample T-Test

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	AARSBLM - AARSSDH	,001548173	,004491191	,002245596	-,005598315	,008694660	,689	3	,540

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 26

Berdasarkan Uji *Paired Sample Test* diperoleh hasil nilai t-hitung sebesar 0,689 dan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,540. Maka hipotesis kedua periode jendela 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah merger dan akuisisi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* saham antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Karena hasil pengujian pada tabel *Paired Sample Test* memperoleh taraf signifikansi sebesar 0,540 ($\alpha > 0,05$).

Pembahasan

Setelah dilakukannya pengujian hipotesis oleh peneliti pada 4 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022, pada periode jendela 41 hari, maka peneliti akan menginterpretasikan hasil penelitian mengenai ada tidaknya reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi yang ditandai dengan adanya nilai rata-rata abnormal return saham mayoritas signifikan di

sekitar tanggal merger dan akuisisi, serta ada tidaknya perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Terdapat Reaksi Pasar Terhadap Merger dan Akuisisi yang Ditandai dengan Nilai Rata-Rata *Abnormal Return* Saham Mayoritas Signifikan di Sekitar Aktivitas Merger dan Akuisisi

Adanya rata-rata *return abnormal* yang signifikan sebelum merger dan akuisisi terjadi pada hari kelima, dan menunjukkan bahwa pada saat merger dan akuisisi dilakukan, rata-rata *return abnormal* yang dihasilkan bernilai tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pasar atau investor pada hari tersebut tidak terlalu tertarik pada saham perbankan. Selama periode pengamatan sesudah merger dan akuisisi, tidak ada hari yang menghasilkan *return* saham rata-rata yang *abnormal*. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi secara signifikan terhadap tindakan merger dan akuisisi perusahaan.

Perhitungan akumulasi rata-rata *return abnormal* dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemakmuran pemegang saham perusahaan perbankan. Pada penelitian ini menunjukkan dalam 41 hari akumulasi *return* rata-rata abnormal dengan nilai positif dan negatif. Hal tersebut menunjukkan merger dan akuisisi belum menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dari sebelum hingga setelah merger dan akuisisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi yang ditandai dengan nilai rata-rata *abnormal return* (*average abnormal return*) saham mayoritas signifikan di sekitar tanggal merger dan akuisisi. Karena pada periode jendela 41 hari hanya terdapat 1 hari yang memperoleh *abnormal return* saham signifikan atau sebesar 15,36%, dimana terdapat 1 hari yang menghasilkan rata-rata *abnormal return* signifikan bernilai negatif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achsan (2016) yang menyatakan bahwa adanya *abnormal return* yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman merger dan akuisisi, atau pasar bereaksi terhadap pengumuman merger dan akuisisi, sehingga aktivitas merger dan akuisisi berpengaruh terhadap *abnormal return* perusahaan dan pada penelitian Mellynia, dkk (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *return* saham, *abnormal return*, dan *trading volume activity* yang signifikan sesudah merger dan akuisisi pada sub sektor telekomunikasi.

Terdapat Perbedaan Rata-Rata Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Periode 2018-2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* saham antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, dengan taraf signifikansi yang dihasilkan pada periode jendela 41 hari sebesar 0,540 ($\alpha > 0,05$). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achsan (2016), Nisa (2019), Mellynia, dkk (2023), dan Hakika, dkk (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *return* saham yang signifikan antara sebelum merger dan akuisisi dan sesudah dilakukannya merger dan akuisisi.

Namun demikian, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2021), Pratiwi, dkk (2021), dan Jalaludin, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reaksi pasar selalu berbeda-beda karena banyaknya aspek yang mempengaruhi baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. Perbedaan periode penelitian, data penelitian, serta metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian, meskipun variabel yang digunakan adalah sama yaitu *abnormal return* saham.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguji hipotesis analisis *return* saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022, dengan periode jendela 41 hari, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tidak ada reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi melalui nilai rata-rata *return* saham *abnormal*, yang disebabkan pada periode jendela 41 hari, hanya satu hari yang memperoleh *return* saham *abnormal* yang signifikan, yaitu pada hari sebelum aktivitas merger dan akuisisi.
- 2) Tidak ada perbedaan rata-rata *abnormal return* saham sebelum atau sesudah merger dan akuisisi. Hasil ini menunjukkan tidak ada dampak jangka pendek pada *return* saham yang dihasilkan dari aktivitas merger dan akuisisi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah kegiatan merger dan akuisisi secara umum tidak menunjukkan efek signifikan, oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif jangka pendek dari merger dan akuisisi, serta melakukan pertimbangan dan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. (2016). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. Hal 77.
- Alwi, Iskandar Z. (2013). *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta, Hal 79-88.
- Annas, Aswar. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Celebes Media Perkasa. Hal 67.
- Arief Sugiono & Edi Untung. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, Hal 1.
- As'ari, L., Amin, M., & Mawardi, M.C. (2017). Analisis Dampak Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Akuisitor yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(02).
- Astria, N. (2012). Analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan akuisitor yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2) 95.
- Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta
- Bararuallo, F. (2019). *Pengantar Bisnis: Prinsip, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya.
- Catur, Sasongko dan Sfrida Rumondang Parulian (2010), *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- D. Agus Harjito dan Martono (2012), *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia.
- Darmadji, Tjiptono, dan Fakhrudin. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 123.
- Dermawan Sjahrial (2010), *Manajemen Keuangan*, Edisi 4, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Eduardus Tandelillin. (2017). *Pasar Modal "Manajemen Portofolio dan Investasi"*. (G. Sudibyo (ed.)). Yogyakarta: PT. Kanisius. Hal 25-26.
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, Hal 10- 30.
- Fuad Achsan (2016), Analisis Pengaruh merger dan Akuisisi terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus pada perusahaan GO PUBLIC BEI periode 2010-2014), Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Gaughan, P. A. (2011). *Mergers, Acquisition, and Coporate Restructurings*. Wiley India Private Limited.
- Kasmir, (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal 7-18.
- Lestari, M. P. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Indeks LQ45. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 91-102.
- Manahan P. Tampubolon (2013), *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal* Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 275-276.
- Revinka, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sebelas Sektor Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 145-163.
- Ruliarsa Arif Pranowo (2015), Merger dan Akuisisi, Seminar Manajemen Keuangan
- Suganda, T. R. (2018). Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. CV. Seribu Bintang, 53(9).
- Wahyu Hadi Kuncoro (2014), Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Skripsi, Semarang, Universitas Dipenogoro.
- Wolk, H.I., Dodd, J.L., & Rozycki, J.J. (2017). *Accounting Theory*. Los Angeles: SAGE Publication, inc.
- Aziz, A. J., Anwar, S., & Setiawan, A. B. (2023). Analisis Determinan Corporate Governance dan CSR Terhadap Financial Distress: Studi Empiris. *Jurnal Akunida*, 9(1), 1-15.
- Anwar, S., Amelia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce. *Karimah Tauhid*, 2(2), 380-393.

- Anwar, S., Afif, M. N., Saraswati, A., & Elma, E. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Kapas. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(2), 1-12.
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Aziz, A. J., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal: Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128-136.
- Janiati, F., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2022). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Koperasi Pondok Pasantren Baetur Rahman Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(5), 686-697.

Implementasi ISAK 35 Sebagai Standar Penyusunan Laporan Keuangan pada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbang Jangkar Situbondo

Roni Yanto¹, Rifa Herfiah², Khoirun Nisa³

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia - ¹roniyanto@ibrahimiy.ac.id
- ²rifahefiah2000@gmail.com
- ³nisak5342@gmail.com

Abstrak— *The aim of this research was to identify the results of implementing financial reports based on ISAK 35 in non-formal religious education public organizations, namely Madrasah Diniyah Ula and Wustho Baiturrahman Kumbang Anchor Situbondo. This research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation at Madrasah Diniyah Ula and Wustho Baiturrahman Kumbang Anchor Situbondo. The conclusion of this research was that the financial report form of Madrasah Diniyah Ula and Wustho Baiturrahman Kumbang still uses a simple method, namely only in the form of recording cash inflows and cash outflows and including descriptions of transactions that had occurred, not yet implementing the applicable financial reporting guidelines, namely ISAK 35 which included Comprehensive Income Report, Cash Flow Report, Net Asset Change Report, Financial Position Report (Balance Sheet), and Notes to Financial Reports (CaLK).*

Keywords — *Implementation, Drafting, Public Financial Reports, ISAK 35*

1. PENDAHULUAN

Madrasah merupakan salah satu tempat pendistribusian pendidikan kepada generasi muda, khususnya ilmu agama islam dan pembentukan karakter. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju maka pendidikan ilmu agama sejak dini juga menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena majunya suatu negara tergantung terhadap kualitas anak bangsanya. Kata madrasah sendiri berasal dari sebuah kata dalam bahasa arab yang artinya sekolah (Sumarni, 2018). Untuk merealisasikan terbentuknya pendidikan di tengah-tengah masyarakat, maka sangat dibutuhkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat itu sendiri, karena madrasah termasuk salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan, yang mana pendapatan terbesar dananya yang dibuat dalam operasionalnya berasal dari sumbangan masyarakat atau donator.

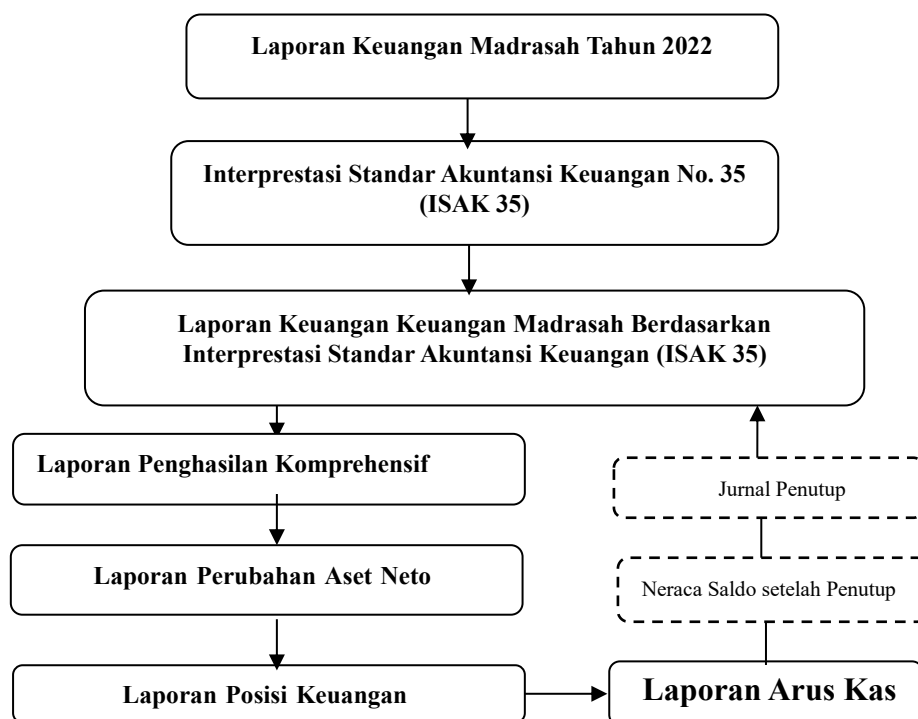
Organisasi nirlaba atau yang lebih dikenal dengan organisasi non profit merupakan suatu wadah yang berperan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas, serta tidak ada tujuan untuk memperoleh hasil material. Untuk itu diperlukan laporan keuangan yang memandai dan akuntabilitas yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku agar meningkatkan kepercayaan dan bentuk tanggungjawab entitas terhadap donatur. Peran akuntansi pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas yang berorientasi laba ataupun nonlaba. (Shoimah 2021). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berperan untuk memenuhi kepentingan sistem pencatatan dan laporan keuangan yang memandai yang memberikan jaminan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar, dalam sebuah laporan keuangan yang benar yaitu ditandai dengan adanya kesesuaian antara angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan bukti yang konkret dan dipercaya (Mia, 2017). Sekalipun entitas yang berkiatan pendapatannya dinilai kecil, standar akuntansi keuangan harus tetap dijalankan. Hal tersebut sebagai bentuk kesiapan entitas menyeragamkan laporan keuangan dengan entitas nirlaba lainnya, serta mempermudah stakeholder dalam membaca laporan keuangan entitas tersebut, karena laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK lebih terperinci dan mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Untuk standar akuntansi keuangan entitas nirlaba yaitu ISAK No 35 (Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35) yang mana di dalamnya terdapat lima komponen yaitu: Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (DSAK, 2018).

Akan tetapi akan terasa sulit dalam menerapkan standar ISAK 35 jika sumber daya manusia yang menjalankan tugas sebagai pengatur manajemen keuangan atau bendahara jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang akuntansi, oleh karena itu maka perlu ditunjuk

bendahara yang ahli dan berpengalaman dalam mengelola laporan keuangan, serta mempunyai pengetahuan yang luas tentang ISAK 35

Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dibidang pendidikan yang berada di desa Kumbangsasi, kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo. Dalam kegiatan operasionalnya Madarasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman berasal dari bantuan dari FKTD (Forum Komunitas Takhiyah Diniyah), pembayaran SPP tiap bulan/perorang yang relatif murah, penjualan kitab serta yang terakhir yaitu Bisyaroh dari ustad yang mengabdikan di sana. Namun dalam pengelolaan laporan keuangannya masih dikatakan sederhana, hal tersebut dikarenakan rendahnya SDM pengelola Laporan Keuangan di Madarasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman. Mengingat pentingnya sebuah laporan keuangan untuk entitas yang tergolong nirlaba, maka perlu dilakukan pencatatan secara akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur yang telah diberikan untuk kegiatan operasional entitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi ISAK 35 Sebagai Standar Penyusunan Laporan Keuangan pada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbang Jangkar Situbondo periode 2022, namun dalam penelitian ini dibatasi dengan mengambil empat komponen dalam ISAK 35 tidak mencatumkan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut skema kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber: data diolah)

Akuntansi merupakan sebuah proses yang meliputi pencatatan, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah serta penyajian data transaksi yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan, sehingga menjadi sebuah informasi yang digunakan seseorang atau sebuah organisasi sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan oleh entitas atau lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban terhadap publik. Adapun ciri-ciri akuntansi sektor publik diantaranya adalah:

- Dimiliki secara kolektif oleh publik
- Dijalankan untuk tidak mencari keuntungan finansial

c. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan operasional maupun kebijakan selalu didasarkan terhadap konsensus bagi organisasi pemerintah.

Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993), akuntansi sektor publik mempunyai tujuan utama, antara lain:

- a. Memberikan donatur yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasional dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajer (*management control*).
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Organisasi Nirlaba atau organisasi non profit merupakan entitas yang pokoknya adalah untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik tanpa mengkomersialkannya atau mencari keuntungan moneter, entitas nonlaba dapat didefinisikan secara hukum sebagai entitas yang tidak dapat mendistribusikan aset atau pendapatannya untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau pemimpinnya.

Organisasi Nirlaba disini tujuan utama didirikannya adalah bukan semata mencari keuntungan melainkan untuk kemaslahatan umum, yang mana sumber daya manusianya menjadi aset berharga, hal tersebut dikarenakan semua kegiatan yang ada didalamnya dikendalikan oleh masyarakat, kemudian dikelola yang hasilnya dirasakan oleh banyak orang. Dalam organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan yang mutlak, semua murni didirikan untuk kepentingan bersama, Sehingga tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dijual belikan, untuk contoh organisasi Nirlaba yang ada ditengah-tengah masyarakat yaitu misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi, yayasan, dan sebagainya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menyatakan bahwa entitas Nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan keuntungan yang sebandan dengan apa yang telah dikorbankan kepada entitas.
2. Memproduksi barang atau jasa yang hasilnya bukan untuk meraut keuntungan, sekalipun menghasilkan keuntungan berupa material, maka jumlah yang dihasilkan dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan dibagi-bagikan kepada pengelola atau pendiri entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan yang mutlak seperti lazimnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dengan artian bahwa kepemilikan dalam entitas tersebut tidak dapat dijual, dialihka

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan merupakan berkas pencatatan keuangan, yang berisikan segala macam transaksi, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Dalam karakteristik kualitatif menurut berbagai literatur akuntansi terdapat empat karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat dipahami, dalam penyajian laporan keuangan menggunakan bentuk dan bahasa teknis sesuai dengan tingkat pemahaman penggunaanya.
- b. Relevan, dalam informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya.
- c. Andal, informasi yang disajikan dapat berguna atau dapat diandalkan oleh pemakainya, yang mana dalam penyajian laporan keuangan disajikan dengan jujur dan wajar.
- d. Dapat diperbandingkan, dalam informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya.

Tujuan keseluruhan dari adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan sebuah informasi yang membantu kepada investor dan kreditur dalam menentukan keputusan investasi dan kredit. Sedangkan tujuan laporan keuangan untuk organisasi bukan mencari laba (*non-profit organization*) adalah:

- a. Media dasar dalam penentuan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya (aset) perusahaan.
- b. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan organisasi dalam mendistribusikan pelayanan terhadap publik.
- c. Untuk menilai aktivitas manajemen dalam melaksanakan kewajiban pembiayaan dan investasi

- d. Sebagai informasi tentang organisasi baik mengenai sumber daya (aset), kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan, serta perubahannya.
- e. Menyajikan informasi terkait kinerja organisasi.
- f. Memberikan informasi terkait dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

ISAK 35 merupakan sebuah pedoman laporan keuangan yang berorientasi nonlaba yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyebutkan bahwa pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45) revisi 2010 merupakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas Nirlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011, namun pada tanggal 11 April 2019 PSAK 45 dicabut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengganti dan mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) no.35.

Standar Akuntansi adalah panduan atau prinsip umum yang mengelola pembuatan sebuah akuntansi dalam perancangan dan penyajian laporan keuangan untuk dikomunikasikan pada pemakai laporan keuangan, sedangkan suatu prosedur akuntansi adalah pelaksanaan khusus yang nantinya akan dipakai untuk menerapkan patokan tersebut. Pengembangan patokan akuntansi sangat penting untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan yang nantinya akan disajikan.

Dengan diadopsinya IAS (International Accounting Standards), 1 Presentation of Financial Statements menjadi PSAK 1: berisikan tentang Penyajian Laporan Keuangan, maka interpretasi standar akuntansi keuangan no. 35 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dipandang perlu untuk diterbitkan karena berguna bagi entitas yang berorientasi nirlaba untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangannya, yang telah disahkan pada tanggal 26 September 2018 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam ISAK 35: tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba atau organisasi nonlaba memberikan pedoman penyajian dalam laporan keuangan untuk entitas nirlaba, dengan adanya pedoman ISAK 35 dapat memberikan informasi keuangan yang jelas kepada kepada donatur dan masyarakat.

Dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan no. 35 (ISAK 35) telah menjelaskan bagaimana penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba, yang telah disajikan seperti berikut:

- a. PSAK 1 : Penyajian laporan keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa "Pernyataan ini menggunakan terminologi yang sesuai dengan kebutuhan entitas yang berorientasi laba, seperti entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor pulik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri." Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba.
- b. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas nonlaba dalam Interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi nonlaba
- c. Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- d. Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (1) cara manajemen melaksanakan tanggungjawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta (2) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Untuk laporan keuangan yang berdasarkan ISAK 35 itu dihasilkan dari siklus akuntansi entitas yang berorientasi nirlaba yang mana struktur laporan keuangan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan no. 35 (ISAK 35) terdiri dari sebagai berikut :

- a. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan yang menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tertentu. Dimana laporan ini juga mengatur informasi yang sajikan dalam laporan laba rugi seperti penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

b. Laporan Aset Neto

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatas dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatas dari pemberi sumber daya.

c. Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan adalah laporan yang menjelaskan mengenai posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan unsur-unsur tertentu pada waktu tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus (aliran) kas menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Informasi laporan ini berguna untuk menilai bagaimana kemampuan organisasi atau entitas memperoleh kas atau setara kas dan memungkinkan untuk para pemakainya untuk mengembangkan model tersebut dalam menilai dan membandingkan arus kas di entitas tersebut pada masa sekarang dengan entitas atau organisasi lainnya.

e. Catatan atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas, tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Qualitative research*) yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok, yang mempunyai 2 tujuan utama, yaitu yang pertama menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Sukamdinata, 2017).

Menurut pendapat Lofland, sumber data utama penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata dan tindakan. (Lexy, 2019). Selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data yang tertulis, dokumen, statistik dan foto. Selain itu menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian kualitatif ialah terdiri dari 3 komponen, yaitu:

a. *Place*, yaitu tempat dimana interaksi dalam suatu sosial berlangsung.

b. *Actor* atau pelaku ialah orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.

c. *Activity*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam literatur penelitian ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait dengan laporan keuangan meliputi data primer dan sukender.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi dan objek penelitian dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku atau gerak-gerik subjek yang dapat dipercaya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan informan, observasi dan dokumentasi. Informan adalah orang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dan bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sumber data adalah bendahara dan Kepala Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman desa Kumbangsari.

b. Data sekunder berkedudukan sebagai penjelas terhadap data primer baik dalam bentuk tabel maupun diagram yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh pihak pengumpul atau pihak lain. Data sukender dalam penelitian ini adalah catatan laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara madrasah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa data yang dapat dikumpulkan sehingga menghasilkan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Madrasah Diniyah Ula dan Wustho tepat pada tahun 2022 dalam menyusun laporan penghasilan komprehensif dalam laporan keuangannya masih belum menerapkan. Padahal dalam entitas yang bersifat nirlaba (tidak mencari laba) itu harus menggunakan konsep ISAK 35, hal ini sebagai pendukung bagi entitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. serta membantu bagi pihak *stekholder* dalam membaca bagaimana keadaan laporan keuangan entitas tersebut. Dalam pedoman ISAK 35 laporan penghasilan komprehensif memberikan informasi tentang semua pendapatan yang diperoleh serta beban yang ditanggung oleh entitas. Berikut laporan penghasilan komprehensif Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari tahun 2022.

Tabel 1
Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif Madrasah Diniyah Ula dan Wuatho Baiturrahman Kumbangsari (Per 31 Desember 2022, Dalam Rupiah)	
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
<i>Pendapatan</i>	
Pendapatan Bosda	Rp. 23.100.000
Pendapatan SPP	Rp. 11.520.000
Pendaftaran Ujian	Rp. 904.000
Penjualan Kitab	Rp. 175.000
<i>Total Pendapatan</i>	Rp. 35.699.000
<i>Beban</i>	
Insentif Mualim	Rp. 9.600.000
Insentif Tukang Kebun	Rp. 900.000
Administrasi	Rp. 1.917.000
Atribut Madrasah	Rp. 2.089.000
Konsumsi	Rp. 258.000
Token	Rp. 1.224.000
Barokah Pembina	Rp. 100.000
Iuran FKDT	Rp. 300.000
Lain-lain	Rp. 500.000
<i>Total Beban</i>	Rp. 16.888.000
Surplus	Rp. 18.891.000
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
<i>Pendapatan</i>	

Bisyaroh Ustad Qoyyum	Rp. 480.000
Total Pendapatan	Rp. 480.000
Beban	
Pensiun Ustad Sholeh	Rp. 400.000
Total Beban	Rp. 400.000
Surplus	Rp. 80.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	Rp. 18.891.000

(Sumber: Data diolah)

Dari data yang telah dioalah diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pendapatan tanpa pembatasan yang diperoleh dari pemberi sumber daya sebesar Rp. 35.699.000,- selama kurun waktu setahun (2022), sedangkan untuk beban tanpa pembatasan yang ditanggung oleh pihak madrasah ditahun 2022 sebesar 16.888.000,- maka secara keseluruhan pihak madrasah diniyah ula dan wustho baiturrahman kumbangsari mengalami surplus sebesar Rp. 18.811.000,- sedangkan untuk pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar Rp. 480.000,- sedangkan beban dengan pembatasan sebesar Rp. 400.000,- jadi setelah di kalkulasi, maka total keseluruhan penghasilan komprehensif yang diperoleh oleh pihak madrasah sebesar Rp. 18.891.000,-

b. Laporan Perubahan Aset Neto

Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari dalam penyajian laporan perubahan aset neto berdasarkan ISAK 35 belum menerapkannya pada tahun 2022, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, padahal hal tersebut sangat diperlukan dalam sebuah entitas Nirlaba yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui Surplus (defisit) aset pada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho dalam tahun berjalan, dan periode berikutnya. Berikut laporan perubahan aset neto Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari 2022.

Tabel 2
Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan Perubahan Aset Neto Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari (Per 31 Desember 2022, Dalam Rupiah)	
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo Awal	Rp. 2.888.000
Surplus tahun berjalan	Rp. 18.811.000
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	Rp. 480.000
Saldo Akhir	Rp. 22.179.000
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo awal	-
Surplus tahun berjalan	Rp. 80.000

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(Rp. 480.000)
Saldo Akhir	(Rp. 400.000)
TOTAL ASET NETO	Rp. 21.779.000)

(Sumber : Data Diolah)

Pada laporan perubahan aset neto Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari tahun 2022 yang sesuai dengan pedoman ISAK 35 yaitu memberikan informasi tentang perubahan aset neto tanpa pembatasan pada tahun 2021 sebesar Rp.2.888.000,- pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.22.179.000,- hal ini dikarenakan Madrasah Diniyah Ula dan Wustho mengalami Surplus besar Rp.18.811.000,- serta mendapatkan penambahan dari aset neto yang dibebaskan dari pembatasan sebesar Rp 480,000,- sehingga secara keseluruhan aset neto pada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman pada tahun 2022 sebesar Rp 21,779,000,-

c. Laporan Posisi Keuangan

Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari pada tahun 2022 dalam penyajian laporan posisi keuangan belum sesuai dengan pedoman berlaku yaitu ISAK 35. Padahal hal ini sangat berpengaruh terhadap suatu entitas, jika entitas belum menerapkan pedoman yang berlaku, maka entitas tersebut tidak dapat melihat berapa besar aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh entitas tersebut. Berikut laporan posisi keuangan Madrasah Ula dan Baiturrahman Kumbangsari tahun 2022.

Tabel 3
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari (Per 31 Desember 2022, Dalam Rupiah)	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp. 21.779.000
TOTAL ASET	Rp. 21.779.000
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
TOTAL LIABILITAS	-
ASET NETO	
Aset Neto-tanpa pembatasan	Rp. 22.179.000
Aset Neto-dengan pembatasan	(Rp. 400.000)
Total Aset Neto	Rp. 21.779.000
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	

(Sumber: Data diolah)

Pada laporan posisi keuangan Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman pada tahun 2022 yang telah sesuai dengan pedoman ISAK 35 memberikan informasi total aset sebesar Rp 21.779,000,- dan selama tahun 2022 juga Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari tidak memiliki catatan utang, sehingga pada liabilitas di laporan posisi keuangan tidak ada tercatat atau kosong.

d. Laporan Arus Kas

Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari dalam penyajian laporan arus kas pada tahun 2022 tidak menerapkan pedoman yang telah ada. Sedangkan salah satu aspek yang harus ada pada laporan keuangan yang berorientasi nirlaba yaitu laporan arus kas yang sesuai dengan ISAK 35. Tujuan laporan arus kas itu sendiri adalah untuk mengetahui saldo akhir entitas untuk satu periodenya. Laporan arus kas Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari untuk tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 4
Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari (Per 31 Desember 2022, Dalam Rupiah)	
AKTIVITAS OPERASIONAL	
Kas dari sumbangan	Rp. 23.580.000
Kas dari pendapatan	Rp. 12.599.000
Kas yang harus dibayar untuk operasional	(Rp. 17.288.000)
Kas neto dari aktivitas operasional	Rp. 18.891.000
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	Rp. 18.891.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	Rp. 2.888.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp. 21.779.000

(Sumber : Data diolah)

Pada laporan arus kas Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari pada tahun 2022 yang telah sesuai dengan pedoman ISAK 35 menghasilkan sebuah informasi tentang pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak Madrasah yaitu sebesar Rp. 35.699.000,- untuk dana yang digunakan madrasah dalam membiayai seluruh aktivitas Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman yaitu sebesar Rp. 17.288.000,-

Sehingga dapat diketahui bahwa Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman mengalami Surplus sebesar Rp.18.891.000,- sehingga untuk saldo akhir yang dimiliki oleh madrasah yaitu sebesar Rp. 21.779.000,-

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi laporan keuangan dengan ISAK 35 pada Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk laporan keuangan Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Baiturrahman Kumbangsari masih menggunakan metode sederhana. yaitu hanya dalam bentuk kas masuk dan kas keluar saja dengan mencatumkan uraian transaksi yang telah terjadi, belum menerapkan pedoman laporan keuangan yang berlaku yaitu ISAK 35. Yang terdiri laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang lebih terstruktur dan terperinci serta memudahkan untuk para stekholder untuk membaca laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengelola laporan keuangan atau bendahara madrasah terkait dengan ilmu akuntansi, agar bendahara tidak mengalami kesulitan serta mampu dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun berikutnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga dalam penyajian laporan keuangannya lebih berkualitas.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat Implementasikan ISAK 35 pada laporan keuangan di entitas nonlaba lainnya secara lebih baik dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Jaenal. Rahma, Ayumi. (2020). "Sosialisasi Penerapan ISAK 35 dalam Penyajian Laporan Keuangan kepada Pengurus Masjid AL-AULIA, pekalongan", *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2
- Afridayani. Pratiwi, Adhitya Putri dkk. (2022). "Implementasi ISAK 35 pada Pelaporan Keuangan SDIT Pertama Gemilang", *Jurnal Kuat (Keuangan dan Akuntansi Terapan)* Vol.4 No. 1, Maret.
- Anjani, Sitha Amelia. Bharata, Risma Wira. (2022). Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia), *Jurnal AKUNTANSIKU*, Vol. 1, No. 4.
- Azis, Khalid Fauzi & Yanto, Roni. (2023). Identifikasi Bi Rate, Indeks Harga Saham Komposit (IHSG), Uang Beredar Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, Vol. 9, No. 2. *Jurnal ISTIQRO*. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.2002>
- Belinda, Putri Ariella . Nevi Costari. (2021). "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam suatu Instansi Pemerintahan". *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No, 1.
- Damanik, Lisna Sari. Situmeang, Kartika Sari dkk. 2022. "Analisis Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Rumah Sakit X", *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*, Vol.1, No. 1.
- Divian, Sukma. (2020). "Rangga Putra Ananto, dkk, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 15, No. 2.
- DSAK, (2018). *Draf Eksposur ISAK 35 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA (Ikatan Akuntan Indonesia)*
- Handayani, Monika. (2019). *Akuntansi Sektor Publik dilengkapi 100 Soal dan Jawab*. Edisi 1. Jogjakarta: POLIBAN PRESS.
- Hery. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* cetakan 5. Jakarta : PT. Gramedia
- Ibrahim, (2023). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. [http://www.90/Article_Text/106-1-10-20180515\(1\).pdf](http://www.90/Article_Text/106-1-10-20180515(1).pdf)
- Ikhsan, Arfan et. al. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* edisi 2. Medan: Madenatera.
- Imaniyati, Neri Sri. (2019). *METODE PENELITIAN FIQH DAN EKONOMI SYARI'AH* . Malang: Madani Media.
- Indrawa, Rully. Poppy Yaniawati. (2017). *Metode Penelitian dan Campuran untuk Manajemen, pembangunan dan Pendidikan (Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leksono, Sonny. (2020). *Metodelogi Penelitian Kualitatif ekonomi & Bisnis Studi Pembangunan, Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Maulana, Iqbal Subhan . Mujibur Rahmat. (2021). Penerapan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 3, No.2.
- Maspa Makkawaru. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Konsepsi*, Vol. 8, No. 3.
- Mochtar, Raja Ade Fitrasari. Saputra, Dian. (2022). Analysis of Implementation of ISAK 35 at Madrasah X City of Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 6, No. 3.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Nawawi. (2019). *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media.
- Octisari, Sully Kemala. Murdijaningsih, Tjahjani. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan ISAK 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, Vol. 21, No. 3.
- Sadeli , Lili M. (2018). *Dasar-dasar AKUNTANSI*:Cetakan kedua belas. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Shoimah, Imro'atun. Wardayanti, Siti Maria, dkk. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP)*, Vol. 21, No. 2.
- Saputra, Yusuf Jaya. Sabilalo, Muhmudin A. dkk, (2023). Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 tentang Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Di Masjid AL-MI'RAJ Kota Kendari), *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 12 No. 1.
- Sari, Devi Indah. Ferdawati, dkk. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35. *Accounting Information System, Taxes, and Auditng*, Vol. 1, No. 1.

- Setiadi. (2021). Implementasi ISAK 35 (NIRLABA) pada Organisasi Nonlaba (Masjid, Sekolah, Kursus), *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja*. Vol.6, No.2.
- Sudaryono. (2019). *Metode penelitian Kualitatif, kuantitatif dan Mix Method* edisi kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiri, Slamet. Bogat Agus Riyono. 2018. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, & R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukamdinata, Nanan Syadodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarni. (2018). Peran dan Fungsi Yayasan dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah, *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 2.
- Suripto. Hamdy, Syaibatul dkk. (2022). Implementasi ISAK 35 pada Yayasan Al Ikhsan. *Jurnal Karinov*, Vol. 5, No. 2.
- Wardiyah, Mia Lasmi. (2017). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Warren, Carl S.. James M. Reeve, dkk. (2017). *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia* Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat.
- Widodo, Hendrarto & Yanto, Roni. (2023). Pengaruh Proporsi Perempuan Terhadap Lapangan Kerja Di Indonesia. *Journal of Nusantara Economic Science (JNES)*. Vol. 1, No.1. <https://nafatimahpustaka.org/jnes/article/view/20/17>
- Widyaningsih, Yuliana Endah. (2018). Implementasi Akuntansi dalam Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Al-Wahab Yogyakarta). *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*. Vol. XII, No.1.
- Yanto, Roni. (2022). Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i2.388>
- Yanto, Roni & Zainurradi. (2022). Penerapan Sistem Pembukuan Akuntansi Pada Usaha Dagang UMKMBerdasarkan SAK EMKM (Kasus Pada Usaha Dagang Toko). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*. Vol. 1, No. 3. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/655>
- Yuesti, Anik., Ni luh Putu Sandrya Dewi, dkk. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food And Beverage* di BEI

Feri Tristiawan¹, Komala Ardiyani²

¹Universitas Selamat Sri – feritristiawan@gmail.com

²Universitas Pekalongan – komala@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, uji f dengan menggunakan SPSS. Pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan. Hasil analisis menunjukkan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan menggunakan Return On Asset (ROA), ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan Ln dan nilai perusahaan yang diproksikan menggunakan Price Book Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel leverage yang diproksikan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Dalam uji ANNOVA (uji F) profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : ROA,PBV,DER

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan negara terbesar yang digunakan untuk menjamin kemakmuran masyarakat. Pajak difungsikan sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan serta sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan dibidang ekonomi dan sosial (UU No. 9 Tahun 1994). Wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak oleh pemerintah sebagai sumber dana, baik badan maupun pribadi. Bagi masyarakat, kehadiran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan atau jumlah keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga ada indikasi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya. Keberadaan pajak yang dikatakan sebagai beban bagi wajib pajak dalam arti lain yakni bagi perusahaan. Sehingga banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal maupun ilegal. Upaya legal dalam melakukan minimalisasi beban pajak sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan teknik atau metode pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang ada dalam aturan pajak dan undang-undang merupakan pengertian dari penghindaran pajak atau yang disebut sebagai *tax avoidance* (C. A. Pohan, 2011).

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang *tax avoidance* biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) karena perusahaan ingin berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Menurut Harlon dan Heitzman (2010), ratio tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dihitung dengan menggunakan proksi diantaranya: *Accounting Effective Tax Rate* (GAAP ETR), *Current Effective Tax Rate* (Current ETR), dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Meskipun

penghindaran pajak dapat dikatakan bersifat legal, namun dari pihak pemerintah tetap tidak membenarkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang ditemukan telah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pelanggaran pajak. Awal November 2017 lalu, perusahaan Apple telah dituduh melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan yang didapat ke Jersey. Perlu diketahui, bahwa Jersey memberlakukan tarif pajak perusahaan sebesar 0% untuk perusahaan asing. Pada tahun 2017, Apple telah menghasilkan 44,7 miliar dolar AS di luar Amerika Serikat dan hanya membayarkan pajak luar negeri sebesar 1,65 miliar dolar AS atau dalam artian lain nilai tersebut kurang dari 4%. Sedangkan Uni Eropa menginginkan Apple membayarkan pajaknya sekitar 15 miliar dolar AS. (Kumparan.com, 2017). Perusahaan lain yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan sektor manufaktur. Pada tahun 2019, PT Adaro Energi Tbk disinyalir melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Dalam menghindari wajib pajaknya dalam negeri, PT Adaro Energi Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi para pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan ini teridentifikasi dari laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non arm's length price*) yang dilakukan PT Adaro Energi Tbk dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, yang menunjukkan adanya ketimpangan tarif transfer apabila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara global. PT Adaro Energi Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa supaya mereka dapat membayar pajak 1,75 triliun lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Liputan6.com, 2019).

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja yang menjadi faktor dalam penghindaran pajak. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja dalam menggambarkan kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dalam suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Profitabilitas diproksikan menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). ROA mampu memperlihatkan kemampuan operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang dapat mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dianggap mendapatkan laba. Ketika laba yang dihasilkan tinggi maka besar kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Faktor lain yang digunakan dalam menilai perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah leverage. *Leverage* merupakan adanya perbandingan antara besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017). Dalam arti lain rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun sebaliknya. DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas (Kasmir, 2014). Rasio *leverage* juga memperlihatkan resiko yang akan dihadapi perusahaan. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh perusahaan yang digambarkan oleh hutang dan modal (*equity*). Rasio *leverage* juga memperlihatkan resiko yang dihadapi perusahaan (Cahyono *et al.*, 2016). Semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar pula beban bunga yang akan didapat dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan mengalami penurunan sehingga pajak yang

akan dibayar semakin rendah. Tingginya beban bunga akan berdampak pada rendahnya kecenderungan sebuah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah bentuk pengukuran yang dapat dikategorikan pada besar kecilnya suatu perusahaan yang tergantung pada beberapa faktor yakni total aset perusahaan, kapitalisasi pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan (Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan menurut Sujianto (2001) dalam Sri dan Agus (2018) adalah besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan memperlihatkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar pasti memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan bidang pajaknya daripada perusahaan kecil. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar maka semakin besar pula biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu perusahaan dalam golongan besar karena didukung dan memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perencanaan pajak sehingga mampu menekan beban pajak secara optimal.

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak juga dapat dilihat dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kinerja suatu perusahaan yang mencerminkan dari harga saham yang terbentuk dari permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan tersebut (Harmono, 2009). Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih (2009) nilai perusahaan merupakan suatu pandangan investor melihat tingkat keberhasilan perusahaan yang berkaitan erat dengan harga sahamnya. Tingginya harga saham membuat tinggi pula nilai perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini tetapi juga prospek perusahaan kedepannya.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021.

Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan serta memprediksi tentang praktek akuntansi. Dengan adanya teori akuntansi positif, para pembuat kebijakan dapat memprediksi adanya konsekuensi ekonomis dari kebijakan-kebijakan juga praktik akuntansi. Teori akuntansi positif berupaya dalam menguraikan praktik-praktik akuntansi yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang didapat secara uji empiris. Teori akuntansi positif juga menjelaskan tentang sebuah proses, pemahaman, penggunaan kemampuan, penggunaan kebijakan dan penggunaan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi keadaan tertentu dalam masa yang akan datang. Teori akuntansi positif juga dapat memberikan pedoman untuk para pembuat kebijakan akuntansi dalam hal menentukan konsekuensi dalam kebijakan yang diambil.

Harahap (2011) mengatakan bahwa metode teori akuntansi positif bermula dari suatu teori atau metode ilmiah yang tengah dilakukan atau diterima oleh umum. Berdasarkan teori ini maka dapat dirumuskan bahwa masalah penelitian dalam pengamatan perilaku atau fenomena nyata yang tidak terdapat dalam teori. Yang kemudian dikembangkan dalam teori yang menjelaskan fenomena tersebut dan kemudian dilakukan penelitian secara terstruktur dengan standar peraturan dalam melakukan perumusan masalah, penyusunan hipotesa, pengumpulan data serta pengujian statistik ilmiah. Sehingga dapat diketahui bahwa hipotesa

yang dirumuskan apakah diterima atau tidak. Para pendukung menyebutkan bahwa metode ini yang dapat digolongkan sebagai metode ilmiah karena penggunaan peraturan yang terstruktur serta memiliki data empiris yang obyektif juga model statistik matematik yang bersifat logik.

Tax avoidance merupakan pengaturan dalam menekankan atau meminimalkan beban pajak suatu perusahaan tetapi dengan memperhitungkan sebab akibat pajak yang akan muncul, namun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran pajak karena upaya wajib pajak hanya untuk menekan, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari,2013). Namun langkah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara memanipulasi laba yang akan berdampak pada pemberian data yang kurang tepat kepada investor. Hal ini memberikan dampak pada pendapatan nasional sektor perpajakan mengalami penurunan.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai laba yang dihasilkan perusahaan. Agus Sartono (2012) mengatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang ada seperti halnya penjualan, modal, kas, jumlah karyawan, dan sebagainya. Rasio profitabilitas juga akan menunjukkan tingkat keefektifan pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka akan semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan akan semakin meningkat ketika nilai profitabilitas semakin tinggi. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

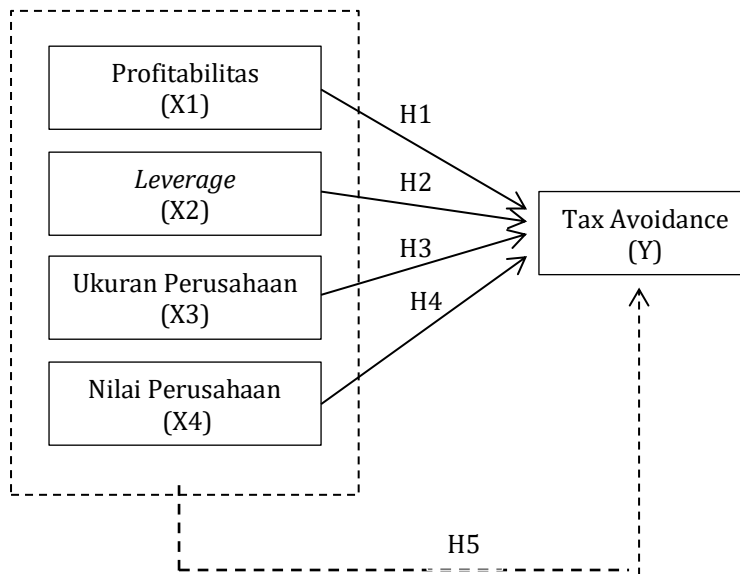
Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan nilai hutang perusahaan modal maupun asset perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan sumber dana operasi perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan dalam pengukuran seberapa besar hutang yang digunakan dalam pembiayaan perusahaan. Dewi dan Noviri (2017) mengatakan bahwa pembiayaan hutang terbagi dalam bagian biaya bunga pinjaman yang dapat mengurangi penilaian pada penghasilan kena pajak. Hal ini memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat mengurangi nilai wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan bentuk pengukuran yang dikategorikan berdasarkan besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh beberapa faktor antar lain nilai total aset perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan (Suwito dan Herawaty,2005). Sehingga dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi. Perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan termasuk kewajiban perpajakan kepada pemerintah. Perusahaan dalam ukuran besar akan tetap mematuhi ketentuan perpajakan dengan baik meskipun terdapat indikasi penghindaran pajak dengan upaya menekankan biaya perusahaan dengan seminimal mungkin.

Nilai perusahaan merupakan suatu kinerja sebuah perusahaan yang tergambar dalam harga saham yang terbentuk atas permintaan dan penawaran pasar modal yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan tersebut (Harmono,2009). Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsing (2009) nilai perusahaan merupakan suatu pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dapat

dilihat dari harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Serta dapat meningkatkan kepercayaan pasar yang tidak hanya terhadap kinerja perusahaan tetapi juga prospek kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > Pengaruh variable X terhadap variable Y secara parsial.
 - - - - -> Pengaruh variable X terhadap variable Y secara simultan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan operasi perusahaan. ROA atau *return on assets* merupakan salah satu rasio yang menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. ROA juga memperlihatkan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dalam penggunaan seluruh aset yang dimiliki.

Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin tinggi nilai ROA, atau dapat diartikan bahwa profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti diikuti dengan naiknya jumlah pajak penghasilan sesuai dengan kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka dapat dikatakan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Salah satu usaha manajemen keuangan dalam mempertahankan tingkat profitabilitas perusahaan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* memiliki tujuan untuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran perusahaan

sehingga perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan maka semakin rendah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk (2020) menyatakan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dari Fauzan dkk (2019), Noviyani dan Muid (2019), Permata dkk (2018) dan menghasilkan kesimpulan ROA berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal ataupun aset perusahaan. Perusahaan mendapatkan sumber pendanaan dari pendanaan eksternal dan pendanaan internal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yakni berupa utang dalam pembiayaan aktivitas operasinya dapat menimbulkan munculnya beban bunga.

Semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar pula beban bunga yang akan didapat dari hutang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan akan menggunakan pendanaan dari sisi hutang daripada sisi ekuitas. Perusahaan mengambil langkah ini karena timbulnya beban bunga dari pendanaan utang yang dapat dikurangkan secara fiskal sedangkan deviden yang muncul dari pendanaan dari sisi ekuitas tidak dapat dikurangkan. Hal ini juga menyebabkan laba perusahaan akan mengalami penurunan oleh karena itu, tingginya beban bunga akan berdampak pada tingginya kecenderungan sebuah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rinosa Noviyani dan Muid (2019), dan Annisa (2017) dan menghasilkan kesimpulan DER berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Skala penentu besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari nilai total aset, nilai modal, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan lainnya merupakan pengertian dari ukuran perusahaan. Pada UU No.20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 bagian yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Perusahaan yang masuk dalam kelompok yang berukuran besar (mempunyai total aset yang besar) akan cenderung lebih stabil dan lebih mampu dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang masuk pada golongan besar akan didukung dan memiliki sumber daya yang besar yakni sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing termasuk bidang perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan yang cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu perusahaan dalam golongan besar karena didukung dan memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perencanaan pajak. Perusahaan besar akan mampu dalam mengatur perpajakannya dengan *tax planning*. adanya *tax planning* dapat berpengaruh pada mengoptimalkan *tax saving* perusahaan. Dalam hal ini *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara legal sehingga

mampu menekan beban pajak secara optimal.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aviva dan Nurasik (2021), I Kadek dkk (2020). William dkk (2020), dan menghasilkan kesimpulan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih (2009) bahwa nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang berkaitan erat dengan harga saham. Harga saham yang relatif tinggi mempengaruhi nilai perusahaan menjadi tinggi, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan dan prospek jangka panjang perusahaan. Perusahaan berusaha memberikan keuntungan secara maksimum bagi para pemegang sahamnya ketika harga saham perusahaan mengalami peningkatan. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin besar keuntungan bagi para pemegang saham. Keadaan ini sangat diminati oleh para investor karena meningkatnya permintaan saham menyebabkan nilai perusahaan ikut meningkat.

Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar suatu perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing termasuk perencanaan pajak. Perusahaan yang besar juga akan menarik minat pemerintah sehingga akan dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Namun ini tidak berpengaruh bagi nilai perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara atau badan atau perusahaan. Perusahaan yang besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang beresiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk. Sehingga semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nawang dkk (2021), yang menghasilkan kesimpulan PBV berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Nilai Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan yang baik ialah perusahaan yang memiliki tingkat manajemen keuangan yang baik, dimana dapat dilihat dari bagaimana usaha dalam mempertahankan tingkat profitabilitas perusahaan dengan perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi ditandai dengan semakin besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat upaya penghindaran pajak. Perusahaan yang sumber pendanaannya berupa utang akan menimbulkan beban bunga. Semakin besar beban bunga yang diperoleh dari utang tersebut maka semakin besar pula tingkat *leverage* perusahaan. Sehingga perusahaan akan mengalami penurunan laba yang akan berakibat pula pada penurunan beban pajak.

Penghindaran pembayaran pajak kerap kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam golongan perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perencanaan pajak (Sarah,2020). Yang kemudian mampu menekan nilai beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga akan menjadikan perusahaan semakin besar dan semakin tinggi nilai perusahaan yang dimiliki.

H5 : Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode yang digunakan dalam menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell,2012).

Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan setiap perusahaan sampel yang dilaporkan di BEI dari tahun 2018-2021. Sugiyono (2019:456) mengatakan bahwa data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sampel yang telah terdaftar pada *website Indonesia Stock Exchange* (www.idx.co.id) serta data yang telah dipublikasikan pada *website IDNFinancials* (www.indfinancials.com) tahun 2018-2021. Arikunto (2013) mengatakan populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021 sebanyak 47 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*) yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga menghasilkan sampel sebanyak 25 perusahaan.

Definisi operasional variabel memiliki tujuan dalam menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan alat bantu dengan tepat. Definisi operasional variable dalam penelitian ini antar lain :

Tax avoidance adalah usaha dalam meminimalkan bahkan menghilangkan beban pajak suatu perusahaan dengan pertimbangan akibat pajak yang akan ditimbulkan, namun bukan untuk melanggar pajak hanya saja mengurangi, meringankan, meminimumkan, atau menghindari beban pajak yang dilakukan dengan cara yang di perbolehkan pada undang-undang perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). *Tax avoidance* dapat dihitung menggunakan *cash effective tax ratio* dengan rumus (Budiman dan Setiyono,2012) :

$$CETR = \frac{\text{kas yang dikeluarkan untuk pajak}}{EBT}$$

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan operasi perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan salah satu rasio yaitu *return on assets* (ROA). Fungsi ROA yaitu untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Adapun rumus ROA adalah sebagai berikut (Agus Sartono,2010:123):

$$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

Leverage merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban-kewajiban jangka panjang menggunakan rasio. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai suatu perbandingan yang menunjukkan tingginya nilai utang yang digunakan dalam pembiayaan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan, maka semakin besar jumlah beban bunga yang akan ditanggung perusahaan, sehingga bisa mengurangi laba perusahaan sebelum kena pajak yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pajak perusahaan yang nantinya akan dibayarkan. *Leverage* dapat diukur menggunakan *debt to equity ratio*, dengan rumus (Agus Sartono,2010:120):

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total equity}}$$

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala penentu besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total aset, nilai penjualan, nilai *equity*, dan jumlah karyawan (Saifudin dan Yunanda, 2016). Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural total aset yaitu sebagai berikut (Taliyang,2011 dalam Lina,2013):

$$\text{size} = \ln(\text{total aset})$$

Nilai perusahaan merupakan kinerja suatu perusahaan dalam mencerminkan harga saham yang terbentuk dari permintaan dan penawaran pasar modal yang menunjukkan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus *price to book value* (PBV). PBV juga dapat diartikan sebagai rasio yang memperlihatkan harga saham yang diperjual belikan apakah diatas (*overvalued*) atau dibawah (*undervalued*) nilai buku saham. Adapun cara menghitung PBV yakni (Fakhrudin dan Hadianto,2001):

$$PBV = \frac{\text{harga pasar perlembar saham}}{\text{nilai buku saham}}$$

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Data yang baik yang dapat digunakan dalam suatu penelitian ialah data yang telah terdistribusikan secara normal. Pengujian ini menggunakan teknik *One Kolmogrov-Smirnov*.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std.	
	Deviation	0.45311882
Most Extreme Differences	Absolute	0.229
	Positive	0.196
	Negative	-0.229
Test Statistic		0.229
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.4 dapat diketahui nilai *Kolmogorov-Smirnov* test sebesar 0,229 dan signifikannya sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dimana dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Namun, pengujian asumsi klasik dapat dilanjutkan karena walaupun data tidak terdistribusi normal, namun masih memenuhi syarat *Best Linier Unbiased Estimators (BLUE)* dengan menggunakan asumsi *Gauss-Markov* (Gujarati, 2003).

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan guna mengetahui ada tidaknya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik ialah yang tidak terdapat gejala multikolinier didalamnya dalam kata lain tidak terdapat adanya kolerasi antar variabel bebas. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Toleran Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* ≥ 10 , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	-0.462	0.793		-0.583	0.562		
Return On Asset	0.382	0.401	0.099	0.951	0.344	0.889	1.125
Dept Equity Ratio	-0.186	0.074	-0.245	-2.504	0.014	0.994	1.006
Size	0.016	0.028	0.060	0.584	0.561	0.889	1.125
Price Book Value	0.157	0.109	0.147	1.439	0.153	0.916	1.092

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu yang mempunyai varian homogen atau tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,154	,614		,251	,803
Profitabilitas	,399	,313	,138	1,278	,204
Leverage	,003	,058	,006	,056	,955
Ukuran perusahaan	-,007	,022	-,034	-,317	,752
Nilai Perusahaan	,019	,085	,024	,225	,823

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada variabel independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan menghasilkan nilai sig 0.204, 0.955, 0.752, dan 0.823 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai absolut variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara residual periode t dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik ialah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Waston (DW-Test)*.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.305 ^a	0.093	0.055	0.4625598	1.879

a. Predictors: (Constant), Price Book Value, Dept Equity Ratio, Return On Asset, Size

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

sumber: Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.7 menunjuk kan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,879 sedangkan dari tabel *Durbin-Waston* dengan nilai signifikan 0,05 dan jumlah sampel sebanyak 100 sampel serta jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel, maka dalam tabel nilai *Durbin-Watson* akan diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,5922 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,7582. Maka nilai 4-Du (4-1,7582) sebesar 2,2418 sehingga hasil $du < d(DW) < 4-du$ adalah $1,7582 < 1,879 < 2,2418$. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai dw terletak diantara du dan 4-du sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual pada model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (*Uji-t*) digunakan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-

masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji *t* dilakukan dengan cara membandingkan antara *t* hitung dengan *t* tabel. Dalam menentukan nilai uji *t* tabel ialah dengan signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (N-k)$, dimana *N* ialah jumlah observasi sedangkan *k* ialah jumlah variabel (X). Dengan uji kriteria apabila *t* hitung > *t* tabel ($\alpha, N-k$) maka H_0 ditolak, sedangkan apabila *t* hitung < *t* tabel ($\alpha, N-k$) maka H_0 diterima. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik – t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,462	,793		-,583	,562
Profitabilitas	,382	,401	,099	,951	,344
Leverage	-,186	,074	-,245	-2,504	,014
Ukuran Perusahaan	,016	,028	,060	,584	,561
Nilai Perusahaan	,157	,109	,147	1,439	,153

a. Dependent Variable: TaxAvoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji *t* antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama

H1 : Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji regresi linier berganda memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,382. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada variabel profitabilitas menunjukkan *t* hitung sebesar 2,051 lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,344 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, sehingga hipotesis pertama ditolak.

2. Pengujian hipotesis kedua

H2 : *Leverage* berpengaruh secara persial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji regresi linier berganda memperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,186. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada variabel *leverage* menunjukkan *t* hitung sebesar -2,778 lebih kecil dari *t* tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, sehingga hipotesis kedua ditolak.

3. Pengujian hipotesis ketiga

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2018-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji regresi linier berganda memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan t hitung sebesar -0,536 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,561 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

4. Pengujian hipotesis keempat

H4 : Nilai Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji regresi linier berganda memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,157. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada variabel nilai perusahaan menunjukkan t hitung sebesar 2,663 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,153 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini merupakan pengujian yang menunjukkan apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi yang baik dan layak untuk diteliti atau tidak (Ghozali, 2011). Uji pengaruh simultan (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*. Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,086	4	,522	2,438	,052 ^b
	Residual	20,326	95	,214		
	Total	22,413	99			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas

Sumber : Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,052

lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau $0,052 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan hubungan variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 dinyatakan ditolak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square*, berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.305 ^a	0.093	0.055	0.4625598

a. Predictors: (Constant), Price Book Value, Dept Equity Ratio, Return On Asset, Size

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data sekunder yang diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,055 yang berarti bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan sebesar 5,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil analisis data hipotesis pertama menunjukkan t hitung sebesar 2,051 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,344 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Hal ini dijelaskan karena emiten tidak terfokus pada pertimbangan jumlah profitabilitas yang ada pada perusahaan tersebut. Semakin tingginya nilai ROA maka akan membuat perilaku penghindaran pajak semakin meningkat (Plesko, 2004). Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat laba yang tinggi telah dipastikan mempunyai dana yang cukup untuk pembayaran pajak serta melindungi nama baik perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib dalam memberi laporan beban pajak perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengurangi perilaku *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati dan Damayanthi (2019), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Hasil analisis data hipotesis kedua menunjukkan bahwa t hitung sebesar -2,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Menurut Ichsani dan Susanti (2019) *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena semakin besar hutang perusahaan maka akan mengurangi *tax avoidance*. Ini terjadi karena semakin besar hutang perusahaan maka semakin meningkat pula pembayaran kewajiban bunga perusahaan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak. Ketika laba sebelum pajak berkurang maka kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kimsen *et al.*, (2018) juga Rinosa Ari dkk (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Hasil analisis data hipotesis menunjukkan bahwa t hitung sebesar -0,536 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,561 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Meningkatnya skala dari perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya periode operasional dari perusahaan, maka dapat diperkirakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang besar. Selain itu telah diperkirakan juga bahwa perusahaan juga mempunyai sumber daya manusia yang memiliki ilmu mengenai peraturan perpajakan. Hal ini dapat membuat perusahaan memiliki kecenderungan perilaku *tax avoidance* meningkat. Namun ada pula perusahaan besar yang mampu dalam mengatur perpajakannya dengan *tax planning*. adanya *tax planning* perusahaan dapat dikatakan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga mampu mengatur beban pajak yang harus dibayarkan atau tanpa melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Permata dkk (2018), dan Trisnarningsih dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Hasil analisis data hipotesis menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,663 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,153 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diprosikan pada ekuitas (ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk), jumlah saham (modal ditempatkan dan disetor

penuh), harga saham (harga penutupan saham akhir tahun), nilai buku (ekuitas dibagi jumlah saham) dan *Price To Book* (PBV) dimana harga saham dibagi nilai buku. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar suatu perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya masing-masing termasuk perencanaan pajak. Sehingga perusahaan akan membayarkan wajib pajaknya guna mendapatkan citra yang baik dari masyarakat namun ada juga perusahaan yang akan memanfaatkan sumber daya manusianya untuk menekan angka wajib pajak perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Tarihoran (2016), dan Nawang dkk (2021) yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Perusahaan secara simultan terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan secara parsial maupun simultan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji simultan diatas, nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,052 lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau $0,052 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan hubungan variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Hal ini berkaitan dengan teori yaitu membuktikan faktor fundamental dan teknikal perusahaan yang berasal dari laporan keuangan yang dipresentasikan oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang baik ialah perusahaan yang memiliki tingkat manajemen keuangan yang baik, dimana dapat dilihat dari bagaimana usaha dalam mempertahankan tingkat profitabilitas perusahaan dengan perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi ditandai dengan semakin besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkat upaya penghindaran pajak. Perusahaan yang sumber pendanaannya berupa utang akan menimbulkan beban bunga. Semakin besar beban bunga yang diperoleh dari utang tersebut maka semakin besar pula tingkat *leverage* perusahaan dan menurunnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut. Penghindaran pembayaran pajak kerap kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam golongan perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perencanaan pajak. yang kemudian mampu melakukan *tax planning* sehingga dapat mengoptimalkan *tax saving* perusahaan. Dalam artian perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati *et al.*, (2019), Viola (2018), Kimsen *et al.*, (2018), Handayani (2018) menyatakan bahwa secara simultan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Nilai Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
5. Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Merujuk pada hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas pada sektor manufaktur saja sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.
- Abdullah A, K. V. (2019, Desember). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1-10.
- Alisea A, T. N. (2019, Juni). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2018). *Aktual*, 2(1), 71-82.
- Anes Yunita Sari, H. W. (2021, Mei). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Aviva Cahya Ningrum, N. (2021, April). The Effect Of Executive Commisioners, Company Size, Independent Commisioners, And Institutional Ownership On Tax Avoidance In Lq45 Companies Listed On The Idx 2017-2019 Period. *Web Of Scientist:International Scientific Research Journal*, 2(4), 38-56.
- Barly, H. (2018, Juli). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238.
- Debby M, S. A. (2020, September 19). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, -.

- Efrida Siboro, H. F. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana*.
- Gultom, J. (2021, Mei). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), -.
- Hanggi A, S. D. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140.
- I Kadek Junaedi, I. M. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Mahasarakswati Denpasar*.
- Imelda O, S. D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2(54), 1-10.
- Indah Rahmadini, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017 . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 131-143.
- Jeremi Martinus, M. E. (2021, Desember). Penghindaran Pajak Pada Industri Barang Konsumsi Di Indonesia Sebelum Era Pandemi Covid19 : Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas. *Educoretax*, 1(4), -.
- Maya Ariska, M. F. (2020, Juni). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*, 01(01), -.
- Muhammad A, P. W. (2019). Pengaruh Sales Grow Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2(14), 1-10.
- Nardi G, D. P. (2021, Mei). Aktivitas Luar Negeri Dalam Memoderasi Determinan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 65-74.
- Nawang K, S. C. (2021, Agustus). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). (190-202, Ed.) *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2).
- Purba, R. C. (2020, Juni). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Global Manajemen*, 9(1), 64-69.
- Rinosa A.W, N. K. (2020, Desember). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46-59.
- Sevi L.D, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
- Sri T, E. M. (2021, Oktober). Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding SeNAPaN*, 1(2), 736-753.

Thomas F, J. I. (2021, April). Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 588-595.

Pengaruh Harga Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pedagang Pada Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian

Dini Haryati

Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari - diniharyati14@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pedagang pada komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian, pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pedagang pada komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian, serta pengaruh harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang pada komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survey, sampel penelitian adalah seluruh pedagang di Komplek BBC Muara Bulian yang berjumlah 41 orang pedagang, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan angket. Sementara teknik analisa data meliputi analisis deskriptif, analisis regresi, serta uji prasyarat analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, jika terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang pada komplek BBC Muara Bulian. Hal ini dibuktikan dengan, hasil uji t variabel harga (X_1) yang menunjukkan nilai t_{hitung} adalah $2,256 > t_{tabel} 1,685$ dan nilai signifikansi $0,017$ ($sig < 0,05$). Hasil uji t variabel fasilitas (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} adalah $3,481 > t_{tabel} 1,685$ dan nilai signifikansi $0,001$ ($sig < 0,05$). Hasil uji F atau uji simultan (uji serempak) variabel harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang adalah nilai $F_{hitung} 20,791 > F_{tabel} 3,24$ dengan nilai signifikansi $0,000$ ($sig < 0,05$) menunjukkan bahwa harga dan fasilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pedagang. Besarnya pengaruh harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang di Komplek BBC Muara Bulian adalah sebesar 49,7%.

Kata Kunci: Harga, Fasilitas, Kepuasan, Pedagang

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah atau system ekonomi Islam, sebagai suatu sistem yang merujuk pada syariat, yaitu petunjuk wahyu, diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan mensejahterakan para pengamalnya, baik muslim maupun non muslim. Globalisasi ekonomi telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat berbeda dengan lingkungan bisnis yang kita kenal sebelumnya. Akibat globalisasi ekonomi, tercipta situasi dimana *costumer*

menuntut perusahaan untuk menentukan produk dan jasa yang mereka butuhkan dan harus dipenuhi serta dilayani dengan baik oleh produsen (*costumer take charge*).

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pemilik kompleks BBC Muara Bulian melalui Disperdagkop dan UKM selaku pihak pengelola harus dapat memberikan kepuasan kepada pedagang pada Komplek BBC selaku konsumen dan memberikan citra yang baik di mata pedagang dengan member perhatian dan menunjukkan keberpihakan kepada pedagang melalui penetapan harga sewa ruko dan pembenahan fasilitas di Komplek BBC Muara Bulian.

Tingkat hunian atau jumlah pedagang yang menyewa ruko di Komplek BBC Muara Bulian harus menjadi fokus pihak pengelola kawasan, namun tanpa adanya perubahan, baik dalam menetapkan harga sewa ruko dan kemudahan pengurusan administrasi, pembenahan pada fasilitas penunjang di dalam dan di luar ruko, serta kualitas pelayanan pihak pengelola kawasan terhadap keluhan pedagang, maka hal tersebut akan sulit diwujudkan.

Dalam rangka memberikan masukan tentang persepsi kepuasan pedagang terhadap variabel harga dan fasilitas, perlu dilakukan penelitian yang diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur guna menilai keberadaan variabel-variabel tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam dengan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **"Pengaruh Harga dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pedagang pada Komplek Bulian Bisnis Centre (BBC) Muara Bulian"**.

Konsumen merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, konsumen memegang

peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan.

Dengan adanya nilai tambah dari suatu produk, maka konsumen menjadi lebih puas dan kemungkinan untuk menjadi konsumen suatu produk tersebut dalam waktu lama akan sangat besar. Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain harga, kualitas produk, pelayanan, aktivitas penjualan, dan nilai-nilai perusahaan.

Harga menurut buku Ensiklopedia Umum adalah harga dalam ekonomi perusahaan terutama dimaksud biaya produksi yaitu, "Segala pengorbanan (dinilai dengan mata uang) yang dikerahkan untuk menyiapkan suatu jenis barang.

Menurut Philip Kotler penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka waktu tertentu (mengenaiperkembangan pasar). Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Fasilitas merupakan suatu faktor yang sangat penting dan sangat menunjang dalam suatu perusahaan memasarkan produk jasa kepada konsumen pengguna jasa. Adapun definisi fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara. Sedangkan menurut Phillip Kotler, mendefinisikan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survey. Penelitian survey yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala atau pengumpulan informasi dari populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah dari

sampel sebagai mewakili data populasi tersebut, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Dalam proposal penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh pedagang atau pelaku usaha yang menyewa ruko di Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yang berjumlah 41 pedagang. peneliti berpedoman kepada Gay dalam Mukhtar bahwa yang akan disajikan sebagai sampel penelitian adalah seluruh pedagang pada Komplek BBC Muara Bulian yang berjumlah 41 orang. Seluruh sampel penelitian (responden) mengisi 3 macam instrumen dari variabel harga, fasilitas dan kepuasan pedagang. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dapat menggunakan wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu teknik, tergantung dari masalah yang diteliti. Analisis data pada penelitian kuantitatif adalah kegiatan analisis data meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga sewa ruko yang diberlakukan oleh Disperdagkop, UKM selaku pihak pengelola Komplek BBC Muara Bulian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pedagang. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman Berutu pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $2,350 > t$ tabel 1.987 dan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.

Penelitian tentang pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen juga dilakukan oleh Rahma Yanti pada tahun 2021 menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji t penelitian RahmaYanti di peroleh nilai thitung sebesar 4,098 dan ttabel 1,986, karena thitung>ttabel ($4,098 > 1,986$),sedangkan untuk signifikansi $< 0,05$ maka ($0,000 < 0,05$). Maka dapat fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. di Restoran

Tersedianya fasilitas pendukung di Komplek BBC Muara Bulian memberikan dampak berganda terhadap keberadaan pedagang sebagai penyewa ruko di kawasan tersebut, selain menumbuhkan arus kunjungan konsumen, hal tersebut juga dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk bertransaksi dengan para penyedia produk barang atau jasa yang berada di Komplek BBC Muara Bulian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang di Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel harga (X1) terhadap kepuasan pedagang di Komplek BBC Muara Bulian. Hasil uji t variabel harga (X1) menunjukkan nilai thitung adalah $2,256 > ttabel 1,685$ dan nilai signifikansi $0,017$ ($sig < 0,05$).
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel fasilitas (X2) terhadap kepuasan pedagang di Komplek BBC Muara Bulian. Hasil uji t variabel fasilitas (X2) menunjukkan nilai thitung adalah $3,481 > ttabel 1,685$ dan nilai signifikansi $0,001$ ($sig < 0,05$).
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel harga (X1) dan fasilitas (X2) terhadap kepuasan pedagang di Komplek BBC Muara Bulian. Hasil uji F atau uji simultan menunjukkan nilai Fhitung adalah $20,791 > Ftabel 3,24$ dan nilai signifikansi $0,000$ ($sig < 0,05$). Besarnya pengaruh harga dan fasilitas terhadap kepuasan pedagang di Komplek BBC Muara Bulian adalah sebesar 49,7%

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal harga, penetapan harga sewa ruko pada Komplek BBCMuara agar mempertimbangkan harga sewa ruko yang berlaku di pasaran, khususnya pada area sekitar Komplek BBC. Mekanisme pembayaran agar dapat berpihak kepada para pedagang selaku konsumen dengan memberikan tempo pembayaran bagi pedagang dengan masa sewa ruko 2 tahun keatas.
2. Dalam hal fasilitas, agar fasilitas pendukung seperti ATM, mushola, dan *help desk* Disperdagkop, UKM dapat disediakan. Selain bermanfaat bagi pedagang, juga bagi pengunjung Komplek BBC Muara Bulian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim(2013).*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta:Kementerian Agama RI.
- Asri Maharini,(2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam; Studi Kasus pada Penginapan Pondok Musafir Tulungagung, *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAI Negeri Tulungagung*, Jawa Timur,.
- Buchari Alma,(2014). *Pengantar Statistik Sosial*, Bandung:Alfabeta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(2013) Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Donni Juni Priansa, (2017). *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung:Alfabeta.
- Fajar Laksana, (2010). *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fandy Tjiptono, (2016). *Service, Quality & Satisfaction*, Yogyakarta: Andi.
- Firman Berutu, (2017). Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Keputusan Pedagang Menyewa Kios (Study Kasus Perusahaan Daerah Pusat Pasar Sidikalang), Medan: *Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara*.
- Fitria Salahika Salma & Ririn Tri Ratnasari, (2016). Pengaruh Kualitas Jasa Perpektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya, *Jestt*, Vol.2 No. 4 April 2015.
- Franklin Book Program, (2010). *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius
- Freddy Rangkuti, (2014). *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali Imam,(2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hasbiati,(2020). *Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap KepuasanNasabah Bank Syariah Indonesia Kota Palopo*, Skripsi Program

- Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINegeri Palopo.
- Heri Sudarsono,(2013). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,Yogyakarta:Ekonisia.
- Husaini Usman, (2013).*Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrasari (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, Surabaya: Unitomo Press.
- Iskandar (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press,
- Ivonne Wood,(2009). *Layanan Pelanggan: Cara Praktis, Murah, dan Inspiratif MemuaskanPelanggan Anda*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J Paul Peter dan Jerry C Olson (2014). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Jakarta:Salemba Empat.
- Juhaya S. Praja (2016).*Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia,
- Kemedikbud,(2019) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPPB,
- Kemenpan, *Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik*, Jakarta: Biro Hukum.
- Kuswadi (2014).*Cara Mengukur Kepuasan Konsumen*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Marius Angipora (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Amin Suma (2008). *Menggali Akar Menguraikan Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Tangerang: Kolam Publishing.
- Mukhtar (2010).*Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Pandji Anoraga (2012). *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Phillip Kotler (2017). *Manajemen PemasaranEdisi 13. Alih Bahasa: Benyamin Molan*, Jakarta: Erlangga.
- Riant Nugroho (2014).*Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizki Wahyudi, Eka Tripustikasi, Ahmad Yahya Asy-Syidqi (2019).*Teori dan Aplikasi Pendukung Penetapan Harga Produk*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Rozalind (2014).*Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Nasution (2011).*Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifuddin Azwar (2014).*Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Samryn (2011). *Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono (2010).*Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarlin, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perpektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syofian Siregar (2014).*Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapidengan Perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17*, Jakarta: Bumi Aksara

- Tatang Yuli Eko Siswono, *Penelitian Pendidikan Matematika*, Surabaya: Unesa University Press.
- Yusuf Qardhawi,(2004). *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam, terjemahan Abu Hana Zulkarnain, dkk, Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Media Eka Sarana.
- Yusuf Qardhawi **(1997)**. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin Lc. & Dra. Dahlia Husein*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Zaki Fuas Chalil (2016). *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Fitri Rahmadani¹, Witra Maison², dan Siska Yulia Defitri³
Universitas Mahaputera Muhammad Yamin – ¹fitriashlinn@gmail.com
– ²witramaison.02@gmail.com
– ³siskayd023@gmail.com

Abstrack-*This study aims to determine the Effect of Quality Apparatus on Asset Management, the Effect of Regulatory Understanding on Asset Management and Internal Control System on Asset Management, as well as the Effect of Quality Apparatus, Regulatory Understanding and Internal Control System simultaneously on Asset Management. This research was conducted on OPD in Solok City, namely Twenty-seven (27) OPD. The data used are primary data, the sample technique used is a saturated sample by distributing questionnaires. The sample in this study is the entire population, namely the Head of the OPD and the Head of the General Subdivision, and Managers of Goods of each OPD in the city of Solok. The results showed that Quality Aparatur, Regulatory Understanding and Internal Control System had a significant effect on Asset Management, then Quality Apparatus, Regulatory Understanding and Internal Control System had a simultaneous effect to Asset Management.*

Keywords: *Quality Apparatus, Regulatory Understanding, Internal Control System, Asset Management*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah telah diberi keleluasaan untuk mengelola, mengembangkan, dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Astini, 2018). Aset sebagai barang yang merupakan milik negara maupun daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen aset juga termasuk ke dalam ruang lingkup pertanggung jawaban keuangan negara. Pemerintah daerah membutuhkan adanya manajemen aset yang baik agar dapat memantau, menghitung, memahami kondisi aset atau barang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Manajemen aset merupakan bagian penting dalam keuangan negara. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Manajemen aset daerah di Indonesia dapat dikatakan belum optimal meskipun pemerintah daerah telah diberi kewenangan otonomi. Menurut (Prayogi et al., 2021) kendala dalam manajemen aset pada SKPK Kota Langsa disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum adanya pemahaman regulasi terhadap pekerjaan, belum optimalnya sistem informasi, dan kompetensi sumber daya manusia, menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia maka manajemen aset pada satuan kerja juga akan semakin baik dan tertib. Untuk mendukung keberhasilan manajemen aset dalam

sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut. Manajemen aset membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai (Hastings, 2010:23) dalam (Leky *et al.*, 2020). Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu pada satu bidang tertentu maka akan menghasilkan kinerja yang juga berkualitas (Resi *et al.*, 2022)

Selanjutnya variabel pemahaman regulasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen aset. Mainar *et al.* (2017) menyatakan bahwa regulasi memang merupakan jaminan yang harus ada agar pengelolaan aset daerah dapat terlaksana secara baik yang secara tidak langsung menjamin tidak akan terjadi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan yang berpotensi muncul dalam tahapan manajemen aset daerah.

Pengendalian internal juga memengaruhi dalam manajemen aset. Sistem pengendalian manajemen merupakan faktor penting bagi pihak manajemen agar dapat mendorong efisiensi dan dipatuhinya suatu kebijakan (Doni *et al.*, 2023). Hasil penelitian Astini (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Semua komponen sistem pengendalian internal yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring harus dibangun secara memadai, sehingga akan meningkatkan efektivitas manajemen aset tetap. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Rahmadhani dan Ariani (2022) dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan aset atau barang milik daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditemukan penatausahaan aset di Pemerintah Kota Solok belum terlaksana dengan tertib dan efektif. Pemeriksaan atas penatausahaan aset menunjukkan hasil dalam pencatatan beberapa aset di Pemerintah Kota Solok masih belum teridentifikasi dengan jelas dikarenakan terkendala oleh dokumen pendukung yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat beberapa aset atau barang milik daerah yang belum sepenuhnya tercatat pada kartu inventaris barang sehingga mengakibatkan kartu inventaris barang belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam pengendalian penatausahaan aset.

Pengelolaan barang milik daerah perlu dikelola dengan baik sehingga terwujud *good governance*, yakni pemerintah yang berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu pelayanannya dapat berupa penatausahaan aset daerah yang baik, dimana aset daerah dicatat dan dipertanggungjawabkan atas penggunaannya agar tidak hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau manajemen aset yaitu Kualitas Aparatur, Pemahaman Regulasi Dan Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah". Manajemen aset merupakan suatu proses untuk perbaikan pemahaman kondisi aset, perbaikan biaya operasi, dan kinerja yang membantu perbaikan dalam proses pengambilan keputusan (Azhar Iqlima, 2017). Manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasional pemerintah daerah. Selain itu ada upaya untuk mendukung inventarisasi aset-aset pemerintah daerah yang tidak digunakan.

Kualitas atau kompetensi aparatur merupakan tingkat kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya (Astini, 2018). Sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan

suatu organisasi, sebab merupakan pilar utama dalam pelaksanaan setiap kegiatan serta berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi (Kurniati *et al.*, 2017). Selain itu kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas daerah (Defitri *et al.*, 2021).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (regulasi). Pemahaman regulasi adalah proses pembuatan memahami ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Perspektif pertama dalam memahami keberhasilan suatu implementasi adalah kepatuhan para implementor dalam melaksanakan regulasi yang tertuang dalam dokumen regulasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 69).

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Syaifudin *et al.* (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam peyelenggaraan penatausahaan aset daerah untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui survei langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kota Solok. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Kasubbag Umum dan Pengurus Barang dari tiga puluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kota Solok. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan rancangan sampel *non probability sampling* dengan teknik sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*. Variabel terikat atau variabel dependen (Y) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiarto, 2017:78). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Manajemen Aset (Y). Sedangkan variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. (Sugiarto, 2017:78). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Aparatur (X₁), Pemahaman Regulasi (X₂) dan Sistem Pengendalian Internal (X₃). Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item total correlation* dengan membandingkan r hitung (kolom *Corrected Item Total Correlation*) dengan r table (kolom *Product Moment*) dengan signifikan 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom* (df)=n-2, dimana n adalah jumlah responden penelitian.

Menurut Ghazali (2018:45) uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas).

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2018:95).

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Manajemen Aset
A	=	Koefisien Konstanta
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien Regresi dari Masing-Masing Variabel
X_1	=	Kualitas Aparatur
X_2	=	Pemahaman Regulasi
X_3	=	Sistem Pengendalian Internal
e	=	Koefisien Error (Variabel Pengganggu)

Menurut (Ghozali, 2018:98) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Sedangkan koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 30 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing sampel diambil 3 orang responden yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Sub Bagian Umum, dan Pengurus Barang, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 kuesioner. Dari 90 kuesioner yang disebar, kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 81 kuesioner.

Tabel 1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	53,09 %
	Perempuan	38	46,91 %
Umur	26-35 tahun	14	17,28 %
	36-45 tahun	30	37,04 %
	46-60 tahun	37	45,68 %
Pendidikan	SLTA	7	8,64 %
	D III	8	9,88 %
	S1	34	41,98 %
	S2	30	37,03 %
	S3	2	2,47 %
Jabatan	Kepala OPD	27	33,33 %
	Kasubbag Umum	27	33,33 %
	Pengurus Barang	27	33,33 %

Sesuai tabel diatas responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki dan berlatar belakang umur 46-60 tahun. Latar belakang pendidikan responden dominan dari tingkat pendidikan S1 atau Sarjana. Berdasarkan hasil olahan data yaitu analisis statistik dibawah ini menggunakan SPSS sebagai berikut :

Uji Validitas

Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen Aset (Y)

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
Y.1	41.82	14.195	0,629	0,184	Valid
Y.2	41.77	14.625	0,576	0,184	Valid
Y.3	41.85	14.303	0,663	0,184	Valid
Y.4	41.77	14.025	0,714	0,184	Valid
Y.5	41.77	14.450	0,630	0,184	Valid
Y.6	41.98	13.512	0,651	0,184	Valid
Y.7	41.75	14.338	0,643	0,184	Valid
Y.8	41.96	13.661	0,707	0,184	Valid
Y.9	41.87	13.585	0,702	0,184	Valid
Y.10	41.93	13.609	0,693	0,184	Valid
Y.11	41.71	14.531	0,562	0,184	Valid

didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,184. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan tersebut valid dan sebaliknya jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Aparatur (X1)

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X1.1	17.55	1.650	0,415	0,184	Valid
X1.2	17.29	1.911	0,598	0,184	Valid
X1.3	17.27	1.950	0,586	0,184	Valid
X1.4	17.16	2.211	0,387	0,184	Valid
X1.5	16.79	3.018	0,206	0,184	Valid

dimana r_{hitung} masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, yang membuktikan bahwa data tersebut valid.

Tabel 1.4 Hasil Uji Validitas Pemahaman Regulasi (X2)

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X2.1	16.40	2.619	0,611	0,184	Valid
X2.2	16.37	2.511	0,667	0,184	Valid
X2.3	16.34	2.679	0,690	0,184	Valid
X2.4	16.29	2.511	0,641	0,184	Valid
X2.5	16.16	2.961	0,429	0,184	Valid

Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$, yang membuktikan bahwa data tersebut

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X3.1	33.22	9.575	0,611	0,184	Valid
X3.2	33.22	9.025	0,666	0,184	Valid
X3.3	33.41	9.847	0,587	0,184	Valid
X3.4	33.28	9.431	0,579	0,184	Valid
X3.5	33.11	9.900	0,536	0,184	Valid
X3.6	33.18	9.828	0,505	0,184	Valid
X3.7	33.08	10.205	0,482	0,184	Valid
X3.8	32.95	10.198	0,453	0,184	Valid
X3.9	33.08	9.930	0,512	0,184	Valid

Nilai r_{tabel} sebesar 0,184. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
Manajemen Aset (Y)	0,907	0,60	Reliabel
Kualitas Aparatur (X1)	0,602	0,60	Reliabel
Pemahaman Regulasi (X2)	0,815	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,838	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Variabel Manajemen Aset dapat dikatakan reliabel karena hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar $0,907 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi, kemudian pada variabel kualitas aparatur dapat dikatakan reliabel dengan hasil pengujian sebesar $0,602 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan tinggi, dan varibel pemahaman regulasi dikatakan reliabel dengan hasil

pengujian sebesar $0,815 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi serta variabel sistem pengendalian internal dapat dikatakan reliabel dengan hasil pengujian $0,838 > 0,60$ dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1.7 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas Aparatur	0,538	1,860
Pemahaman Regulasi	0,549	1,823
Sistem Pengendalian Internal	0,427	2,342

a. Dependent Variable: Manajemen Aset

Dari hasil output pada uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel $> 0,10$ dan nilai VIF untuk masing-masing variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	0,226	2,942	
Kualitas Aparatur	0,691	0,174	0,295
Pemahaman Regulasi	0,830	0,152	0,403
Sistem Pengendalian Internal	0,374	0,098	0,317

a. Dependent Variable: Manajemen Aset

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,226 + 0,691X_1 + 0,830X_2 + 0,374X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,226 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Kualitas Aparatur, Pemahaman Regulasi dan Sistem Pengendalian Internal bernilai konstan maka besarnya nilai Manajemen Aset adalah sebesar 0,226 satuan. Koefisien Kualitas Aparatur (X_1) sebesar 0,691 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Kualitas Aparatur (X_1) 1 satuan dengan asumsi Pemahaman Regulasi (X_2) dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Manajemen Aset (Y) sebesar 0,691 satuan. Koefisien Pemahaman Regulasi (X_2) sebesar 0,830 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Pemahaman Regulasi (X_2) 1 satuan dengan asumsi Kualitas Aparatur (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Manajemen Aset (Y) sebesar 0,830 satuan. Koefisien Sistem Pengendalian Internal (X_3) sebesar 0,374 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Sistem Pengendalian Internal (X_3) 1 satuan dengan asumsi Kualitas Aparatur (X_1) dan Pemahaman Regulasi (X_2) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Manajemen Aset (Y) sebesar 0,374 satuan.

Uji Parsial (Uji t)**Tabel 1.9 Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,226	2,942		0,077	0,939
	Kualitas Aparatur	0,691	0,174	0,295	3,973	0,000
	Pemahaman Regulasi	0,830	0,152	0,403	5,471	0,000
	Sistem Pengendalian Internal	0,374	0,098	0,317	3,805	0,000

a. Dependent Variable: Manajemen Aset

1. Pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Manajemen Aset

Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3,973 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,665, maka $3,973 > 1,665$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis pertama (H1) dapat diterima bahwa Kualitas Aparatur (X1) berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y).

2. Pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap Manajemen Aset

Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 5,471 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,665, maka $5,471 > 1,665$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis kedua (H2) dapat diterima bahwa Pemahaman Regulasi (X2) berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y).

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Manajemen Aset

Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3,805 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,665, maka $3,805 > 1,665$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis ketiga (H3) dapat diterima bahwa Sistem Pengendalian Internal (X3) berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y).

Uji Simultan (Uji F)**Tabel 1.10 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1041.146	3	347.049	86.536	0,000 ^b
	Residual	308.804	77	4.010		
	Total	1349.951	80			

a. Dependent Variable: Manajemen_Aset_Y

b. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur, Pemahaman Regulasi, SPI

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} 86,536 $>$ 2,723, atau nilai signifikan $0,00 < 0,05$, sehingga variabel Kualitas Aparatur (X1), Pemahaman Regulasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Aset (Y). jadi hipotesis (H4) yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur (X1), Pemahaman Regulasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,878 ^a	0,771	0,762	2,003

a. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur, Pemahaman Regulasi, SPI

b. Dependent Variable: Manajemen Aset

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,762. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel Kualitas Aparatur (X1), Pemahaman Regulasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara simultan terhadap Manajemen Aset (Y) adalah sebesar 76,2% sedangkan sisanya sebesar 23,8% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini, seperti Komitmen Organisasi (Ekayanti, *et al.*, 2018) dan Sistem Informasi (Prayogi, *et al.*, 2021), dll.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset. Semakin baik kualitas aparatur akan semakin baik pula manajemen aset. Hal ini menunjukkan dengan adanya aparatur pengelola aset yang berkualitas maka tata kelola manajemen aset akan terlaksana dengan tertib. Pemahaman regulasi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset. Hal ini menunjukkan semakin baik pemahaman regulasi oleh aparatur pengelola aset maka manajemen aset akan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset. Hal ini menunjukkan semakin bagus penerapan sistem pengendalian internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka akan semakin optimal pula manajemen asetnya. Kualitas aparatur, pemahaman regulasi dan sistem Pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap manajemen aset. Hal ini dikarenakan aparatur yang berkualitas tentunya akan memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki penerapan yang baik terhadap sistem pengendalian internal manajemen asetnya sehingga terwujud tata kelola aset yang tertib dan baik.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian ini dengan menambahkan sampel penelitian serta variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2),173-184.
- Azhar, Iqlima. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi Terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, Vol. 1, No.1, 49-61.

- Defitri, S.Y., Bahari, A., Handra, H., Febrianto R. Determinant Factors Of E-Government Implementation and Public Accountability Toe Framework Approach. *Viesoji Politika IR Administravimas*, Vol. 19, No. 4, 37-51.
- Doni, R.A, Sukraini, Juita, Defitri, S.Y., dkk. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JUMBO)*, Vol. 7, No. 2, 327-333
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economics Research (IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Ghozali, L. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastings, N. A. J. (2010). *Physical Asset Management*. London: Springer.
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 (3), 540-558.
- Leky, M. T. D. F., Subroto, B., & Rosidi, R. (2020). Factors Affecting Asset Management in Malacca District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 266-276.
- Mainar. Darwanis, Abdullah, Syukriy. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada SKPK Di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 6, No. 1, 41- 50.
- Malau, F. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah Melalui Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Samosir. *Tesis Universitas Sumatera Utara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Prayogi, Jefry Eka, Azhar, I., Zati, Muhammad Rizqi. (2021). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset Pada SKPK Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, Vol. 2 No. 6, 350-361.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, Resi Andika, Defitri, Siska Yulia, Maison Witra. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 No. 3, 247-267.
- Ratmono, D., & Rochmawati, A. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 236-247.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Rosihan, Bharranti, Bonifasia Elitha, Ratang Westim. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Keuda)*, Vol. 2 No. 1.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media (2nd ed.)* Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Syaifudin, M., Ritchi, H., & Avianti, I. (2020). Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol, 12(2).

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis *Artificial Intelligence* Terhadap Kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting* (Studi Kasus pada Organisasi Sektor Publik di Kabupaten Gresik)

Gusti Dian Prayogi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya– dian@stieyapan.ac.id

Abstrak— *For public sector organizations Artificial Intelligence can improve efficiency, transparency, and the quality of services provided to the public if its application is appropriate, as for some technologies in the public sector, for example E-Government, Big Data Analytics and Open Data. This type of research analysis uses quantitative research methods. The research analysis population used was from the Finance and Accounting Section of the Gresik Work Unit, East Java Regency. The sampling technique is target sampling (Proposive). Researchers used a questionnaire to collect data. The developed questionnaire was tested quantitatively with validity and reliability tests. The indicators of the research analysis tool used as variables are the government internal control system (X1), artificial intelligence-based accounting information systems (X2), and financial reporting fraud trends (Y). In this study, descriptive analysis using load factor values and inferential analysis using smartPLS 3.0 software were used as data analysis.*

The results of the study state that the government internal control system does not have a significant impact on the tendency of fraud in financial statements with a positive coefficient of 0.103. However, the Artificial Intelligence-based accounting information system has a significant effect on the tendency of financial statement fraud with a coefficient value of 0.637.

Keywords — *internal control system, government, Fraudulent Financial Reporting Tendency*

1. PENDAHULUAN

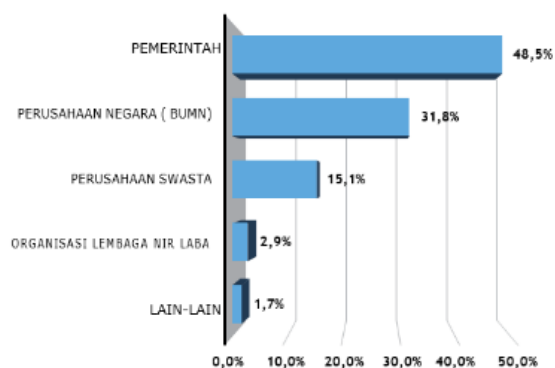
Seiring berjalannya waktu teknologi terus mengalami perkembangan dan perkembangannya cukup pesat. Inovasi dan kemajuan dalam bidang teknologi yang terjadi secara terus-menerus, tentunya membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan kita. beberapa contoh perkembangan teknologi Blockchain, Internet of Things(IoT), Artificial Intelligence(AI), Cloud Computing, Healthcare Technology dan Virtual and Augmented Reality. AI atau yang lebih dikenal dengan Artificial Intelligence memungkinkan pengguna mengerjakan tugas yang sebelum keberadaannya dilakukan manual dengan bantuan manusia, seperti mendeteksi atau mengenali wajah, analisis data kompleks, dan bahkan pengambilan keputusan termasuk dalam hal keuangan dan akuntansi. Perkembangan teknologi tersebut memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hiburan dan tidak terkecuali sektor publik (Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2018).

Bagi organisasi sektor publik Artificial Intelligence dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jika penerapannya tepat, adapun beberapa teknologi pada sektor publik misanya E-Government, Big Data Analytics dan Open Data. Walaupun keberadaannya memberikan banyak manfaat, tidak sedikit pula dengan adanya teknologi membawa sisi negatif oleh karenanya menjadi suatu hal yang patut diperhatikan untuk mempertimbangkan implikasi etis, aspek keamanan, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi di sektor publik. Menurut Pasyarani., L (2023) penerapan Artificial Intelligence (AI) yang tidak benar atau tidak etis dapat memiliki beberapa akibat negatif di berbagai sektor, termasuk sektor publik diantaranya dapat terjadi bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan, ketidakpatutan dan ketidaktransparanan, ketidakamanan data dan privasi, penggantian pekerjaan manusia, dan ketidakmampuan untuk menjelaskan keputusan. Kristyani, Dian, dan Hamidah (2020) mengungkapkan ciri-ciri kecurangan sektor publik pada zaman digitalisasi, seperti pemanfaatan

miskonsepsi dalam pengaruhnya pada digitalisasi teknologi yang terjadi dalam bidang akuntansi misal dengan penggantian tugas akuntan dan dekresi kecurangan. memanfaatkan permasalahan kesalahan manusia dan kurangnya keterampilan dalam menghadapi teknologi digital, menggunakan produk teknologi digital, melakukan penipuan. Oleh karena itu, meskipun kecerdasan buatan diterapkan dalam manajemen sektor publik, namun harus diperkuat dengan sistem pengendalian internal yang andal. Salah satu bagian terpenting dari pengendalian internal pada organisasi sektor publik adalah pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan.

Dengan penerapan pengawasan internal yang berkomitmen dalam penyusunan pelaporan keuangan, organisasi sektor publik dapat mencegah kesalahan, penipuan dan penyalahgunaan sumber daya keuangan. Hal ini juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Di Indonesia, penerapan sistem pengawasan pada lingkungan intern pemerintah (internal control) telah menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa kerangka acuan dalam pembangunan pengawasan lingkup internal pemerintah Indonesia digunakan lima unsur dan 25 sub unsur, yang kelima unsur tersebut mewakili lingkungan pengendalian, manajemen resiko, aktivitas kontrol atau pengawasan, informasi komunikasi, dan monitoring dalam pengawasan internal. Meskipun penilaian dilakukan dengan menilai kematangan SPIP, namun merupakan penilaian terhadap kematangan SPIP dalam memenuhi tujuan pengendalian, yang meliputi efektifitas dan efisiensi aktifitas perusahaan dalam rangka mencapai indikator kinerja organisasi, penyusunan laporan keuangan yang andal dan kompetable, dan perlindungan terhadap aset yang dimiliki entitas pemerintah serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan atau aturan lain yang membersamai.

Gambar 1. Jenis Organisasi yang paling dirugikan karena fraud



Menurut Shoihahm Siti dan Praseytono(2016) menyatakan bahwa biasanya staf pada organisasi sektor publik (pemerintah daerah) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi dokumen pertanggungjawaban ataupun pendukungnya dimana dokumen tersebut akan menjadi sumber data transaksi yang memuat informasi bermanfaat bagi laporan keuangan entitas. Tindakan fraud lain yang dilakukan oleh staf pada Organisasi sektor publik adalah terkait dengan saat pengadaan aset salah satunya pada aktifitas penentuan sisa persediaan aset, kemudian aktifitas penafsiran sisa umur manfaat aset (yang biasanya berkaitan dengan penghapusan aset) maupun aktifitas yang berhubungan dengan perhitungan penyusutan aset yang dinilai dengan tidak proporsional sesuai pedoman yang berlaku. Staf pada organisasi sektor publik (pemerintah daerah) dapat pula melakukan kelalaian dalam aktifitas pencatatan hibah atau bantuan dari pemerintah yang merupakan entitas di atasnya (pusat maupun propinsi) atau dapat pula melakukan kesalahan dalam pencatatan transaksi pada kode akun (Code of Account).

Saat ini, kecurangan tidak lagi murni bersifat manual, melainkan berbasis teknologi yang disebut dengan cybercrime. Menurut data dari Survei Kejahatan Keuangan dan Penipuan Global PWC tahun 2020, penipuan di bidang teknologi, media, dan telekomunikasi menyumbang 20% kejahatan dunia maya, 16% penipuan pelaporan keuangan, dan 13% penipuan pelanggan. Kejahatan dalam manipulasi pelaporan keuangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta tapi juga sektor publik termasuk di kabupaten Gresik. Padahal Pemerintah Daerah kabupaten Gresik mencatat pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan pendapatan asli daerah dimana PAD melambung dua kali lipat lebih, dari Rp 981 miliar pada 2019 menjadi Rp 1.988 miliar pada 2021. Pendapatan

asli daerah dan belanja modal bersama-sama secara signifikan mempengaruhi kelemahan pengendalian internal (Kristanto, Septian Bayu:2009). Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian TK Putra (2018) dan JV Sebayang (2017). Sehingga peneliti tertarik memilih topik “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting pada organisasi sektor publik dalam hal ini Kabupaten Gresik”.

Sistem Pengendalian (pengawasan) Intern Pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan suatu kerangka yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur dan menganalisa secara terstruktur terkait dengan pencapaian tujuan entitas publik, keandalan dan transparansi dalam pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kinerja operasional entitas publik, dan pemenuhan tata kelola sesuai aturan peraturan yang membersamainya

Dalam PP 60 Tahun 2008 mengatur tentang prinsip, tugas, dan tanggung jawab dalam pengendalian intern pemerintah. Menurut FS Ari Wibowo, A.Atwal Arifin (2018) ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem internal control pemerintah sesuai dengan peraturan tersebut antara lain:

- 1) Lingkup Pengendalian: Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah untuk mendefinisikan dan memahami lingkup pengendalian internal yang diperlukan dalam entitas pemerintah. Hal ini mencakup identifikasi risiko, pemahaman terhadap tujuan organisasi, serta penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada.
- 2) Penilaian Risiko: Entitas pemerintah diharapkan untuk melakukan penilaian risiko secara sistematis. Hal ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin dihadapi dan bagaimana memitigasi resiko tersebut sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan penentuan tindakan pengendalian yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut.
- 3) Struktur Organisasi: Peraturan tersebut menekankan pentingnya adanya struktur organisasi yang jelas dan memadai dalam entitas pemerintah. Struktur organisasi dapat pula termasuk dalam aktifitas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai, termasuk juga pengaturan wewenang berdasarkan jabatan dan fungsi serta tanggung jawab yang mengikutinya.
- 4) Kebijakan dan Prosedur: Pemerintah diharapkan untuk pengembangan aturan terkait dengan kebijakan dan sistem prosedur yang relevan dan memadai. Ini mencakup kebijakan terkait pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, serta pelaporan keuangan.
- 5) Pengawasan dan Evaluasi: Entitas pemerintah diharapkan memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif guna meyakini bahwa sistem pengawasan internal dapat berjalan dan terorganisir dengan baik. Ini termasuk pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan operasional, penilaian kinerja, serta tindakan perbaikan yang diperlukan.
- 6) Sumber Daya Manusia: Pemerintah diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni secara keahlian dan pengalaman sehingga memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan sistem pengendalian internal. Ini melibatkan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
- 7) Pelaporan: Pemerintah diharapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terpercaya. Laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional secara akurat serta mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku.

Menurut Pirlindungan (2022), pengimplementasian dalam sistem pengawasan internal pemerintah dimana sesuai dengan kerangka acuan pada PP 60 Tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi, mengelola risiko, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Omidi, Min.Q, Moradinaftchali V., M Piri (2019) menyatakan bahwa artificial Intelligent merupakan salah satu dari teknologi yang perkembangan cukup pesat dalam era modernisasi dan digitalisasi saat ini. Artificial Intelligent (AI) atau kecerdasan buatan mengacu pada kemampuan sistem komputerisasi atau mesin untuk melakukan aktifitas peniruan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang umumnya secara manual membutuhkan kecerdasan manusia. AI dapat membersamai berbagai bidang ataupun aplikasi, termasuk dalam pengenalan deteksi wajah (face detection), pengenalan suara (voice detection), pengenalan penekanan tulisan tangan manusia, pengenalan objek tertentu, penterjemahan bahasa, analisis data, sistem rekomendasi, mobil otonom, dan

banyak lagi. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi AI, terutama dalam bidang pembelajaran mesin dan deep learning, telah membawa perkembangan yang signifikan dalam kemampuan sistem AI untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia yang kompleks.

Mahmud Muhamadi, Shoreh Yazdani, Mohamad hamed Khanmohammadi, Keyhan Mahem (2020) menyatakan bahwa artificial Intelligent memiliki potensi besar untuk mengubah cara kerja dan interaksi manusia dengan teknologi. Namun, ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan, termasuk etika, privasi, dan pengaruh pada pasar tenaga kerja. Penerapan artificial Intelligent juga memerlukan pemikiran yang matang dan regulasi yang tepat guna memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan aman.

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence (AI) adalah sistem yang menggabungkan konsep dan teknologi Artificial Intelligence ke dalam proses akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan analisis dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan.

A Fernández (2019) menyatakan bahawa terdapat beberapa komponen atau fitur yang dapat ada dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence:

- 1) Otomatisasi Proses: Sistem ini menggunakan AI untuk otomatisasi beberapa tugas dan proses akuntansi yang biasanya dilakukan secara manual. Contohnya termasuk pengenalan dan pengolahan otomatis faktur, pengelompokan dan klasifikasi otomatis transaksi, dan pencocokan otomatis antara transaksi dan catatan.
- 2) Pendeteksian Kecurangan: Sistem dapat menggunakan teknik AI untuk mendeteksi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam data keuangan. Dengan menganalisis pola dan anomali, sistem dapat memberikan peringatan dini terhadap transaksi yang mencurigakan atau perilaku yang tidak biasa.
- 3) Prediksi dan Analisis: Dengan menggunakan teknik machine learning, sistem dapat menganalisis data historis dan tren untuk memberikan prediksi dan analisis yang lebih mendalam. Misalnya, sistem dapat memberikan perkiraan penjualan berdasarkan data historis, melakukan analisis biaya, atau memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan pengeluaran.
- 4) Pelaporan dan Visualisasi: Sistem ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dipersonalisasi dengan menggunakan teknologi AI. Selain itu, sistem dapat menyajikan informasi keuangan dengan cara yang lebih visual dan mudah dimengerti, seperti grafik dan visualisasi data interaktif.
- 5) Asisten Virtual: Beberapa sistem informasi akuntansi berbasis AI dapat menyertakan asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan dalam hal akuntansi dan pelaporan. Asisten virtual ini menggunakan pemrosesan bahasa alami dan kemampuan berpikir logis untuk berinteraksi dengan pengguna dan memberikan solusi atau informasi yang relevan.

Qingfei Min, Vahab Moradinaftchali, Muhammad Piri (2019) menyatakan bahwa keuntungan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AI meliputi peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan manusia, analisis yang lebih mendalam, peningkatan akurasi pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa implementasi AI dalam sistem akuntansi juga memerlukan perhatian terhadap keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Fraudulent Financial Reporting pada sektor publik mengacu pada tindakan yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau pelanggaran dalam pelaporan keuangan oleh organisasi sektor publik. Beberapa bentuk kecurangan laporan keuangan yang sering terjadi di sektor publik meliputi:

- 1) Pencatatan Transaksi yang Salah: Organisasi sektor publik dapat mencatat transaksi secara tidak benar atau tidak akurat untuk menyembunyikan kekurangan anggaran atau mengubah penampilan keuangan yang sebenarnya.
- 2) Penggelembungan Pendapatan: Organisasi sektor publik dapat melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dengan cara mengelola dan melaporkan pendapatan dengan tidak benar atau dengan cara menunda atau memajukan pendapatan.
- 3) Penggelembungan Aset: Organisasi sektor publik dapat menggelembungkan nilai aset atau melaporkan aset yang tidak ada atau tidak berfungsi dengan benar untuk memperlihatkan keadaan keuangan yang lebih baik daripada kenyataannya.

- 4) Pengelolaan Utang yang Tidak Benar: Organisasi sektor publik dapat mengelola utang atau beban keuangan dengan cara yang tidak benar, seperti menyembunyikan utang, mengalihkan utang ke entitas lain, atau menggunakan praktik akuntansi yang tidak etis untuk mengurangi beban keuangan yang sebenarnya.
- 5) Manipulasi Anggaran: Organisasi sektor publik dapat memanipulasi anggaran dengan cara menyembunyikan pengeluaran yang sebenarnya atau dengan mengubah alokasi anggaran agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya.

Kecurangan laporan keuangan pada sektor publik memiliki konsekuensi yang serius, termasuk merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan kerugian finansial, dan merusak reputasi organisasi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pemeriksaan dan audit yang ketat sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan di sektor publik. Menurut pengarang, Alex (2022) Kecurangan laporan keuangan akan semakin kecil jika akuntan pemerintah memiliki keahlian yang mendalam sebagai berikut penggunaan teknologi big data analytics, pemikiran yang kritis, public communication yang baik, pemahaman atas bisnis proses yang memadai, pengelolaan dan desain data, kejujuran dan loyal, serta memiliki perilaku yang baik didasarkan pada nilai etika dan empati sebagai makhluk yang beragama.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting

Muammar, Rizky dan Fauziah Fitri Aida (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian atau pengawasan internal pemerintah memantau tren penipuan informasi keuangan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Saftarini Putu Rita, Yuniarta Gede Adi, Ni Kadek Sinarwati (2015) dan Muqti Randy Syarif (2016). Jadi hipotesis penelitiannya adalah:

H1 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting

Alifiananda Nisrina dkk. (2021) menyatakan bahwa semakin andal sistem informasi keuangan dan akuntansi berkinerja dalam hal membantu aktifitas suatu entitas bisnis maka akan semakin terlihat keefektifan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan akuntansi. Namun Widiassa, I Putu Jordy Pratama (2020), penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis kecerdasan buatan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan di hotel.

H2 : Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode analisis jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian menggunakan staf atau sumber daya manusia yang ditempatkan pada bagian Keuangan dan Akuntansi Satuan Kerja Gresik Kabupaten Jawa Timur. Teknik pengambilan sampelnya adalah target sampling (Proposive) . Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan jenis indikator analisis penelitian 14 macam , sehingga jumlah sampel adalah yang terkecil dari 5 kali jumlah indikator, atau dengan ukuran $5 \times 14 = 70$ sampel, atau bisa juga paling banyak 10 kali jumlah cakupan indikator atau dikalikan $10 \times 14 = 140$.

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai tools dalam pengumpulan data yang akan diolah. Kuesioner yang dikembangkan akan dilakukan pengujian data secara kuantitatif dengan uji validitas dan reliabilitas. Indikator alat analisis penelitian yang dijadikan acuan sebagai variabel adalah sistem pengendalian (pengawasan) internal pemerintah (X1), sistem informasi akuntansi (SIA) berbasis kecerdasan buatan (X2), dan tren fraud model pelaporan keuangan (Y). Dalam penelitian ini, adapun analisis data menggunakan cara analisis deskriptif dengan penggunaan nilai load factor dan analisis inferensial yang secara total disediakan pada software smartPLS 3.0.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk menentukan masing-masing variabel laten dengan variabel lainnya memiliki perbedaan komseptual (Hair dkk., 2019: 114-115):

Hasil Perhitungan Nilai Discriminant Validity

IND	AF (X1)	AT (X2)	KI (Y)
X1.1	0.553	0.402	0.333
X1.13	0.604	0.376	0.334
X1.14	0.578	0.487	0.317
X1.2	0.714	0.429	0.373
X1.3	0.735	0.493	0.537
X1.4	0.722	0.344	0.351
X1.5	0.846	0.594	0.429
X1.6	0.584	0.433	0.182
X1.7	0.536	0.520	0.211
X1.8	0.730	0.501	0.254
X1.9	0.771	0.420	0.272
X2.1	0.531	0.802	0.580
X2.2	0.581	0.658	0.471
X2.3	0.519	0.860	0.647
X2.4	0.579	0.855	0.629
X2.5	0.466	0.809	0.597
X2.6	0.602	0.861	0.592
X2.7	0.390	0.657	0.350
X2.8	0.453	0.627	0.372
Y1	0.493	0.566	0.720
Y10	0.405	0.636	0.832
Y11	0.390	0.498	0.816
Y12	0.307	0.513	0.600
Y13	0.461	0.526	0.858
Y14	0.332	0.469	0.706
Y2	0.374	0.525	0.794
Y3	0.395	0.546	0.800
Y4	0.461	0.611	0.731
Y5	0.306	0.562	0.604
Y6	0.443	0.621	0.811
Y7	0.363	0.522	0.887
Y8	0.383	0.436	0.795
Y9	0.458	0.525	0.877

Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa *cross-load value* setiap indikator setiap variabel laten lebih besar dibandingkan *cross-load value* jika dikaitkan dengan variabel laten lainnya. Artinya, kecuali seluruh variabel laten mempunyai indikator yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya, maka masing-masing variabel laten sudah mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Validitas diskriminan juga dapat dilakukan pengukuran dengan membandingkan *Root value of Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk terhadap korelasi atau hubungan antar konstruk satu dengan lainnya dalam model yang sama. Nilai AVE harusnya lebih besar dari angka 0.50 sehingga p-valuenya berada di bawah nilai atau tingkat signifikansi 5% (Hair et al., 2019: 114-115). Hasil pengukuran atau perhitungan *discriminant validity* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Hasil Perhitungan Nilai AVE (Tahap 1)

Variabel	AVE
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₁)	0.459
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AI (X ₂)	0.596
Kecenderungan <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Y)	0.606

Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

Berdasarkan hasil Tabel 3. *Mean Extracted Variance* (AVE), variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁) mempunyai skor validitas diskriminan kurang dari 0,50. Artinya variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁) masih belum mempunyai validitas diskriminan yang baik, sehingga belum dapat divalidasi karena dianggap belum dapat memberikan keyakinan. Maka untuk menaikkan nilai AVE agar lebih besar dari 0.50, nilai beban eksternal terkecil pada variabel “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” (X₁), X_{1.1} dan X_{1.7}, dihapuskan dari variabel model karena dianggap tingkat atau nilai validitasnya palingkecil pada variabel model tersebut.

Setelah dilakukan dropping indikator dengan nilai outer loading terkecil dari variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁) yang tidak lolos uji maka dilakukan uji Discriminant Validity yang diukur dengan membandingkan nilai Average Variance Extracted (AVE) tahap 2, berikut luaran hasil uji tahap kedua:

Hasil Perhitungan Nilai AVE (Tahap 2)

Variabel	AVE
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₁)	0.503
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AI (X ₂)	0.596
Kecenderungan <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Y)	0.606

Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

Berdasarkan hasil ekstraksi mean variance (AVE) sebelumnya, nilai keseluruhan variabel mempunyai validitas diskriminan lebih besar dari angka 0,50. Sehingga dari hasil tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwasannya seluruh variabel dianggap sudah valid dan dapat menimbulkan kepercayaan. Setelah variabel tervalidasi, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Composite Reliability

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan menakar tingkat kestabilan dan konsistensi suatu instrumen secara konseptual atas suatu variabel. Kriteria tingkat reliabilitas suatu variabel juga dapat diperhitungkan berdasarkan nilai atau level reliabilitas suatu konstruk (Hair et al., 2019: 111-112). Dalam penelitian ini pengukuran level reliabilitas juga dapat diukur dengan melihat nilai reliabilitas komposit. Sehingga *insight* tentang reliabel atau tidaknya suatu alat ukur dilakukan dengan menggunakan koefisien reliabilitas. Dalam hal ini koefisien reliabilitas harusnya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,70 (Hair et al., 2019: 111-112). Hasil pengukuran *composite reliability value* dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Perhitungan Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₁)	0.900
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AI (X ₂)	0.921
Kecenderungan <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Y)	0.955

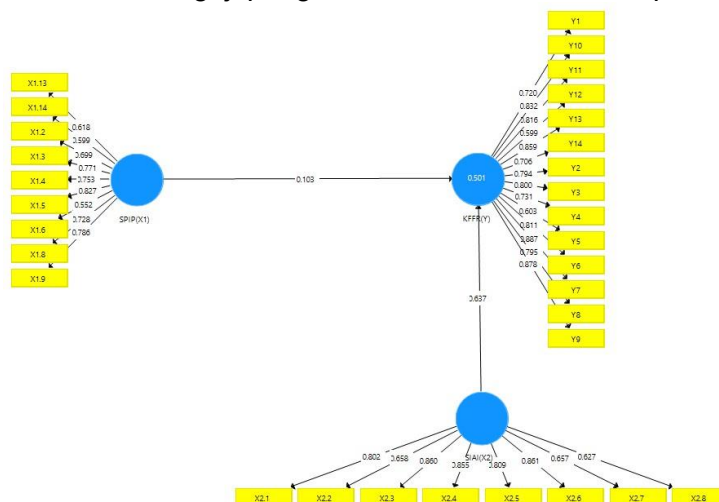
Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

Berdasarkan hal di atas, keseluruhan variabel yang digunakan mempunyai skor keyakinan komposit yang nilainya lebih besar dari angka 0,70. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penelitian memiliki nilai yang reliabel dan dapat dipercaya sehingga menyakinkan ketika digunakan dalam uji analisis selanjutnya.

Evaluasi Struktur Model

Pengujian *structural model* atau *internal model* dilakukan dalam rangka pengukuran korelasi atau hubungan keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran model internal dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan antar variabel serta besarnya pengaruh hubungan umum variabel-variabel pada sistem yang akan dibangun. Nilai R² digunakan saat

mengukur model internal untuk menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian.



Uji Coefficient of Determination R Square

R-squared (R^2), sering disebut R-squared, adalah ukuran kesesuaian persamaan regresi dan menunjukkan pecahan atau persentase dari total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, dan kecocokan model dianggap lebih baik bila R^2 mendekati 1 (Hair et al., 2019: 114-115).

Berdasarkan nilai R^2 tersebut, suatu model dapat diklasifikasikan sebagai kuat ($\leq 0,70$), menengah ($\leq 0,45$) dan lemah ($\leq 0,25$). Berikut merupakan hasil nilai R^2 .

Hasil Perhitungan Nilai R Square (R^2)

Variabel	R Square
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1)	-
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis AI (X_2)	-
Kecenderungan <i>Fraudulent Financial Reporting</i> (Y)	0.501

Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

Berdasarkan hal di atas, perhitungan nilai R^2 menunjukkan bahwa nilai R^2 penipuan informasi keuangan (Y) sebesar 0,501 artinya sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan sistem informasi akuntansi berbasis AI (X_2) dapat dijelaskan oleh variabel Kecenderungan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Y).) sebesar 50,1%, dan sisanya sebesar 49,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembuktian Hipotesis

Nilai koefisien jalur antar konstruk yang dihitung harus signifikan secara statistik. Proses *bootstrapping* atau *Jackknifing* dapat digunakan untuk menentukan relevansi suatu hubungan. Hasilnya berupa nilai t yang telah ditentukan yang kemudian dibandingkan dengan t tabel. Apabila nilai thitung lebih besar dari t-tabel (1,96) pada taraf signifikansi 5%, maka nilai proyeksi koefisien rute adalah signifikan. (Hair dkk., 2019: 120).

Penelitian ini memiliki enam hipotesis pengujian. Adapun hasil masing-masing pengujian tersaji berikut ini:

Hasil Pengukuran Bootstrapping

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
SPIP(X_1) - > KFFR(Y)	0.103	0.104	0.141	0.729	0.466	TIDAK DITERIMA
SIAI(X_2) -> KFFR(Y)	0.637	0.652	0.121	5.284	0.000	DITERIMA

Sumber: Data Olahan Smart PLS 3.0 (2023)

- H1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *Fraudulent* (kecurangan) *Financial Reporting*.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dampak sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tuntutan penipuan informasi keuangan menunjukkan angka positif

sebesar 0,103, t-statistik sebesar $0,729 < t \text{ tabel } (1,96)$ dan P prinsip. Ternyata tidak ada pengaruh yang signifikan. Kedua, hipotesis bahwa “sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai dampak signifikan terhadap pelaporan penipuan keuangan” tidak didukung dalam penelitian ini. Sistem pengendalian internal mungkin bisa saja tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting*, dikarenakan beberapa faktor atau masalah *bypassing controls*, kompetensi, kerentanan SPI, kolusi, tekanan keuangan, kurangnya pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Terkait *bypassing controls* dapat terjadi ketika pihak yang berpotensi melakukan *fraudulent financial reporting* mencoba menghindari atau melewati sistem pengendalian internal yang ada dengan mencari celah atau kelemahan dalam sistem tersebut, memanipulasi prosedur, atau mengeksploitasi kerentanan dalam sistem pengendalian internal pada instansi. Kompetensi menyangkut implementasi yang kompeten dan penegakan yang konsisten sistem pengendalian internal pada instansi. Kerentanan sistem pengendalian internal menyangkut pondasi yang kurang kuat sistem pengendalian internal instansi untuk mengatasi semua potensi risiko kecurangan. Kolusi dapat menyangkut situasi di mana anggota pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penegakan sistem pengendalian internal tidak mematuhi aturan dan prosedur yang ada dengan terlibat dalam kolusi dengan pihak lain yang ingin melakukan kecurangan. Tekanan keuangan menyangkut pemerintah atau entitas pemerintah mungkin menghadapi tekanan keuangan yang kuat atau persyaratan anggaran yang sangat ketat. Terakhir kurangnya pengawasan dan pemeriksaan eksternal akan menyangkut kurangnya efektivitas pengawasan atau pemeriksaan eksternal yang independen dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Hasil penelitian ini agak berbeda dengan penelitian di negara terpencil, salah satunya di Uganda, seperti Nalukenge, Nkundabanyanga, S.K. dan Ntayi untuk melakukan audit pada instansi pemerintah yang tugasnya antara lain menilai dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Di Uganda, Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk melakukan audit keuangan publik dan bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan termasuk temuan, rekomendasi dan catatan mengenai pengendalian internal. Saat ini, sistem pengendalian internal pemerintah Uganda diyakini berdampak pada pencegahan penipuan dalam laporan keuangan pemerintah Uganda (*fraudulent financial information*). Penelitian yang dilakukan di India dengan topik yang sama oleh Sharma., N (2022) justru membenarkan hasil penelitian tersebut dimana peneliti mengatakan bahwa pengendalian lokal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan berbuat curang di India. Sejatinnya Sistem pengendalian internal memang membutuhkan pengawasan yang ketat dari pimpinan pemerintah. Dalam konteks keuangan publik, pengawasan yang baik dapat membantu mencegah aktivitas keuangan yang mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap arahan dan peraturan yang berlaku.

Dari semua penjelasan diatas dapat diambil suatu ringkasan bahwa sistem pengendalian internal adalah bagian penting dalam mencegah penipuan dalam bidang finansial, namun sistem pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa penipuan pada sektor publik tidak akan pernah terjadi. Sehingga untuk mengurangi mengurangi risiko penipuan, perlu ekstra usaha dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat, pemantauan yang efektif, transparansi, dan kontrol eksternal yang independen. Selain itu yang tidak kalah penting adalah penegakan integritas dan kepatuhan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah (sektor publik)

- 2) H2: Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting*.

Berdasarkan output pengujian dalam Tabel diatas., imbas Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence terhadap Kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting* yg pertanda output nilai koefisien (standardized coefficient) positif sebanyak 0.637, t-Statistik sebanyak $5.284 > t\text{-tabel } (1.96)$, & P Values $0.000 < 0.05$ maka Hipotesis H2 diterima, hal ini bisa dimakanai bahwa, imbas Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence terhadap Kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting* terbukti berpengaruh positif signifikan. Maka hipotesis yg diajukan terkait menggunakan, “Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence mempunyai imbas signifikan Terhadap Kecenderungan *Fraudulent Financial Reporting*” menerima dukungan menggunakan arah imbas yg positif pada pada penelitian ini. Sistem Informasi Akuntansi yang menggunakan Artificial

Intelligence (AI) memang berdampak penting terhadap tingkat penipuan dalam pelaporan keuangan di sektor publik namun perlu digarisbawahi dampak pada setiap entitas dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti sejauh mana teknologi kecerdasan buatan (AI) digunakan dan sejauh mana tindakan pengelolaan, pengawasan, dan kepatuhan dilakukan. Teknologi yang diberikan *Artificial Intelligence* memang dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan secara cermat dan mendeteksi anomali atau pola yang tidak biasa terjadi pada instansi pemerintah serta memungkinkan pemantauan *real-time* atas transaksi dan kegiatan keuangan pada instansi pemerintahan atau sektor publik, yang memungkinkan tindakan pencegahan segera jika ada indikasi kecurangan. Dengan analisis *big data*, *Artificial Intelligence* dapat mengidentifikasi sebuah pola atau tren tertentu yang bersifat mencurigakan dengan lebih baik daripada jika dilakukan secara manual oleh manusia sehingga dapat membantu dalam mendeteksi kecurangan yang melibatkan jumlah data besar. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi AI bukanlah solusi tunggal dalam pencegahan kecurangan keuangan di lingkungan pemerintah atau sektor publik. Solusi lain yang tidak kalah penting adalah dengan membangun prosedur dan kebijakan yang kuat, pemantauan sumber daya manusia, serta pemeriksaan internal dan eksternal yang efektif. Selain itu penanaman budaya organisasi yang berkepatuhan, berintegritas, dan budaya etika kerja dalam organisasi juga harus dipertimbangkan dalam mewujudkan tata kelola yang baik sehingga membawa dampak bagi efektifitas pelaporan keuangan yang bermartabat. Akhirnya penting diingat bahwa *Artificial Intelligence* hanyalah alat yang dapat membantu dalam usaha ini, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi dan penggunaannya dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak sistem pengendalian atau pengawasan internal pemerintah terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan diperkirakan tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Kedua, hipotesis yang menyatakan “sistem pengendalian atau pengawasan intern pemerintah memiliki signifikansi positif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan” tidak didukung dalam penelitian yang telah dilakukan ini. Pada saat yang sama, pengaruh sistem informasi akuntansi (SIMAK/SIA) berbasis AI terhadap tren penipuan informasi keuangan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Kemudian hipotesis yang menyatakan “Sistem informasi akuntansi (SIMAK/SIA) berbasis AI mempunyai signifikansi positif terhadap kecenderungan penipuan informasi keuangan” mendapat dukungan ke arah pengaruh positif dalam penelitian ini. Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami penelitian yang berkaitan dengan topik serupa. Organisasi atau pemerintah sebaiknya mempertimbangkan investasi lebih lanjut dalam teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi dalam mendeteksi dan mencegah penipuan keuangan. Sementara itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah ada aspek tertentu dari sistem pengendalian internal yang perlu ditingkatkan atau dimodifikasi guna menjaga integritas dan akurasi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiananda Nisrina, dkk .(2021). Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi dan Deteksi Pencegahan Kecurangan Akuntansi. Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, 4-5 Agustus 2021.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2016). Report to Nations. Association of Certified Fraud Examiners. Austin.
- Animah, A. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Prosiding Ekonomi Kreatif di Era Digital, 1(1). 68-183.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Basley, M. S. (2014). *Audit Dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
- A Fernández. (2019). Artificial intelligence in financial services. Banco de Espana Article, 2019 papers.ssrn.com Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3366846> or

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3366846>

- Abidin, Z., Permata, Ahmad, I., & Rusliyawati. (2021). Effect of mono corpus quantity on statistical machine translation Indonesian-Lampung dialect of nyo. *Journal of Physics: Conference Series*, 1751(1), 12036. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1751/1/012036>
- DR Susiarini, K Kiswanto. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*. journal.unnes.ac.id
- Mahmood Mohammadi, Shohreh Yazdani, Mohammad hamed Khanmohammadi, Keyhan Maham. (2020). Financial Reporting Fraud Detection: An Analysis of Data Mining Algorithms. *International Journal of Finance & Managerial Accounting* : Volume 4, Issue 16 January 2020 Pages 1-12
- Nalukenge, I., Nkundabanyanga, S.K. and Ntayi, J.M. (2019), "Corporate governance, ethics, internal controls and compliance with IFRS", *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 16 No. 4, pp. 764-786. <https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2017-0064>
- Qingfei Min, Vahab Moradinaftchali, Muhammad Piri. (2019). The Efficacy of Predictive Methods in Financial Statement Fraud. *Hindawi Discrete Dynamics in Nature and Society* Volume 2019, Article ID 4989140, 12 pages <https://doi.org/10.1155/2019/4989140>
- Pasyarani., L (2023). Revitalisasi Akuntansi dengan Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent). *Jurnal Ilmu Data* Vol. 3 No. 2 (2023)
- Parlindungan, Paris. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6275>
- Sharma.,N.(2022). Effects of Integrity and Controls on Financial Reporting Fraud. a I Vol.1, issue.VIII, October 2022 I. www.poonamshodh.in
- Widiasa, I Putu Jordy Pratama (2020) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Hotel Berbintang di Bali). Undergraduate thesis, *Universitas Pendidikan Ganesha*.

Pengaruh Manajemen Laba, *Capital Intensity* Dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* Dan *Real Estate*

¹Khoirunnisa Azzahra, ²Siti Chaerunisa Prastiani
Universitas Pamulang -¹dosen00880@unpam.ac.id
-²dosen00885@unpam.ac.id

Abstract-This research aims to determine and test the influence of earnings management, capital intensity, and executive character on tax avoidance. Empirical studies on property and real estate sector companies listed on the IDX for the 2017-2021 period. The hypothesis test used in this research is multiple linear regression analysis with the help of Eviews. The sample selection in this research used the purpose sampling method. The number of research samples based on predetermined criteria was 13 companies. The results of this research show that earnings management has a negative and significant effect on tax avoidance. capital intensity has no effect on tax avoidance. Executive character has a negative and significant effect on tax avoidance. Profit management, capital intensity, and executive character simultaneously influence tax avoidance. Sales growth is unable to moderate the influence of earnings management on tax avoidance.

Keywords: Profit management, capital intensity, executive character, and tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber terbesar perpajakan nasional. Setiap wajib pajak harus berperan serta agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara dapat memberikan dukungan yang baik bagi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat pajak menjadi beban karena mengurangi pendapatan dan tidak dibayarkan langsung saat membayar pajak. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bahkan perusahaan menghindari pajak.

Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan secara legal. Penghindaran pajak bisa dikatakan sebagai persoalan yang pelik dan karena di satu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan (Listiyani dan Cahyani, 2021). Saat ini berbagai macam potensi digali untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut memperjelas bagaimana

Pentingnya pajak bagi negara. Selain itu dalam APBN yang ditentukan setiap tahun, pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara. Perusahaan mempunyai tujuan yang bertolak belakang dengan pemerintah, seringkali perusahaan melakukan tax planning dengan berbagai macam strategi. Tujuannya agar dapat memilih jelas tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Salah satu strategi tax planning adalah penghindaran pajak (Silvia, 2021). Upaya penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan property dan real estate. Dilansir dari www.suara.com tahun 2016, yaitu bocornya "Panama Paper" yang artinya "Dokumen Panama", dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh jasa panama. Dokumen tersebut berisikan data-data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang-orang terkenal diluar negeri. Dokumen tersebut memuat klien-klien besar yang ada didunia, yang diduga menginginkan mata uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di Indonesia yang terdeteksi di skandal "The Panama Papers". Salah satu perusahaan property dan real estate yang terlibat dalam kasus Panama Papers yaitu PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaannya dengan tujuan untuk menghindari pajak negara. Kekayaan yang berhasil disembunyikan oleh induk PT Ciputra

Development Tbk (CTRA) dan anak perusahaannya yaitu PT Juita Ciputra mencapai US\$ 1,48 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun.

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Pohan, 2012:76).

Menurut Schipper (1989) mengartikan manajemen laba ialah tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mengatur atau membuat kebijakan terkait informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Capital intensity dapat di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan (Sugiarto, 2019). Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar Effective Tax Rate (ETR) perusahaan rendah.

Karakter perusahaan merupakan pihak yang memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan dalam perusahaan. dalam hal pengambilan keputusan, eksekutif perusahaan memiliki karakter yang berbeda yaitu eksekutif yang berani mengambil risiko (risk taker) dan eksekutif yang tidak berani mengambil risiko (risk averse).

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Marlinda, Titisari & Masitoh, 2020) teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan ini menjelaskan tentang hubungan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan dalam hubungannya dengan penghindaran pajak yaitu para prinsipal menginginkan agen dalam manajemen perusahaan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dalam menguntungkan pemegang saham sehingga manajemen mengatur cara untuk mendapatkan pendapatan yang besar dengan beban pajak yang seminimal mungkin maka dari itu cara penghindaran pajak lah yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur keinginan para prinsipal dalam mendapatkan laba yang besar.

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu secara perorangan atau badan. Penghindaran pajak ini menjadi suatu penghalang dalam melakukan pemungutan pajak yang menyebabkan penghasilan negara berkurang. Menurut Mangoting (1999), penghindaran pajak (tax avoidance) tidak menentang peraturan undang-undang pajak dikarenakan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) ini memanfaatkan celah dalam peraturan undang-undang pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sisi pajak dengan melakukan tax planning yang benar dan tepat.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Waluyo et al., 2016). Menurut Pohan, A (2012), dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan, adalah tax saving dan tax avoidance karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang. Ada kemiripan antara tax saving dan tax avoidance.

Tax saving merupakan usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan tax avoidance adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakekatnya, tax avoidance merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan tindakan tax avoidance ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan tax evasion.

Heally dan Wahlen (1999) dalam Riahi dan Belkaoui (2006) menyatakan bahwa Manajemen Laba (Earnings Management) terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah

laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Capital intensity adalah sejumlah uang yang diinvestasikan untuk mendapatkan output satu dolar. Semakin besar modal digunakan untuk menghasilkan unit yang sama, dapat dikatakan bahwa semakin intens modal perusahaan (Shaheen & Malik, 2012). Pada umumnya, capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga capital intensity ratio diukur dengan berapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Eksekutif perusahaan merupakan seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan tertentu dalam sebuah perusahaan. Pihak eksekutif perusahaan bisa terdiri dari CEO, CFO, dan *top executive* lainnya. Umumnya, para eksekutif mempunyai tugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor. Low (2006) menyatakan bahwa karakter eksekutif dalam mengambil keputusan dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif yang bersifat *risk taking* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taking* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif dengan karakter seperti ini tidak ragu-ragu melakukan pembiayaan yang dananya bersumber dari hutang untuk memajukan perusahaan (Lawellen, 2003 dalam Rusli, 2014). Karakter *risk taking* biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, kompensasi, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Menurut Rego dan Wilson (2008), kompensasi eksekutif puncak mempunyai hubungan positif terhadap kegiatan agresivitas pajak perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*

Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham menciptakan kondisi di mana manajemen mengetahui informasi lebih baik dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham, sehingga dapat membuat manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Tujuan manajemen melakukan manajemen laba ialah untuk membuat nilai laba dalam laporan keuangan terlihat baik. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan laba yaitu dengan menurunkan beban pajak perusahaan dengan praktik *tax avoidance*. Hasil dari beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Darma, Tjahjadi & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Manajemen laba menjadi hal yang perlu dilakukan manajemen untuk mengurangi besarnya beban pajak yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka:

H1: Diduga manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan suatu gambaran pada perusahaan terkait banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Dalam pemilihan investasi aset tetap mengenai perpajakan yaitu dalam hal beban depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada aset tetap akan mempengaruhi terhadap pembayaran pajak perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki aset tetap yang besar maka akan memiliki beban depresiasi yang besar pula sehingga proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menjadi salah satu penyebab adanya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dari depresiasi aset tetap yang ditimbulkannya. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap tinggi dapat meningkatkan biaya depresiasi yang tinggi, sehingga perusahaan dapat

mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan yang memiliki beban depresiasi tinggi akan memiliki laba sebelum pajak yang rendah dan beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. Perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* tinggi diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka:

H2: Diduga *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Maccrimon dan Wehrung (1990) dan Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), dalam menjalankan tugas di perusahaan, karakter eksekutif dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif dengan karakter sebagai *risk-taking* dan eksekutif dengan karakter sebagai *risk-averse*. Eksekutif dengan karakter *risk-taking* akan lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, eksekutif *risk-taking* biasanya mempunyai dorongan untuk memperoleh penghasilan, kompensasi, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Budiman dan Setiyono, 2012). Berbeda dengan *risk-taking*, eksekutif *risk-averse* cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan sehingga mereka akan memilih peluang bisnis yang mempunyai risiko paling kecil bagi perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan mengubah biaya pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Dampak dari kecilnya pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Pernyataan diatas di dukung penelitian (Swingly & Sukartha, 2015), bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka:

H3: Diduga Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono menjelaskan bahwa metode kuantitatif berdasarkan filosofi *positivism* yang digunakan untuk meneliti populasi atau spesifik sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di seluruh perusahaan sektor *Property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang diberikan dengan penelitian ini antara lain laporan keuangan berupa laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dari tahun 2017-2021 dan juga studi pustaka dengan membaca buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1	<i>Tax Avoidance</i>	Pembayaran Pajak Cash ETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Manajemen Laba	1. Total Accrual $TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$ 2. Nondiscretionary Total Accrual dengan menggunakan regresi $\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$ 3. Nondiscretionary Total Accrual (NDTA) $NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it} - \Delta TRec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$ 4. Discretionary Total Accrual (DTA) $DTA = \frac{TAC}{TA_{it-1}} - NDTA$	Rasio
3	<i>Capital Intensity</i>	$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ Capital Intensity Ratio =	Rasio
4	Karakter Eksekutif	Risiko Perusahaan = $\frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *Property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 yang berjumlah 83 perusahaan, dimana jumlah pengambilan sampel yaitu dengan cara menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menetapkan jumlah sampel, karena penentuan banyaknya sampel didasari atas beberapa kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penarikan Sample

NO	Kriteria Sampel	Pelanggan Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia		83
2	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang menyediakan laporan keuangan secara konsisten selama tahun 2017-2021	-39	44
3	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang mengalami laba selama tahun 2017-2021.	-30	14
4	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti.	-1	13
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria			13
Tahun Penelitian 2017-2021			5
Jumlah sampel penelitian			65

Sumber : Data diolah oleh penulis

Analisa data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini data penelitian tersebut akan di hitung menggunakan *software statistic Eviews (Econometric Views)* versi 9.0. dan analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu dengan menguji :

1) Uji Pemilihan Model data panel

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan, yaitu model common effects, model fixed effect dan model random effect

2) Analisis statistik deskriptif

3) Uji asumsi klasik

Uji asumsi dalam penelitian ini adalah :

- a) Uji normalitas data adalah untuk menguji apakah model regresi variable I independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak
- b) Uji Multikoleniaritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
- c) Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).
- d) Uji Heteroskedastisitas

4) Analisis regresi data panel

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Manajemen Laba

X2 = *Capital Intensity*

X3 = Karakter Eksekutif

e = Standar Error

5) Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis yang di gunakan adalah uji F dan Uji T

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji chow nilai probabilitas (Prob) Crosssection Chi-square adalah $0,0098 < 0,05$, nilai p-value cross section Chi Square $< \alpha = 5\%$, atau probability (p-value) F Test $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil uji hausman nilai probabilitas Cross Section $>$ nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$) $0,3623 > 0,05$, yang berarti H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *random effect model* lebih tepat digunakan daripada *fixed effect model*.

Hasil uji *Lagrange Multiplier* nilai probabilitas *value* sebesar $0,0410 < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *random effect model* lebih tepat digunakan dari pada *common effect model*

Uji F

Tabel 3
Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

R-squared	0.547722	Mean dependent var	1484.020
Adjusted R-squared	0.517570	S.D. dependent var	4539.323
S.E. of regression	3152.884	Sum squared resid	5.96E+08
F-statistic	18.16547	Durbin-Watson stat	2.168903
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output E-views, 2024

Uji T

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.140.488	1398.002	2.961718	0.0044
Manajemen Laba	-0.034900	0.004420	-7.881133	0.0000
Capital intensity	0.446860	0.452696	0.987138	0.3275
Karakteristik eksekutif	-2.988423	1.418380	-2.106927	0.0393

Sumber : Output E-views, 2024

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa nilai probabilitas Manajemen Laba sebesar $0,0000 < 0,05$ dan hasil *t-Statistic* $-7,881133 > 1,99962$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, yang artinya Manajemen Laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Manajemen laba menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh manajemen upaya mengurangi besarnya beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan, manajemen perusahaan dengan pemegang saham menciptakan kondisi di mana manajemen mengetahui informasi lebih baik dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham, sehingga manajemen dapat melakukan aktivitas manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifai dan Atiningsih (2019), yang menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Capital Intensity* sebesar $0,3275 > 0,05$ dan hasil *t-Statistic* $0,987138 < 1,99962$ sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima, yang artinya *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Capital intensity merupakan gambaran perusahaan terkait banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Dalam pemilihan investasi aset tetap mengenai perpajakan yaitu dalam hal beban depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada aset tetap akan mempengaruhi terhadap pembayaran pajak perusahaan. Maka jika perusahaan memiliki aset tetap yang besar akan memiliki beban depresiasi yang besar pula sehingga proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menjadi salah satu penyebab adanya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dari depresiasi aset tetap yang ditimbulkannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anindyka S. dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas Karakter Eksekutif sebesar $0,0393 < 0,05$ dan *t-Statistic* $-2,106927 > 1,99962$ sehingga dapat disimpulkan H_a diterima, yang artinya Karakter Eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam Perusahaan karakter eksekutif fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif dengan karakter sebagai *risk-taking* dan eksekutif dengan karakter sebagai *risk-averse*. Eksekutif dengan karakter *risk-taking* akan lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, eksekutif *risk-taking* biasanya mempunyai dorongan untuk memperoleh penghasilan, kompensasi, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Berbeda dengan *risk-taking*, eksekutif *risk-averse* cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan sehingga mereka akan memilih peluang bisnis yang mempunyai risiko paling kecil bagi perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan mengubah biaya pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Dampak dari kecilnya pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiyanto & Fitria (2019) yang menyimpulkan bahwa karakter Eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengaruh Manajemen Laba, *Capital Intensity* Dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Property* Dan *Real Estate* periode 2017-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen Laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* artinya bahwa manajemen laba memiliki peranan dalam menjalankan praktik manajemen pajak perusahaan. Seorang manajer perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang diinginkan akan memperhitungkan besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, Oleh sebab itu, maka menimbulkan dugaan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan berhubungan dengan praktik manajemen pajak perusahaan
2. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat capital intensity pada perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat tax avoidance pada perusahaan.
3. Karakter Eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin eksekutif berfungsi sebagai *risk taker* maka semakin memicu tinggi nya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, Pratomo, Kurnia (2018), Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *e-Proceeding of Management: Vol.5, No.1* Maret 2018 ISSN: 2355-9357.
- Belkaoui, Ahmed Riahi (2006), Teori Akuntansi, Buku 1, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).Jurnal. Universitas Islam Sultan Agung
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 5(2), 137. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Dharma, Noviani (2017), Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.1. Januari (2017):529-556 ISSN: 2302-8556.
- Listiyani, Cahyani (2021), Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala E* ISSN No. 2798-9364.
- Marlinda, Titisari, Masitoh (2020), Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 4(1), Maret 2020: 39-47 ISSN 2597-8829.
- Pohan, A (2012), *Optimizing Corporate Tax Management*, Kajian Perpajakan dan *Tax Planing* Terkini, Edisi 1, Bumi Aksara, Jakarta
- Rego, S.O., dan R. Wilson (2008), Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance.
- Rifai, Atiningsih (2019), Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economics and Banking* ISSN 2685-3698.
- Rusli, Rini (2014). Skripsi: Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dimensi Tata Kelola Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. FE UR.
- Shaheen, Sadia dan Qaisar Ali Malik (2012) The Impact of Capital Intensity, Size of Firm and Profitability on Debt Financing in Textile Industry of Pakistan. *Interdisciplinary Jurnal of Contemporary Research in Bisnis*, Vol.3, No.10, pp. 1061-106.
- Silvia (2017), Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*, Volume 3 Issue 4.

- Sugiyanto, Fitria, J.R. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Humanis* 2019, 447-461
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, Sukartha (2015), Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015) ISSN: 2302-8556.
- Waluyo et al. 2016. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*.

Analysis Of Fraud Prevention in Village Fund Management Using Anti-Fraud Awareness and Whistleblowing System

Made Yessi Puspitha¹, Ni Putu Erviani Astari², Rai Gina Artaningrum³

Universitas Dhyana Pura -yessipuspitha@undhirabali.ac.id

- ²ervianiastari@undhirabali.ac.id

- ³raigina86@undhirabali.ac.id

Abstract— Fraud is an issue that still affects organizations on a regular basis. The administration of village funds was one of the fraud incidents. Increasing each person's anti-fraud awareness and creating a whistleblowing system that serves as a conduit for reporting any act of violation committed within the organization are two ways to reduce the number of fraud cases involving village fund administration. There were fifteen villages in the Mengwi sub-district that made up the research population. People who might be involved in managing village finances, such as the village consultative council, the village head, the village secretary, and the village treasurer, made up the research samples. Partial Least Square (PLS) analysis with a variance-based SEM equation model was used to evaluate hypotheses. The test results found that anti-fraud awareness had an effect on the whistleblowing system, anti-fraud awareness had an effect on fraud prevention in village fund management, the whistleblowing system had an effect on fraud prevention in village fund management, and anti-fraud awareness through the whistleblowing system had an impact on fraud prevention in village fund management.

Keywords — Anti-Fraud Awareness; Whistleblowing System; Fraud Prevention In Village Fund Management

1. INTRODUCTION

Fraud is a serious problem that continues to occur in organizations. Fraud can be committed by the upper and lower classes in the work environment. In the workplace, both the top and lower classes are capable of committing fraud. Because agencies and institutions grant employees access to and control over corporate assets, including bookkeeping, bank account management, and obtaining products and services for company or organization inventories, fraud in the workplace is possible.

According to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), three types of fraud are corruption, asset misappropriation, and fraudulent financial statements. In Indonesia, the biggest loss occurred due to corruption, which touched a percentage of 69.9%; in second place was asset misappropriation at 20.9%; and the last were losses due to fraudulent financial statements at 9.2% (ACFE, 2019:15). If sorted by type of organization, government organizations topped the list of the most harmed organizations at 48.5%, followed by government companies or SOEs at 31.8%, private companies at 15.1%, non-profit organizations at 2.9%, and other organizations at 1.7% (ACFE, 2019). The data indicates that government organizations experience quite a lot of fraud, almost half of which occurs in government organizations. One of the frauds that can occur in government is the management of village funds.

Village fund fraud cases quoted from Indonesia Corruption Watch (ICW) data increased ninefold during the period 2015 to 2021 (Kompas, 2023). According to Bambang Soesatyo, chairman of the People's Consultative Assembly, the increase in misappropriation of village funds made village fund management enter the top three corruption cases in Indonesia (Kompas, 2023). Fraud cases occurred in Baha Village from 2016 to 2017. The village head has misappropriated funds that cost the state 1 billion rupiah (Balipost, 2019). A similar case also occurred in Mengwitani Village in 2018 involving three village officials, namely the head of a village, the chief financial officer, and the chief financial officer, with a state loss of 1.2 billion rupiahs (BPK Bali, 2018).

This finding indicates that village financial management is still vulnerable to fraud, so fraud prevention is needed. Fraud prevention is more effective than repressive efforts (Insani et al., 2020). Taking precautions from the start is better than detecting fraud after it occurs. Fraud prevention can occur if someone has high anti-fraud awareness. Anti-fraud awareness is an effort used to build an

understanding of the importance of fraud prevention in an organization. Employees who have high anti-fraud awareness can understand and carry out their duties seriously against fraud.

Another factor that can affect fraud prevention is the existence of reports from whistleblowers that can effectively reveal and prevent fraud (Sweeney, 2008). The important role of the whistleblowing system is to prevent fraud in the organization. Every individual needs to have a whistleblowing intention so that mistakes made by the leadership or other parties in the organization can be corrected. The whistleblower has a role in revealing fraud that is not visible on the surface. The whistleblowing system can be an instrument for fraud prevention. Policies and rules to protect whistleblowers have been designed by the government in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016. However, there are still many whistleblowers who choose to remain silent (Sustika et al., 2020). The risks faced by whistleblowers are quite large, such as intimidation, threats, discrimination, labeling, and material losses (Annisa & Nurlaeli, 2022).

This research aims to analyze fraud prevention in village fund management through anti-fraud awareness and a whistleblowing system. The whistleblowing system is a new variable to this research because whistleblowing can be an intermediate variable that can influence anti-fraud awareness and fraud prevention in village fund management. The reason that supports this is that a sophisticated reporting system must be supported by anti-fraud awareness in the organization (Annisa & Nurlaeli, 2022).

Agency theory explains two parties who have a contractual agreement. The agent promises to provide services and make decisions based on the interests of the principal. This relationship can give rise to moral hazard and adverse selection (Jensen & Meckling, 1976). The principal, namely the people, elects the village head through the election of the village head as an agent to manage village funds according to the village fund budget, which is carried out in an accountable manner. However, in agency theory, the agent can act as a failure to fulfill the agreed contract (moral hazard), or there is a situation where the principal does not know whether the decisions and actions taken by the agent represent the interests of the principal (adverse selection). The fraud triangle theory discovered by Cressey in 1953 explains three causes of fraud, namely pressure, opportunity, and rationalization.

Anti-fraud awareness is an effort to build an understanding that fraud prevention must be carried out by employees, superiors, and leaders to minimize losses for the organization. The most urgent context is improving integrity and preventing fraudulent activities in the organization. Anti-fraud awareness can raise sensitivity and concern among various parties about the dangers of fraud and the controls needed to prevent it (Jalil, 2018). It is hoped that anti-fraud awareness within a person can minimize the occurrence of fraud from both employees and management and can protect organizational assets (Insani, 2020). Fundamental elements can be applied according to SAS 99 (American Institute of Certified Public Accountants, 2002), namely: creating and maintaining a culture of honesty and high ethics. evaluate fraud processes, procedures, and controls, and develop appropriate oversight.

A whistleblowing system is a mechanism created to report violations of the law, violations of the code of ethics, or other violations that can harm stakeholders or the organization (KNKG, 2008). The basis for disclosing violations is good faith and not bad will/slander or personal complaints about company policy (KNKG, 2008). A whistleblowing system can be a means for public sector organizations to detect fraud early. Catching fraud perpetrators is more effective if monitoring is carried out by colleagues (KNKG, 2022). The whistleblowing system includes three aspects, namely structural aspects, operational aspects, and maintenance aspects (KNKG, 2008).

According to Government Regulation Number 60 of 2014, Village Funds are an allocation of funds whose priority use is given by the central government to finance the implementation of village government, village development, and empowerment of village communities. Village funds come from the State Revenue and Expenditure Budget which is channeled through the regional government and then allocated to villages based on basic allocations and the characteristics and area of the village. Adequate supervision needs to be carried out to control the use of village funds so that the objectives of providing funds can be achieved optimally and reduce fraud. Fraud prevention strategies must be translated into programs to address the causes of fraud by creating a situation and atmosphere that facilitates detection and avoidance in an accommodating direction (Yuniarti, 2017). Fraud prevention strategies can be implemented through several steps, namely (BPKP, 2018) establishing fraud policies, standard prevention procedures, organizational structure,

control techniques, and sensitivity to fraud.

Hypothesis

Fraud in village fund management is vulnerable to occurring if there is no optimal supervision. Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget, which are given to villages to support village economic development and village empowerment, need to be supervised to control the use of village funds so that the aim of providing funds can be achieved optimally and reduce acts of fraud. Fraud prevention strategies must be translated into programs to address the causes of fraud by creating a situation and atmosphere that facilitate detection and avoidance in an accommodating direction (Yuniarti, 2017). Pressure can make someone commit fraud. Fraud can also occur due to rationalization, which is the concept of justification for the behavior carried out. Fraud perpetrators will look for various types of morally acceptable behavior to rationalize their ideas before committing fraud. The perpetrator believes that the actions he committed did not constitute criminal activity. One way to improve morals and ethics can be achieved by raising anti-fraud awareness (Insani et al., 2020). Anti-fraud awareness is expected to provide consideration and sensitivity to all elements of the organization (Fitriani et al., 2022). A strong sensitivity to fraud can encourage someone to report it (Annisaa & Nurlaeli, 2022). The effectiveness of anti-fraud awareness can strengthen organizational hierarchical control and reduce fraud.

H1: Anti-Fraud Awareness Affects the Whistleblowing System.

Fraud can occur due to pressure in certain situations, and rationalization is a justification for what is done. Based on this theory, prevention is carried out by improving employee morals and ethics to create integrity in leaders and employees in the organization. Moral hazards can be reduced through regulations, systems, or character development (Sayidah, 2018). One way to improve morals and ethics can be achieved by raising anti-fraud awareness in managing village funds. Anti-fraud awareness is an effort to increase awareness about the importance of preventing fraud in all elements of the organization (Insani et al., 2020). Anti-fraud awareness is formed by understanding all elements of the organization about the risk of fraud, the causes of fraud, the types of fraud, and their impact on the organization. Adequate and well-internalized anti-fraud awareness can prevent fraud from occurring (Ramadhan, 2022). In other words, high sensitivity from all parties in the organization to fraud can prevent village fund management fraud from occurring.

H2: Anti-Fraud Awareness Affects Fraud Prevention in Village Fund Management.

Fraud can also occur if there is an opportunity to do so. The whistleblowing system is useful for reporters to report fraud or violations committed by internal parties in the organization. The whistleblowing system ensures that there is a way to convey important information for the company to parties who must handle it safely while creating a reluctance to commit violations (Prena & Kusmawan, 2020). This system requires the participation of all elements of the organization in the process of disclosing and reporting fraud (Arpani et al., 2022). Research by Arpani et al. (2022) and Prena and Kusmawan (2020) found that the whistleblowing system had an effect on fraud prevention. Implementation of fraud prevention can be done by strengthening the whistleblowing system (Ramadhan, 2022).

H3: The Whistleblowing System Affects Fraud Prevention in Village Fund Management.

Systematic measures to identify fraud include fraud awareness and technique. The growth in fraud should alert all parties to the necessity of creating and regularly implementing an anti-fraud strategy to strengthen anti-fraud and raise public knowledge of the risks associated with fraud and how it affects businesses and employees (Jalil, 2018). Creating a system for reporting fraud is one tactic to stop it. A set of initiatives intended to stop or at least manage fraud is known as a fraud prevention plan. By establishing circumstances that can guide the organization toward preventing fraud, this method relates to how to regulate the elements that induce fraud (Yuniarti, 2017). According to Albrecht et al. (2012), effectively avoiding fraud involves two key activities: (1) establishing and upholding a culture of integrity and a high code of ethics, and (2) evaluating the risk of fraud and formulating specific strategies to lower it, dangers and get rid of fraud-related chances.

H4: The Whistleblowing System and Anti-Fraud Awareness Affect Fraud Prevention in Village Fund Management.

3. METHOD

Regarding prior research and the theoretical underpinnings that underlie it, the conceptual framework explains the link between the research variables. The variables analyzed are the independent variable (X), namely anti-fraud awareness; the intervening variable (Z), namely the

whistleblowing system; and the dependent variable (Y), namely fraud prevention in village fund management. Figure 1 shows the association between the variables.

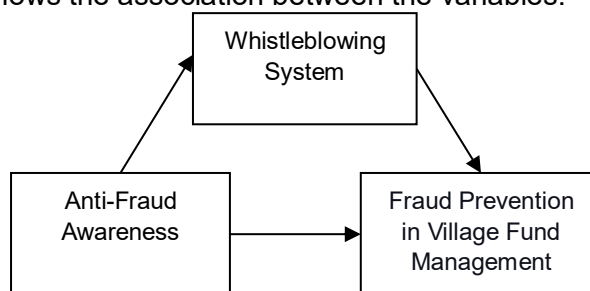


Figure 1. Conceptual Framework

The research population is village officials in the Mengwi sub-district area, namely the village consultative council, village head, village secretary, and village treasurer. Each village is determined by four village officials located in 15 villages in Mengwi District. The population obtained from 15 villages multiplied by 4 village officials becomes 60 people. The sample method uses a saturated sample. Thus, 60 people make up the sample. Primary data is a source of research data because researchers directly collect research data by asking several questions listed in the research questionnaire. A five-point Likert scale was used to gauge the respondents' opinions. The data analysis technique uses Partial Least Square (PLS), which is structural equation modeling (SEM) equation analysis using SmartPLS software.

4. RESULT AND DISCUSSION

The total number of questionnaires distributed was 60 copies, which were all returned and filled out. The characteristics of the respondents in this study were mostly male, totaling 46 people, while there were 14 female respondents. The dominant age range in this study was 49 people aged 41–60 years. Meanwhile, there were 5 people aged 20 to 40 years and 6 people aged over 60 years. The most recent education was for 32 people at the high school level. Meanwhile, there are 27 people for a bachelor's degree and 1 person for a master's degree. 26 people had more than 10 years of work experience. Meanwhile, there were 24 people from 1 year to 5 years and 10 people from 5 years to 10 years.

Table 1. The Result Of Descriptive Statistics

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	St. Deviation
Anti-Fraud Awareness	60	16,00	30,00	25,683	2,754
Whistleblowing System	60	14,00	30,00	23,483	3,304
Fraud Prevention in Village Fund Management	60	12,00	25,00	20,633	2,113

Source: primary data processed, 2023

The anti-fraud awareness variable has an average value of 25,683, which is quite close to the maximum value of 30,00. This indicates that respondents are generally in agreement or strongly in agreement with six anti-fraud awareness questions, with the lowest total answer being 16,00. The anti-fraud awareness variable's standard deviation, which is 2,754, is lower than the variable's average value. According to this finding, there is very little variation from the anti-fraud awareness variable. Respondents tend to answer neutral, agree, and strongly agree to six questions on the whistleblowing system, with the lowest total answer being 14,00. The average value of the whistleblowing system variable is 23,483, which is fairly near the maximum value of 30,00. The standard deviation value of 3,304, which is less than the average, indicates that the variance in the whistleblowing system variable is quite minimal.

The fraud prevention in the village fund management variable has an average value of 20,633, which is reasonably close to the maximum value of 25,00. This indicates that most respondents agree or strongly agree with the following five questions regarding village fund management fraud prevention. The village fund management fraud prevention variable has a

relatively modest deviation, as evidenced by its 2,113 standard deviation, which is lower than the average value.

Table 2. Outer Loading

Indicator Code	Anti-Fraud Awareness	Whistleblowing System	Fraud Prevention In Village Fund Management
X1.1	0,723		
X1.2	0,790		
X1.3	0,790		
X1.4	0,872		
X1.5	0,875		
X1.6	0,900		
Z1.1		0,753	
Z1.2		0,777	
Z1.3		0,836	
Z1.4		0,806	
Z1.5		0,859	
Z1.6		0,903	
Y1.1			0,795
Y1.2			0,762
Y1.3			0,873
Y1.4			0,791
Y1.5			0,794

Source: primary data processed, 2023

The indicator value's reflection, which is based on the correlation between the internal component score and the construct score, displays the convergence validity value in Table 2. The observed structure yields an expected value of more than 0,70. A value of more than 0,70 is displayed by the outer loading value. The cross-loading value demonstrates discriminant validity. For every research indicator, this evaluation is done. If the measurement indicator has a low correlation with other variables and a high correlation with the variable it measures, discriminant validity is satisfied.

Table 3 shows that each research indicator has a correlation coefficient value that is higher than the correlation coefficient value for each other indicator. The values of each variable column X are higher than the values of variable columns Z and Y. The values of each variable column Z are higher than the values of variable columns X and Y. The values of each variable column Y are higher than the values of variable columns X and Z.

Table 3. Cross Loading

	Anti-Fraud Awareness	Whistleblowing System	Fraud Prevention in Village Fund Management
X1.1	0,723	0,119	0,396
X1.2	0,790	0,303	0,527
X1.3	0,790	0,213	0,422
X1.4	0,872	0,418	0,589
X1.5	0,875	0,439	0,536
X1.6	0,900	0,508	0,759
Z1.1	0,288	0,753	0,544

Z1.2	0,443	0,777	0,563
Z1.3	0,233	0,836	0,525
Z1.4	0,317	0,806	0,558
Z1.5	0,408	0,859	0,570
Z1.6	0,433	0,903	0,674
Y1.1	0,538	0,533	0,795
Y1.2	0,519	0,456	0,762
Y1.3	0,583	0,670	0,873
Y1.4	0,416	0,526	0,791
Y1.5	0,636	0,595	0,794

Source: primary data processed, 2023

Table 4. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Anti-Fraud Awareness	0,909	0,947	0,928	0,685
Whistleblowing System	0,905	0,912	0,927	0,679
Fraud Prevention in Village Fund Management	0,863	0,872	0,901	0,646

Source: primary data processed, 2023

If the average variance extracted (AVE) value is more than 0.50, the validity category is represented. Table 4 demonstrates that all three variables have AVE values of more than 0.50, indicating strong discriminant validity for each variable. The Cronbach's alpha coefficient and the composite reliability test were used in the reliability testing process. When a study's composite reliability value and Cronbach's alpha coefficient are both over 0,70, it is deemed to be reliable. Table 4 demonstrates that the study satisfies dependability requirements. The composite reliability values, which are more than 0,70, specifically 0,98, 0,927, and 0,91, demonstrate this. If the composite reliability value has a value above 0,70, then the variable can be said to have high reliability. Reliability testing can also be seen from Cronbach's alpha coefficient values, namely 0,909, 0,905, and 0,863, which are more than 0,70. So it can be concluded that the research variables have a high level of reliability.

Table 5. Adjusted R Square (R^2)

	R Square Adjusted
Fraud Prevention in Village Fund Management	0,647
Whistleblowing System	0,178

Source: primary data processed, 2023

The adjusted R squared (R^2) value shows how much the dependent variable is influenced by the independent variable. Table 5 shows that the value of the village fund management fraud prevention variable (Y) is 0,647. This means that preventing fraud in managing village funds is influenced by 64,7% of the variables of anti-fraud awareness and the whistleblowing system.

Table 6. The result of Bootstrapping Calculation

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Anti-Fraud Awareness -> Fraud Prevention in Village Fund Management	0,459	0,458	0,094	4,867	0,000
Anti-Fraud Awareness -> Fraud Prevention in Village Fund Management	0,438	0,444	0,143	3,063	0,002

Whistleblowing System					
Whistleblowing System -> Fraud Prevention in Village Fund Management	0,498	0,497	0,094	5,277	0,000
Anti-Fraud Awareness-> Whistleblowing System-> Fraud Prevention in Village Fund Management					
Anti-Fraud Awareness-> Whistleblowing System-> Fraud Prevention in Village Fund Management	0,218	0,217	0,074	2,934	0,003

Source: primary data processed, 2023

The Influence of Anti-Fraud Awareness on the Whistleblowing System.

The research results in Table 6 show that the relationship between anti-fraud awareness (X) and the whistleblowing system (Z) has an initial sample value of 0,438. A positive value indicates a positive relationship between anti-fraud awareness (X) and the whistleblowing system (Z). A P value of $0,002 < 0,05$ means that anti-fraud awareness has a positive and significant relationship to the whistleblowing system. These findings mean that fraud queue awareness can encourage someone to report violations that occur in the organization (Annisa and Nurlaeli, 2022) and increase the socialization or communication of an effective whistleblowing system (Albrecht, 2012). Anti-fraud awareness can increase awareness of fraudulent behavior and make efforts to report it using the whistleblowing system for follow-up.

These results corroborate the pressure-justification fraud triangle theory, which holds that someone under pressure would rationalize their actions. If someone justifies their fraudulent behavior, they are capable of acting dishonestly. However, this can be a control to lessen fraud if he is aware that there is a fraud line. The results of this study confirm those of Yuniarti's 2017 study, which discovered a strong beneficial relationship between anti-fraud knowledge and the whistleblowing system.

The Influence of Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention in Village Fund Management

According to Table 6, there is a 0,459 initial sample value in the association between anti-fraud awareness (X) and fraud prevention in village fund management (Y). A positive value indicates a positive relationship between anti-fraud awareness (X) and the prevention of village fund management fraud (Y). A P value of $0,000 < 0,05$ means that anti-fraud awareness has a positive and significant relationship to preventing fraud in managing village funds. These findings mean that anti-fraud awareness can prevent village fund management fraud. Fraud prevention can be done by improving morals and ethics so that honest individual character can be built by raising anti-fraud awareness for every employee in the village government.

These results corroborate the pressure and rationalization components of the fraud triangle theory. When under duress, a person may justify their fraud by saying it was typical and frequent. On the other hand, anti-fraud awareness works to prevent fraud in the management of village funds, which is harmful to the village government, the community, and the individuals involved. It also makes all stakeholders in the village government more aware of potential fraud. The findings of this study corroborate those of Budiantoro et al. (2022) and Insani et al. (2020).

The Influence of the Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Fund Management

The research results in Table 6 show that the relationship between the whistleblowing system (Z) and fraud prevention in village fund management (Y) has an initial sample value of 0,498. A positive value indicates a positive relationship between the whistleblowing system (Z) and preventing fraud in village fund management (Y). An association between the whistleblowing system and fraud prevention in village fund management is positive and significant, as indicated by a P value of $0,000 < 0,05$. These findings mean that the existence of a whistleblowing system in the organization can prevent fraud in managing village funds. The whistleblowing system encourages every party to speak up by reporting acts of fraud that occur in the management of village funds.

These results lend credence to the fraud triangle theory, which holds that anyone may perpetrate fraud given the right conditions. A whistleblower system, on the other hand, can reduce the likelihood of fraud since anybody involved in village administration can denounce fraudulent

activity, which is then investigated, and supporting documentation is gathered. The research of Anandya & Werastuti (2020); Dinda Natalia & Sujana, (2022); Pramudyastuti et al. (2021) is supported by the findings of this study.

The Influence of Anti-Fraud Awareness through a Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Fund Management

The research results in Table 6 show that the relationship between anti-fraud awareness (X) through the whistleblowing system (Z) and fraud prevention in village fund management (Y) has an initial sample value of 0,218. A positive value indicates a positive relationship between anti-fraud awareness (X) through the whistleblowing system (Z) and the prevention of village fund management fraud (Y). A P value of $0,003 < 0,05$ means that the whistleblowing system can be an intermediary variable in the influence between anti-fraud awareness and fraud prevention in village fund management. The whistleblowing system is one of the village government's strategies to prevent fraud in managing village funds. If everyone in the company supports this system by being aware of the dangers of fraud, it will function at peak efficiency. Village governments can stop fraud in the management of village funds by having a whistleblower system and anti-fraud knowledge.

These results provide credence to the pressure, opportunity, and rationalization components of the fraud triangle theory. An individual may engage in fraudulent action if they come into a circumstance where they feel pressured to do so. An open chance might turn into the possibility of someone acting dishonestly, and the desire to commit fraud will grow when someone finds a way to justify dishonest activity. By raising anti-fraud awareness, village governments can take steps to uphold morals and ethics. This will enable the implementation of methods aimed at lowering the risk of fraud in the whistleblowing system, which will in turn prevent fraud in the village funds.

5. CONCLUSION

The research results have led to the following conclusions: anti-fraud awareness has a significant effect on the whistleblowing system, anti-fraud awareness has a significant effect on preventing fraud in village fund management, the whistleblowing system has a significant effect on preventing fraud in village fund management, and anti-fraud awareness affects preventing fraud in managing village funds through a whistleblowing system. Reducing fraud in village fund management can be achieved in part by encouraging everyone in the village administration who is aware of anti-fraud measures to report any infraction.

REFERENCE

- Albrecht, W. S. , A. C. O. , A. C. C. , & Z. M. F. (2012). *Fraud Examination (Fourth)*. Soth-Western Cengage Learning.
- Albrecht, W.S., A. C. C. and A. C. D. (2002). "*Fraud Examination* (Thomson, Ed.).
- Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2).
- Annisaa, Z., & Nurlaeli, S. (2022). Determinants of Whistleblowing Intentions: The Role of Education in Building Personal Integrity. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i1.262>
- Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *SYNERGY: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.52364/synergy.v2i1.16>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2019). *Survei Fraud Indonesia*. Balipost. (2019). Sidang Korupsi APBDes, Oknum Perbekel. <https://www.balipost.com/news/2019/02/13/68750/Sidang-Korupsi-APBDes,Oknum-Perbekel...Html>.
- BPK Bali. (2018). Korupsi Dana Desa Mengwitani, Mantan Perbekel Dipenjara. <https://bali.bpk.go.id/Wp-Content/Uploads/2018/02/Korupsi-Dana-Desa-Mengwitani-Mantan-Perbekel-Dipenjara.Pdf>.
- Budiantoro., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) , Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan

- (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2474>
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study In The Social Physiology Of Embezzlement* (IL). New Jersey: Patterson Smith.
- Dinda Natalia, S. A. P., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p06>
- Fitriani, S. D., Dewata, E., & Indriasari, D. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Whistleblowing System dan Kesadaran Anti Fraud. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 140–151.
- Insani, D. A. S., Tarjo, & Yuliana, R. (2020). The Effect of Fraud Awareness and Skepticism Professionals on Fraud Prevention (Survey in Madura Area Inspectorate). In *International Colloquium on Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, Issue 1).
- Jalil, F. Y. (2018). Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud. *ETIKONOMI*, 17(2), 297–306. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7473>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kompas.2023. (n.d.). Rawan Korupsi, Pengawasan Pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat. <https://www.kompas.id/Baca/Polhuk/2023/03/15/Rawan-Korupsi-Pengawasan-Dana-Desa-Harus-Diperkuat>.
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., Fitri, G., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 6, Issue 1).
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(1), 84–105.
- Ramadhan, D. (2022). Strengthening Integrity and Fraud Awareness in Preventing Fraud During the Covid-19 Pandemic. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i2.266>
- Sayidah, N. (2018). Internalization Of The Value Of Metal Revolution In Forensic Accounting And Investigative Audit Learning Models. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(2), 297–305. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.02.12>
- Sustika, A. D., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2020). Whistleblowing For Fraud: Perspective Of Leadership Types And Accountability Pressure. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.153>
- Sweeney, P. (2008). Hotlines Helpful for Blowing the Whistle. *Financial Executive*, 24(4), 28–32.
- Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control And Anti-Fraud Awareness On Fraud Prevention (A Survey On Inter-Governmental Organizations). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626>

Model Standar Akuntansi Keuangan Pada Laporan Keuangan UMKM Di Indonesia

Dipa Teruna Awaloedin¹, Tedy Ardiansyah²
Universitas Nasional-¹dipateruna@civitas.unas.ac.id,
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta-²tedyardiansy4h@gmail.com,

Abstract-The problem of MSMEs in Indonesia is a problem that must be paid attention to because MSMEs are a main part of supporting the economy in Indonesia, one of which concerns the financial reports of MSMEs. The aim of the research is to determine the correlation between the author's statement of SAK on MSME financial reports in Indonesia and the appropriate model for Financial Accounting Standards on MSME financial reports in Indonesia. The research method uses quantitative research with a systematic literature review approach using the PRISMA method, where the sample used uses 48 articles originating from Google Scholar and Semantic Scholar for the period 2017–2023. The results of the research were carried out with two analyses, namely cluster analysis and project map analysis, where novelty was found from this research, namely cluster analysis, where almost 50 percent of all authors had similarities in ensuring that MSME financial reports are characterized by a Pearson correlation between 0.41 and 0.61. Meanwhile, the project map analysis is divided into two conclusions, namely negative and positive, for both sources from Google Scholar and Semantic Scholar.

Keywords: MSMEs, Financial Report, Financial Accounting Standards

1. PENDAHULUAN

Beberapa masalah umum dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kompleksitas Standar: Standar akuntansi seringkali sangat sulit dipahami oleh pengguna yang tidak akrab dengan akuntansi (Billiarta, 2022; Wijayanti & Effriyanti, 2019; Wulandari, 2021). 2. Kesesuaian dengan Praktik Bisnis: Ada kemungkinan bahwa standar akuntansi tidak selalu sesuai dengan praktik bisnis Indonesia. Ini dapat menyebabkan perbedaan antara informasi yang dilaporkan dan keadaan sebenarnya perusahaan. 3. Ketidakpastian Interpretasi (Wilantara, 2022): Pendapat berbeda tentang cara menerapkan standar yang ambigu atau tidak jelas, terutama dalam hal-hal yang kompleks seperti pengakuan pendapatan atau penilaian aset. 4. Perubahan Standar yang Cepat: Standar akuntansi nasional dan internasional sering berubah dengan cepat. Ini dapat menjadi tantangan bagi bisnis untuk tetap konsisten dalam pelaporan keuangan (Wulanditya, 2022). 5. Biaya Implementasi: biaya untuk menerapkan standar baru atau perubahan. 6. Ketidakseimbangan Antara Pemenuhan Kebutuhan Pengguna: Ada ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan investor, kreditur, dan pemerintah. 7. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap standar akuntansi seringkali tidak konsisten atau tidak efektif, yang dapat mengurangi kredibilitas dan keandalan informasi keuangan (Estikasari & Adi, 2019). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah, lembaga pengatur, dan profesi akuntan terus berusaha meningkatkan transparansi, relevansi, dan kredibilitas informasi keuangan di Indonesia. Ini dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, standar akuntansi yang lebih baik, dan peningkatan pelatihan profesional.

Beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi oleh bisnis dengan peraturan akuntansi keuangan meliputi: 1. Kompleksitas Standar: Standar akuntansi keuangan yang kompleks dapat sulit dipahami dan diterapkan dengan benar. Ini dapat memerlukan sumber daya tambahan, seperti waktu dan biaya untuk pelatihan dan konsultasi. 2. Biaya Implementasi: Standar baru atau perubahan yang signifikan seringkali membutuhkan dana yang signifikan untuk diterapkan dalam hal sumber daya manusia, sistem informasi, dan proses bisnis. Biaya ini dapat menambah beban perusahaan. 3. Ketidakpastian Interpretasi: Standar akuntansi yang ambigu atau terbuka tentang interpretasi dapat menyebabkan persepsi yang berbeda tentang transaksi atau peristiwa yang sama. 4. Menyesuaikan dengan Perubahan Bisnis: Standar akuntansi mungkin tidak selalu sesuai dengan praktik. 5. Pengaruh Perubahan Standar: Perubahan standar akuntansi dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama jika perusahaan harus mengubah kebijakan akuntansi atau metode baru. Ini dapat memengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. 6. Kesesuaian dengan Persyaratan Pihak

Ketiga: Beberapa pihak, seperti investor, kreditor, dan pemerintah, mungkin memiliki kebutuhan tambahan tentang informasi keuangan perusahaan. Persyaratan ini mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi oleh standar akuntansi. 7. Manajemen Risiko dan Keselarasan: Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa standar akuntansi mereka mencerminkan profil risiko dan tujuan bisnis mereka dengan benar (Sanjaya et al., 2019; Supriyadi & Setyorini, 2020; Yanti & Setiyanto, 2021). Ketidaksesuaian antara praktik bisnis dan standar akuntansi dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Ini akan memastikan bahwa staf akuntansi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, memastikan staf memiliki keterampilan dan pengetahuan akuntansi yang cukup, dan terus mengikuti praktik terbaik industri dan standar akuntansi.

Standar akuntansi keuangan umumnya berlaku untuk semua jenis bisnis, termasuk perusahaan produk. Namun, ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan produk saat menerapkan standar akuntansi keuangan. Beberapa di antaranya termasuk: 1. Penilaian Persediaan: Perusahaan produk seringkali memiliki stok barang yang memerlukan penilaian yang akurat (Khadijah, 2019; Mustofa, 2021; Talib, 2019; Wahyuni Lubis et al., 2022; Zain, 2021). Menentukan nilai persediaan, metode penilaian yang tepat, dan pengakuan biaya persediaan dapat menjadi masalah. 2. Pengakuan Biaya Produksi: Satu tantangan utama bagi perusahaan produk adalah menghitung biaya produksi dengan akurat. Ini mencakup menentukan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta cara mengalokasikannya ke produk. 3. Pengakuan Pendapatan: Perusahaan produk mungkin menggunakan model bisnis yang rumit seperti ritel, grosir, atau metode distribusi lainnya. Pengakuan pendapatan harus mematuhi prinsip pengakuan pendapatan (Indrawati et al., 2021; Kawatu et al., 2019; Mufti, 2021; Palullungan et al., 2021). 4. Penilaian Nilai Wajar Aset Tetap: Perusahaan produk mungkin memiliki aset tetap seperti fasilitas produksi, peralatan, atau mesin. Menilai nilai wajar aset tetap ini dan menentukan kapan harus menurunkan nilainya (impairment) adalah tugas yang sulit. 5. Pengelolaan Risiko Mata Uang Asing: Perusahaan produk mungkin terpapar pada risiko mata uang asing jika mereka melakukan transaksi lintas batas atau menjalankan bisnis di luar negeri. Sangat penting untuk mengelola risiko ini dan menerapkan prinsip akuntansi yang tepat saat melaporkan transaksi mata uang asing. 6. Pengungkapan Risiko: Perusahaan produk mungkin menghadapi risiko yang berbeda karena perubahan dalam regulasi industri, harga bahan baku, atau siklus produksi. Untuk menghindari risiko ini, mereka harus memberikan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangannya. Perusahaan produk harus memahami standar akuntansi keuangan yang berlaku secara menyeluruh dan bagaimana menerapkannya sesuai dengan bisnis mereka. Ini juga dapat membantu memiliki tim keuangan yang terampil dan berkualitas tinggi yang memahami industri produk dan prinsip akuntansi keuangan.

Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ada beberapa masalah unik yang sering mereka hadapi saat menerapkan standar akuntansi keuangan: 1. Keterbatasan Sumber Daya: UMKM biasanya memiliki sumber daya manusia dan dana yang terbatas. Mereka mungkin tidak memiliki karyawan yang terlatih dalam akuntansi atau keuangan yang tahu bagaimana menerapkan standar akuntansi. 2. Keterbatasan Pengetahuan: Pemilik atau manajer UMKM mungkin tidak cukup mengenal akuntansi keuangan, yang dapat menyulitkan mereka untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku. 3. Tingkat Transaksi yang Rendah: Beberapa UMKM mungkin memiliki tingkat transaksi yang rendah, yang dapat membuat mereka kurang memperhatikan pencatatan keuangan. Ini dapat menyebabkan mereka tidak memiliki data keuangan yang akurat untuk melaporkan kinerja keuangan dan mematuhi standar akuntansi. 4. Kesulitan dalam Memperoleh Kredit: Bisnis kecil dan menengah (UMKM) sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kredit atau pendanaan tambahan karena laporan keuangan mereka tidak disusun dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang dapat dipercaya (Yulianasari, 2020). 5. Kompleksitas Standar Akuntansi: Beberapa standar akuntansi keuangan bisa rumit, terutama bagi orang yang tidak terbiasa dengan akuntansi. Ini dapat menyulitkan UMKM untuk menerapkan standar ini dengan benar. 6. Biaya Implementasi: UMKM mungkin menganggap biaya untuk menerapkan standar akuntansi sebagai beban tambahan yang tidak dapat mereka bayar, terutama jika mereka harus menyewa konsultan atau karyawan tambahan untuk membantu mereka memahami dan menerapkan standar tersebut. UMKM dapat mempertimbangkan beberapa langkah, seperti: - Menggunakan perangkat lunak akuntansi yang mudah digunakan dan murah - Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemilik dan staf tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi -

Mempekerjakan konsultan keuangan atau akuntan untuk menawarkan bantuan dan saran - Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan atau pihak lain yang dapat membantu dan mendukung dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat.

Berdasarkan scientific riset dan serta kajian teori dari permasalahan diatas dimana peneliti ingin mengetahui bahwa basis permasalahan lapoaran keuangan UMKM yang belum mempunyai standar SAK menjadi bagian penting yang harus diselesaikan. Peneliti ingin menemukan state of the art (SOTA) terutama mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan UMKM di Indonesia. Dari hal tersebut riset atau penelitian ini mempunyai rumusan pertanyaan; "Berapa besar hubungan korelasi antara author dalam menyatakan SAK pada laporan keuangan UMKM di Indonesia?", kemudian "bagaimana model yang tepat untuk Standar Akuntansi Keuangan terhadap laporan keuangan UMKM?". Dari background diatas untuk itu peneliti fokus untuk riset dengan judul "Model Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada laporan keuangan UMKM di Indonesia".

PSAK No. 1 memastikan bahwa "Laporan keuangan adalah tahapan dari proses financial report (Fadilah, 2020; Yulianis et al., 2021). Laporan keuangan yang full umumnya meliputi antara lainneraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi, dan laporan keuangan lainnya. keuangan, memo dan report lain, serta materi deskripsi yang merupakan bagian krusial dari laporan keuangan. Untuk itu, termasuk list dan deskripsi yang berkaitan dengan laporan, seperti gambaran tentang dampak hasil harga dan informasi keuangan tentang klasifikasi industri dan geografis; a. Asset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi sebagai akibat dari kejadian masa lalu dan yang diharapkan akan memberikan benefit ekonomi di masa depan; b. Liabilitas adalah kewajiban saat ini perusahaan atau insititusi yang berasal dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya menyebabkan output keluar dari sumber daya perusahaan atau institusi yang memiliki benefit ekonomi; dan c. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan atau institusi setelah dikurangi seluruh kewajibannya.

Usaha mikro atau UMKM adalah suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan ekonomi perseorangan dan memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah sebagaimana didefinisikan menurut hukum.

SAK oleh EMKM "Perusahaan, usaha sangat kecil, menengah adalah suatu perusahaan yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); Memenuhi persyaratan dan definisi suatu perusahaan. Diatur oleh undang-undang yang berlaku selama minimal dua tahun berturut-turut di Indonesia (Mutiah, 2019; Nuvitasari & Martiana, 2019) UU 2008 tentang UMKM (Usaha Kecil dan Mikro) Menurut No.20 adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau organisasi. Pedagang tunggal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang ini disebut usaha mikro.

Suatu usaha yang sangat produktif yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau suatu perusahaan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari, atau secara langsung atau tidak langsung, suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut disebut usaha kecil atau menengah. Jumlah usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil undang-undang ini. Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan kecil atau besar.

SAK EMKM No. 20 Tahun 2008 menjelaskan standar EMKM terkait sebagai berikut: 1. Standar Usaha Mikro. Ini terdiri dari dua kriteria bisnis ini a. Harta bersih tidak termasuk tanah dan bangunan dimana perseroan berada tidak boleh melebihi Rp50 juta. b. Mempunyai pendapatan tahunan lebih kecil dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil: a. Memiliki wealth net antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah: a. Memiliki wealth net antara 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dan b. Memiliki pendapatan bersih antara 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Untuk itu, jumlah klasifikasi EMKM ini dapat dicocokkan dengan pertimbangan ekonomi yang diatur oleh hukum di Indonesia.

Teknik SLR digunakan untuk mengetahui, melihat, menilai, dan memperkirakan semua riset yang ada pada suatu hal bidang disukai, termasuk rumusan masalah khusus yang relevan. Metode SLR dipakai dalam melaksanakan kajian sistematis dan pengenalan jurnal,

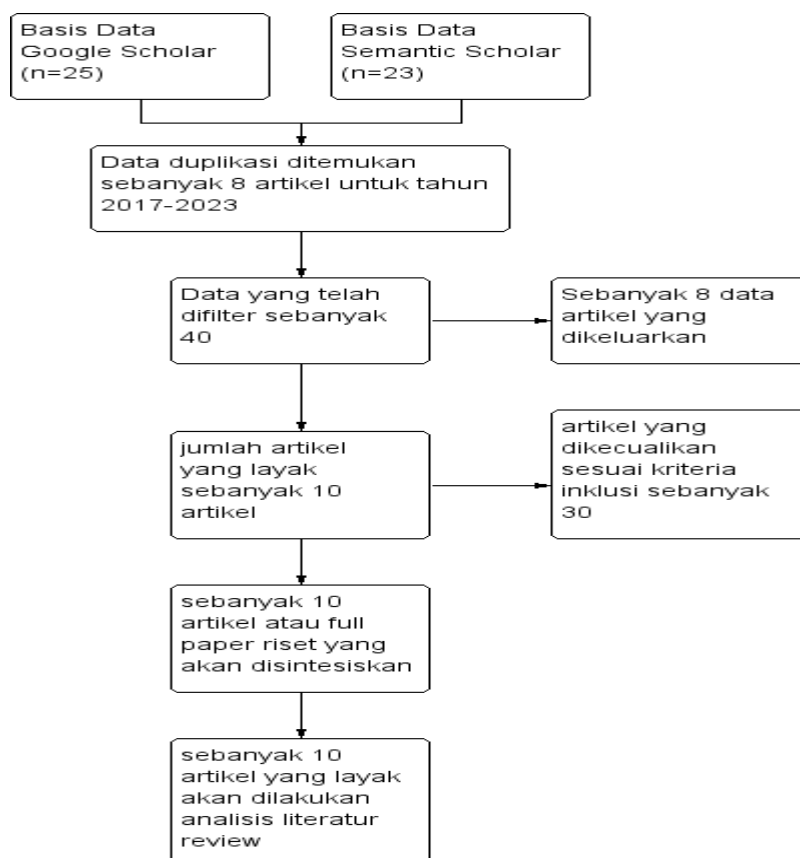
dengan tahapannya menindaklanjuti setiap langkah atau protokol telah ditetapkan sebelumnya (Triandini et al., 2019).

Tinjauan literatur sistematis adalah cara untuk mengenal analisa, dan menggambarkan suatu artikel riset berkenaan dengan rumusan masalah riset, bidang tema, hal khusus tertentu yang phenomena. Menjalakan riset, pengertian menyeluruh terhadap riset adalah salah satu syarat yang harus dijalankan periset. Kajian literatur merupakan metode riset literatur berhubungan dengan rumusan masalah harus dijawab oleh periset. pertimbangan secara pragmatis mengenal, mendapatkan dan analisa literatur riset relevan yang akan mencurahkan pada isi seluruh artikel (Larasati et al., 2021).

Riset memakai jenis penelitian "Systematic Literature Review" (SLR). Tinjauan literatur sistematis adalah gambaran riset yang bertujuan mengidentifikasi, analisa dan memperkirakan bukti riset umum dalam bentuk rumusan masalah atau pertanyaan riset, tema, atau sesuatu yang unik dan beda. Tinjauan pustaka yang sistematis mempunyai benefit dalam merangkum berbagai temuan penelitian yang relevan sehingga fakta yang disajikan untuk memberikan kemudahan keputusan. Tinjauan survei literatur dipakai untuk menjadi patokan teori bagi periset guna menganalisis scope riset mengenai tema yang atau untuk mengetahui apa yang ditulis periset yang sudah diteliti sebelumnya. Hal ini mempunyai benefit anatara lain tujuan, termasuk prakti rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh periset (Nugroho et al., 2021).

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Kriteria inklusi studi

Dalam riset ini, Author telah menuliskan semua artikel yang memenuhi klasifikasi antara lain: 1. Judul "Standar Akuntansi Keuangan", 'Akuntansi Keuangan', "SAK", 2. Judul "Laporan Keuangan", "UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah", 3. Riset kuantitatif dan kualitatif, 5. Diterbitkan artikel antara periode 2017 dan 2023.

Kriteria eksklusi studi

Dalam riset ini, author mengecualikan semua artikel dimana antara lain: 1. Penelitian mempelajari Standar Akuntansi Keuangan atau laporan Keuangan UMKM saja, 2. Riset mixed method atau campuran, 3. Artikel non bahasa Inggris, 4. Artikel yang dikeluarkan tahun 2017

Strategi pelaksanaan

Pelaksanaan riset, Periset menggunakan "Standar Akuntansi Keuangan", "SAK", "Laploan Keuangan", "Usaha Mikro Kecil Menengah", "UMKM" sebagai keyword untuk mencari kumpulan data pada Google Scholar (GS) dan Semantic Scholar (SS).

Penulis memasukkan institusi, jurnal, nama publikasi, judul artikel, dan kata kunci menggunakan alat pencarian makalah. Ini akan membantu dalam menemukan nomor yang dicari atau diinginkan di kertas. Dalam hasil jurnal, penulis, peringkat, jumlah kutipan, judul, tahun terbit, nama penerbit, dan jenis artikel dapat ditemukan. Untuk memulai putaran survei, evaluasi dilakukan terhadap judul dan pokok artikel yang dipilih mengenai standar disatukan dan untuk dijaui. Setelah itu, artikel dicek untuk dikaji lebih dalam, strategi, tes, tools, dan bukti yang terungkap. Peta aliran pengetahuan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) digunakan untuk tinjauan sistematis ini (Dwilaga, 2023; Rachmawati & Purwandari, 2022). Peta PRISMA (gambar 1) menunjukkan banyak dokumen yang dikenal yang dipilih untuk ketepatan, keterlibatan, dan dikecualikan berdasarkan bagian inklusi dan eksklusi. Hasilnya, sepuluh artikel riset didapatkan.

Kategori coding

Menghitung beberapa subbagian, penulis menyatukan data ke dalam list. Sub dari bagian ini mencakup pembuat, tahun pelaksanaan, tools tes dan finding. Selain itu, sang periset mengatur beberapa survei untuk identifikasi semua artikel dan collect data dalam list. pada saat yang sama, check sekali lagi hasilnya dan putuskan tujuan dan saran. Tools Nvivo yang lebih easy untuk handle riset atau identifikasi guna mendukung atau support dari temuan atau finding perihal di atas.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan dan mencapai tujuan, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kajian sistematis literatur. Sebuah survei rutin dilakukan dari 1 Desember 2023 hingga 15 Februari 2024. Semua makalah yang memenuhi kriteria berikut telah dicantumkan oleh penulis dalam penelitian ini: (1) judul "Standar Akuntansi Keuangan", atau "Akuntansi Keuangan" atau "Standar Akuntansi Keuangan (SAK)"; (2) judul "laporan keuangan" atau salah satu dari laporan keuangan, seperti "Laporan Keuangan UMKM" atau "Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah" (3) Studi kuantitatif; (4) Publikasi dalam jurnal peer review dari 2017 hingga 2023. Selain itu, penulis mengecualikan semua makalah yang memenuhi salah satu kriteria berikut dari penelitian ini: (1) penelitian hanya membahas manajemen sekolah atau kewirausahaan; (2) metodologi penelitian adalah kualitatif atau campuran; (3) makalah tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris; dan (4) makalah yang diterbitkan sebelum tahun 2017.

Penulis memasukkan afiliasi, jurnal, nama publikasi, judul artikel, dan kata kunci menggunakan alat pencarian makalah. Ini akan membantu dalam menemukan nomor yang dicari atau diinginkan di kertas. Dalam hasil jurnal, penulis, peringkat, jumlah kutipan, judul, tahun terbit, nama penerbit, dan jenis artikel (misalnya, seminar, prosiding, atau bab buku) dapat ditemukan. Untuk memulai siklus survei, evaluasi dilakukan terhadap judul dan intisari artikel yang dipilih mengenai standar penggabungan dan penghindaran. Setelah itu, artikel diperiksa untuk eksplorasi, strategi, tes, instrumen, dan penemuan.

Untuk tinjauan sistematis ini, peta aliran pengetahuan PRISMA (Item Reporting Preferred for Systematic Reviews and Meta-Analyses) digunakan. Peta PRISMA (gambar 1) menunjukkan jumlah dokumen yang diketahui yang diuji kelayakan, keterlibatan, dan pengecualian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasilnya, sepuluh makalah penelitian diberikan kepada kami.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan hasil yang dikumpulkan, yang terdiri dari nama penulis, jumlah sample, jumlah variabel, dan kesimpulan. Tabel ini juga menunjukkan jumlah artikel yang telah dipublikasikan yang terkait dengan rumusan masalah peneliti.

Tabel 1.

Data Artikel yang telah difilter PRISMA				
Nama Penulis Atau Author	Tahun Publikasi	Sumber Data	Jenis Variabel	Kesimpulan
Yuli Rawun (YR) & Oswald (ONT) N. Tumilaar	2019	Google Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada UMKM yang menyusun laporan keuangan. Ini karena pelaku UMKM tidak tahu cara menyusun laporan keuangan dan mereka tidak ingin menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang ada saat ini.
Jilma Dewi Ayu Ningtyas (JDAN)	2017	Google Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi	Hasil riset menggambarkan bahwa financial report UMKM terdiri dari catatan atas keuangan pernyataan, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi.
Putri Aulia Fitriani (PAF)	2023	Google Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	gagal menerapkan SAK EMKM karena UMKM kurang memahami akuntansi dan tidak memahami SAK EMKM karena pencatatan keuangannya hanya berupa catatan pengeluaran dan penerimaan kas. Faktor lain yang menyebabkan UMKM gagal menerapkan SAK EMKM adalah kurangnya pengawasan dari pihak terkait dan kurangnya pemahaman tentang SAK EMKM. pemerintah dan organisasi yang terkait.
Dewi Kirowati (DK), Vaisal Amir (VA)	2019	Google Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	Riset menggambarkan bahwa sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Madiun belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan dan belum tahu. Selain itu, mereka masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengadopsi dan menerapkan SAK EMKM.
Baiq Widiastiwati, Denni Hambali	2020	Google Scholar	UMKM, SAK, Laporan Keuangan	Hasil riset menunjukkan bahwa UMKM UD Sari Bunga belum

Nama Penulis Atau Author	Tahun Publikasi	Sumber Data	Jenis Variabel	Kesimpulan
				menerapkan SAK EMKM, tetapi peneliti membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Menurut hasil perhitungan data, laporan keuangan UMKM UD Sari Bunga menunjukkan posisi keuangan yang baik.
Berlian Afriansyah, Upi Niarti, Tuti Hermelinda	2021	Semantic Scholar	UMKM, SAK, Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap Akuntansi dan SAK-EMKM berpengaruh terhadap penyajian Laporan keuangan.
PristianaWidyastuti	2017	Semantic Scholar	UMKM, SAK, Laporan Keuangan	Output riset menggambarkan bahwa pengusaha tidak tahu tentang tujuan, keuntungan, dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Akibatnya, pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana.
Kesia Danila Hamongsina, Frida M.Sumual, Olifia Yodiawati Tala	2022	Semantic Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	Studi ini menggambarkan bahwa KM Sirene belum menerapkan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya karena beberapa masalah: tidak ada pengawasan dari pihak tertentu, pandangan pemilik, dan kurangnya pengetahuan akuntansi.
Sri Ayem, Risma Prihatin	2020	Semantic Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	Penyusunan pajak dan SAK-EMKM meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Iis Solihat, Pesi Suryani, Olivia Idrus, Any Meilani, Amalia Kusuma Wardini	2021	Semantic Scholar	UMKM, Laporan Keuangan, SAK	UMKM mampu mengaktifkan penyusunan SAK ETAP UMKM laporan keuangan dalam bentuk jurnal umum, penyesuaian jurnal, buku besar, neraca, kertas kerja,

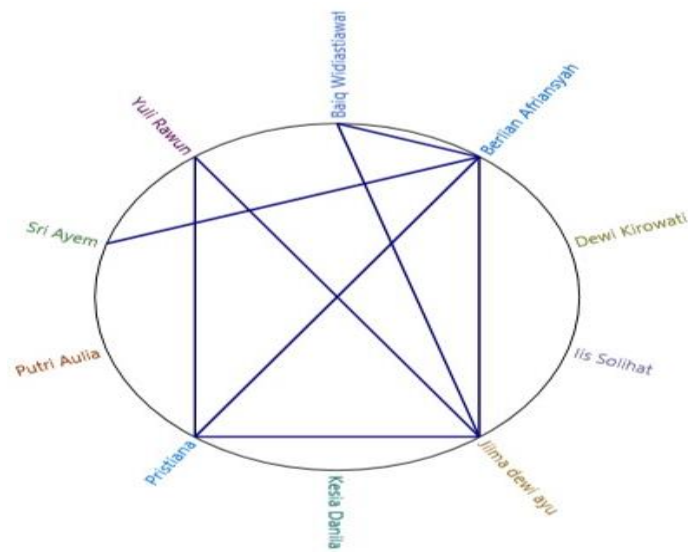
Sumber Data: diolah mandiri (2024)

Dari sepuluh artikel atau author yang ditemukan dalam tabel di atas, dua sumber data digunakan; lima dari informan ini berasal dari Google Scholar (GS), dan lima lainnya berasal dari Semantic Scholar (SS). Publikasi artikel atau kertas dilakukan dari tahun 2017 ke atas atau sampai dengan 2023. Untuk menjawab rumusan pertanyaan secara menyeluruh, data di atas akan dibantu dalam pengolahan dengan Nvivo 12.

Cluster Analysis

Analisa kelompok adalah metodologi eksplorasi yang digunakan untuk menunjukkan desain proyek pengelompokan sumber atau node dengan kata-kata, nilai atribut, atau karakteristik yang sebanding. Diagram analisis kelompok menawarkan sumber atau representasi node grafis yang menunjukkan persamaan dan perbedaan. Dalam diagram analisis cluster, node atau sumber harus identik dan tidak berbeda untuk kenyamanan. Analisis klaster dapat berupa peta cluster dua dimensi, peta cluster tiga dimensi, dendrogram horizontal, dan dendrogram vertikal, serta grafik lingkaran. Peneliti menggunakan analisis

lingkaran grafik kelompok saat ini. Pada grafik lingkaran, garis biru menunjukkan kesamaan, dengan garis yang lebih tebal menunjukkan kesamaan yang lebih kuat. Perbedaan ditunjukkan dengan garis merah atau tanpa garis, yang menunjukkan ketidaksetaraan atau ketidakkonsistenan yang signifikan.



Gambar 2.
Analysis cluster SAK pada laporan keuangan UMKM

Dari hasil gambar 2 diatas mengenai Analysis cluster SAK pada laporan keuangan UMKM, nampak garis biru adanya kesamaan antara author yang satu dengan yang lainnya sebaliknya bila tidak ada menunjukan bahwa tidak adanya kesamaan antara author yang satu dengan yang lainnya dari artikel yang ditulis mengenai Analysis cluster SAK pada laporan keuangan UMKM. Bila dilihat pada Gambar 2 hanya author Putri Aulia, Kesi Danila, Iis Solihat dan Dewi kirowati, sebaliknya yang mempunyai hubungan yang kuat ditandai garis biru antara author satu dengan yang lainnya antara lain: Sri Ayem, Yuli Rawun, Baiq Widiastawati, Berlian Afriansyah, Jilma Dewi Ayu dan Pristiana. Untuk Sri Ayem hanya mempunyai hubungan kepada Berlian Afriansyah sama halnya dengan Berlian Afriansyah dengan Baiq Widiastawati, sedangkan Yuli Rawun mempunyai dua hubungan kepada Pristiana dan Jilma Dewi Ayu, lalu Pristiana mempunyai 3 hubungan kepada Yuli Rawun, Berlian Afriansyah dan Jilma Dewi Ayu, lalu Berlian Afriansyah mempunyai 3 hubungan dengan Sri Ayem, Pristiana dan Jilma Dewi Ayu, lalu Jilma Dewi Ayu mempunyai 4 hubungan dengan Pristiana, Yuli Rawun, Baiq Widiastawati dan Berlian Afriansyah. Hal tersebut menyatakan bahwa dari author tersebut mempunyai konsep dan pandangan mengenai SAK pada laporan keuangan agar menjadi baik UMKM di Indonesia.

Tabel 2.
Rule of Thumb Pearson Correlation Coefficient(Hair et al., 2014)

Correlation Coefficient	Strength Description
0.81 - 1.00	Strongest
0.61 - 0.80	Strong
0.41 - 0.60	Moderate
0.21 - 0.40	Weak
0.00 - 0.10	Weak to No Relationship

Untuk melihat korelasi koefisien dari masing-masing informant pada kluster analisis, hubungan antara angka ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 3.
Pearson Correlation Coefficient

File A	File B	Pearson correlation coefficient
Files\\Data Author\\Pristiana	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,610108
Files\\Data Author\\Sri Ayem	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,577453
Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	Files\\Data Author\\Baiq Widiastawati	0,558719
Files\\Data Author\\Pristiana	Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	0,538118
Files\\Data Author\\Yuli Rawun	Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	0,517915
Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	Files\\Data Author\\Baiq Widiastawati	0,511772
Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,506219
Files\\Data Author\\Yuli Rawun	Files\\Data Author\\Pristiana	0,50047
Files\\Data Author\\Pristiana	Files\\Data Author\\Baiq Widiastawati	0,489322
Files\\Data Author\\lis Solihat	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,48805
Files\\Data Author\\Sri Ayem	Files\\Data Author\\Pristiana	0,484106
Files\\Data Author\\Yuli Rawun	Files\\Data Author\\Baiq Widiastawati	0,475426
Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,474486
Files\\Data Author\\Sri Ayem	Files\\Data Author\\lis Solihat	0,468731
Files\\Data Author\\Yuli Rawun	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,463484
Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	Files\\Data Author\\lis Solihat	0,448651
Files\\Data Author\\Pristiana	Files\\Data Author\\lis Solihat	0,447278
Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	Files\\Data Author\\Baiq Widiastawati	0,446891
Files\\Data Author\\Yuli Rawun	Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	0,433787
Files\\Data Author\\Sri Ayem	Files\\Data Author\\Jilma dewi ayu	0,42539
Files\\Data Author\\Pristiana	Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	0,415477
Files\\Data Author\\Putri Aulia	Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	0,414988
Files\\Data Author\\Putri Aulia	Files\\Data Author\\Berlian Afriansyah	0,413806
Files\\Data Author\\Sri Ayem	Files\\Data Author\\Dewi Kirowati	0,412909

Sumber Data: diolah mandiri (2024)

Dari Tabel 3 Pearson Correlation Coefficient, bahwa data yang ditampilkan hanya ada 24 dari total 45, tabel diatas hanya menunjukan status moderate dan strong alias cukup dan kuat, selebihnya sebanyak 21 data mempunyai status weak dan weak no to relationship alias lemah dan lemah tidak mempunyai hubungan. Seperi pada tabel diatas hanya 1 hubungan yang mempunyai status strong alias kuat yaitu hubungan antara Pristiana dan Berlian Berlian afriansyah, dinyatakan dengan nilai 0,61. Kemudian selanjutnya sebanyak 23 dinyaatkan moderate alias cukup dimana nilainya diantara 0.41 sampai dengan 0,60 antara lain hubungan antara Sri Ayem dengan Berlian Afriansyah dengan nilai 0,577, kemudian Berlian Afriansyah dengan Baiq Widiastawait dengan nilai 0,558, lalu Pristiana dengan Jilma Dewi Ayu senilai 0,538, lalu antara Yuli Rawun dengan Jilma Dewi Ayu senilai 0,517, lalu antara Jilma Dewi Ayu dengan Baiq Widiastawati dan Berlian Afriansyah senilai 0,511 dan 0,506, lalu Yuli Rawaun dengan Pristiana senilai 0,500, lalu antara Pristianan dengan Baiq Widiastawati senilai 0,489, lalu lis solihat dengan Berlian Afriansyah senilai 0,488, lalu hubungan antara Sri ayem dengan

Pristiana senilai 0,484, lalu hubungan antara Yuli Rawun dengan Baiq Widiastawati senilai 0,475, lalu hubungan antara Dewi Kirowati dengan Berlian Afriansyah senilai 0,474, lalu hubungan Sri Ayem dengan Lis Solihat senilai 0,468, lalu hubungan dengan Yuli Rawun dengan Berlian Afriansyah senilai 0,463, kemudian hubungan antara Gilma Dewi Ayu dengan Lis Solihat senilai 0,448, lalu hubungan dengan Pristiana dengan Lis Solihat senilai 0,447, lalu hubungan Dewi Kirowati dengan Baiq Widiastawati dengan nilai 0,446, lalu hubungan Yuli Rawun dengan Dewi Kirowati dengan nilai 0,433, lalu hubungan Sri ayem dengan Gilma Dewi Ayu senilai 0,425, lalu hubungan Pristiana dengan Dewi Kirowati, kemudian Putri Aulia dengan Dewi Kirowati dan Berlian afriansyah serta terakhir hubungan Sri ayem dengan Dewi Kirowati dengan nilai secara keseluruhan adalah 0,41.

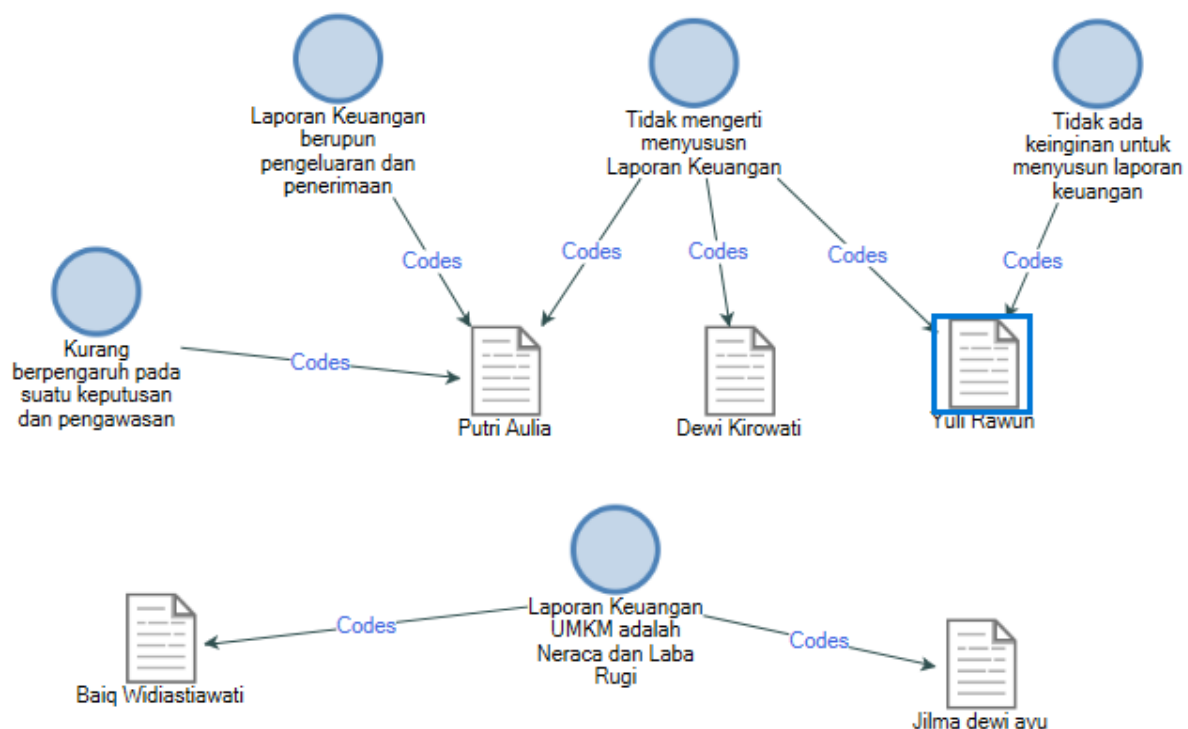
Map Analysis

Membentuk variabel menjadi struktur model memerlukan penggunaan perangkat visualisasi. Map diuji secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan korelasi antara variabel-variabel. Peneliti dapat menemukan korelasi atau hubungan ini dari data yang diolah secara sistematis dan tidak manual.

Ada tiga jenis model atau peta: mind maps, concept maps, dan project maps. Riset dengan proyek map atau model sangat mudah; data dapat diidentifikasi dan dianalisis secara otomatis. Tetapi untuk mengurangi kesalahan, fungsi manual masih diperlukan.

Project Map Analysis Google Scholar (GS)

Terlampir dibawah Project Map Analysis Google Scholar (GS) untuk menampilkan model seperti dibawah berikut:

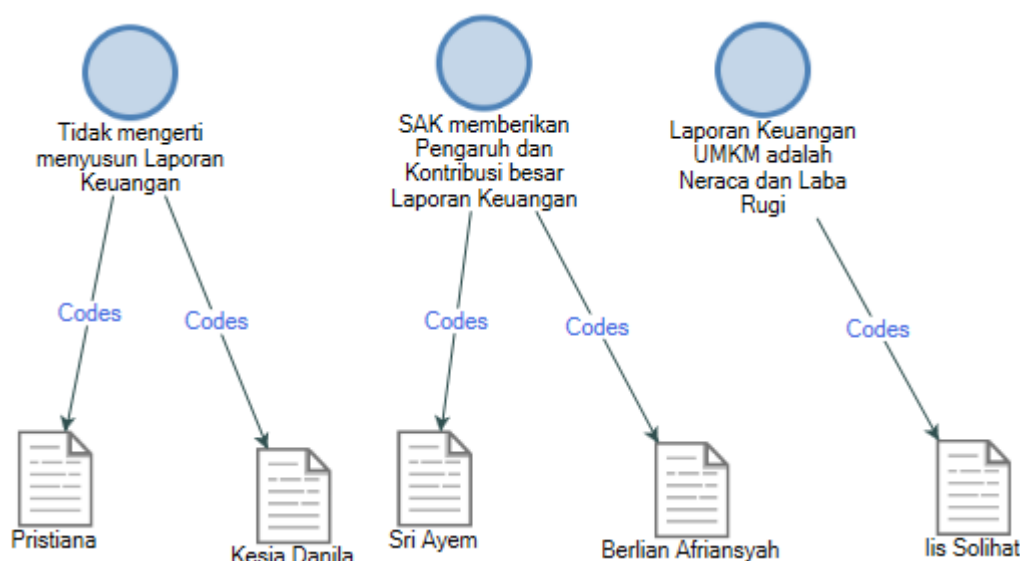


Gambar 3. Project Map Analysis Google Scholar (GS)

Dari Gambar 3 menunjukkan model SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia dimana terpecah menjadi dua bagian yaitu sisi baik dan sisi buruk, untuk sisi buruk terdiri dari 3 author yaitu Putri Aulia, Dewi Kirowati dan Yuli Rawun dimana menunjukkan hasil bahwa SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia antara lain kurang berpengaruh pada suatu keputusan dan pengawasan, lalu tidak mengerti menyusun laporan keuangan, kemudian tidak ada keinginan untuk menyusun laporan keuangan dan diakhiri bahwa laporan keuangan terdiri hanya dari penerimaan dan pengeluaran. Untuk sisi baik terdiri dari dua author yaitu Baiq Widiastawati dan Jilma Dewi Ayu dimana SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi. Perlu diketahui bahwa lingkaran berwarna biru muda adalah menunjukkan coding pernyataan mengenai tulisan dari author sedangkan untuk codes adalah hasil pengkodean yang dilakukan oleh para-author atau penulis artikel tersebut.

Project Map Analysis Semantic Scholar (SS)

Terlampir dibawah Project Map Analysis Semantic Scholar (SS) untuk menampilkan model seperti dibawah berikut:



Gambar 4. Project Map Analysis Semantic Scholar (SS)

Dari Gambar 4 menunjukan model SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia dimana terpecah menjadi dua bagian yaitu sisi baik dan sisi buruk, untuk sisi buruk terdiri dari 2 (dua) author yaitu Pristiana dan Kesia Danila dimana menunjukan hasil bahwa SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia umumnya tidak mengerti dalam menyusun laporan keuangan. Untuk sisi baik terdiri dari 3 (tiga) author yaitu Sri Ayem, Berlian Afriansyah dan Iis Solihat dimana SAK dengan Laporan keuangan UMKM di Indonesia terdiri SAK memberikan pengaruh dan kontribusi besar laporan keuangan serta laporan keuangan UMKM adalah Neraca dan laporan laba rugi. Perlu diketahui bahwa lingkaran berwarna biru muda adalah menunjukan coding pernyataan mengenai tulisan dari author sedangkan untuk codes adalah hasil pengkodean yang dilakukan oleh para-author atau penulis artikel tersebut.

4.KESIMPULAN

Data akhir yang didapatkan menggunakan pendekatan PRISMA dimana terdapat 10 data, 10 data ini dipecah menjadi dua tahapan yaitu, bagian awal bersumber dari data GS dan bagian akhir dari SC.

Kemudian pada analisis dilakukan pada dua tahapan yaitu analisis cluster atau cluster analysis dan Project Map Analysis. Untuk Analisis Cluster disimpulkan bahwa hanya ada dua kategori yaitu strong dengan nilai correlation coefficient yaitu 0,61 sampai dengan 0.80 dan moderate atau cukup dengan nilai correlation coefficient yaitu 0,41 sampai dengan 0.60. dari data yang masuk sebanyak 45 dimana masuk kategori strong hanya 1 dan kategori moderate berjumlah 23 sedangkan sisanya weak adalah 21. Bila dilihat secara keseluruhan justru strong dan moderate lebih mendominasi dari pada hubungan weak, diartikan bahwa sebanyak 24 author mempunyai persamaan dalam hal menuliskan dan merumuskan artikel mereka yang berhubungan dengan kata kunci Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ini dapat diartikan hampir separoh dari total keseluruhan setuju bahwa laporan keuangan UMKM harus didasari dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Yang terakhir adalah analisis Project Map Analysis Google Scholar (GS) dimana terbentuk 4 variabel dari tiga author dimana menghasilkan kesimpulan negatif dan kesimpulan positif, dimana untuk negatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: kurang berpengaruh pada suatu keputusan, tidak mengerti membuat report keuangan, tidak ada keinginan membuat report keuangan dan laporan keuangan hanya berupa penerimaan dan pengeluaran dari SAK pada financial report UMKM di Indonesia. Dan untuk kesimpulan baik dari 2 (dua) author hanya satu variabel yaitu laporan keuangan UMKM adalah Neraca dan Laba Rugi.

Untuk analisis Project Map Analysis Semantic Scholar (SS) dimana terbentuk 3 variabel dari lima author dimana menghasilkan kesimpulan negatif dan kesimpulan positif, dimana untuk negatif hanya ada satu yang harus diperhatikan yaitu: tidak mengerti menyusun financial report dari SAK pada laporan keuangan UMKM di Indonesia. Dan untuk kesimpulan positif dari 3 (tiga) author hanya dua variabel yaitu laporan keuangan UMKM adalah Neraca dan Laba Rugi dan SAK memberikan pengaruh dan kontribusi besar laporan keuangan.

Model yang didapatkan diatas dapat menambah kajian pustika dalam riset yang menyangkut keuangan atau finansial dari institusi sehingga menambahkan state of the art yang mana melahirkan novelty. Dan juga diharapkan agar hasil kajian teori dapat diimplementasikan kedepan untuk dilanjutkan pada bidang riset kuantitatif maupun mixed method riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Billiarta, Y. M. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Keahlian Akuntansi Komisaris Dan Kompleksitas Akuntansi Terhadap Audit Delay. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 14(2), 607–619.
- Dwilaga, A. T. (2023). Implementasi Model Artificial Intelligence dalam Warehouse: Systematic Literature Review. *JUSTI (Jurnal Sistem Dan Teknik Industri)*, 3(2), 253–261.
- Estikasari, I. P., & Adi, P. H. (2019). Ketaatan akuntansi, kontrol atasan, budaya etis organisasi, penegakan hukum dan kecurangan akuntansi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 6(02), 1–12.
- Fadilah, N. (2020). Analisis Laporan Keuangan SD Nurul Huda II SURabaya Ditinjau Dari PSAK No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan). *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 7(1), 35–48.
- Hair, J. F., Wolfinbarger, M. F., Ortinau, D. J. & Bush, R. P. (2014). *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall.
- Indrawati, N. M. S., Warongan, J. D. L., & Latjandu, L. D. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Pengakuan Pendapatan atas Penjualan kWh Meter Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Kawatu, R. O., Ilat, V., & Wangkar, A. (2019). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Khadijah, S. (2019). Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Menggunakan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Micro, Kecil, dan Menengah) Pada Toko Bangunan Dua Mas Rilly Pelaihari. *Politeknik Negeri Banjarmasin*.
- Larasati, I., Yusril, A. N., & Al Zukri, P. (2021). Systematic Literature Review Analisis Metode Agile Dalam Pengembangan Aplikasi Mobile. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 369–380.
- Mufti, D. (2021). Pengakuan Pendapatan dan Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar. *KEUNIS*, 9(1), 54–62.
- Mustofa, M. B. (2021). *Penerapan Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 Pada Usaha Dagang Hingar Kalidawir Tulungagung*.
- Nugroho, D. A., Khasanah, D. N., Pangestuti, I. A. I., & Kholili, M. I. (2021). Problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA: A systematic literature review (SLR). *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 87–96.
- Palullungan, J., Warongan, J. D. L., & Latjandu, L. D. (2021). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 72 Pada PT. Favors Raja Maya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 194–202.
- Rachmawati, D. E., & Purwandari, E. (2022). Proses Ta'dib sebagai penguatan aplikasi pendidikan Islam di Indonesia: Pendekatan Systematic Literature Review. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 175–186.
- Sanjaya, N., Nopiyani, P. E., & Rianita, N. M. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau dari Budaya Tri Hita Karana, GCG, Kompetensi SDM dan Manajemen Risiko Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3).
- Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh pengungkapan manajemen risiko terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di industri perbankan Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 467–484.
- Talib, A. F. bin. (2019). *Evaluasi Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak*

- Etap) Nomor 14 pada UD. Happy Happy di Surabaya.*
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
- Wahyuni Lubis, D., Fatahurrazak, F., & Lidya Rikayana, H. (2022). *Analisis Penilaian Persediaan Barang Dagang Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm)(Studi Kasus Pada Mini Market Sejahtera)*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Wijayanti, S., & Effriyanti, E. (2019). Pengaruh penerapan IFRS, audit effort, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. *Akuntabilitas*, 13(1), 33–48.
- Wilantara, I. (2022). *Determinan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Isak) Nomor 35 (Studi Pada Yayasan Panti Asuhan Se-Kecamatan Negara)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wulandari, T. (2021). Pengaruh Konvergensi IFRS, Kompleksitas Akuntansi dan Probabilitas Kebangkrutan Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *CASH*, 4(01), 9–19.
- Wulanditya, P. (2022). Kajian Empiris Financial Restatements akibat Perubahan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 313–325.
- Yanti, B. C. D., & Setiyanto, A. I. (2021). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 95–104.
- Yulianasari, N. (2020). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Dalam Memperoleh Pembiayaan Kredit. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 51–65.
- Yulianis, F., Sari, I. P., & Yulianti, W. (2021). Analisis Penerapan Psak No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Di Amal Usaha 'Aisyiyah Pariaman (Studi Kasus Pada Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3).
- Zain, F. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pt. Barriz Santun Jaya)*. STIE PGRI Dewantara Jombang.